



**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKA BINA KARYA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DISABILITAS MENUJU
KEMANDIRIAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1
(S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

OLEH :

FAIZAL BAKHTIAR

NPM. 2115500022

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAIZAL BAKHTIAR

NPM : 2115500022

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul **PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKA BINA KARYA KABUPATEN TEGAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS MENUJU KEMANDIRIAN** adalah benar - benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah saya lakukan. Maka saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan SKRIPSI ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan penuh kesadaran.

Tegal, Januari 2020



Faizal Bakhtiar
NPM 2115500022

PERSETUJUAN



**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKA BINA KARYA
KABUPATEN TEGAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENYANDANG DISABILITAS MENUJU KEMANDIRIAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tegal, 23 Januari 2020

Telah disetujui oleh,

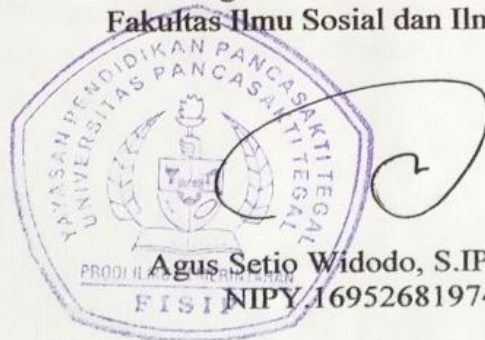
Dosen Pembimbing I

Drs. Sana Prabowo, M.Si
NIP.195612251983121001

Dosen Pembimbing II

Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si
NIPY.16952681974

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si
NIPY.16952681974



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
Jl. Halmahera KM. 1 Tegal Telp (0283) 323290

PENGESAHAN

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKA BINA KARYA KABUPATEN TEGAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS MENUJU KEMANDIRIAN

Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada hari : Kamis
Tanggal : 23 Januari 2020

1. Ketua Dewan Penguji : Drs. Sana Prabowo, M.Si
NIP.195612251983121001
2. Sekertaris Dewan Penguji : Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si
NIPY.16952681974
3. Anggota Dewan Penguji : Dr. Nuridin,SH.,MH
NIPY.9351091960

()
()
()

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Nuridin, SH. MH
NIPY.9351091960

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya”.(Q.S. Al-Imran :39)

“Selalu ada Allah untuk orang yang sabar” (Q.S. Al-Anfal: 66)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.(Q.S.Al-Insyirah:6)

“Orang besar menempuh jalan ke arah tujuan melalui rintangan dan kesukaran yang hebat”. (Rasulullah SAW)

“Keyakinan ketekunan serta semangat dalam menghadapi suatu hal adalah kunci keberhasilan ”. (Penulis)

“mirai e mukatte ,yukkuri to aruite ikou”.(kiroro)

“Yesterday is learning, today is action, tommorow is your future dreams seen from what you do now”. (Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1 Puji Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta kenikmatan ,yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam menempuh perkuliahan dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini
- 2 Kedua Orang tuaku yang tercinta Ayahku Riyanto, dan Ibuku Nur baeti Kakaku Achmad Komarudin, Nenekku Ratini, kekasihku Maya beserta keluarga besarku yang selalu memberi semangat dan motivasi didalam kehidupanku.
- 3 Kepada Motivatorku Bpk Sunarman Soekamto , teman-teman Difable Slawi Mandiri (DSM) Kabupaten Tegal serta rekan kerja Tim Research Disability 2017 yang telah memotivasiku.
- 4 Kepada teman-teman terdekatku yang saya sayangi dan saya banggakan Andri Bekti S.Pd, Moh Riza Al Fariz , Ardo Yoga P SH ,Ilham Tegar S.IP Glori Handika S.IP, Mitariza Migunani S.IP,M.Si , Annisa Nur hidayah, teman-teman seperjuangan UKM FPMM dan teman-teman fisip UPS Tegal .
- 5 Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Bakhtiar, Faizal. 2020 “*Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya Kabupaten Tegal Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian*”. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I : Drs. Sana Prabowo, M.Si dan Pembimbing II : Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah kurang maksimalnya Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya Kabupaten Tegal Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dialami dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat ditempuh oleh UPTD Loka Bina Karya untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas menuju kemandirian.

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang merupakan tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya Kabupaten Tegal Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuisioner, wawancara, dokumentasi, kepustakaan dan observasi. Teknik dan analisa data menggunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal pada tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa : (1) peran; Peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan disabilitas menuju kemandirian meliputi peran sebagai fasilitator, peran sebagai broker, peran sebagai mediator, peran sebagai pembela, dan peran sebagai pelindung, dan peran sebagai fasilitator adalah peran yang paling dominan yang dijalankan oleh UPTD Loka Bina Karya, Peran UPTD Loka Bina Karya sebagai fasilitator diantaranya adalah memfasilitasi pemberdayaan disabilitas namun peran tersebut dalam memberdayakan penyandang disabilitas meski sudah dapat dikatakan cukup baik namun belum sepenuhnya berhasil dalam memberdayakan disabilitas menuju kemandirian hal ini dikarenakan output/hasil pemberdayaan disabilitas tingkat keberhasilan hanya berkisar 15-40 % dari 20 peserta atau 3-8 peserta yang mampu mandiri, sehingga hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan disabilitas yang dilaksanakan oleh UPTD Loka Bina Karya dalam mewujudkan kemandirian disabilitas belum sepenuhnya mampu memandirikan penyandang disabilitas (2) faktor-faktor yang menghambat dalam pemberdayaan disabilitas menuju Kemandirian diantaranya; faktor diri sendiri (Stigma diri)/mendemotivasi diri, faktor keluarga dalam memotivasi, faktor peran masyarakat dan pemerintah dan hambatan yang paling kuat pengaruhnya ialah faktor diri sendiri dalam menyikapi keadaan (3) meningkatkan sosialisasi dan memberikan edukasi program pemberdayaan,

memberikan motivasi dan bimbingan , mengintensifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan program pemberdayaan ,monitoring dan evaluasi capaian hasil serta dengan melakukan rencana aksi bersama untuk mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas.

Kata Kunci :Peran, Penyandang Disabilitas ,Pemberdayaan Disabilitas,Kemandirian

ABSTRACT

Bakhtiar, Faizal. 2020 “*role of the Technical Implementation Unit of the Tegal Regency Loka Bina Karya Office in Empowering Persons with Disabilities Towards Independence*”. Thesis, Government Science, Pancasakti University,. Advisor I : Drs. Sana Prabowo, M.Si and Advisor II : Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si.

The main problem of this research is the less optimal role of the Technical Implementation Unit of the Tegal Regency Loka Bina Karya Office in Empowering Persons with Disabilities Towards Independence.

The objectives to be achieved in this study are:

- 1. To describe the role of the UPTD Loka Bina Karya in empowering people with disabilities in Tegal Regency.*
- 2. To describe the obstacles experienced in the empowerment of people with disabilities in UPTD Loka Bina Karya Tegal Regency.*
- 3. To find out the solutions that can be adopted by UPTD Loka Bina Karya to overcome obstacles in empowering people with disabilities towards independence.*

The type and type of research used is descriptive qualitative, which is a type of research that can provide a factual description of the Role of the Technical Implementation Unit of the Tegal District Office of Work in the Empowerment of Persons with Disabilities Towards Independence. Data collection is done by questionnaire, interview, documentation, literature and observation. Data analysis techniques and uses functional interactive analysis based on three activities, namely data reduction, data presentation and data verification.

The results of this study illustrate that: (1) the role; The role of the Loka Bina Karya UPTD in empowering disability towards independence includes the role of facilitator, role as broker, role as mediator, role as defender, and role as protector, and role as facilitator is the most dominant role carried out by Loka Bina Karya, Role UPTD Loka Bina Karya as a facilitator includes facilitating disability empowerment, but the role in empowering people with disabilities even though it can be said is quite good but has not been fully successful in empowering disability towards independence. 20 participants or 3-8 participants are able to be independent, so this proves that the empowerment of disabilities carried out by the Loka Bina Karya UPTD in realizing independence of disability has not been fully able to stand up for persons with disabilities (2) factors that inhibit in empowering disability towards Independence including: self-factors (self-stigma) / self-motivating, family factors in motivating, community and government role factors and the strongest barriers to influence are self-factors in addressing the situation (3) increasing socialization and providing educational programs empowering, providing motivation and guidance, intensifying and optimizing the implementation of empowerment programs, monitoring and evaluating the achievement of results and by carrying out joint action plans to realize the independence of persons with disabilities.

Keywords: Role, Persons with Disabilities, Disability Empowerment, Independence

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT pendengar semua doa, rumah semua harapan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya Dalam Pemberdayaan Penyandang disabilitas

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum., Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan studi di Universitas Pancasakti Tegal.
- b. Dr. Nuridin, SH. MH., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian.
- c. Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.
- d. Drs.Sana Prabowo, M.Si dan Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si., dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat bermanfaat kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
- e. Dra. Erny Rosyanti, M.Si., dosen wali yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama penulis melaksanakan studi di Universitas Pancasakti Tegal.

- f. Bapak/Ibu dosen dan staf TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membekali ilmu pengetahuan dan membantu terkait dengan administrasi selama penulis menuntut ilmu di Universitas Pancasakti Tegal.
- g. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
- h. Kepala UPTD LBK Kabupaten Tegal yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
- i. Teman-Teman DSM (Difabel Slawi Mandiri) yang telah memberikan dukungan moril dalam melaksanakan penelitian.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Tegal, Januari

Tanda tangan,

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Pernyataan Penulis	ii
Lembar Persetujuan Skripsi	iii
Lembar Pengesahan Skripsi	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xix
Daftar Skema.....	xix
Daftar Bagan	xix
Daftar Lampiran	xix

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	9
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
I.3.1 Tujuan Penelitian	10
I.3.2 Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Kerangka Teori	12
II.1.1 Penelitian Terdahulu.....	12
II.1.2 Peran.....	15
II.1.2.1 Pengertian.....	15
II.1.2.2 Pendampingan Sosial	19
II.1.3 UPTD Loka Bina Karya	30
II.1.3.1 Pengertian.....	30
II.1.3.2 Landasan Hukum berdirinya Loka Bina Karya Kabupaten Tegal.....	30
II.1.3.3 Tujuan Loka Bina Karya	32
II.1.4 Pemberdayaan	33
II.1.4.1 Pengertian Pemberdayaan	33
II.1.4.2 Tujuan Pemberdayaan	38
II.1.4.3 Strategi Pemberdayaan	39
II.1.4.4 Pendekatan Pemberdayaan	41
II.1.4.5 Prinsip-prinsip Pemberdayaan.....	42
II.1.4.6 Sasaran Pemberdayaan	44
II.1.4.7 Tahapan Pemberdayaan.....	45

II.1.4.8	Indikator Keberdayaan	48
II.1.5	Pengertian Disabilitas	50
II.1.5.1	Pengertian	50
II.1.5.2	Jenis-jenis Disabilitas	57
II.1.6	Kemandirian	60
II.1.6.1	Pengertian Kemandirian	60
II.2	Definisi Konsep	62
II.3	Pokok-Pokok Penelitian	64
II.4	Alur Pikir	65
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
III.1	Jenis dan Tipe Penelitian.....	67
III.2	Jenis dan Sumber Data	69
III.3	Informan Penelitian	70
III.4	Teknik Pengumpulan Data.....	72
III.5	Teknik dan Analisis Data	77
III.6	Sistematika Penulisan	83
 BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN		
IV.1	Deskripsi Kabupaten Tegal.....	85
IV.1.1	Visi dan Misi Kabupaten Tegal	85
IV.1.2	Letak Geografis Kabupaten Tegal	86
IV.1.3	Demografi Kabupaten Tegal	89
IV.1.3.1	Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Tingkat Pendidikan	89
IV.1.3.2	Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan JenisPekerjaan.....	90
IV.1.3.3	Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Kelamin.....	91
IV.1.3.4	Keadaan Penyandang Disabilitas Kabupaten Tegal	92
IV.1.3.5	Keadaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Tegal Berdasarkan Kelompok Usia	93
IV.1.3.6	Keadaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Disabilitasnya	95
IV.1.3.7	Daftar Penyandang Disabilitas Yang Menerima Pelayanan di UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal	97
IV.2	Gambaran Umum Dinas Dinas Sosial Kabupaten Tegal.....	98

IV.2.1	Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Tegal	99
IV.2.2	Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tegal	99
IV.2.3	Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tegal	137
IV.2.4	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial	139
IV.2.5	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten tegal	140
IV.3	Gambaran Umum UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal	142
IV.3.1	Visi dan Misi UPTD Loka bina karya Kabupaten Tegal	142
IV.3.2	Tugas dan Fungsi UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal	143
IV.3.3	Pegawai UPTD Loka Bina Karya	148
IV.4	Sarana dan Prasarana Penunjang UPTD Loka Bina Karya	149
IV.4.1	Struktur Organisasi UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal.....	151
IV.5	Gambaran Umum Difabel Slawi Mandiri (DSM) Kabupaten Tegal	152
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
V.1	Hasil Penelitian	158
V.2	Pembahasan.....	319
BAB VI PENUTUP		
VI.1	Kesimpulan.....	345
VI.2	Saran	349
DAFTAR PUSTAKA		351
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Penyandang disabilitas di Kab.Tegal	4
Tabel I.2	Jenis Layanan Yang diberikan UPTD Loka Bina Karya	6
Tabel I.3	Pemberdayaan Disabilitas melalui pelatihan ketrampilan/keahlian	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	15
Tabel III.1	Rentang Skala	79
Tabel III.2	Rentang Skala Variabel “Peran UPTD Loka Bina Karya”	80
Tabel IV.1	Luas Wilayah Kabupaten Tegal Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan Lahan 2017 (Ha)	88
Tabel IV.2	Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	89
Tabel IV.3	Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan jenis Pekerjaan Tahun 2017	90
Tabel IV.4	Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Kelamin 2017	91
Tabel IV.5	Data Penyandang disabilitas di Kab.Tegal	92
Tabel IV.6	Data Penyandang disabilitas di Kab.Tegal	93
Tabel IV.7	Data Penyandang disabilitas di Kab.Tegal	95
Tabel IV.8	Pemberdayaan Disabilitas Melalui Pelatihan Ketrampilan / Keahlian	97
Tabel IV.9	Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tegal	138
Tabel IV.10	Sarana dan Prasarana Penunjang Monitoring Sarana dan Prasarana Dinas Sosial	139
Tabel IV.11	Pegawai UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal	148
Tabel IV.12	Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal	150
Tabel V.01	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	158
Tabel V.02	Responden Berdasarkan Usia	159
Tabel V.03	Responden Berdasarkan Mata Pencaharian / Profesi	160
Tabel V.04	Pengetahuan Program Pemberdayaan Disabilitas	163
Tabel V.05	Partisipasi Disabilitas Dalam Pemberdayaan	165
Tabel V.06	Pengetahuan Mekanisme Mendapatkan Program	167
Tabel V.07	Sosialisasi Program Pemberdayaan Disabilitas	170
Tabel V.08	Rentang Waktu Program Pemberdayaan	172
Tabel V.09	Output Program Pemberdayaan	174
Tabel V.10	Keberlanjutan Program Setelah Pemberdayaan	177
Tabel V.11	Hambatan Dalam Program Pemberdayaan	179
Tabel V.12	Evaluasi Program Pemberdayaan	181
Tabel V.13	Penyampaian Masukan ,Kritik Saran Pemberdayaan Disabilitas	183
Tabel V.14	Pengetahuan Tentang Program UPSK	185
Tabel V.15	Partisipasi Dalam Program UPSK	187
Tabel V.16	Pengetahuan Mekanisme Mendapatkan UPSK	189
Tabel V.17	Tindak Lanjut Program UPSK	191

Tabel V.18	Hambatan Program UPSK	193
Tabel V.19	Evaluasi Program UPSK.....	195
Tabel V.20	Pengetahuan Adanya Program UEP.....	197
Tabel V.21	Partisipasi mendapatkan Program UEP	199
Tabel V.22	Monitoring Petugas Pendamping Dalam Bantuan UEP.....	201
Tabel V.23	Keberlanjutan Program UEP.....	203
Tabel V.24	Output Program UEP	205
Tabel V.25	Hambatan Dalam Program UEP	207
Tabel V.26	Evaluasi Program UEP.....	209
Tabel V.27	Pengetahuan Program.....	211
Tabel V.28	Partisipasi Mendapatkan Program E-KTP/KK/SIM	213
Tabel V.29	Mekanisme Mendapatkan Fasilitas Pelayanan KTP/KK/SIM.....	216
Tabel V.30	Hambatan Program Fasilitas E-KTP/KK/SIM.....	219
Tabel V.31	Evaluasi Program E-KTP/KK/SIM.....	221
Tabel V.32	Pengetahuan Program Fasilitas Pelayanan Kesehatan (kusta).....	223
Tabel V.33	Tingkat Partisipasi Program Fasilitas Kesehatan (kusta).....	227
Tabel V.34	Mekanisme Mengakses Program Fasilitas Kesehatan (kusta).....	228
Tabel V.35	“Hambatan Program Fasilitas Pelayanan Kesehatan (kusta).....	231
Tabel V.36	Evaluasi Program Fasilitas Pelayanan Kesehatan (kusta).....	233
Tabel V.37	Pengetahuan Tentang Adanya Pendampingan	235
Tabel V.38	Partisipasi Program Pendampingan	236
Tabel V.39	Pendampingan Dalam Permasalahan	238
Tabel V.40	Output Program Pendampingan	240
Tabel V.41	Output Pendampingan.....	242
Tabel V.42	Hambatan Program Pendampingan.....	244
Tabel V.43	Evaluasi Program Pendampingan	246
Tabel V.44	Pengetahuan Adanya Motivasi Dan Bimbingan	247
Tabel V.45	Partisipasi Motivasi Dan Bimbingan	249
Tabel V.46	Mekanisme Untuk Mendapatkan Bimbingan.....	251
Tabel V.47	Output Motivasi Dan Bimbingan	253
Tabel V.48	Hambatan Dalam Motivasi Dan Bimbingan	255
Tabel V.49	Evaluasi Program Fasilitas Motivasi Dan Bimbingan.....	257
Tabel V.50	Kemampuan Petugas Dalam Mengidentifikasi Masalah	259
Tabel V.51	Identifikasi Sumber Referal	263
Tabel V.52	Menjangkau Kerjasama Publik	265
Tabel V.53	Menghubungkan Sumber Referal	268
Tabel V.54	Menghubungkan Sumber Referal Dengan Tindak Lanjut	271
Tabel V.55	Distribusi Sumber Kebutuhan	273
Tabel V.56	Pemenuhan Kebutuhan.....	276
Tabel V.57	Kebutuhan Pelayanan.....	278

Tabel V.58	Monitoring Dan Evaluasi	280
Tabel V.59	Konsisten Dalam Melakukan Evaluasi	283
Tabel V.60	Pengetahuan Tentang Assesment Petugas Pendamping	285
Tabel V.61	Ketrampilan Melakukan Assesment	288
Tabel V.62	Jejaring Usaha	290
Tabel V.63	Diskriminasi Yang Dialami.....	292
Tabel V.64	Mediator Permasalahan.....	295
Tabel V.65	Pembelaan (advokasi)	298
Tabel V.66	Pembelaan (advokasi)Dunia Pendidikan Dan Usaha.....	300
Tabel V.67	Pelindung Kasus Diskiminasi Sosial.....	302
Tabel V.68	Pelindung Kasus Diskiminasi Dunia Pendidikan Dan Pekerjaan.....	305
Tabel V.69	Rentang Skala	308
Tabel V.69	Rentang Skala Per-Aspek Dan Item Jawaban.....	309
Tabel III.02	Rentang Skala Variabel “Peran UPTD Loka Bina Karya”	319

DAFTAR SKEMA

Skema III.1 Model interaktif analisis data menurut Miles and Huberman	83
Skema II.1 Allur Pikir	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Peta Administrasi Kabupaten Tegal..... 87

DAFTAR BAGAN

Bagan IV.2 Struktur UPTD Loka Bina Karya	151
Bagan IV.1 Struktur Dinsos	140

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia telah mengesahkan CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) penyandang disabilitas dan kebijakan-kebijakan baru berkembang harmonis baru-baru ini dengan CRPD. Berkaitan dengan itu dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, memberdayakan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas pemerintah Indonesia telah membentuk regulasi khusus kedalam undang-undang yang mengatur kebijakan terhadap mereka.

Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Penyandang Disabilitas”. Merujuk pada peraturan tersebut menyatakan bahwa: “*Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermanfaat*”.

Menurut UU No 8 Tahun 2016 dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penerapan kebijakan-kebijakan baru yang masih lamban dibelakang perkembangan yang positif ini penyandang disabilitas, secara umum masih dianggap sebagai ketidak aktifan dan sebuah beban dalam masyarakat. Layanan-layanan dan program-program tidak diorientasikan untuk pemberdayaan mereka. Kecacatan atau keterbatasan tersebut harusnya tidak menjadi halangan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk kemudahan akses sarana atau prasarana fasilitas publik , hak untuk diberdayakan agar lebih mandiri serta sejahtera dalam kehidupan mereka. Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah upaya pengembangan untuk menguatkan potensi kemandirian dalam hidupnya sehingga mampu menjadi individu atau kelompok yang tangguh dan mandiri hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 7 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi *“Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri”*.

Namun faktanya menunjukkan kondisi sebaliknya, program pemberdayaan tidak diorientasikan kepada mereka. Kurangnya pengetahuan tentang program pemberdayaan disabilitas, serta kurang optimal dalam mengevaluasi program pemberdayaan dan monitoring yang berlanjut setelah pemberdayaan menjadi suatu hal yang belum terlaksana dengan baik. Minimnya akses dan pengetahuan program serta keterbatasan peserta dalam mendapatkan rehabilitasi sosial berupa

pemberdayaan menjadi kendala yang belum tertangani secara maksimal dan menyentuh apa tujuan dari pemberdayaan yaitu kemandirian serta kesejahteraan pada mereka. Sebagian besar masyarakat penyandang disabilitas dikategorikan kedalam PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) hal ini dikarenakan tingkat kesejahteraan mereka yang sangat rendah, perekonomian yang rendah serta pendidikan yang rendah dan kemandirian yang belum terwujud selalu melekat pada mereka. Tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, perekonomian yang rendah serta pendidikan yang rendah dan kemandirian yang belum terwujud dikarenakan adanya berbagai hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas .

Sebagai bagian dari masyarakat tentu para penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, oleh karena itu dengan keterbatasan yang ada , mereka tetap berusaha untuk bertahan demi menopang kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih lagi keadaan sosial mereka masih sangat rentan ,mendapatkan perlakuan khusus atau bahkan diskriminasi dari lingkungan mereka yang tergolong normal.

Berbicara mengenai Penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal khususnya dari 18 kecamatan terdapat sekitar 12,376 Jiwa orang dengan disabilitas. Berikut data penyandang disabilitas yang terbagi perkecamatan.

Tabel 1.1 Data Penyandang Disabilitas di Kab.Tegal

NO	KECAMATAN	JUMLAH DIFABLE
1	LEBAKSIU	1180
2	PANGKAH	976
3	BALAPULANG	972
4	TARUB	918
5	MARGASARI	838
6	ADIWERNA	748
7	WARUREJA	672
8	TALANG	625
9	DUKUHTURI	620
10	JATINEGARA	604
11	SURADADI	592
12	BOJONG	586
13	KRAMAT	568
14	KEDUNG BANTENG	528
15	PAGERBARANG	526
16	BUMIJAWA	494
17	SLAWI	467
18	DUKUHWARU	462
	JUMLAH	12,376 Jiwa

Sumber SIMAS(Sistem Informasi Masyarakat Miskin) BAPPEDA LITBANG KAB.TEGAL 2017

Berdasarkan tabel diatas jumlah penyandang disabilitas dikabupaten Tegal yang terbagi dalam 18 kecamatan sebanyak 12,376 Jiwa . Hal ini perlu perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik sektor Swasta sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sektor privat (Pemerintah) sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai civil society guna memberdayakanya agar kesejahteraan mereka lebih terjamin dan mandiri dalam hidupnya. Disektor Privat Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengatasi pendidikan yang tergolong masih rendah yaitu dengan menyetarakan pendidikannya agar penyandang disabilitas dapat menempuh pendidikan tanpa adanya perbedaan sedangkan untuk membantu mereka dalam mewujudkan dan meningkatkan

kemandirian serta perekonomian yaitu dengan memberdayakan penyandang disabilitas agar lebih mandiri dalam hidupnya, pemberdayaan dapat berupa pendidikan pelatihan, ketrampilan/keahlian.

Dalam hal ini Dinas Sosial lah sebagai peran utama untuk menangani permasalahan sosial seperti penyandang disabilitas. Namun peranan yang terbatas menjadi kendala dalam menangani permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk didalamnya penyandang disabilitas.

Untuk meminimalisir agar penyandang disabilitas tidak bergantung pada orang lain dan tidak mengalami diskriminasi. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan cara mendayagunakan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki melalui pemberdayaan yang berkelanjutan pada mereka. Dengan cara memberikan pelatihan, ketrampilan/keahlian yang intensif guna memberdayakannya sehingga mereka mempunyai bekal dalam mensejahterahkan hidupnya dan mandiri secara sosial tanpa berpangku tangan pada orang lain.

Dalam naungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai jabatan fungsional, UPTD Loka Bina Karya menjadi balai rehabilitasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal. UPTD Loka Bina Karya Berdiri Tahun 1994 yang dulu awal berdiri berada dalam naungan Departemen Sosial. Bentuk pelayannya pun beragam diantaranya program pemberdayaan pendidikan pelatihan/ketrampilan, fasilitasi unit pelayanan sosial keliling (UPSK), fasilitasi untuk mendapatkan pelayanan e-KTP/KK dan SIM, fasilitasi untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi disabilitas kusta/orang yang pernah mengalami kusta dan memberikan motivasi dan bimbingan pada

ekstrauma. Salah satu bentuk upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang diberikan oleh UPTD Loka Bina Karya adalah pendidikan pelatihan ketrampilan/keahlian. Ada beberapa pendidikan pelatihan ketrampilan/ keahlian yang diberikan kepada penyandang disabilitas diantaranya ; pelatihan menjahit,handycraft, tataboga ,salon, kecantikan, elektronik, otomotif dan lain-lain . Dari 12.376 Jiwa Penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal hanya 1.550 Jiwa yang sudah mendapatkkan pelayanan berupa pelatihan,UPSK,UEP, Layanan kesehatan , SIM, KK/KTP,dan Alkes melalui UPTD Loka Bina karya.

Berikut adalah Tabel dari klien yang pernah mendapatkan bantuan alat dan pelatihan yang pernah dilaksanakan di UPTD Loka Bina Karya.

Tabel 1.2 Jenis Layanan Yang diberikan UPTD Loka Bina Karya

Jenis Layanan	Jumlah
1.Pendidikan Pelatihan/keahlian	772 Jiwa
2.Bantuan UEP,UPSK,Alkes dll	778 Jiwa
Jumlah	1550 Jiwa

Sumber :Kajian Akademis Pembentukan UPTD Loka Bina Karya 2017)

Menurut data tabel diatas baru ada sekitar 1550 jiwa penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan oleh UPTD Loka BINA Karya yaitu berupa sebanyak 772 Jiwa yang terlayani mendapatakn pelayanan pendidikan pelatihan keahlian dan 778 Jiwa terlayani untuk mendapatkan bantuan UEP,UPSK,Alkes dll.Pemberdayaan yang diberikan oleh UPTD Loka Bina karya yaitu berupa pelatihan Ketrampilan/Keahlian,dan berikut adalah pelatihan keahlian yang pernah dilaksanakan UPTD Loka Bina Karya.

Tabel.1.3 Pemberdayaan Disabilitas melalui pelatihan ketrampilan/keahlian

NO	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Jenis Bantuan Peralatan	Usaha mandiri	Usaha Lainnya	Belum Berdaya
1	Pelatihan handycraft	80	-Peratan handy craft -Modal Usaha	16 Orang	125	503
2	Membatik	95	-peralatan membatik -modal usaha	15 Orang		
3	Tata Boga	80	-peralatan masak -modal usaha	4 Orang		
4	Menjahit	148	-mesin jahit -modal usaha	49 Orang		
5	Otomotif	80	-peralatan bengkel	12 Orang		
6	Elektro	80	-peralatan Elektro	15 Orang		
7	Service Hp	79	-peralatan service hp	15 Orang		
8	Budidaya Jamur	65	-perlengkapan dan peralatan budidaya jamur	10 Orang		
9	Sablon	65	Peralatan sablon	8 Orang		
	Jumlah	772 Jiwa		144 Jiwa	125 Jiwa	503 Jiwa

Sumber Data: Kajian Akademis pembentukan UPTD Loka Bina Karya 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah alumni peserta Loka Bina Karya kurang lebih 772 peserta pelatihan/keahlian. Dari 772 peserta pelatihan hanya sebanyak 144 orang atau sekitar 20 % Penyandang Disabilitas yang sudah membuka usaha mandiri lewat hasil pelatihan dan 125 orang atau sekitar 15% penyandang disabilitas yang membuka usaha lainya.sementara itu sebanyak 503 atau sekitar 65% Penyandang disabilitas belum bekerja/belum berdaya dari capaian output hasil pemberdayaan. Adanya tingkat keberhasilan dari pemberdayaan yang hanya sekitaran 35% program pemberdayaan berupa pemberian pelatihan ketrampilan keahlian dinilai belum berhasil secara optimal

dan menjadi suatu hal yang menjadi perhatian khusus ,pemberdayaan dinilai belum dapat berhasil/sia-sia (muspro) dan berkelanjutan dikarenakan langkah strategi pemberdayaan yang kurang insentif ,evaluatif,dan konsisten. Pemberdayaan bukan hanya sekedar pemberian ketrampilan/keahlian semata namun setelah dilaksanakan pemberdayaan ,pemerintah diharapkan turut andil dalam memonitoring para penyandang disabilitas pasca pemberdayaan. Sehingga program pemberdayaan nantinya dapat menjadikan masyarakat disabilitas menjadi berdaya serta meningkatnya taraf hidup mereka dari segi ekonomi dan dapat menjadi mata pencaharian bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,mewujudkan kesejahteraanya dan menuju kemandirian secara sosial.

Peran UPTD Loka Bina Karya di Kabupaten Tegal dalam penanganan penyandang disabilitas masih terbatas hal dikarenakan secara struktural yang masih terbatas dalam pendampingan disabilitas serta minimnya tenaga pendamping difable,Pendamping disabilitas menurut struktural hanya 2 Kepala Unit UPTD dan 5 pegawai THL yang menjadi pendamping penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal,adanya keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penyandang disabilitas yang tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas yang belum tersentuh penyuluhan/sosialisasi mengenai adanya pelatihan keterampilan,adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas.

UPTD Loka Bina Karya dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal harus mampu berperan secara optimal dalam memberdayakan para penyandang

disabilitas di Kabupaten Tegal terutama untuk para penyandang disabilitas yang telah memasuki usia produktif sehingga selain dapat mengurangi beban keluarga juga para penyandang disabilitas dapat mewujudkan kesejahteraan hidup serta meningkatkan taraf kemandirianya.

Fenomena penyandang disabilitas yang masih terlantar dan belum tercover untuk mendapatkan pemberdayaan melalui pelatihan ketrampilan/keahlian menjadi perhatian khusus pemerintah terutama peran UPTD Loka Bina Karya yang mestinya berperan sebagai inisiator dalam mengatasi permasalahan sosial penyandang disabilitas dari yang tadinya kurang berdaya menjadi berdaya tetapi dalam pelaksanaannya terdapat program yang kurang sesuai dan mengena sehingga pemberdayaan dinilai belum maksimal dalam mewujudkan kemandirian para penyandang disabilitas. Sehubungan dengan hal persoalan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Peran UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian.”**

I.2 Rumusan Masalah

Dengan diadakanya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelaksanaan pelatihan keahlian/ketrampilan diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka serta dapat menjadi mata pencaharian para penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mewujudkan kesejahteraanya dan menuju kemandirian secara sosial.

Terkait Pemberdayaan Penyandang disabilitas UPTD Loka Bina Karya sebagai instansi yang menjadi tempat balai rehabilitasi dan berperan memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas dirasa belum maksimal dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas. UPTD Loka Bina Karya belum bisa sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian kepada mereka yang menjadi tujuan dari pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas guna mewujudkan kesejahteraan dan menuju kemandirian?
- b. Apa sajakah kendala dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas menuju kemandirian di UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal?
- c. Solusi apa sajakah yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas menuju kemandirian di UPTD Loka Bina Karya?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal.

- b. Untuk mendeskripsikan kendala yang dialami dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal.
- c. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang dapat ditempuh oleh UPTD Loka Bina Karya terkait dengan kendala dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

I.3.2 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian pengetahuan dilingkup studi pemerintahan khususnya dibidang pemberdayaan penyandang disabilitas .

b. Secara Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang baik untuk menentukan kebijakan selanjutnya terkait pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas guna menuju kemandirian di Kabupaten Tegal.

2. Bagi Masyarakat penyandang disabilitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada mereka untuk tetap semangat dalam keterbatasannya, dan dengan adanya pemberdayaan peltihan keahlian/ketrampilan mereka mampu menjadi seorang yang mandiri dan lebih produktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembaca meningkatkan cakrawalanya dari segi tujuan dan hasil penelitian yang dilakukan.

II. 1 Kerangka Teori

II.1.1 Penelitian Terdahulu

1. *"Pemberdayaan Penyandang Cacat Melalui Pelatihan Menjahit di Loka Bina Karya Kabupaten Tegal "*. penelitian ini dilakukan oleh Indah Apriyani ,Agustus 2017 .

Penelitian ini berupaya menyajikan hasil penelitian proses pemberdayaan penyandang cacat melalui pelatihan menjahit serta berusaha mendeskripsikan dampak pemberdayaan melalui pelatihan yang telah diberikan kepada penyandang cacat di Loka Bina Karya Kabupaten Tegal.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Sulistyani (2004:77) beliau mengemukakan bahwa pemberdayaan dimaknai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau

proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya .

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara , wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan penyandang cacat di Loka Bina Karya ini prosesnya dilakukan secara beruntun mulai dari tahap perencanaan ,pelaksanaan,dan evaluasi.Dampak dari pelatihan menjahit ini dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan serta ketrampilan menjahit,peningkatan pendapatnbagi penyandang cacat dan dapat berkerja di konveksi yang ada disekitar loka bina karya.

2.” *Peran Yayasan Penyandang cacat mandiri dalam meningkatkan ekonomi difabel di Cabean,Sewon,Bantul*”.Penelitian ini dilakukan Dita Kusumaningrum Juni 2015

Penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana peran yayasan penyandang cacat mandiri dalam meningkatkan ekonomi difabel tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengkaji dan mendeskripsikan peran serta hasil peningkatan ekonomi difabel.

Teori yang digunakan dalam penelitian berasal dari Zubaedi yaitu peran seorang pendamping sebagai motivator ,peran pendamping sebagai komunikator dan peran pendamping sebagai fasilitator.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara , wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini menggambarkan bahwa peran yayasan penyandang cacat mandiri sebagai pendamping dalam meningkatkan perekonomian difabel ada tiga peran yaitu *pertama* peran pendamping sebagai motivator yang memberikan semangat pada difabel yang berkerja di yayasan agar tidak kehilangan semangat.*kedua* peran pendamping sebagai komunikator yang memberikan arahan yang jelas,pengantar inspirasi kepada lembaga lain.*ketiga* peran pendamping sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas untuk kebutuhan yang dibutuhkan difabel dalam berkreasi.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Lokasi	Tahun
1	Pemberdayaan Penyandang cacat melalui pelatihan menjahit di Loka Bina Karya Kabupaten Tegal	Upaya dan dampak Pemberdayaan melalui pelatihan menjahit terhadap difabel	Loka Bina Karya Kabupaten Tegal	2017
2	Peran Yayasan Penyandang cacat mandiri dalam meningkatkan ekonomi difabel di Cabean,Sewon,Bantul	Upaya yang dilakukan yayasan Penyandang cacat dalam meningkatkan ekonomi difabel	Yayasan Penyandang Cacat Mandiri	2015

II.1.2 Peran

II.1.2.1 Pengertian

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bukunya Teori Peran Konsep, derivasi, dan Implikasi Edy Suhardono : Makna dari peran menurut Biddle dan Thomas menurut perspektif

teori peran menyepadankan dengan "lakon" oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap *script* (semacam skenario), intruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosialpun mengalami hal yang sama, dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat.

Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Sedangkan definisi peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan

berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap pegawainya.

Peran sebagaimana dijelaskan Soekanto (2006: 212) merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi sosial dalam masyarakat (status). Peran mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

1. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan (tugas) oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran didefinisikan sebagai perangkat harapan-harapan yang diperuntukkan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peran ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Peran terdapat dua macam harapan (Berry, 1995: 101), yaitu :

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap “masyarakat” atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi sosial dalam masyarakat. Suatu sikap atau perilaku yang diharapkan dapat memberikan angin segar oleh sekelompok orang terhadap individu yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila dikaitkan dengan UPTD Loka Bina Karya, maka UPTD Loka Bina Karya memiliki peran sebagai lembaga yang mempunyai posisi sebagai pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat difabel yang diharapkan dapat memberikan secercah harapan penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensinya melalui pembinaan, pelatihan ketrampilan/keahlian yang bermanfaat bagi masyarakat difabel. Sehingga masyarakat difabel dapat sejahtera, mandiri dan lebih berdaya dalam hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan status yang sama tanpa adanya diskriminasi.

II.1.2.2 Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dalam hal ini Peran Pendampingan masyarakat difabel diperlukan. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial yakni "membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri", maka dalam hal ini peran pendamping disabilitas diharapkan mampu membantu masyarakat difabel agar difabel mampu membantu dirinya sendiri dalam konteks kesejahteraan. Dalam hal ini peranan pendamping disabilitas diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping disabilitas bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka dalam hal ini masyarakat difabel. Dengan demikian, pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok tidak berdaya (difabel) dan pekerja sosial (pendamping difabel) untuk bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti:

1. Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi
2. Membolisasi sumber daya setempat
3. Memecahkan masalah sosial
4. Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Bidang Tugas

Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas dan fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni :pemungkinan (enabling) atau fasilitasi, penguatan(empowering),perlindungan (protecting) dan pendukungungan (supporting).

1. Pemungkinan atau fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama serta melakukan manajemen sumber.
2. Penguatan, fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat masyarakat (capacity building). Pendamping berperan aktif sebagai agen memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.
3. Perlindungan : fungsi ini berkaitan dengan interaksi antar pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan kerja, konsultan.
4. Pendukungungan : mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada

masyarakat .pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok melainkan pula melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai ketrampilan dasar ,seperti melakukakn analisis sosial mengelola dinamika kelompok,menjalin relasi,bernegosiasi,berkomunikasi dan mencari serta mengatur sumber dana.

Peranan Pekerja Sosial: Model Dan Strategi

Paradigma generalis dapat memberi petunjuk mengenai fungsi kegiatan-kegiatan pembimbingan sosial serta menunjukkan peranan-peranan dan strategi-strategi sesuai dengan fungsi tersebut. Mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994), ada beberapa peran pekerjaan sosial dalam pembimbingan sosial. Lima peran di bawah ini sangat relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pembimbingan sosial.

1. Fasilitator

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut sebagai “pemungkin” (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Seperti dinyatakan Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:188), “The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, and promotion of interaction and action”.

Selanjutnya Barker (1987) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan

tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49).

Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa “setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994). Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:190-203) memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial:

- a) Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) Mendefinisikan tujuan keterlibatan.
- c) Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan.
- d) Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan.
- e) Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan.
- f) Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif.

- g) Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan.
- h) Memfasilitasi penetapan tujuan.
- i) Merancang solusi-solusi alternatif.
- j) Mendorong pelaksanaan tugas.
- k) Memelihara relasi sistem.
- l) Memecahkan konflik.

2. Broker

Dalam pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari.

Dalam konteks PM, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, dalam PM terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh “keuntungan” maksimal.

Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker:

- a) Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.
- b) Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten.
- c) Mampu mengevaluasi efektifitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan makna broker seperti telah dijelaskan di muka. Peranan sebagai broker mencakup menghubungkan klien dengan barang-barang dan jasa dan mengontrol kualitas barang dan jasa tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu: menghubungkan (linking), barang-barang dan jasa (goods and services) dan pengontrolan kualitas (quality control).

Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:226-227) menerangkan ketiga konsep di atas satu per satu:

·Linking adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Linking juga tidak sebatas hanya memberi petunjuk kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga meliputi memperkenalkan klien dan sumber referal, tindak lanjut, pendistribusian sumber, dan meenjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima oleh klien.

Goods meliputi yang nyata, seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan. Sedangkan services mencakup keluaran pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien, semisal perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, pengasuhan anak.

Quality Control adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring yang terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

Dalam proses pendampingan sosial, ada dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial: Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat (community need assessment), yang meliputi: (a) jenis dan tipe kebutuhan, (b) distribusi kebutuhan, (c) kebutuhan akan pelayanan, (d) pola-pola penggunaan pelayanan, dan (e) hambatan-hambatan dalam menjangkau pelayanan (lihat makalah penulis mengenai metode dan teknik pemetaan sosial untuk mengetahui cara-cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat).

Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk: (a) memperjelas kebijakan-kebijakan setiap lembaga, (b) mendefinisikan peranan lembaga-lembaga, (c) mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga, (d) memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, (e) mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan, dan (f)

mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial.

3. Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) memberikan contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (win-winsolution). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela dimana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri. Compton dan Galaway (1989: 511) memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator:

- a. Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
- b. Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.

- c. Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama.
- d. Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah.
- e. Berupaya untuk melokalisir konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.
- f. Membagi konflik kedalam beberapa isu.
- g. Membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik.
- h. Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.
- i. Gunakan prosedur-prosedur persuasi.

4. Pembela

Dalam praktek PM, seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memainkan peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik.

Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (caseadvocacy) dan advokasi kausal (causeadvocacy) (DuBois dan Miley, 1992; Parsons, Jorgensen

dan Hernandez, 1994). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

Rothblatt (1978) memberikan beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam PM:

- a. Keterbukaan yaitu membiarkan berbagai pandangan untuk didengar.
- b. Perwakilan luas yaitu mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan.
- c. Keadilan yaitu memiliki sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan.
- d. Pengurangan permusuhan yaitu mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan.
- e. Informasi yaitu menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis.
- f. Pendukungan yaitu mendukung partisipasi secara luas.
- g. Kepekaan yaitu mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain.

5. Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi

pelindung (protector) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (guardianrole), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial.

Prinsip-prinsip peran pelindung meliputi:

- a) Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama.
- b) Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan.
- c) Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan peran pendamping sosial diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Peran pendamping tersebut meliputi peran sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela dan pelindung. Apabila dikaitkan dengan peran Loka Bina karya dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas menuju kemandirian maka UPTD Loka Bina Karya mempunyai peran sebagai pendamping disabilitas yang diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai pemecah masalah atau penyembuh secara langsung. Peranan tersebut dapat berupa peran sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela dan pelindung masyarakat disabilitas.

II.1.3 UPTD Loka Bina Karya

II.1.3.1 Pengertian

Loka Bina Karya (LBK) adalah salah satu sarana rehabilitasi sosial luar Panti bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya bagi orang dengan kecacatan, melalui penyelenggaraan keterampilan bimbingan sosial dan keterampilan kerja agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya bagi terwujudnya kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Loka Bina Karya merupakan kelompok jabatan fungsional yang dinaungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai wadah untuk memberdayakan penyandang cacat di daerah Kabupaten Tegal agar mereka memiliki keterampilan dan mampu berdaya. Apabila dikaitkan dengan *disability* yang dimaksudkan rehabilitasi di Loka Bina Karya adalah pengembalian orang-orang penyandang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, sosial, *vocasional* serta ekonomi sesuai dengan kebutuhannya.

II.1.3.2 Landasan Hukum berdirinya Loka Bina Karya Kabupaten Tegal

Berikut ini merupakan landasan hukum berdirinya UPTD Loka Bina Karya

Kabupaten Tegal:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997
Dijelaskan bahwa :

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan penjelasan tersebut menyatakan bahwa penyandang cacat juga mempunyai hak yang sama karena mereka merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan berhak untuk dihargai dan dihormati keberadaannya, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan bidang pendidikan.
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dijelaskan mengenai
“Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi

kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan”. Dari penjelasan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pelatihan kerja yang diberikan kepada penyandang cacat merupakan upaya pemerintah dalam membekali serta meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kompetensi kerja, agar penyandang cacat lebih produktif dan sejahtera.

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 205 Tahun 1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat
7. Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor 96/HK/SE/2005 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Penyandang Cacat.

II.1.3.3 Tujuan Loka Bina Karya

Tujuan dari Loka Bina Karya Kabupaten Tegal adalah:

1. Tersedianya fasilitas rehabilitasi sosial luar panti yang mudah dijangkau oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau

gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.

2. Tumbuhnya motivasi kerja dan kemampuan penyesuaian sosial orang dengan kecacatan (ODK).
3. Tersedianya orang dengan kecacatan (ODK) yang memiliki keterampilan dan kemampuan kerja/usaha.
4. Terwujudnya kemandirian orang dengan kecacatan (ODK)

II.1.4 Pemberdayaan

II.1.4.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut “*empowerment*” Menurut Webster dan Ford Inggris dictionary kata “*Empower*” mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasi otoritas ke pihak lain). Sedangkan dalam pengertian kedua berarti *to give ability to or anability to or anable* (upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan).

Pemberdayaan sendiri menunjuk pada (*skill*) kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki power (kekuatan) dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif

yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Secara istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli, diantaranya:

- a) Menurut Shardlow sebagaimana dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi, mengemukakan bahwa pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka .
- b) Menurut Mc. Ardle sebagaimana dikutip oleh Saymsir Salam, dkk, lebih menitikberatkan pemberdayaan pada proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi

pengetahuan, keterampilan, serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Menurut Kartasasmita sebagaimana dikutip oleh Anwar, istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu maka, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut Payne sebagaimana dikutip oleh Syamsir Salam, dkk. Pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki.

Edi Suharto dalam bukunya mengatakan bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan,

bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; selain itu mampu menjangkau sumber-sumber yang produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Parsons sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto Pemberdayaan adalah sebuah proses membantu orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pengertian keberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian pemberdayaan, pada intinya terfokus pada tiga hal, yakni pemberkuasaan, penguatan kapasitas diri, dan memandirikan. Ketiga hal ini merupakan hal yang penting dalam proses pemberdayaan. Pemberkuasaan merupakan suatu tahap untuk menguatkan diri seseorang khususnya orang yang lemah fisik serta kehidupan bermasyarakat.

Dalam arti, mereka termarginalkan, dan dikucilkan dengan keadaan fisik yang lemah. Untuk menguatkan kapasitas diri dan memandirkannya salah satunya bisa melalui partisipasi dalam masyarakat yang bersangkutan dalam kehidupan sosial mereka melalui penguatan kapasitas diri seperti memanfaatkan skill atau kemampuan yang ada sehingga dari kemampuan tersebut terciptalah kemandirian.

Menurut penulis, pada umumnya kegiatan pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, menambah kekuatan ,dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Oleh sebab itu maka,pemberdayaan adalah upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat yang bersangkutan, proses tersebut menekankan bahwa seseorang memperoleh ketrampilan, pengetahuan,dan kekuasaan yang cukup untuk dapat meningkatkan kapasitas yang dapat mempengaruhi hidupnya dalam kehidupan masyarakat . Setiap orang mampu merubah kehidupannya, seperti orang yang penakut menjadi pemberani, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, orang yang tidak bisa menjadi bisa, orang yang tidak berdaya menjadi berdaya, dll. Semua ini dapat tercapai apabila masyarakat yang diberdayakan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di lingkungannya. Dan apabila dikaitkan dengan masyarakat disabilitas maka pemberdayaan masyarakat

difabel kegiatan pemberdayaan dengan memberikan kegiatan pemberdayaan terhadap difabel dilakukan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, menambah kekuatan, dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Oleh sebab itu maka, pemberdayaan masyarakat difabel adalah upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat difabel itu sendiri yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat difabel yang bersangkutan

II.1.4.2 Tujuan Pemberdayaan

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat adalah upaya perluasan horizon pilihan bagi masyarakat. Masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Untuk itu setiap upaya pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk peningkatan martabat manusia sehingga menjadi masyarakat maju dalam berbagai aspek.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun

sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun kondisi eksternal.

Pada intinya tujuan pemberdayaan dilakukan melalui berbagai proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dianggap kurang berdaya dengan memanfaatkan berbagai peluang melalui kemandiriannya. Selain itu tujuan pemberdayaan adalah bentuk penguatan bagi masyarakat, agar mereka mampu mempertahankan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga masyarakat yang berdaulat, sehingga sampai pada kehidupan yang sejahtera.

II.1.4.3 Strategi Pemberdayaan

Menurut Suharto (2010: 66), konteks pekerjaan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga cara, Aras Mikro, Aras Mezzo, dan Aras Makro. Aras mikro yaitu pemberdayaan dilakukan kepada klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utama adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Aras mezzo yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai

strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya. Aras makro yaitu disebut juga pendekatan sebagai strategi sistem besar, Karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.

Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, dengan bertujuan memandang klien yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Menurut Wardhani dalam Mu'arifuddin (2011: 22) ada beberapa strategi pokok dalam usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga atau masyarakat melalui sebuah kelompok, yaitu :

- (1) Melaksanakan musyawarah atau pertemuan secara rutin guna membahas konsep usaha ekonomi produktif yang cocok dan sesuai untuk peningkatan ekonomi keluarga maupun masyarakat.
- (2) Mengadakan pelatihan teknis kepada kelompok masyarakat untuk melakukan usaha ekonomi produktif secara terampil serta menggunakan teknologi tepat guna yang tidak merusak lingkungan.
- (3) Memilih pengurus untuk melaksanakan manajemen kelompok yang partisipatif, jujur dan bertanggung jawab.
- (4) Mengadakan kegiatan simpan pinjam kelompok dan memobilisasi dana anggota kelompok.

(5) Mengembangkan dinamika kelompok untuk mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada serta menciptakan peluang usaha yang lain untuk dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

(6) Mengembangkan kerjasama antar kelompok untuk membentuk gabungan antar kelompok sebagai basis pembentukan koperasi yang mengakar dalam masyarakat, artinya dimiliki, dikelola dan diperuntukkan untuk kepentingan anggota dan masyarakat.

II.1.4.4 Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui beberapa penerapan pendekatan pemberdayaan (Suharto, 2006: 67), yaitu :

1. Pemungkinan: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemampuan diri mereka. Dengan mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi sehingga dapat memperluas kerja dan memberikan pendapatan yang layak.

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan pihak yang lemah.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha .

II.1.4.5 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Secara istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dalam upaya memberdayakan masyarakat, terdapat beberapa beberapa prinsip.

Pelaksanaan pendekatan di atas berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Menurut beberapa penulis, seperti Solomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt (1989), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto, 1997:216-217).

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- e. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.

- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

II.1.4.6 Sasaran Pemberdayaan

Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan

Untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui terlebih dahulu konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Ketidakberdayaan disebabkan oleh faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, dan ketiadaan pelatihan-pelatihan. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya (Suharto, 2006:60-61) meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang disabilitas, gay dan lesbian, serta masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok lemah khusus, mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang hanya membebani orang lain karena keterbatasan yang dimilikinya. Dalam upaya penanganannya pun berbeda, mereka membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dibandingkan dengan masyarakat normal lainnya. Sementara itu, ketidakberdayaan mereka merupakan juga akibat dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

II.1.4.7 Tahapan Pemberdayaan

Isbandi Rukminto Adi menyebutkan tahapan-tahapan pemberdayaan di dalam bukunya yang berjudul “Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan, Intervensi Komunitas”.

- a. Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan ini terdapat dua tahap yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan.

- b. Tahap Pengkajian

Dalam proses *Assessment* masyarakat sudah dilibatkan secara aktif

agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Disamping itu, pada tahap ini pelaku perubahan juga memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

c. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. Dalam proses ini petugas bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan pada saat itu.

d. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini agen Perubahan (community worker) membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Bantuan dari pihak petugas ini biasanya amat diperlukan pada kelompok yang belum pernah mengajukan proposal kepada peyandang dana, tetapi bagi kelompok yang telah beberapa kali mengajukan permohonan

maka peran petugas menjadi lebih berkurang. Dalam tahap ini *community worker* dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan

e. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (Penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga. Karena pertentangan antar kelompok warga juga dapat menghambat pelaksanaan suatu program ataupun kegiatan.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan diri warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

g. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap di mana seluruh program telah berjalan secara optimal dan petugas fasilitator pemberdayaan masyarakat sudah akan mengakhiri kerjanya.

II.1.4.8 Indikator Keberdayaan

Parsons et.al. sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Schuler, Hashemi dan Riley sebagaimana yang dikutip oleh Edi Suharto, mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *Empowerment Index* atau indeks pemberdayaan. Diantaranya:

- a. Kebebasan mobilitas, kemampuan individu untuk pergi ke luar

rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

- b. Kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, Koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator tersebut, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak,

memperoleh kredit usaha.

- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan, dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik, mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga; memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan.

II.1.5 Pengertian Disabilitas

II.1.5.1 Pengertian

Istilah difabel seringkali dilihat sebagai akronim istilah '*differently abled*' (bukan *different ability* seperti yang disebutkan oleh sebagian orang). Maka

istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya ‘orang yang memiliki kemampuan berbeda’. Menurut Zola, istilah *differently abled* diciptakan untuk menekankan pada *'the can-do' aspects of having a disability* (Zola, 1988).

Istilah ‘difabel’ bermakna bahwa disabilitas mungkin saja mengakibatkan orang tidak mampu melakukan sesuatu secara ‘normal’, tetapi si difabel masih dapat melakukannya dengan cara yang berbeda. Berjalan, misalnya, adalah cara untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain.

Mereka yang tidak memiliki kaki, bisa saja melakukan mobilitas dengan kursi roda. Difabel atau kata yang memiliki definisi “*Different Abled People*” ini adalah sebutan bagi orang cacat. Kata ini sengaja dibuat oleh lembaga yang mengurus orang – orang cacat dengan tujuan untuk memperhalus kata – kata atau sebutan bagi seluruh penyandang cacat yang kemudian mulai ditetapkan pada masyarakat luas pada tahun 1999 untuk menggunakan kata ini sebagai pengganti dari kata cacat. (sumber : www.google/difabel.com)

Ada beberapa definisi dari kata difabel ini. Berikut merupakan beberapa tanggapan dan pengertian tentang definisi difabel:

- a. **Menurut Pakar John C. Maxwell**, difabel adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal.*(sumber:pakar John C. Maxwell)*
- b. **Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna / tidak sempurna akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik.*(sumber:kamus besar bahasa Indonesia /KBBI)*
- c. **Pada Wikipedia**, difabel adalah sesuatu keterbatasan yang dimiliki seseorang dikarenakan suatu kecelakaan atau bawaan dari lahir, yang mengakibatkan orang ini memiliki keterbatasan dalam hal fisik maupun mental.
- d. **Menurut WHO**, difabel adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.*(sumber;WHO.int / World Health Organization)*

Asal-usul istilah 'difabel' dalam Bahasa Indonesia tidak dapat dipastikan karena penulis menemukan beberapa versi. **Versi pertama** mengatakan bahwa istilah difabel adalah istilah khas Indonesia yang diciptakan Mansour Faqih. Dalam versi ini tidak disebutkan kapan dan dimana persisnya Fakih menciptakan

istilah itu, tetapi taksirannya adalah pertengahan pada dekade 1990-an (lihat Suharto, 2016).

Menurut **versi kedua** istilah difabel diperkenalkan pada tahun 1981 dalam suatu diskusi pada konferensi ketunanetraan Asia yang diselenggarakan bersama oleh International Federation of the Blind (IFB) dan World Council for the Welfare of the Blind (WCWB) di Singapura. istilah ini kemudian diindonesiakan menjadi "difabel". Menurut Tarsidi dan Somad, para pendukung istilah 'difabel' secara tidak tepat mengartikan 'disability' sebagai "ketidakmampuan" dan karena itu mereka berargumen bahwa orang-orang dengan *disability* "bukan tidak mampu tetapi memiliki kemampuan yang berbeda." (Tarsidi & Somad, 2009).

Saya sendiri menemukan **versi ketiga** yang menunjukkan bahwa istilah difabel tidak khas Indonesia dan bukan istilah yang 'diciptakan' MansourFakih seperti dalam versi pertama. Istilah 'differently abled' sudah muncul di Amerika Serikat pada tahun 1980an. Dari berbagai sumber, khususnya Oxford Dictionary ("differently abled," n.d.) dan The Phrase Finder ("Differently abled," n.d.) mengantarkan kepada sebuah artikel yang dimuat di Harian *LA Times* terbitan 9 April 1985. Artikel yang berjudul "*Is the language itself disabled in that it can't fairly define the handicapped?*" ini menggugat ketidak-mampuan berbagai istilah yang ada untuk mewakili dan mendefinisikan para difabel.

Penulisnya sendiri memilih kata *handicap* dan ia sedang menjawab kritik dari berbagai pihak tentang istilah yang ia pilih. Ada dua kritikusnya yang mengatakan bahwa ia hendaknya mempertimbangkan istilah *differently abled*, istilah yang diusulkan oleh dan telah digunakan oleh beberapa organisasi

difabel. Ia mengutip salah satu kliping yang dikirimkan kepadanya yang berbunyi, “*In a valiant effort to find a kinder term than handicapped, the Democratic National Committee has coined differently abled*” (Smith, 1985).

Jadi, mungkin, istilah ‘difabel’ dalam tulisan dan akronim Indonesia adalah khas Indonesia, tetapi sumbernya dari belahan dunia yang lain yang mungkin juga telah dibaca oleh Fakih. Gagasan dan argumen Fakih sendiri tentang istilah ‘difabel’ dimuat dalam dua artikelnya yang mirip dari segi materi bahasannya: “Panggil Saja Kami Kaum Difabel;”(Fakih, 2002, h. 136–146) dan “Akses Ruang yang Adil: Meletakkan dasar keadilan sosial bagi kaum difabel” (Marcoes-Natsir, Juliantoro, Wahono, Suharto, & Munandar, 2004). Artikel “Akses ruang yang adil ...” pertama kali ditulis dan disajikan dalam sebuah seminar bertajuk *Perwujudan Fasilitas Umum Yang Aksesibel bagi Semua* pada September 1999 (Fakih, n.d.). Dalam tulisan-tulisannya, Fakih menekankan bahwa istilah *difabel* adalah istilah yang diperlukan sebagai *counter* diskursus istilah cacat dan *disabled*:

salah satu bentuk resistensi dan pemberdayaan yang hakiki adalah justru mulai dari usaha untuk membongkar konvensi sosial yang diyakini kalangan masyarakat, birokrat, akademisi, bahkan aktivis LSM untuk melakukan dekonstruksi terhadap diskursus 'disable' ataupun 'penyandang cacat' dengan memunculkan wacana tandingan yang lebih adil dan memberdayakan, yakni bahwa mereka yang tidak memiliki kaki, misalnya, ternyata memiliki 'different abilities' atau yang di-Indonesiakan dan disingkat sebagai 'difabel' (Fakih, n.d.).

Sumber persoalannya ada di diskursus ‘normal’ dan ‘cacat’ yang menopang konstruksi sosial istilah ‘penyandang cacat’ dan melahirkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap difabel, mulai dari diskriminasi ekonomi, subordinasi, *stereotyping*, kekerasan, dan penyempitan akses sosial (Fakih, 2002, h. 306–312). Dengan kata lain, penggantian istilah ini adalah bagian dari upaya ‘mengikat’

makna baru untuk melawan diskriminasi terhadap kaum difabel. Penggantian istilah ini, dengan demikian, lebih dari sekedar upaya eufimistik seperti yang dituduhkan para kritikusny.

Seperti diuraikan dalam tulisan Suharto (2016), istilah difabel dipopulerkan dan menjadi ‘alat’ perjuangan para pegiat difabel, khususnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Istilah difabel mereka gunakan dalam program-program pemberdayaan, dalam kampanye hak, sebagai nama lembaga dan organisasi, bahkan dalam sejumlah kasus berhasil menjadi nama dokumen-dokumen pemerintahan semisal peraturan daerah. Meski pada akhirnya tidak digunakan sebagai istilah resmi dalam undang-undang, istilah difabel sudah amat populer digunakan. Menurut definisi undang-undang, ‘penyandang disabilitas’ adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8/2016, 2016, Pasal. 1).

Istilah yang pada akhirnya menjadi pilihan bahasa undang-undang ini adalah istilah paling baru dan diciptakan sesudah tahun 2009. Hal ini setidaknya dapat disimpulkan dari penjelasan Tarsidi dan Somad bahwa dalam rangka merativikasi CRPD, Komnas HAM menyelenggarakan sebuah semiloka pada awal tahun 2009 yang membahas secara khusus istilah apa yang paling tepat untuk menerjemahkan kata ‘*disability*’ dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Semiloka ini adalah sebuah upaya untuk merespon kontroversi pilihan istilah di

saat menyusun rancangan undang-undang ratifikasi. Pada akhirnya, semiloka sendiri tidak mencapai kata sepakat dan hanya menghasilkan istilah-istilah alternatifnya. Ada sembilan istilah dan tidak satu pun yang mengusulkan “penyandang disabilitas”. Tiga yang terkuat, yang direspon tulisan Tarsidi dan Somad adalah: orang berkebutuhan khusus, penyandang ketunaan, dan difabel (Tarsidi & Somad, 2009, h. 128).

Keterangan Tarsidi selaras dengan sumber lain yang menyebutkan bahwa istilah ‘penyandang disabilitas’ lahir dari sebuah “Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat” yang juga diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 19 – 20 Maret 2010 di Jakarta (“Istilah Penyandang Disabilitas Sebagai Pengganti Penyandang Cacat,” 2016). Keterangan tentang kegiatan dan hasil kegiatan ini dapat dibaca di Laporan Tahun Komnas HAM (Komnas HAM, 2011, h. 96). Menurut artikel di web tersebut, ada sejumlah alasan untuk dipilihnya istilah “penyandang disabilitas”, di antaranya:

- Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut.
- Mendeskripsikan fakta nyata.
- Tidak mengandung unsur negatif.
- Menumbuhkan semangat pemberdayaan.
- Memberikan inspirasi hal-hal positif.
- Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah.
- Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian.

- Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat.
- Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi
- Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pamanis
- Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional
- Memperhatikan perspektif linguistik. Mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia
- Menggambarkan kesamaan atau kesetaraan.
- Enak bagi yang disebut dan enak bagi yang menyebutkan.
- Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat

Jadi, menurut penulis baik istilah difabel dan ‘penyandang disabilitas’ adalah istilah-istilah alternatif yang sengaja diciptakan dan lahir dari upaya-upaya untuk melawan diskriminasi terhadap difabel. Difabel adalah akronim dari different ability yang berarti mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal.

II.1.5.2 Jenis-jenis Disabilitas

Dalam membahas mengenai penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus, tidak hanya berpacu pada keterbatasan fisik seperti orang

dengan pengguna kursi roda saja, namun ada jenis lain yang termasuk penyandang disabilitas. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa ragam dari penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Sementara itu, dalam istilah yang lebih umum, *disabled world* memberikan delapan kategori disabilitas (<http://www.disabled-world.com> diakses pada tanggal 12 September pukul 21.45 WIB), diantaranya:

1. Hambatan gerak dan fisik
2. Disabilitas tulang belakang
3. Disabilitas cedera kepala-otak
4. Disabilitas penglihatan
5. Disabilitas pendengaran
6. Disabilitas kognitif atau belajar
7. Gangguan psikologis
8. Disabilitas tak terlihat

Terdapat pula beberapa jenis penyandang disabilitas/kebutuhan khusus. Ini terlihat bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing dimana dari kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas :

A.Disabilitas Fisik :

1. Tuna Netra adalah hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit (Sastya Eka Pravitasari dkk, dalam jurnal *Pemberdayaan Bagi Penyandang Tuna Netra Guna Meningkatkan Sumber Daya Manusia*, 2014). Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan), memiliki sisa penglihatan (low vision), seseorang yang dapat melihat benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat benda dalam jarak satu meter.
2. Tuna Rungu Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. Jenis kecacatan ini terdiri dari tuna rungu wicara, tuna rungu, dan tuna wicara.
3. Tuna Daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir (Soemantri, 2006: 121)

B.Disabilitas Mental :

- 1) Tuna Laras, seseorang yang mengalami gangguan emosi. Sukar mengendalikan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

- 2) Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Dengan kata lain cacat pikiran; lemah daya tangkap (Ekawati Rahayu Ningsih dalam jurnal *Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat*, 2014).

C.Disabilitas Ganda :

Merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keterbatasan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

II.1.6 Kemandirian

II.1.6.1 Pegertian Kemandirian

Kata kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an” yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, pembahasan mengenai kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep CarlRogers disebut dengan istilah self oleh Brammer dan Shostrom (1982) karena diri itu merupakan inti dari kemandirian (dalam Ali, 2006, hlm: 109).

Kemandirian juga berasal dari kata “independence” yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung kepada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri (Chaplin, 1996, hlm: 105).

Kemandirian (self-reliance) adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimilikinya sendiri yaitu mengetahui bagaimana mengelola waktu, berjalan

dan berfikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan dalam mengambil resiko dan memecahkan masalah. Dengan kemandirian tidak ada kebutuhan untuk mendapat persetujuan orang lain ketika hendak melangkah menentukan sesuatu yang baru. Individu yang mandiri tidak dibutuhkan yang detail dan terus menerus tentang bagaimana mencapai produk akhir, ia bisa berstandar pada diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu berdiri sendiri yaitu memiliki kepercayaan diri yang bisa membuat seseorang mampu sebagai individu untuk beradaptasi dan mengurus segala hal dengan dirinya sendiri (Parker, 2006, hlm: 226-227)

Menurut Erikson kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk melepaskan dirinya dengan proses mencari identitas ego yaitu perkembangan kearah individualitas yang mantap untuk berdiri sendiri (dalam Monks, 2006, hlm: 279).

Menurut Gea (2002, hlm: 146) mandiri adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan kekuatan sendiri. Parker juga berpendapat bahwa kemandirian juga berarti adanya kepercayaan terhadap ide-ide diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan menyelesaikan sesuatu hal sampai tuntas. Kemandirian berkenaan dengan hal yang dimilikinya tingkat kompetensi fisik tertentu sehingga hilangnya kekuatan atau koordinasi tidak akan pernah terjadi ditengah upaya seseorang mencapai sasaran. Kemandirian berarti tidak adanya keragu-raguan dalam menetapkan tujuan dan tidak dibatasi oleh kekuatan akan kegagalan (Parker, 2006, hlm: 226).

Menurut penulis kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua apa yang dimilikinya sendiri yaitu mengetahui bagaimana merencanakan mengelola waktu, berjalan/berproses dan memiliki kemampuan berfikir secara individu, disertai dengan kemampuan dalam mengambil resiko dan memecahkan masalah.

II.2 Definisi Konsep

Konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi. Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial. Suatu konsep ada kalanya mempunyai pengertian yang berbeda dan mempunyai variabel yang berbeda pula terutama dalam ilmu sosial. Hal ini disebabkan penggunaan suatu konsep dikaitkan dengan hal atau situasi yang berbeda. Agar tidak menimbulkan kekaburan pengertian, kiranya perlu ditegaskan batasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Adapun definisi konsep yang diajukan adalah :

1. Peran UPTD Loka Bina Karya merupakan suatu peran yang dilakukan oleh UPTD Loka Bina Karya tersebut selaku balai rehabilitasi instansi pemerintah yang memiliki peran sebagai pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat difabel yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dengan memberikan pembinaan/pelatihan-pelatihan ketrampilan keahlian yang bermanfaat untuk mengembangkan potensi kemampuan dan meningkatkan kemandirian bagi penyandang disabilitas.

2. Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan dengan memberikan kegiatan pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, menambah kekuatan, dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Oleh sebab itu maka, pemberdayaan adalah upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat yang bersangkutan.
3. Penyandang disabilitas' adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam bermasyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat disabilitas adalah kegiatan pemberdayaan dengan memberikan kegiatan pemberdayaan terhadap difabel dilakukan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, menambah kekuatan, dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Oleh sebab itu maka, pemberdayaan masyarakat disabilitas adalah upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat difabel itu sendiri yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat difabel yang bersangkutan

5. Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua apa yang dimilikinya sendiri yaitu mengetahui bagaimana merencanakan mengelola waktu, berjalan/berproses dan memiliki kemampuan berfikir secara individu, disertai dengan kemampuan dalam mengambil resiko dan memecahkan masalah.

II.3 Pokok-pokok Penelitian

Pokok-pokok penelitian merupakan penjabaran atas konsep penelitian dengan menentukan apakah variabel yang diteliti dapat diukur dengan indikator-indikatornya.

Adapun pokok-pokok penelitian Peran Loka Bina Karya dalam pemberdayaan difabel menuju kemandirian

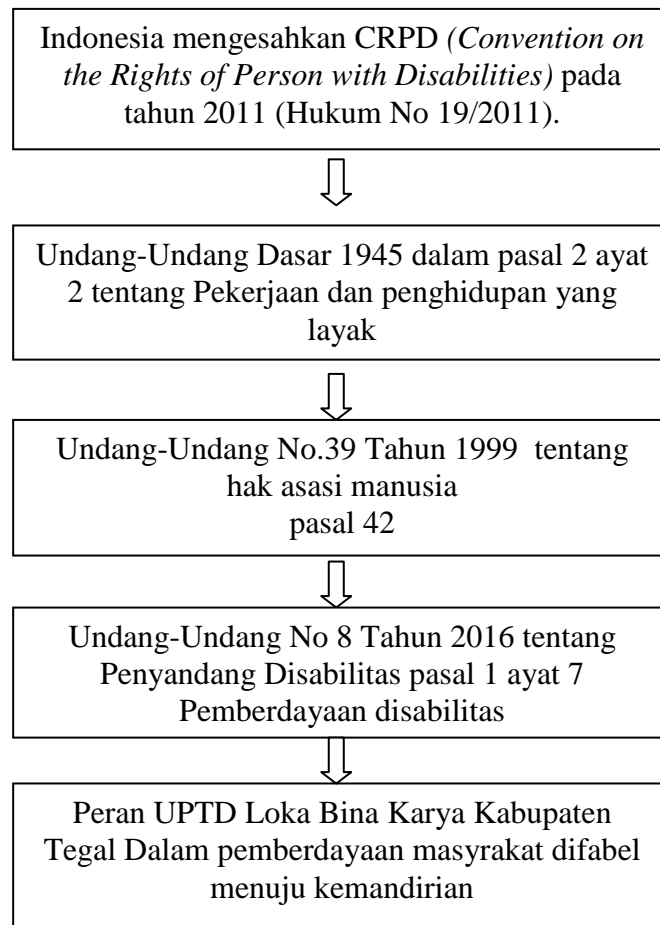
1. Peran Pendamping Disabilitas Loka Bina Karya , indikatornya yakni :
 - a. Fasilitator (pemungkinan),peran terhadap klien untuk menangani tekanan situasional atau transisional.
 - b. Broker ,Identifikasi dan pemecah masalah serta melakukan transaksi dalam pasar lain berupa jaringan pelayanan sosial sehingga klien memperoleh keuntungan yang besar.
 - c. Mediator ,pendamping disabilitas menjalankan peranya untuk kontrak perilaku,negosiasi,pendamai pihak ketiga serta berbagai macam resolusi konflik

- d. Pembela ,peran pendamping disabilitas melakukan peran sebagai advokat diantaranya advokasi kasus dan advokasi kausal.
 - e. Pelindung peran sebagai peindung dari permasalahan-permasalahn yang dihadapi
2. Faktor yang menjadi kendala bagi UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan masyarakat difabel menuju kemandirian.
 3. Solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala dalam pemberdayaan pelatihan keahlian/ketrampilan masyarakat difabel menuju kemandirian di UPTD Loka Bina Karya.

II.4 Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai proses yang memuat langkah-langkah atau proses urutan mengenai topik atau tema penelitian. Peranan penelitian sangat dominan dalam menentukan keberhasilan penelitian, sedangkan alur pikir sifatnya hanya membantu mengarahkan proses penelitian agar berjalan dengan sistematis.

Alur pemikiran mengenai Peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan masyarakat difabel menuju kemandirian.



Skema II.1 Alur Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016:2) disebutkan bahwa secara umum metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh sebuah hasil yang dapat diandalkan dalam menguji suatu kebenaran data. Menurut Meleong metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial alamiah, dengan mengedepankan proses-proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti.

Penentuan metode penelitian ini sangat vital, karena menyangkut pemecahan masalah yang berdampak pada pengambilan kesimpulan. Dengan menentukan metode penelitian yang tepat, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian dapat terpecahkan, kesimpulan yang diambil tepat dan akurat.

III.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono, (2016:7) terdapat beberapa jenis penelitian yaitu : “Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif”. Penelitian Kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian, data yang diperoleh dari penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan Penelitian Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif berbentuk kata, skema maupun gambar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini menjelaskan tentang keadaan dimana berupa kasus dan suatu fenomena. Fenomena atau gejala sosial lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Penelitiannya juga dilakukan pada kondisi yang alamiah/natural, kemudian akan berkembang setelah peneliti menganalisis kasus yang diteliti tentang Peran UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal dalam pemberdayaan masyarakat difabel menuju kemandirian.

Tipe penelitian menggunakan penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan yakni untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.

Di dalam paradigma penelitian terdapat metode penelitian studi kasus kualitatif. Studi kasus terbagi menjadi 3 tipe yaitu :

1. Studi kasus intrinsik, penelitian dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian suatu kasus khusus guna memahami secara utuh kasus tersebut tanpa harus dimaksudkan untuk menghasilkan konsep-konsep/teori ataupun tanpa ada upaya menggeneralisasi.
2. Studi kasus instrumental, penelitian pada suatu kasus unik tertentu guna memahami isu dengan lebih baik, dan juga mengembangkan dan memperhalus teori.

3. Studi kasus kolektif/majemuk/komparatif, suatu studi kasus instrumental yang diperluas sehingga mencakup beberapa kasus. Tujuannya adalah untuk mempelajari fenomena/populasi/kondisi umum dengan lebih mendalam.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian yang akan diteliti adalah studi kasus intrinsik yaitu penelitian yang dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian pada suatu kasus tertentu untuk memahami secara utuh kasus tersebut. Metode studi kasus melibatkan penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tingkah laku individu berkaitan dengan reaksi dan kemampuan individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kasus itu sendiri oleh Punch (1998) didefinisikan sebagai fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas (*bounded context*), meskipun batas-batas fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Kasus bisa berupa individu, kelompok kecil, organisasi, komunitas, atau bahkan suatu bangsa.

III.2. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016:14) macam data ada dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif.

Selain itu, jika dilihat dari jenis datanya terbagi menjadi 2 antara lain :

1. Data Primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dalam penelitian ini data primer bersumber dari UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal, Masyarakat difabel (penyandang disabilitas), Organisasi Difabel Slawi Mandiri (DSM).
2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu arsip dari UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal.

III.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara (Burhan Bungin, 2010:108). Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia “berkewajiban” secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Sebagai anggota informan dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang-dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian.

Dalam pemilihan informan, persyaratan yang diperlukan dalam memilih dan menentukan seorang informan adalah ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi.

Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau, jadi sebagai *internal sampling*, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya.

Usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara: (1) melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintahan) maupun informal (orang/badan, masyarakat seperti tokoh masyarakat). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berganda, misalnya sebagai pegawai Dinas terkait dan sebagai informan pembantu peneliti, yang mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti; (2) melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam hal tertentu perlu direkrut seperlunya dan diberi tahu tentang maksud dan tujuan penelitian jika hal itu mungkin dilakukan. Agar peneliti memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan, seyogyanya ia menyelidiki motivasinya, dan bila perlu mengetes informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala UPTD Loka Bina Karya
2. Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya, 4 Orang
3. Kader Kusta / Wakil Ketua DSM (Difabel Slawi Mandiri) 1 orang

Informan diatas digunakan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang didapat dari responden, supaya menjadikan kroscek siapa saja yang di anggap tahu apa yang kita teliti, diambil dari 75 responden masyarakat penyandang disabilitas yang dipilih dengan pertimbangan tertentu dengan menggunakan *Purposive sampling*.

III.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari settingannya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*) pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder, selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat di lakukan dengan:

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki. Sutrisno Hadi (1986) dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sugiyono, 2011:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dari segi pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi :

a. Observasi berperan serta (*participant observation*)

Dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati dan mengikuti aktivitas obyek penelitian atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Observasi nonpartisipan (*participant observation*)

Peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung / Observasi Patisipan di tempat penelitian, penelitian dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang ada pada objek penelitian dan fakta yang terjadi terkait

dengan Peran UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal dalam pemberdayaan masyarakat difabel menuju kemandirian

2. Metode angket (kuisisioner)

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu, kuisisioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan / pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono 2001:142).

Sedangkan instrumen penelitian ialah peneliti sendiri dan penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa rentang skala (*rating scale*). Rating scale adalah alat pengumpul data dari jawaban responden yang dicatat secara bertingkat, dengan tingkatan pengukuran 5 titik, yaitu titik 1 sampai dengan 5 yang mengukur setiap item pertanyaan di kuisisioner. Jawaban responden pada tiap item kuisisioner mempunyai nilai yang paling tidak baik untuk titik 1 dan nilai yang paling baik untuk titik 5.

Responden menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah adalah merupakan data kualitatif. Dalam skala model *rating scale*, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu *rating scale* ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan dan lain-lain.

Adapun skoring (penilaian) angket pada setiap jawaban responden dengan ketentuan melingkari jawaban yang dipilih, misalnya:

Sangat Setuju (SS)

Setuju (S)

Ragu-Ragu (RR)

Tidak Setuju (TS)

Sangat Tidak Setuju (STS)

Dalam memperoleh hasil dari analisis secara kualitatif maka jawaban ini dapat diberi dengan berdasarkan skor. Dalam menentukan skor di gunakan *rating scale* yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor, dimana cara pengukuran tersebut adalah dengan berhadapan kepada seorang responden dan diminta untuk memberikan jawabannya, kemudian dari jawaban tersebut di berikan skor. Contoh penentuan skor:

A (tinggi sekali) : skor 5

B (tinggi) : skor 4

C (sedang) : skor 3

D (rendah) : skor 2

E(rendah sekali) : skor 1

3. Wawancara

Menurut Esterberg (2002), interview atau wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk menggali

informasi tentang Peran UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal dalam pemberdayaan masyarakat difabel menuju kemandirian Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan:

1. Kepala UPTD Loka Bina Karya
2. THL UPTD Loka Bina Karya 4 Petugas Pendamping Disabilitas
3. Kader Kusta / Wakil Ketua DSM(Difabel Slawi Mandiri)1 orang
4. Kepustakaan (Library Reseach)

Kepustakaan (Library Reasearch) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur, buku-buku ilmiah, majalah, brosur-brosur, hasil akhir laporan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi penelitian. Dalam penelitian ini, literatur merupakan bahan referensi yang digunakan untuk menunjang penelitian.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Burhan Bungin, 2010:121). Dokumentasi yaitu “cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian”. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi berfungsi untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang digunakan dalam kerangka teori.

Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian agar lebih valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga peneliti bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Foto-foto ini akan membantu

memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data-data di UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal, profil UPTD Loka Bina Karya, dan foto-foto.

III.5. Teknik dan Analisis Data

1. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan analisis statistik deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data lapangan. Data-data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan deskriptif analisis (kesimpulan), yang artinya data-data yang terkumpul dipilah-pilah dan dikelompokkan, dijumlahkan dan diprosentasekan.

Setelah data tersebut dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kita golongan data kedalam tabel rentang skala yang mana untuk menentukan skor dalam mencari nilai rata-rata per item jawaban dalam aspek yang telah di olah masing-masing dalam tabel distribusi frekuensi.

Untuk memastikan kita cari tahu dahulu skor terendah dan skor tertinggi.
Bila sampel yang kita pakai sebanyak 75 responden dan banyaknya alternatif jawaban 3 (Selalu, ada kalanya /kadang-kadang atau biasa saja, dan Tidak).

Maka :

- Skor terendah = Bobot Terendah x Jumlah Sampel =

$$3 \quad \times \quad 75 \quad = \quad 150$$

- Skor Tertinggi = Bobot Tertinggi x Jumlah Sampel =

$$5 \quad \times \quad 75 \quad = \quad 375$$

Untuk menentukan rentang skala yang menggunakan rumus :

$$\text{Rentang Skala (RS)} = \frac{n(m-1)}{m}$$

(Sumber : Sugiyono, 2011:99)

Dimana : N = Jumlah Sampel

M = Jumlah alternative tiap jawaban item

Maka akan menjadi ;

$$RS = \frac{75(5-1)}{5} = 60$$

Sehingga akan terbentuklah tabel rentang skala :

Tabel III.01
Rentang Skala

No	Rentang Skala (RS)	Kriteria
1.	316 – 375	Sangat Baik/Sangat Memuaskan
2.	226 – 315	Baik/Memuaskan
3.	196 – 225	Biasa Saja
4.	136 – 195	Tidak Baik/Tidak Memuaskan
5.	75 – 135	Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Memuaskan

Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2018

Setelah skor dalam rentang skala di golongan per aspek yang diambil dalam masing-masing tabel distribusi frekuensi, maka selanjutnya di rekapitulasi masing-masing skor dalam rentang skala dengan cara mencari total score $\sum X_1 + \sum X_2 + \dots + \sum X_{22}$, jadi $(\sum X) =$.Nilai maksimum (max) untuk variabel Peran UPTD Loka Bina Kaya $(\sum X)$ diperoleh melalui = jumlah item pernyataan dikalikan nilai tertinggi dikalikan jumlah responden penyandang disabilitas sebanyak 75 responden, jadi diperoleh $65 \times 5 \times 75 = 24375$, sedangkan nilai minimum (min) variabel Peran UPTD Loka Bina Kaya $(\sum X)$ $(\sum X)$ diperoleh melalui = jumlah item pernyataan dikalikan nilai terendah dikalikan jumlah reponden, jadi diperoleh $65 \times 1 \times 75 = 4875$

Range merupakan jumlah nilai maksimum (max) dikurangi nilai minimum = $24375 - 4875 = 19500$, selanjutnya dengan mengetahui range nilai dari jawaban responden maka dapat ditentukan Rentang Skala (RS) pengukuran yaitu range dibagi skala pengukuran = $19500 / 5 = 3900$, Rentang Skala (RS) digunakan untuk

menentukan rentang penilaian dalam kategori “Peran UPTD Loka Bina Karya Dalam Pemberdayaan Disabilitas Menuju Kemandirian” yang ditentukan dalam standar derajat penilaian berikut:

Tabel III.02
Rentang Skala Variabel “Peran UPTD Loka Bina Karya”

Rentang Skala (RS)	Kriteria
20476– 24375	Sangat Baik/Sangat Memuaskan
16576 – 20475	Baik/Memuaskan
12676– 16575	Biasa Saja
8776 – 12675	Tidak Baik/Tidak Memuaskan
4875- 8775	Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Memuaskan

Sumber: data primer yang telah diolah tahun 2020

Sedangkan untuk dijadikan bahan kroscek maupun perbandingan untuk teknik analisa data deskriptif kualitatif maka dilengkapi pula data yang diperoleh dari wawancara. Maka data-data yang sudah terkumpul perlu dianalisis agar dapat menambah informasi yang jelas. Pengelolaan dengan penganalisaan data ini mempunyai tujuan untuk menjabarkan data yang diperoleh dari penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, teknik menganalisa data dengan cara meneliti kembali catatan yang diperoleh dari penelitian.
- b. *Coding*, teknik menganalisa data dengan cara mengklasifikasikan jawaban menurut macamnya.

- c. *Klasifikasi*, teknik menganalisa data dengan cara membuat kategori untuk mengklasifikasikan jawaban. Hal ini berguna untuk mempermudah dalam melakukan analisis dan mengambil kesimpulan.
- d. *Tabulasi*, teknik menganalisa data dengan cara penyusunan data dalam keadaan ringkas dan tersusun dalam suatu tabel tunggal sehingga data dapat dibaca dengan mudah untuk mengetahui jawaban dari masalah yang akan diteliti.

Adapun teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa teknik analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu untuk melakukan proses analisis diperlukan penelitian secara terpadu yang mencakup unsur-unsur terkait yang menjadi variabel dalam penelitian, sehingga semua unsur yang terlibat dapat dianalisis dan menghasilkan produk yang dapat mengurangi permasalahan yang ada. Tahapan analisis dalam penelitian ini adalah tahapan berupa pengelolaan dan identifikasi data dasar yang ada untuk mengetahui kondisi, potensi, kendala, karakteristik, serta keterbatasan obyek penelitian.

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu deskriptif, dapat dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal dalam pemberdayaan masyarakat difabel menuju kemandirian.

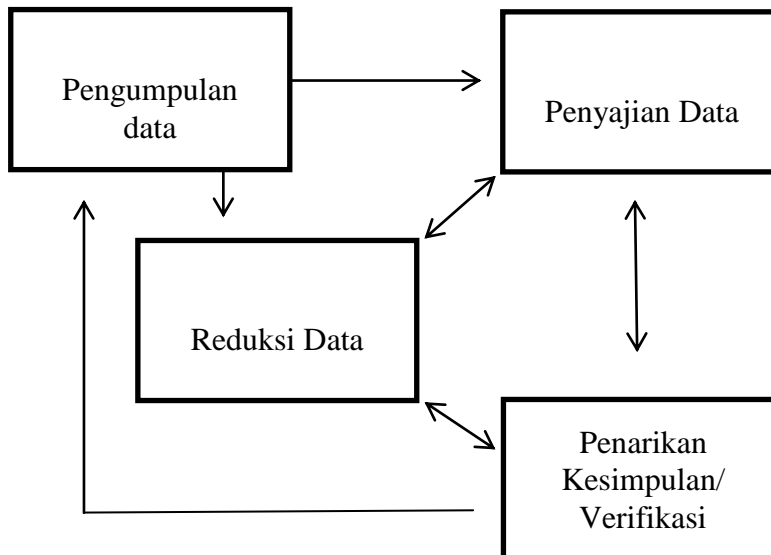
Sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal pada tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti (Miles and Huberman dalam Sugiyono 2016:247) adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan, jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya ditarik dan diverifikasi oleh peneliti
2. Penyajian dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi, memeriksa, mengatur, serta mengelompokan data sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan benar.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarik kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti.

Model interaktif analisis data menurut Miles and Huberman dikutip

Sugiyono (2016:247) sebagai berikut:



Skema III.1 Model interaktif analisis data menurut Miles and Huberman

Sumber : Sugiyono (2016:247)

Pengumpulan data, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi satu sama lainnya berinteraksi dari ketiga komponen yang ada.

III.6 Sistematika Penulisan

Sistematika berfungsi untuk mempermudah orang lain dapat membaca atau mempelajari pembahasan untuk suatu pemaparan, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Rumusan Masalah

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Kerangka Teori

II.2 Definisi Konsep

II.3 Pokok-pokok Penelitian

II.4 Alur Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 Jenis dan Tipe Penelitian

III.2 Jenis dan Sumber Data

III.3 Informan Penelitian

III.4 Teknik Pengumpulan Data

III.5 Teknik dan Analisis Data

III.6 Sistematika Penulisan

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai detail wilayah penelitian, peneliti kemudian memberikan deskripsi umum lokasi penelitian, dimana hal tersebut sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini dapat menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui wilayah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

IV.1. Deskripsi KabupatenTegal

IV.1.1. Visi dan Misi KabupatenTegal

A. Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia.

B. Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

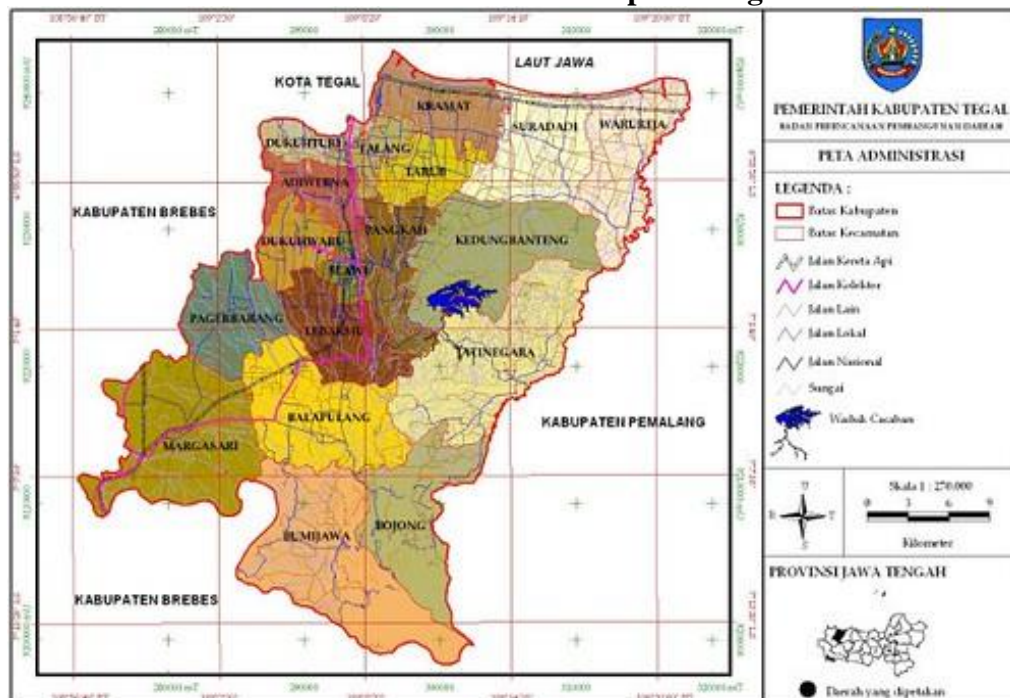
IV.1.2 Letak Geografis Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara $108^{\circ}57'6''$ s/d $109^{\circ}21'30''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}50'41''$ s/d $7^{\circ}15'30''$ Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 878,79 km persegi, yang terbagi dalam 18 kecamatan dengan 281 desa dan 6 kelurahan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal.

Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa

Gambar IV.1
Peta Administrasi Kabupaten Tegal



Sumber: http://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14

Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu :

1. Daerah pantai/pesisir meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja (3 kecamatan dengan 43 desa/kelurahan).
2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah (10 kecamatan dengan 159 desa/kelurahan).

3. Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng (5 kecamatan dengan 85 desa).

Tabel IV.1
Luas Wilayah Kabupaten Tegal
Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan Lahan 2017 (Ha)

No.	Kecamatan	Sawah *)	Bukan Sawah	Jumlah	Sawah (%)	Bukan Sawah (%)
1	Margasari	3.489	5.194	8.683	9,01	10,57
2	Bumijawa	2.280	6.576	8.856	5,89	13,38
3	Bojong	2.245	3.607	5.852	5,80	7,34
4	Balapulang	3.152	4.339	7.491	8,14	8,83
5	Pagerbarang	2.752	1.548	4.300	7,10	3,15
6	Lebaksiu	2.719	1.376	4.095	7,02	2,80
7	Jatinegara	2.111	5.851	7.962	5,45	11,9
8	Kedungbanteng	1.379	7.383	8.762	3,56	15,02
9	Pangkah	1.448	2.103	3.551	3,74	4,28
10	Slawi	375	1.014	1.389	0,97	2,06
11	Dukuhwaru	1.836	794	2.630	4,74	1,62
12	Adiwerna	989	1.397	2.386	2,55	2,84
13	Dukuhturi	624	1.124	1.748	1,61	2,29
14	Talang	1.202	637	1.839	3,10	1,30
15	Tarub	1.742	940	2.682	4,50	1,91
16	Kramat	2.157	1.692	3.849	5,57	3,44
17	Suradadi	4.131	1.442	5.573	10,66	2,93
18	Warureja	4.104	2.127	6.231	10,60	4,33
	Jumlah	38.735	49.144	87.879	100	100

*) Termasuk lahan yang diusahakan di kawasan hutan

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tegal 2018

Dari tabel IV.1 dapat diketahui keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tegal menurut kecamatan dan jenis penggunaan lahan tahun 2017 (ha), mencakup luas sawah maupun bukan sawah yakni 87.879 (ha). Luas keseluruhan lahan sawah adalah 38.735 (ha) dan luas keseluruhan lahan bukan sawah adalah 49.144 (ha). Dan dari 18 kecamatan, kecamatan Bumijawa yang memiliki lahan terluas yakni 5,89 % sawah (2.280 ha) dan 13,38 % bukan sawah (6.576 ha) dimana total luasnya adalah 8.856 (ha).

IV.1.3 Demografi

IV.1.3.1 Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel IV.2
Penduduk Kabupaten Tegal
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

Pendidikan Tertinggi	Jumlah	Persentase
Tidak Sekolah	18.461	3,23%
Sekolah Dasar	223.117	39,08%
Sekolah Menengah Pertama	118.775	20,80%
Sekolah Menengah Atas	155.245	27,19%
Diploma I/II/III	13.343	2,34%
Strata I/II/III	42.039	7,36%
Jumlah	570.980	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari tabel IV.2 dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018, Berjumlah sebanyak 570.980 jiwa dengan latar belakang tingkat pendidikan sebanyak 96,77 % atau 552.519 bersekolah pada jenjang sekolah dasar sampai Strata dan sebanyak 3,23% atau 18.461 jiwa tidak bersekolah. Jumlah tertinggi berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan total sebesar 223.117 (39,08%) penduduk ,sedangkan jumlah terendah berada pada jenjang Diploma I/II/II dengan total 13.343 (2,34%) penduduk.

IV.1.3.2 Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel IV.3
Penduduk Kabupaten Tegal
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2017

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	121.080	18,77%
2	139.419	21,61%
3	188.514	29,22%
4	91.947	14,25%
5	104.202	16,15%
Jumlah	645.162	100%

Keterangan :

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
2. Industri Pengolahan
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel
4. Jasa Kemasyarakatan
5. Lainnya

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Dari tabel IV.3 dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2017, jumlah tertinggi berada pada jenis pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel dengan jumlah 188.514 (29,22%) penduduk, sedangkan jumlah terendah berada pada jenis pekerjaan jasa kemasyarakatan dengan total 91.947 (14,25%) penduduk.

IV.1.3.3 Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel IV.4
Penduduk Kabupaten Tegal
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Margasari	47.560	48.405	95.965
Bumijawa	42.212	42.448	84.660
Bojong	30.201	31.941	62.142
Balapulang	40.594	41.548	82.142
Pagerbarang	26.165	26.581	52.746
Lebaksiu	40.975	43.065	84.040
Jatinegara	26.796	27.395	54.191
Kedungbanteng	20.326	20.157	40.483
Pangkah	50.741	50.607	101.348
Slawi	35.414	36.811	72.225
Dukuhwaru	29.523	30.361	59.884
Adiwerna	60.189	59.688	119.877
Dukuhturi	44.808	44.315	89.123
Talang	51.324	50.988	102.312
Tarub	39.507	39.059	78.566
Kramat	55.288	56.422	111.710
Suradadi	40.687	41.022	81.709
Warureja	30.201	30.191	60.392
Jumlah (%)	712.511 (49,70%)	721.004 (50,30%)	1.433.515 (100%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari tabel IV.4 dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017 yang tersebar pada 18 kecamatan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 712.511 (49,70) penduduk, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 721.004 (50,30%) penduduk dari total keseluruhan 1.433.515 penduduk Kabupaten Tegal. Jumlah penduduk terbanyak berada pada kecamatan adiwerna yaitu sebesar 119.877 Jiwa dan Jumlah penduduk terendah berada pada kecamatan kedungbanteng yaitu sebesar 40.483 Jiwa.

IV.1.3.4 Keadaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Tegal

Tabel IV.5 Data Penyandang disabilitas di Kab.Tegal

No	Kecamatan	Jumlah	
		Jiwa	Procentase(%)
1	Lebaksiu	1180	9,54
2	Pangkah	976	7,89
3	Balapulang	972	7,86
4	Tarub	918	7,42
5	Margasari	838	6,77
6	Adiwerna	748	6,04
7	Warureja	672	5,43
8	Talang	625	5,05
9	Dukuhturi	620	5,01
10	Jatinegara	604	4,89
11	Suradadi	592	4,78
12	Bojong	586	4,73
13	Kramat	568	4,58
14	Kedung Banteng	528	4,27
15	Pagerbarang	526	4,25
16	Bumijawa	494	3,99
17	Slawi	467	3,77
18	Dukuhwaru	462	3,73
Jumlah (%)		12.376	100%

Sumber SIMAS(Sistem Informasi Masyarakat Miskin)
Bappeda Litbang Kab.Tegal 2017

Dari tabel IV.5 dapat disimpulkan bahwa jumlah penyandang disabilitas menurut *SIMAS(Sistem Informasi Masyarakat Miskin)Bappeda Litbang Kab.Tegal 2017* di Kabupaten Tegal adalah 12.376 Jiwa (100%) , Penyandang disabilitas tersebar disetiap kecamatan di Kabupaten Tegal dengan jumlah penyandang disabilitas yang terbanyak berada di kecamatan Lebaksiu dibandingkan dengan kecamatan lainya yaitu sebesar 1180 Jiwa atau (9,54%) dan jumlah penyandang disabilitas terendah terdapat di kecamatan Dukuhwaru yaitu sebesar 462 Jiwa atau (3,73%) .

IV.1.3.5 Keadaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Tegal Berdasarkan Kelompok Usia

Tabel IV.6 Data Penyandang disabilitas di Kab.Tegal

No.	Kecamatan	Kelompok(USIA)								JML Total	Procentase (%)
		PENYANDANG DISABILITAS (JIWA)									
		≤ 15 th		15-44 th		45-59 th		≥60			
P	L	P	L	P	L	P	L				
1	MARGASARI	17	29	134	175	96	96	164	126	837	6,77
2	BUMIJAWA	25	38	90	122	43	48	59	67	492	3,98
3	BOJONG	25	42	88	125	54	58	108	85	585	4,74
4	BALAPULANG	38	37	182	231	73	92	190	126	969	7,83
5	PAGERBARANG	16	22	67	111	43	34	143	89	525	4,25
6	LEBAKSIU	26	48	196	282	118	157	187	166	1180	9,55
7	JATINEGARA	24	22	70	79	62	66	162	118	603	4,87
8	KEDUNG BANTENG	14	21	66	106	29	46	152	91	525	4,25
9	PANGKAH	29	46	158	236	98	114	173	122	976	7,89
10	SLAWI	19	23	89	130	38	62	61	44	466	3,77
11	DUKUHWARU	16	25	82	124	35	44	88	48	462	3,73
12	ADIWERNA	27	35	125	193	84	96	102	86	748	6,05
13	DUKUHTURI	29	29	127	168	66	75	63	63	620	5,03
14	TALANG	19	22	116	150	52	66	129	71	625	5,06
15	TARUB	33	41	132	222	87	112	168	123	918	7,42
16	KRAMAT	26	24	99	134	48	60	100	77	568	4,59
17	SURADADI	27	33	92	125	45	53	135	82	592	4,78
18	WARUREJA	33	33	115	143	35	79	116	116	670	5,44
	Jumlah	443	570	2028	2856	1106	1358	2300	1700	12361	
	Procentase	3,58	4,61	16,41	23,10	8,94	10,99	18,62	13,75	12361	100%
		8,19%		39,51%		19,93%		32,37%		100%	

Sumber: <http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran> diakses hari jumat 24 jan 2020 Pukul:16.05 dan Bappeda Litbang Kab Tegal (diolah peneliti pada januari tahun 2020)

Dari tabel IV.5 dapat disimpulkan bahwa jumlah penyandang di Kabupaten Tegal menurut Sumber: <http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran> sebanyak 12.361 Jiwa yang tersebar di 18 kecamatan dan dengan berdasarkan kelompok usia yang terbagi kedalam 4 kategori kelompok usia yaitu ≤ 15 tahun yang berjumlah 1013 Jiwa (8,19%) , kategori kelompok usia produktif yaitu 15-44 tahun yang berjumlah 4884 Jiwa (39,51%) ,kelompok usia paruhbaya 45-59 tahun sebanyak 2464 jiwa (19,93%) dan kelompok lanjut usia 4000 jiwa (32,37%) .

Penyandang disabilitas dengan kelompok usia paling dominan yaitu pada kelompok usia produktif 15-44 tahun dengan jumlah 4884 jiwa (39,51%) kelompok lanjut usia 4000 jiwa (32,37%) kelompok usia paruhbaya 45-59 tahun sebanyak 2464 jiwa (19,93%) kemudian disusul dengan kelompok usia ≤ 15 tahun yang berjumlah 1013 Jiwa (8,19%) .

Sementara demikian jumlah penyandang disabilitas tersebar di setiap kecamatan dengan jumlah terbanyak berada pada kecamatan lebaksiu dibandingkan kecamatan lainnya yaitu sebanyak 1180 jiwa atau 9,55% dan jumlah penyandang disabilitas terendah berada pada kecamatan dukuhwaru dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 462 jiwa atau 3,73%.

IV.1.3.6 Keadaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Disabilitasnya.

Tabel IV.7 Data Penyandang disabilitas di Kab.Tegal

No.	Kecamatan	Jenis-Jenis Disabilitas												JML
		Disabilitas Fisik									Disabilitas Non Fisik			
		Daksa	Netra	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Rungu wicara	Netra Daksa	TRW Netra	TRW Daksa	TRW Netra Daksa	Cacat Mental	Eks psikotik	Daksa Mental	
1	MARGASARI	147	157	130	48	38	36	9	14	16	125	48	84	852
2	BUMIJAWA	135	75	62	20	27	0	2	5	8	87	21	47	489
3	BOJONG	170	83	95	23	25	10	4	8	5	92	29	42	586
4	BALAPULANG	246	134	136	37	38	20	4	10	7	196	76	82	986
5	PAGERBARANG	81	78	104	34	14	7	6	9	14	96	20	66	529
6	LEBAKSU	280	145	225	48	28	12	15	15	8	240	77	87	1180
7	JATINEGARA	83	109	154	34	18	12	19	6	11	55	25	75	601
8	KEDUNG BANTENG	91	77	130	30	13	10	7	3	7	82	38	48	536
9	PANGKAH	245	131	112	41	28	20	8	21	11	223	84	79	1003
10	SLAWI	112	48	45	24	20	5	3	9	5	119	41	64	495
11	DUKUHWARU	84	62	45	28	17	6	2	7	4	122	62	36	475
12	ADIWERNA	167	96	72	28	19	9	9	4	12	177	55	132	780
13	DUKUHTURI	121	70	31	19	22	8	9	9	9	222	78	52	650
14	TALANG	123	103	78	29	19	6	9	16	3	176	47	36	645
15	TARUB	193	151	127	49	16	7	11	11	11	197	83	86	942
16	KRAMAT	159	96	51	24	30	11	7	5	3	118	46	49	599
17	SURADADI	138	96	84	22	24	14	12	6	10	113	24	80	623
18	WARUREJA	192	96	95	39	19	6	5	8	6	127	19	88	700
	Procentase	21,84	14,26	14,02	4,55	3,27	1,57	1,12	1,31	1,18	20,25	6,89	9,73	100%
	Jumlah Total	2767	1807	1776	577	415	199	141	166	150	2567	873	1233	12671

Sumber: <http://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/public/rekap-kabkota-proses>
diakses hari jumat 24 jan 2020 Pukul: 19.05 (diolah peneliti 2020)

Dari tabel IV.6 dapat disimpulkan bahwa jumlah penyandang di Kabupaten Tegal menurut Sumber: <http://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/public/rekap-kabkota-proses> berjumlah sebanyak 12.671 Jiwa yang tersebar di 18 kecamatan dan dengan berdasarkan jenis disabilitas . Di Kabupaten Tegal jumlah disabilitas dapat dilihat berdasarkan Jenis disabilitas yang terbagi menjadi dua yaitu disabilitas fisik dan non fisik, disabilitas fisik dapat dikategorikan kedalam 9 kategori yaitu: disabilitas daksa dengan jumlah 2767 jiwa (21,84%) disabilitas netra berjumlah 1807 jiwa (14,26%), disabilitas tuna rungu dengan jumlah 1776 jiwa (14,02%) , tuna wicara dengan jumlah 577 jiwa (4,55%),tuna rungu wicara dengan jumlah 415 (3,27%) , netra dan daksa dengan jumlah 199 jiwa (1,57%), tuna rungu wicara dan netra dengan jumlah 141 jiwa (1,12%)%, tuna rungu wicara dan daksa dengan jumlah 166 jiwa (1,31%), tuna rungu wicara netra dan daksa dengan jumlah 150 jiwa dan dapat disimpulkan bahwa jumlah penyandang disabilitas fisik yang terbagi dalam 9 kategori yaitu dengan jumlah 7988 jiwa (63,04%).

Sementara demikian penyandang disabilitas non fisik terbagi menjadi 3 kategori yaitu cacat mental,eks psikotik/trauma ,daksa dan cacat mental dengan penyandang disabilitas mental dengan jumlah 2567 jiwa (20,25%) Eks Psikotik/trauma dengan jumlah 873 jiwa (9,73%) dan penyandang disabilitas daksa dan cacat mental dengan jumlah 1233 jiwa (9,73%) kemudian dapat disimpulkan bahwa jumlah penyandang disabilitas non fisik adalah 4683 (36,96%). Dan dengan demikian jumlah penyandang disabilitas terbanyak berada pada kecamatan lebaksiu dibandingkan kecamatan lainnya yaitu sebanyak 1180 jiwa atau 9,31% dan jumlah penyandang disabilitas terendah berada pada kecamatan dukuhwaru dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 475 jiwa atau 3,74%.

IV.1.3.7 Daftar Penyandang Disabilitas Yang Menerima Pelayanan di UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal

Tabel.IV.8Pemberdayaan Disabilitas Melalui Pelatihan Ketrampilan/Keahlian

NO		Jenis Bantuan	Jumlah Penerima manfaat (jiwa)	Jenis Bantuan Peralatan	Outcome kemandirian membuka usaha/ bekerja pada swasta	Usaha Lainnya	Belum Mandiri Sepenuhnya
1.	Pemberdayaan	Pelatihan handycraft	80	-Peratan handy craft -Modal Usaha	16 Orang	125	503
		Membatik	95	-peralatan membatik -modal usaha	15 Orang		
		Tata Boga	80	-peralatan masak -modal usaha	4 Orang		
		Menjahit	148	-mesin jahit -modal usaha	49 Orang		
		Otomotif	80	-peralatan bengkel	12 Orang		
		Elektro	80	-peralatan Elektro	15 Orang		
		Service Hp	79	-peralatan service hp	15 Orang		
		Budidaya Jamur	65	-perlengkapan dan peralatan budidaya jamur	10 Orang		
		Sablon	65	Peralatan sablon	8 Orang		
	Jumlah		772		144	125	503
2.	Bantuan Lainnya	Bantuan UEP,UPSK, Layanan Kesehatan, SIM, KK/KTP, Alat Kesehatan	778	Bantuan UEP,UPSK, Layanan Kesehatan, SIM, KK/KTP, Alat Kesehatan	778		
	Jumlah Total		1550 Jiwa		922 Jiwa	125 Jiwa	503 Jiwa

Sumber; kajian akademis UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal 2017

Dari tabel IV.6 dapat disimpulkan bahwa jumlah penyandang di Kabupaten Tegal yang menerima pelayanan di UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal menurut *Sumber: kajian akademis UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal 2017* berjumlah sebanyak 1550 Jiwa yaitu dengan mendapatkan program pemberdayaan berupa pendidikan dan pelatihan dan bantuan peralatan ada sekitar 772 peserta sementara itu sebanyak 778 jiwa mendapatkan bantuan program lainya yaitu Bantuan UEP,UPSK,Layanan Kesehatan,SIM C/D ,KK/KTP,Alat Kesehatan (alat bantu gerak,alat bantu dengar dll) .

Sementara output hasil pemberdayaan (pendidikan ,pelatihan ,ketrampilan / keahlian dari 772 peserta pemberdayaan hanya ada 144 peserta (18,65%) yang berhasil mandiri dengan membuka usaha ataupun bekerja pada sektor swasta hasil dari pendidikan pelatihan ,ketrampilan / keahlian sementara 122 peserta (15,80%) berhasil membuka usaha lainya dan sebanyak 503 peserta (65,15%) belum sepenuhnya mandiri .

IV.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal, Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Program, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial.

IV.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Tegal

IV.2.2 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan perencanaan Dinas;
- b. Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Bina Program, Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Pembinaan terhadap UPTD dan institusi di bidang sosial;
- e. Pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sosial;

Berdasarkan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsinya, Jabatan struktural dalam Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Sosial

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Bina Program, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Jaminan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan dan penetapan perencanaan Dinas.
- b) Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dibidang Bina Program, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial , Asistensi dan Jaminan sosial.
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial.
- d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial.
- e) Pembinaan terhadap UPTD dan institusi di bidang sosial.
- f) Pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- g) Pengendalian, evaluasi dan pealporan pelaksanaan tugas di bidang sosial.

b. Uraian Tugas

- a) Menyusun dan menetapkan perencanaan kerja Dinas;
- b) Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Bina Program, Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial;
- c) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang sosial;
- d) Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
- e) Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
- f) Membina pengelolaan UPTD dan institusi di bidang sosial;
- g) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang sosial dan menyajikan alternatif pemecahannya;
- h) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

- i) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j) Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- k) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Tanggung Jawab

- a) Tersusunnya perencanaan Dinas.
- b) Terumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Bina Program, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial
- c) Terselenggaranya urusan pemerintah dibidang sosial
- d) Terbinanya pelaksanaan tugas pelayanan sosial
- e) Terbinanya pengelolaan UPTD dan institusi pelayanan sosial
- f) Terbinanya pengelolaan urusan kesekretariatan / ketatusahaan Dinas
- g) Terselenggaranya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang sosial
- h) Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas

2. Nama Jabatan: Sekretaris Dinas Sosial

a. Tugas dan Fungsi

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan

perencanaan, penata usahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut ,sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan rencana kerja
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan operasional kesekretariatan / ketatausahaan
- c) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Dinas
- d) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Bina Program, Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial
- e) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas
- g) Pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggara tugas Dinas
- h) Pengelolaan urusan keuangan , kepegawaian dan umum
- i) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan

b. Uraian Tugas

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ ketatausahaan;
- c) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan Dinas;
- d) Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Bina Program, Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, Asistensi dan Jaminan Sosial;

- e) Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f) Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- g) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- k) Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Tugas dan fungsi

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan.

b. Uraian Tugas

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
 - c) Melakukan pengelolaan anggaran Dinas
 - d) Melakukan pengelolaan perbendaharaan Dinas;
 - e) Melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Dinas;
 - f) Melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - g) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - h) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - i) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - j) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tanggung Jawab
- a) Tersedianya data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja
 - b) Tersedianya data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan dinas.
 - c) Terkelolanya keuangan dinas

- d) Terlaksananya pengendalian , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan
- e) Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas

4. Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan , kepegawaian ,rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

b. Uraian Tugas

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja
- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan
- c) Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- d) Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
- e) Melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- f) Mengelola dan menginventarisir Aset Dinas
- g) Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas protocol

5. Nama Jabatan: Kepala Bidang Bina Program

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Bidang Bina Program mempunyai Tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penyusunan program, pengelolaan data, monitoring dan evaluasi program.

b. Uraian tugas

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Program;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang bina program;
- c) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melaksanakan tugas pendataan;
- d) Mengelola data kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- e) Mengembangkan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
- f) Meningkatkan kualitas sumber daya kesejahteraan sosial;
- g) Menyusun pedoman dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program dinas;
- h) Menyusun laporan kinerja dinas;
- i) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya, dalam upaya meningkatkan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial;

- j) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keterhambatan pelaksanaan program dan menyajikan alternatif pemecahannya;
- k) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- l) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- m) Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Program dan Dinas;
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Nama Jabatan: Kepala Seksi Perencanaan , Monitoring dan Evaluasi Program Sosial

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Perencanaan , Monitoring dan Evaluasi Program Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Program dalam penyusunan program kesejahteraan sosial dinas dan pengembangan kualitas usaha kesejahteraan sosial.

b. Uraian Tugas

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan, monitoring dan evaluasi dinas;
- c) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi program Dinas;
- d) Melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan perencanaan program dinas;
- e) Melakukan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi;
- f) Melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi program dinas;
- g) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi program sosial serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

- j) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

7. Nama Jabatan: Kepala Seksi Pendataan dan Informasi

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Pendataan dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Program dalam pengelolaan data fakir miskin, PMKS dan PSKS serta mengembangkan sistem informasi.

b. Uraian Tugas

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pendataan dan informasi;
- c) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melaksanakan pendataan;
- d) Mengelola dan melakukan verifikasi serta validasi data fakir miskin, PMKS dan PSKS;

- e) Mengelola sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) melalui jaringan teknologi informasi;
- f) Mempublikasikan rencana dan hasil pelaksanaan program dinas;
- g) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pendataan dan informasi serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

8. Nama Jabatan: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS.

b. Uraian Tugas

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;

- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang rehabilitasi sosial ;
- d) Melaksanakan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti/lembaga;
- e) Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f) Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi usia lanjut;
- g) Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
- h) Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)
- i) Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks warga binaan, eks psikotik, korban perdagangan orang dan Korban tindak kekerasan;

- j) Melaksanakan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pekerja Seks Komersial (PSK), Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA;
- k) Melaksanakan fasilitasi adopsi/pengangkatan anak melalui pengadilan;
- l) Memfasilitasi penempatan ke balai/tempat penampungan atau persinggahan bagi PMKS;
- m) Memfasilitasi pelaksanaan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang;
- n) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya, dalam upaya meningkatkan rehabilitasi sosial;
- o) Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial;
- p) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- q) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- r) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

- s) Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Nama Jabatan: Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan usia lanjut.

b. Uraian Tugas

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang anak dan usia lanjut sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang anak dan usia lanjut sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c) Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut;

- d) Melaksanakan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut di dalam dan luar panti/lembaga
- e) Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f) Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan usia lanjut;
- g) Melakukan fasilitasi adopsi/pengangkatan anak melalui pengadilan;
- h) Melakukan fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan usia lanjut di lembaga kesejahteraan sosial;
- i) Melakukan penjangkauan dan visitasi bagi anak dan usia lanjut yang memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial;
- j) Melakukan penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut;
- k) Melakukan penelitian pengembangan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut;

- l) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- n) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- o) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

10. Nama Jabatan: Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dan Tuna Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dan Tuna Sosial mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data / informasi tentang penyandang disabilitas dan tuna sosial sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b) Penelaahan data / informasi penyandang disabilitas dan tuna sosial sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c) Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial.

b. Uraian Tugas

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang penyandang disabilitas dan tuna sosial sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang penyandang disabilitas dan tuna sosial sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c) Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna Sosial;
- d) Melaksanakan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial di dalam dan luar panti/lembaga;

- e) Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas;
- f) Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT);
- g) Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks warga binaan, eks psikotik, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;
- h) Melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pekerja Seks Komersial (PSK), Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan pengguna NAPZA;
- i) Melakukan penjangkauan dan visitasi bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial yang memerlukan pelayanan rehabilitasi sosial;
- j) Melakukan penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial;
- k) Melakukan penelitian pengembangan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna Sosial;
- l) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

- m) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - n) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - o) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - p) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- c. Tanggung Jawab
- a) Tersedianya data / informasi tentang penyandang disabilitas dan tuna sosial sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b) Tersedianya data / informasi tentang penyandang disabilitas dan tuna sosial sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - c) Terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial;
 - d) Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial;
 - e) Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

11. Nama Jabatan: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan pemberdayaan sosial bagi seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan / atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas dan adat terpencil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan pemberdayaan sosial;
- c) Pelaksanaan program bidang pemberdayaan sosial;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial.

b. Uraian Tugas

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat; .
- c) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan sosial ;

- d) Melaksanakan program pembinaan dan peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan potensi kesejahteraan sosial lainnya;
- e) Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan kelembagaan bagi Karang Taruna, Forum Dunia Usaha, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya;
- f) Melakukan pembinaan dan pengawasan pengumpulan uang dan barang;
- g) Melaksanakan pemberdayaan bagi pahlawan perintis kemerdekaan dan keluarganya;
- h) Melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, dan nilai-nilai sosial masyarakat.
- i) Melaksanakan pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- j) Melaksanakan pemberian rekomendasi ijin undian;
- k) Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan undian;
- l) Melaksanakan rekomendasi pemberian ijin operasional pendirian lembaga kesejahteraan sosial;
- m) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya, dalam upaya meningkatkan pelayanan pemberdayaan sosial;

- n) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - o) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - p) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - q) Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tanggung Jawab
- a) Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja ;
 - b) Tersedianya bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
 - c) Terlaksananya program bidang pemberdayaan sosial;
 - d) Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial;
 - e) Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

12. Nama Jabatan: Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelayanan pemberdayaan sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a) Penelaahan data / informasi tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data / informasi tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan dan pemberdayaan sosial;
- c) Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

b. Uraian Tugas

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial

sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan pemberdayaan sosial;

- c) Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan pemberdayaan sosial;
- d) Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan potensi kesejahteraan sosial lainnya;
- e) Melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan bagi Karang Taruna, Forum Dunia Usaha, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya;
- f) Melakukan pengembangan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial;
- g) Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian ijin operasional pendirian lembaga kesejahteraan sosial;
- h) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengumpulan uang dan barang
- i) Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian ijin undian;
- j) Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan undian;

- k) Menyiapkan penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- l) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- n) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- o) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

13. Nama Jabatan: Kepala Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, nilai-nilai sosial, komunitas adat dan lembaga adat.

b. Uraian Tugas

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, nilai-nilai sosial, komunitas adat dan lembaga adat;
- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
- d) Melakukan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai sosial;
- e) Melakukan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan lembaga adat;
- f) Melakukan pemberdayaan sosial bagi pahlawan perintis kemerdekaan dan keluarganya;
- g) Melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tegal;
- h) Menyiapkan data sebagai bahan pengusulan penghargaan kepada pemerintah bagi instansi/lembaga dan relawan sosial atas kepeduliannya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;

- i) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai sosial serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- j) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

14. Nama Jabatan : Kepala Bidang Asistensi dan Jaminan Sosial

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Bidang Asistensi dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan asistensi dan jaminan sosial;

b. Uraian Tugas

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional asistensi dan jaminan sosial;

- c) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan asistensi dan jaminan sosial;
- d) Melaksanakan program penanganan korban bencana, pendayagunaan Tagana dan relawan sosial pada saat tanggap darurat ;
- e) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melaksanakan tugas pendampingan;
- f) Melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian logistik bencana;
- g) Melaksanakan pendampingan sosial fakir miskin;
- h) Melaksanakan pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan bagi fakir miskin;
- i) Melaksanakan program jaminan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin;
- j) Melaksanakan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- k) Melaksanakan rekomendasi pemberian bantuan sosial bagi individu/kelompok/ masyarakat yang mengalami resiko sosial.
- l) Melaksanakan rekomendasi pembebasan biaya perawatan bagi keluarga miskin;

- m) Melaksanakan rekomendasi pemberian bantuan biaya hidup bagi penunggu pasien keluarga miskin;
- n) Melaksanakan rekomendasi pemberian bantuan transport bagi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan;
- o) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya, dalam upaya meningkatkan pelayanan asistensi dan jaminan sosial;
- p) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan asistensi dan jaminan sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- q) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- r) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- s) Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Nama Jabatan : Kepala Seksi Asistensi Sosial

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Asistensi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Asistensi dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan pelayanan asistensi sosial bagi fakir miskin dan kelompok rentan lainnya.

b. Uraian Tugas

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang program asistensi sosial sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan asistensi sosial;
- c) Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asistensi sosial;
- d) Melaksanakan penanganan dan relokasi korban bencana alam, non alam dan sosial;
- e) Melaksanakan pendayagunaan Tagana serta relawan sosial pada saat tanggap darurat;
- f) Melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian logistik bencana;
- g) Melaksanakan pemulihan trauma dan dukungan psikososial bagi korban bencana;

- h) Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian bantuan sosial bagi individu/kelompok/masyarakat yang mengalami resiko sosial;
- i) Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian rekomendasi pembebasan biaya perawatan bagi fakir miskin;
- j) Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian bantuan biaya hidup bagi penunggu pasien keluarga miskin;
- k) Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian bantuan transport bagi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan;
- l) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan asistensi sosial menyajikan alternatif pemecahannya;
- m) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- n) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- o) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

16. Nama Jabatan : Kepala Seksi Jaminan dan Perlindungan Sosial

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Jaminan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Asistensi dan Jaminan Sosial dalam

melaksanakan pelayanan jaminan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin.

b. Uraian Tugas

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi tentang jaminan dan perlindungan sosial fakir miskin sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan, jaminan dan perlindungan sosial fakir miskin;
- c) Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan dan perlindungan sosial fakir miskin;
- d) Melakukan pengendalian dan pengawasan pendamping PKH dalam melaksanakan tugas pendampingan;
- e) Melaksanakan bimbingan keterampilan dan pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi fakir miskin;
- f) Melaksanakan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- g) Melaksanakan kegiatan bantuan stimulan dan penataan lingkungan fakir miskin;

- h) Melaksanakan kegiatan jaminan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin;
- i) Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pemberian jaminan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin;
- j) Menyiapkan bahan sebagai pertimbangan pendampingan sosial bagi fakir miskin;
- k) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan jaminan dan perlindungan sosial fakir miskin serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- l) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- m) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- n) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

17. Nama Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya
(UPTD LBK)

a. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Kepala UPTD Loka Bina Karya yaitu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam melakukan pengelolaan Loka Bina Karya. Untuk melakukan tugas tersebut kepala UPTD LBK mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan kerja UPTD LBK
- b) Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan LBK
- c) Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas.
- d) Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD.
- e) Pengendalian ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD LBK.

b. Uraian Tugas

- a) Menyusun rencana kerja UPTD LBK
- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan LBK.
- c) Menyiapkan dan melaksanakan jadwal bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas.
- d) Melakukan penyiapan kebutuhan perangkat keras dan lunak pelatihan guna kelancaran penyelenggaraan latihan.
- e) Melakukan kunjungan/anjingsana pada tokoh masyarakat formal dan informal ,guna memperoleh dukungan dan kesepakatan

operasional penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas.

- f) Melakukan koordinasi ,hubungan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga terkait,organisasi sosial/LSM,dan dunia usaha dalam penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas ,yang akan dan/atau telah dibina di LBK.
- g) Melakukan bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas.
- h) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan berdasarkan tolak ukur keberhasilan pelatihan.
- i) Melakukan pengolahan data penyandang disabilitas sebagai bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di LBK.
- j) Melakukan penyiapan pelengkapan,yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan,penyaluran dan inventarisasi pemeliharaan sarana UPTD LBK.
- k) Melakukan pembinaan ketatausahaan UPTD.
- l) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan hubungan pengelolaan LBK,serta menyajikan alternatif pemecahannya.
- m) Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing.

- n) Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi ,dedikasi dan loyalitas bawahan.
 - o) Melakukan pengendalian,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - p) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tanggung Jawab
- a) Tersusunnya rencana kerja UPTD LBK,
 - b) Tersedianya data /informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan LBK.
 - c) Terlaksananya pelaksanaan bimbingan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas.
 - d) Terbinanya pengelolaan ketatausahaan UPTD
 - e) Terlaksananya pengendalian ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD LBK.
 - f) Terwujudnya keteraturan,kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

18. Nama Jabatan:Kelompok Jabatan Fungsional

a. Tugas Dan Fungsi

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas pokok membantu kepala UPTD dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja ,dan ketatausahaan UPTD.Untuk melaksanakan tugas

tersebut ,Kepala Sub Bagian tata usaha UPTD LBK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD.
 - b) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD.
 - c) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD.
 - d) Pengendalian ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha UPTD.
- b. Uraian Tugas
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja UPTD.
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD.
 - c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol UPTD.
 - d. Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian UPTD.
 - e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan UPTD.
 - f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan ketatausahaan UPTD ,serta menyajikan alternatif pemecahanya.
 - g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing.
 - h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi,dedikasi,dan loyalitas bawahan.

- i. Melakukan pengendalian ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tanggung Jawab
- a. Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja UPTD
 - b. Terlaksananya koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD.
 - c. Terlaksananya kegiatan ketatausahaan di UPTD.
 - d. Terlaksananya pengendalian ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha UPTD.
 - e. Terwujudnya keteraturan ,kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas

IV.2.3. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tegal didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 29 Karyawan yang terbagi pada Dinas Sosial sejumlah 27 pegawai, dan UPTD LBK Adiwerna 2 pegawai, sebagai Unit Teknis yang melaksanakan kegiatan pada peningkatan kualitas

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, khususnya Penyandang Cacat dengan kegiatan pelatihan ketrampilan. Adapun lebih rincinya mengenai pegawai Dinas Sosial maupun di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Karya (LBK) Adiwerna adalah sebagai berikut:

Tabel IV.9

Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tegal

URAIAN	JUMLAH	Persentase
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN		
a. SEKOLAH DASAR	1	3,45%
b. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	1	3,45%
c. SEKOLAH MENENGAH ATAS	6	20,68%
d. AHLI MADYA	3	10,34%
e. SARJANA (S1)	9	31,04%
f. PASCA SARJANA	9	31,04%
MENURUT GOLONGAN		
a. GOLONGAN I	2	6,90%
b. GOLONGAN II	5	17,24%
c. GOLONGAN III	13	44,83%
d. GOLONGAN IV	9	31,03%
MENURUT JENIS KELAMIN		
a. LAKI-LAKI	17	58,62%
b. PEREMPUAN	12	41,38%
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL		
a. STRUKTURAL	18	62,06%
b. FUNGSIONAL		%
JUMLAH	29	

Dari Tabel IV.6 diatas dapat diketahui pada tahun 2019 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah 29 orang. Dengan komposisi pegawai golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 13 orang dan Golongan IV sebanyak 9 orang.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan tamat SD sebanyak 1 orang, tamat SMP sebanyak 1 orang, dan tamat SMA sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk latar belakang tamat pendidikan Ahli Madya 3 orang latar belakang tamat pendidikan S1 berjumlah 9

orang dan S2 berjumlah 9 orang. Maka dapat disimpulkan jumlah pegawai dengan latar belakang S1 dan Pasca Sarjana adalah yang paling dominan.

Dari total pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tegal, tercatat jumlah pegawai laki-laki sebanyak 17 orang dan pegawai perempuan sebanyak 12 orang, yang artinya pegawai laki-laki jauh lebih mendominasi.

IV.2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial

Adapun Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya didukung dengan memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel IV.10
Sarana dan Prasarana Penunjang Monitoring
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial

Aset	Jumlah
Bangunan Kantor Dinas	1
Sepeda Motor	28
Komputer	15
Laptop	8
Printer	11
Wireless	1
Lemari Kayu	14
Filling Besi	31
Meja Kayu	38
Kursi Kayu	60
AC	16
Sound System	2 Set
Alat Tulis Kantor	Sesuai Kebutuhan

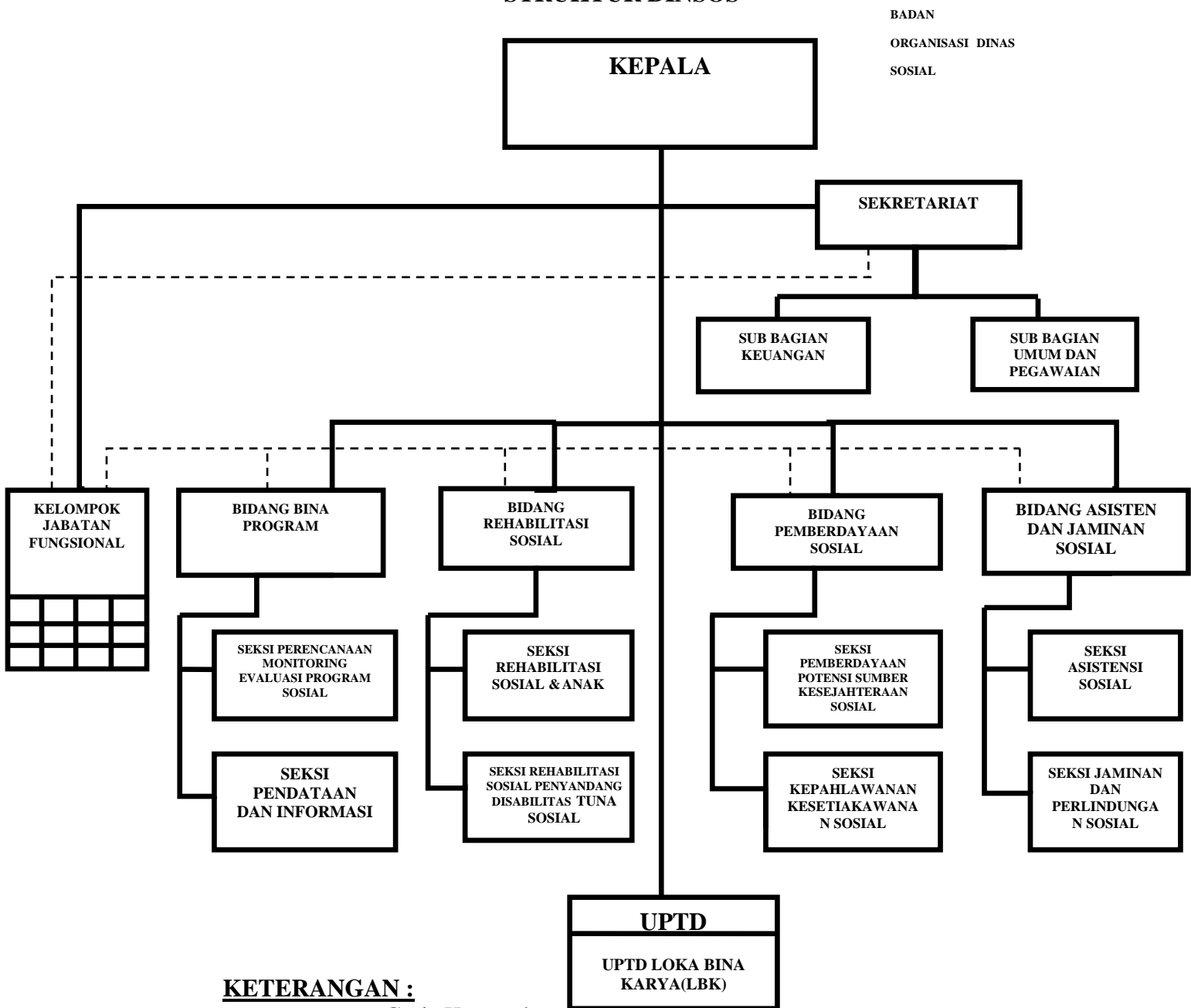
Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Tegal

Beberapa aset diatas sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi baik dalam hal pengumpulan data, pengelolaan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan sosial . Akan tetapi, alangkah baiknya jika Dinas Sosial Kabupaten Tegal membangun lagi sebuah ruang aula pertemuan yang luas untuk

menunjang proses pemberdayaan sosial masyarakat khususnya penyandang disabilitas.

IV.2.5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal

**BAGAN IV.1
STRUKTUR DINSOS**



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - -** : Garis Koordinasi

➤ **Keterangan Nama Perangkat (Bagan IV.1) :**

1. Kepala Dinas : Dra. Nurhayati, M.M
2. Sekretaris : Drs. Waudin, M.Si
3. Kasubag Keuangan: Tambah Anisah R ,SE
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian: Listiya
5. Kabid Bina Program: Wakri,S.Sos.,M.M
6. Kasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Sosial: Bambang Nurochman,S.ST
7. Kasi Pendataan dan Informasi: Sarwoko ,S.Psi
8. Kabid Rehabilitasi Sosial: Dra.Faticha,MM
9. Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia: Enny Handayani ,S.IP
10. Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial : -
11. Kabid Pemberdayaan Sosial: Yudi Kadarwati, S.H. M.M
12. Kasi Pemberdayaan Potensi dan Kesejahteraan Sosial: Joko Priono,S.ST, M.PSSp.
13. Kasi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial : Tobi'in, S.Pd, S.H
14. Kabid Asistensi dan Jaminan Sosial : Dra. Sus Heriningsih
15. Kepala Seksi Asistensi Sosial: Hero Saptowargo. BA
16. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial: Endang Puji H . S.Pd.M.MR.
17. Kepala UPTD Loka Bina Karya (LBK): Dra. Kris Fajar A, M.Pd
18. Kepala Sub Bagian Tata Usaha LBK: Mohamad Muklisiin S.ST

IV.3 Gambaran Umum UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal

Lokasi UPTD LBK terletak di Jl.Raya Selatan Banjaran Kecamatan Adiwerna Tegal Jawa Tengah 52194 . Loka Bina Karya (LBK) ialah sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS Khususnya penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan ketrampilan kerja agar mereka dapat melaksanakan fungsinya,dan mewujudkan kesamaan kesempatan disegala aspek kehidupan dalam masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati No.13 Tahun 2008 tanggal 5 juli 2008 tentang penjabaran tugas pokok,fungsi,tata kerja ,salah satu tugas fungsi Kepala UPTD dilingkungan dinasi sosial,kepala UPTD Loka Bina Karya memiliki tugas dan fungsi adalah melakukan bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS khususnya penyandang disabilitas.

IV.3.1 Visi dan Misi UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal

A.Visi

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui usaha bersama pemerintah dan masyarakat serta pelayanan sosial yang prima untuk menuju keadilan sosial .

B.Misi

1. Menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Mengembangkan pelayanan sosial dengan memberikan perhatian kepada masyarakat yang kurang beruntung.

4. Meningkatkan kualitas,efektifitas dan profesionalisme pelayanan dan kemandirian sosial dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi pegawai,karyawan dan staff LBK dibidang pelayanan kesosialan.

IV.3.2 Tugas dan Fungsi UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal

Berdasarkan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsinya ,Jabatan struktural dalam UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Loka Bina Karya

Tugas Pokok Kepala UPTD Loka Bina Karya yaitu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam melakukan pengelolaan Loka Bina Karya.Untuk melakukan tugas tersebut kepala UPTD LBK mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kerja UPTD LBK
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan LBK
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas.
- d. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD.
- e. Pengendalian ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD LBK.

A. Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana kerja UPTD LBK
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan LBK.
- c. Menyiapkan dan melaksanakan jadwal bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas.
- d. Melakukan penyiapan kebutuhan perangkat keras dan lunak pelatihan guna kelancaran penyelenggaraan latihan.
- e. Melakukan kunjungan/anjingsana pada tokoh masyarakat formal dan informal ,guna memperoleh dukungan dan kesepakatan operasional penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas.
- f. Melakukan koordinasi ,hubungan kerjasama da kemitraan dengan instansi/lembaga terkait, organisasi sosial/LSM, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas ,yang akan dan/atau telah dibina di LBK.
- g. Melakukan bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas.
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan berdasarkan tolak ukur keberhasilan pelatihan.

- i. Melakukan pengolahan data penyandang disabilitas sebagai bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di LBK.
- j. Melakukan penyiapan pelengkapan, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyaluran dan inventarisasi pemeliharaan sarana UPTD LBK.
- k. Melakukan pembinaan ketatausahaan UPTD.
- l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan hubungan pengelolaan LBK, serta menyajikan alternatif pemecahannya.
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing.
- n. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan.
- o. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tanggung Jawab:

- a. Tersusunnya rencana kerja UPTD LBK,
- b. Tersedianya data /informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan LBK.

- c. Terlaksananya pelaksanaan bimbingan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas.
- d. Terbinanya pengelolaan ketatausahaan UPTD
- e. Terlaksananya pengendalian ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD LBK.
- f. Terwujudnya keteraturan,kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD LBK.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas pokok membantu kepala UPTD dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja ,dan ketatausahaan UPTD.Untuk melaksanakan tugas tersebut ,Kepala Sub Bagian tata usaha UPTD LBK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD.
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD.
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD.
- d. Pengendalian ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha UPTD.

A. Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja UPTD.
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD.
- c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga,perlengkapan, humas dan protokol UPTD.

- d. Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian UPTD.
- e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan UPTD.
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan ketatausahaan UPTD ,serta menyajikan alternatif pemecahanya.
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing.
- h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi,dedikasi,dan loyalitas bawahan.
- i. Melakukan pengendalian ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tanggung Jawab:

- a. Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja UPTD
- b. Terlaksananya koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD.
- c. Terlaksananya kegiatan ketatausahaan di UPTD.
- d. Terlaksananya pengendalian ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha UPTD.
- e. Terwujudnya keteraturan ,kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas .

IV.3.3. Pegawai UPTD Loka Bina Karya

UPTD Loka Bina Karya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal .

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, UPTD Loka Bina Karya sebagai bagian dari Dinas Sosial UPTD dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang sosial.

Tabel IV.11
Pegawai UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal

URAIAN	JUMLAH	Persentase
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN		
SEKOLAH DASAR	2	28,58%
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	1	14,28%
SEKOLAH MENENGAH ATAS	1	14,28%
DIPLOMA I	-	-
DIPLOMA II	-	-
DIPLOMA III	-	-
STRATA I	2	28,57%
STRATA II	-	-
STRATA III	1	14,28%
MENURUT GOLONGAN		
GOLONGAN IV	1	14,28
GOLONGAN III	1	14,28%
GOLONGAN II		
GOLONGAN I	5	71,44%
THL (NON ASN)		
MENURUT JENIS KELAMIN		
LAKI-LAKI	6	85,72%
PEREMPUAN	1	14,28%
JUMLAH	7	100,00%

Sumber: UPTD Loka Bina Karya Kab.Tegal

Dari Tabel IV. dapat diketahui pada tahun 2019 Jumlah Pegawai UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal adalah 8 orang. Dengan komposisi pegawai golongan I tidak ada , golongan II tidak ada , golongan III sebanyak 1 orang dan Golongan IV sebanyak 1 orang serta pendamping disabilitas /THL (Non ASN) Sebanyak 5 orang

Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan tamat SD sebanyak 2 orang, tamat SMP sebanyak 1 orang , dan tamat SMA sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk latar belakang tamat pendidikan Diploma tidak ada, latar belakang tamat pendidikan S1 berjumlah 2 orang dan S2 berjumlah tidak ada serta untuk jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang. Maka dapat disimpulkan jumlah pegawai dengan latar belakang tamat S1 adalah yang terbanyak.

Dari total pegawai UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal, tercatat jumlah pegawai laki-laki sebanyak 7 orang dan pegawai perempuan sebanyak 1 orang, yang artinya pegawai laki-laki jauh lebih mendominasi.

IV.4 Sarana dan Prasarana Penunjang UPTD Loka Bina Karya

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS khususnya Penyandang disabilitas, UPTD Loka Bina Karya tidak terlepas dari sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan. Adapun sarana dan prasarans yang tersedia berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga pendamping THL .

Tabel IV.12
Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal

Aset	Jumlah
Bangunan Kantor UPTD	1
Bengkel Proteze	1
Peralatan Pelatihan	Sesuai Kebutuhan
Alat kesehatan ODK	Sesuai Kebutuhan
Perlengkapan Kantor dll	Sesuai Kebutuhan
Komputer	2
Laptop	-
Printer	2
Wireless	Ada
Lemari Kayu	3
Filling Besi	-
Meja Kayu	7
Kursi Kayu	1 Set
AC	-
Sound System	1 Set
Alat Tulis Kantor	Sesuai Kebutuhan

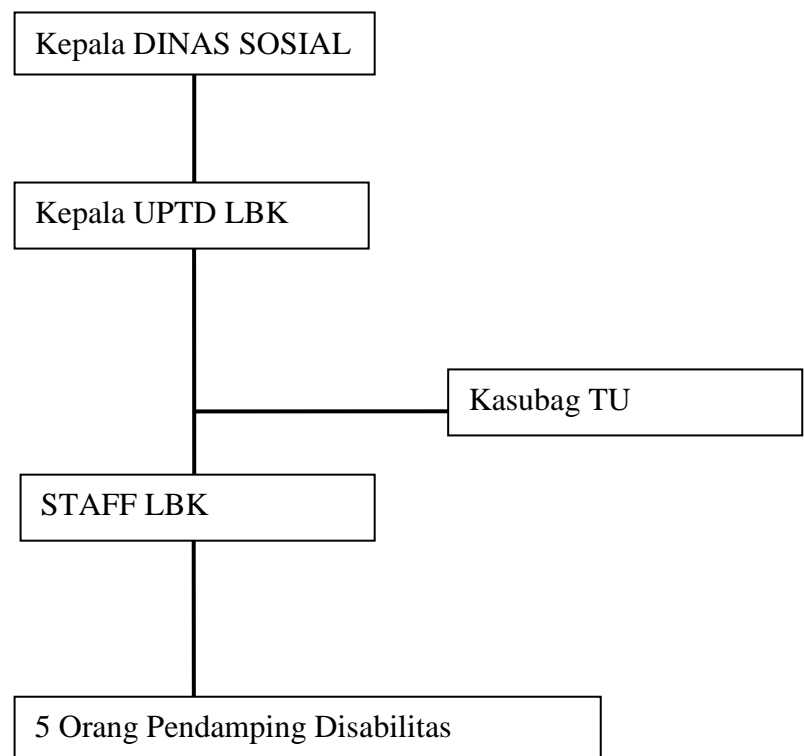
Sumber : UPTD Loka Bina Karya Kab. Tegal

Beberapa aset diatas sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pelatihan ketrampilan keahlian dan fasilitasi penran pedamping baik dalam hal pelayanan, pengumpulan data, pengelolaan, pelaporan serta pelaksanaan pembinaan dan perbaikan / pembuatan kaki palsu.

IV.4.1 Struktur Organisasi UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal

Berikut Struktur Organisasi UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal :

**BAGAN IV.2
STUKTUR UPTD LOKA BINA KARYA**



Sumber: Profil UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal Tahun 2020

Keterangan Nama Perangkat (Bagan IV.1) :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Kepala Dinas Sosial | : Dra Nurhayati MM |
| 2. Kepala UPTD LBK | : Dra Krisfajar Aryani M.Pd |
| 3. Kasubag TU | : Muhamad Mukhlisin SST |
| 4. Staff | : - |

5. Pendamping Disabilitas Wil I : Margi Hanur Cipto SE
6. Pendamping Disabilitas Wil II : Arif Triyono
7. Pendamping Disabilitas Wil III : Dede AP
8. Pendamping Disabilitas Wil IV : Indra Eravani
9. Pendamping Disabilitas Wil V : Ali Machmudin

IV.5 Gambaran Umum Difabel Slawi Mandiri (DSM) Kabupaten Tegal

DSM adalah sebuah Disable People Organization (DPO). DSM terbentuk pada tanggal 30 Desember 2010 atas fasilitas dari Program Pemberdayaan dan Advokasi Difabel yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM Solo).

DSM adalah kelompok difabel yang inklusi, karena anggotanya adalah dari difabel umum (daksa, netra, rungu wicara,ekstrauma) dan difabel dari orang yang pernah mengalami kusta di Kabupaten Tegal. Sampai saat ini anggota DSM ada 145 orang. Kesekretariatan DSM beralamatkan JL. Raya Selatan Banjaran KM 3 No. 21 Tembok Banjaran Adiwerna Kab.Tegal .

1.VISI dan Misi DSM Kabupten Tegal

Visi : Terwujudnya Kesetaraan Hak, Kemandirian dan Kesejahteraan Bagi Difabel.

Misi: Pemberdayaan difabel Memperjuangkan aksesibilitas Memperjuangkan Hak Politik Difabel Dalam Pemilu / Pemilukada ,Memperjuangkan Kebijakan dan Peraturan Daerah dan Nasional Yang Memperhatikan Hak – Hak Difabel.

2.Tujuan didirikanya DSM

- a) Membangkitkan semangat juang dan partisipasi aktif, khususnya kepada anggota DSM dan difabel/Orang Yang Pernah Mengalami Kusta yang lain di KabupatenTegal.
- b) Menyuarakan harapan – harapan anggota DSM khususnya dan difabel/OYPMK di Tegal pada umumnya kepada pemerintah sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan agar memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada difabel di Kabupaten Tegal dalam semua pelayanan dan program pembangunan di Kabupaten Tegal.
- c) Membangun kesadaran lebih luas tentang keberadaan dan kesetaraan hak Difabel.Memenuhi salah satu kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Advokasi Difabel.

3. Kegiatan DSM Kabupaten Tegal

- a) Pelatihan konsep diri dan motifasi diri : Melatih Difabel dan OYPMK untuk mengetahui persepsi terhadap diri individu sendiri baik yang bersifat fisik, sosial dan psikologis juga untuk mengetahui motivasi dari masing masing difabel dan OYPMK dalam kehidupan bermasyarakat
- b) Menjalin kerja sama dengan dinas atau lembaga terkait, terutama yang tergabung dalam forum peduli disabilitas (FPD) kab. Tegal.

- c) Advokasi Mandiri: Di tahun 2018 DSM Konsen melakukan kegiatan advokasi mandiri, dengan mengangkat isu yang berkembang di wilayah kabupaten tegal yaitu salah satunya tentang Difabel dan Kusta. DSM Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam Workshop dan Sosialisasi tentang Kusta dan pengurangan Stigma terhadap Difabel dan OYPMK di wilayah Masyarakat Desa.
- d) Peer conseling DSM sebagai sarana bagi anggota untuk sharing motivasi dan solusi dalam rangka memecahkan masalah baik pribadi, kesehatan maupun usaha. DSM juga Melakukan Kunjungan Monitoring ke rumah difabel dan OYPMK untuk memotivasi dan melakukan pendampingan.
- e) Pemberdayaan Difabel & OYPMK Melalui Pelatihan Keterampilan Difabel dan OYPMK dilibatkan dalam pelatihan keterampilan yang dilaksanakan di LBK maupun yang Kita Lakukan Di Desa. DSM juga mengusahakan agar adanya Pengalokasian dana Desa untuk pemberdayaan difabel dan OYPMK di masing masing desa sasaran program DSM

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya Kabupaten Tegal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian. Yang mana dalam penelitian deskriptif kualitatif peneliti memilih informan tidak pada besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan dengan memilih orang-orang yang kompeten serta mengetahui bagaimana permasalahan yang ada dalam penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan dari para pembaca.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya Kabupaten Tegal dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas menuju kemandirian ,mendeskripsikan kendala dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas menuju kemandirian, mendeskripsikan solusi yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan dalam pemberdayaan disabilitas tersebut.

Maka dengan adanya penelitian ini untuk mencapai tujuan dari penelitian diatas sebagai aspek untuk mengukur sejauh mana peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas ialah melalui pokok-pokok penelitian yang berjumlah 5 pokok-pokok penelitian yang terdiri dari peran UPTD Loka Bina Karya diantaranya peran fasilitator, broker, mediator, pembela dan pelindung pokok penelitian diatas dimaksudkan untuk melihat sejauh mana

peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, karena peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas sehingga dengan adanya hal itu dapat dikatakan pula mereka memperhatikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Untuk menganalisa hasil dari penelitian “Peran UPTD Loka Bina Karya Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas menggunakan instrumen angket/kuesioner tertutup dengan jumlah responden sebanyak 75 responden yaitu masyarakat penyandang disabilitas. Angket/kuesioner yang dibagikan kepada responden terdiri dari 65 pertanyaan dan pernyataan dengan ketentuan skor (nilai) sebagai berikut:

Skor 5 bila responden menjawab A (Sangat Memuaskan)

Skor 4 bila responden menjawab B (Memuaskan)

Skor 3 bila responden menjawab C (Biasa Saja)

Skor 2 bila responden menjawab D (Kurang Memuaskan)

Skor 1 bila responden menjawab E (Tidak Memuaskan)

Dan untuk melengkapi data yang diperlukan sebagai hasil dari penelitian, diambil pula data melalui teknik wawancara mendalam (Indept Interview) kepada informan yang tahu banyak mengenai penelitian yang dilakukan. Analisis data yang digunakan adalah rentang skala untuk menjawab tentang bagaimana peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Data-data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan rentang skala untuk mengetahui hasil dari kinerja peran pendamping disabilitas maka penulis menggunakan rumus:

$$\text{Rentang Skala (RS)} = \frac{n(m-1)}{m}$$

(Sumber : Sugiyono, 2011:99)

Dimana : N = Jumlah Sampel

M = Jumlah alternative tiap jawaban item

Untuk mengawali laporan hasil penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan identitas responden sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD Loka Bina Karya dengan mengambil data responden 75 anggota masyarakat disabilitas yang tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas DSM(Difabel Slawi Mandiri) yang bertempat disekretariat UPTD Loka Bina Karya . Pemilihan lokasi tersebut karena organisasi tersebut menjadi wadah bagi penyandang disabilitas di Kabuptaen Tegal untuk memperjuangkan hak-haknya,mempunyai kepentingan yang sama dalam mewujudkan pelayanan yang aksesible,inklusi tanpa diskriminasi.

Responden penelitian ini terdiri atas 75 responden yang dipilih secara acak dengan populasi masyarakat penyandang disabilitas yang di DSM(Difable Slawi Mandiri). Dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari kuesioner maka diambil pula informan yang diambil dari teknik wawancara yang berjumlah 6 informan.

Informan yang diambil yaitu dari pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya yaitu :

1. Drs.Kris Fajar A.MPd Sebagai Kepala UPTD Loka Bina Karya
2. Margi Hanur Cipto ,SE sebagai Pendamping Wilayah I
3. Arif Triyono Sebagai Pendamping Disabilitas Wilayah II

4. Dede A.P Sebagai Pendamping Disabilitas Wilayah III
5. Ali Machmudin Sebagai Pendamping Disabilitas Wilayah V
6. Firmansyah Sebagai Wakil Ketua DSM (Difabel Slawi Mandiri)

Informan tersebut adalah selaku pendamping disabilitas yang melaksanakan tugas lapangan dan mengetahui banyak mengenai program-program pemberdayaan di UPTD Loka Bina Karya, situasi dan keadaan penyandang disabilitas yang peneliti ambil dan yang paling mengetahui tentang permasalahan penyandang disabilitas kusta.

V.1 Hasil Penelitian

Dibawah ini adalah hasil data 75 sampel responden yang diperoleh dari kuesioner adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin Responden

Tabel V.01

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	30	40%
2.	Perempuan	45	60%
Total		75	100 %

Sumber : Identitas responden pada kuesioner Desember tahun 2020

Melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 35 responden atau 46,67 % dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 40 responden atau 53,33 % dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 75 yang mengikuti pemberdayaan di UPTD

Loka Bina Karya. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat selisih sedikit diantara laki-laki dengan perempuan didalam angket 75 responden.

b. Usia Responden

Tabel V.02
Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase (%)
1.	17 - 22 Tahun	12	16 %
2.	22 - 49 Tahun	45	60 %
3.	50 Tahun Keatas	18	24 %
Total		75	100 %

Sumber : Identitas responden pada kuesioner tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui terdapat 12 responden yang masuk dalam kategori dewasa muda / remaja yang berusia 17-22 tahun dengan prosentase sebesar 16 %, 45 responden yang masuk dalam kategori dewasa yang berusia 22-49 tahun dengan prosentasi 60 %, dan 18 responden yang masuk dalam kategori orang tua yang berusia 50 tahun ke atas dengan prosentase sebesar 24 %. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan rata-rata responden yang pernah mengikuti pemberdayaan di UPTD Loka Bina Karya berusia 22-49 tahun atau masuk dalam kategori dewasa atau usia produktif yang diperoleh prosentase sebesar 60 %.

c. Mata Pencaharian / Profesi Responden

Tabel V.03

Responden Berdasarkan Mata Pencaharian / Profesi

No	Mata Pencaharian / Profesi	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Pelajar/Mahasiswa	9	12 %
2.	Wira swasta/usaha/menjahit	30	40 %
3.	Pegawai Negeri Sipil	-	-
4.	Pegawai Swasta	-	-
5.	Ibu Rumah Tangga	21	28 %
6.	Lain-lain	15	20 %
Total		75	100 %

Sumber : Identitas responden pada kuesioner tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 9 responden yang bermata pencaharian/berprofesi sebagai Pelajar/Mahasiswa dengan prosentase sebesar 12 %, 21 responden yang bermata pencaharian/berprofesi sebagai Wiraswasta/usaha dengan prosentase 28 %, 30 responden yang bermata pencaharian/berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga dengan prosentase sebesar 40 %, 15 responden yang bermata pencaharian/berprofesi Lain-lain dengan prosentasi sebesar 12 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden yang pernah mengikuti pelatihan di UPTD loka Bina Karya yaitu bermata pencaharian / berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga sebesar 40 % dan disusul dengan Wiraswasta sebanyak 21 responden dengan prosentase 28 %, 15 responden yang bermata pencaharian/berprofesi Lain-lain dengan jumlah prosentase sebesar 20 % dan sebagian kecil Pelajar/Mahasiswa sebanyak 9 responden dengan prosentase sebesar 12 %.

Dalam hasil penelitian ini ada beberapa aspek yang dijadikan sebagai alat ukur terkait Peran UPTD Loka Bina Kabupaten Tegal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Menuju Kemandirian yang meliputi:

1. Peran fasilitator yang terdiri dari 46 buah pertanyaan
 - a. Fasilitasi Progam Pemberdayaan terdiri dari 10 Pertanyaan
 - b. Fasilitasi UPSK terdiri dari 6 Pertanyaan
 - c. Fasilitasi UEP terdiri dari 7 Pertanyaan
 - d. Fasilitasi untuk mendapatkan pelayanan E-KTP/KK dan SIM 5 Pertanyaan
 - e. Fasilitasi pelayanan kesehatan(kusta) 5 pertanyaan
 - f. Pendampingan 7 Pertanyaan
 - g. Motivasi dan bibingan 6 Pertanyaan
2. Peran sebagai Broker yang terdiri dari 13 buah pertanyaan
 - a. Identifikasi dan pemecah masalah 3 buah pertanyaan.
 - b. Linking 2 buah pertanyaan
 - c. Goods and Sevices 3 Pertanyaan
 - d. Quality Control 2 Pertanyaan
 - e. Assesment kebutuhan Disabilitas 2 pertanyaan
 - f. Ketrampilan Membangun Konsorsium 1 pertanyaan
3. Peran sebagai mediator yang terdiri dari 2 pertanyaan
4. Peran sebagai pembela yang terdiri dari 2 pertanyaan
5. Peran sebagai pelindung yang terdiri dari 2 pertanyaan

Dari hasil kuesioner diperkuat juga dari beberapa pertanyaan dari hasil interview kepada informan.

Aspek-aspek diatas dapat dipahami sebagai sebuah aspek dalam mengukur tingkat peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas menuju kemandirian yaitu sebagai wujud peran petugas di UPTD Loka Bina karya dalam mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas oleh penyandang disabilitas. Karena itu dalam peran UPTD Loka Bina Karya diukur dari 5 aspek peran pendamping diatas, keseluruhan aspek pengukuran peran tersebut, dijabarkan dalam 65 buah pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban yang berperingkat dari pertanyaan sangat positif (skor 5) sampai dengan sangat negatif (skor 1).

Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan aspek tersebut menggunakan tabel satu-persatu beserta hasil pertanyaan yang telah diolah sebagai berikut :

1. Fasilitator

Aspek Peranan “fasilitator” sering disebut sebagai “pemungkin” (enabler) tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya. Indikator item pertanyaan:

a. Fasilitasi Program Pemberdayaan

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada responden; Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang adanya program pemberdayaan disabilitas yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya?

hasil jawaban sebagai berikut:

Tabel V.04
“Pengetahuan Program Pemberdayaan Disabilitas”
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mengetahui	6	30	8%
2.	Mengetahui	15	60	20%
3.	Ragu-ragu	30	90	40%
4	Kurang mengetahui	15	30	20%
5	Tidak mengetahui	9	9	12%
Jumlah		75	219	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019“Fasilitasi Program Pemberdayaan” nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah menentukan sikapnya dengan memilih 5 alternatif jawaban yaitu Responden yang memilih Sangat Mengetahui yaitu 6 orang atau sebesar 8 %, responden yang memilih jawaban mengetahui 15 orang atau sebesar 20% yang memilih ragu-ragu mengetahui 30 orang atau sebesar 40%, kurang mengetahui yaitu 15 orang atau sebesar 20 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mengetahui sama sekali yaitu 9 orang atau sebesar 12%.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang adanya program pemberdayaan disabilitas dapat diketahui oleh penyandang disabilitas sehingga pemberitahuan tentang adanya program pemberdayaan

disabilitas yang disediakan dapat memberikan dampak pengetahuan tentang adanya program pemberdayaan masyarakat disabilitas. Hal ini ditunjang dengan hasil wawancara dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah dimaksud dengan program pemberdayaan penyandang disabilitas?apakah penyandang disabilitas banyak yang mengetahui tentang adanya program pemberdayaan tersebut?

Bapak Margi Hanur,S.E Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 14 Januari 2019 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan :difabel itu adalah orang yang berpendidikan rendah kita beri pelayanan di bidang pendidikan agar bisa setara dengan ..dengan umum walaupun dengan sistem kejar paket ..

Peneliti :termasuk dalam pemberian program pemberdayaan Pak..?

Informan :..termasuk program pemberdayaan ,pendidikan, program pemberdayaan pemberdayaan ini adalah pemberdayaan agar Mandiri ,mampu bersaing dengan masyarakat harus diberikan pelatihan-pelatihan disini tidak hanya difabel diberikan pelatihan sesuai program udah selesai tidak.. akan tetapi.. diberikan pelatihan. agar bisa bermanfaat agar pelatihan itu ada gunanya agar pelatihan itu mempunyai efek mempunyai akibat itu akhirnya memiliki kegiatan usaha dari hasil pelatihnnya untuk menciptakan kemandirian nya dengan kata lain bahwa tujuan dari pada pelatihan pemberdayaan tersebut adalah untuk meningkatkan SDM sumber daya manusia sumber daya manusia khususnya disabilitas ...”

Peneliti :Terima kasih Pak atas penjelasan tersebut yang saya tanyakan kembali Apakah semua difabel mengerti Pak tentang adanya program pemberdayaan disabilitas ?

Informan:kaitannya dengan sosialisasi terhadap pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Tegal harapannya ke depan bahwa disabilitas di Kabupaten Tegal itu bisa bisa terlayani semua secara berproses karena bertahap yang melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal itu tidak bisa memberdayakan secara serentak itu sudah ada plafon anggaran per tahun agar bisa apa bisa yang membutuhkan pelatihan di Kabupaten Tegal sesuai dengan minat bakat gratis terkait dengan hal ini banyak difabel yang belum mengerti tentang program pemberdayaan di LPK ya Pak belum mengetahui Dari 12 ribu sekian mungkin ya yang sudah mengerti

itu yang sudah tahu adanya program pemerintah pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Tegal itu mungkin gambarnya ya sekitaran angka 20%.... jadi program pemberdayaan disabilitas ada yang tahu tapi belum banyak sehingga sudah menjadi tugas kita semua untuk memberikan penerangan memberikan sosialisasi apa yang harus mereka lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara informan, bahwa Loka Bina Karya sudah mensosialisasikan program pemberdayaan sehingga dapat diketahui oleh sebagian penyandang disabilitas. Sehingga perlu disosialisasikan lebih lanjut agar pengetahuan tentang program pemberdayaan dapat diketahui oleh semua penyandang disabilitas dan dapat dikatakan peran UPTD Loka Bina Karya sudah melaksanakan sosialisasi program dengan cukup baik.

Pertanyaan kedua yang diajukan kepada responden; Apakah Bapak/Ibu/Saudara dapat berpartisipasi dalam program Pemberdayaan Disabilitas yang disediakan Oleh UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.05
Partisipasi Disabilitas Dalam Pemberdayaan
Frekuensi Jawaban Responden

No	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu Berpartisipasi	3	15	4%
2.	Pernah berpartisipasi	18	72	24%
3.	Kadang-kadang	33	99	44%
4	Jarang	9	18	12%
5	Tidak Pernah	12	12	16%
Jumlah		75	216	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Program Pemberdayaan” nomor 2 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden yang telah menentukan sikapnya tentang partisipasi disabilitas dalam mengikuti program pemberdayaan dengan memilih 5 alternatif jawaban disediakan yaitu Responden yang memilih selalu berpartisipasi yaitu 3 orang atau sebesar 4 %, responden yang memilih jawaban pernah berpartisipasi mengikuti 18 orang atau sebesar 24% yang memilih kadang-kadang 33 orang atau sebesar 44%, Jarang yaitu 9 orang atau sebesar 12 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah berpartisipasi yaitu 12 orang atau sebesar 16%.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam program pemberdayaan . Sebagian besar penyandang disabilitas berpartisipasi program tersebut , Sehingga dapat dikatakan peran petugas sebagai fasilitator dalam memfasilitasi peserta pemberdayaan disabilitas dapat dikatakan cukup baik . Hal ini ditunjang dengan hasil wawancara dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah sejauh mana penyandang disabilitas dilibatkan dalam program pemberdayaan pelatihan ketrampilan penyandang disabilitas? bagaimana tanggapan bapak mengenai peserta yang sering mengikuti pelatihan?

Bapak Margi Hanur C, S.E Selaku Pendamping Disabilitas UPTD

Loka Bina Karya pada tanggal 14 Januari 2019 mengatakan:

***Informan;**“Difabel Yang belum tertentu jumlahnya masih sangat banyak masih sangat banyak berarti memprioritaskan yang belum pernah , Sudah pernah mengikuti terus diikuti lagi itu mungkin gambaran dari minoritas. responden karena mereka yang minoritas itu belum tahu persis poksi dari tugas kami stempel dari kepala dinas sosial kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal untuk disabilitas itu harus merata jadi seluruh disabilitas di*

Kabupaten Tegal yang belum tersentuh itu harus bisa mendapatkan pelayanan di LBK

Peneliti ;terkait dengan hal ini banyak di fabel yang belum mengerti tentang program pemberdayaan di LBK ya Pak belum mengetahui?
Informan; Dari 12 ribu sekian mungkin ya yang sudah mengerti itu yang sudah tahu adanya program pemerintah pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Tegal itu mungkin gambarnya ya hanya angka 20% dari 20 peserta.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa, partisipasi penyandang disabilitas yang mengikuti pogram pemberdayaan diprioritaskan untuk yang belum pernah mengikuti pemberdayaan , pemberdayaan disabilitas sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirianya.

Pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan untuk responden ;Apakah Bpk/Ibu/Saudara mengetahui mekanisme untuk mendapatkan program pemberdayaan disabilitas yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.06
Pengetahuan Mekanisme Mendapatkan Program
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat Mengetahui	6	30	8%
2.	Mengetahui	15	60	20%
3.	Ragu-ragu	24	72	32%
4	Kurang Mengetahui	12	24	16%
5	Tidak Mengetahui	18	18	24%
Jumlah		75	204	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Program Pemberdayaan” nomor 3 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Sangat Mengetahui yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban mengetahui 15

orang atau sebesar 20% yang memilih ragu-ragu mengetahui 24 orang atau sebesar 32%, kurang mengetahui yaitu 12 orang atau sebesar 16 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mengetahui yaitu 18 orang atau sebesar 24%. Sehingga dapat dikatakan pengetahuan mekanisme untuk mendapatkan program dikategorikan.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa tentang mekanisme untuk mendapatkan program pemberdayaan disabilitas dapat diketahui oleh penyandang disabilitas sehingga dapat dikatakan pengetahuan mekanisme yang disampaikan oleh petugas pendamping untuk mengakses program pemberdayaan disabilitas dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini ditunjang dengan hasil wawancara dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah bagaimanakah mekanisme dalam memberikan program pemberdayaan disabilitas ? apakah calon peserta mengetahui langkah-langkah dalam mendapatkan pemberdayaan di UPTD Loka Bina Karya?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan jawaban Informan

Peneliti : *Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan program pemberdayaan disabilitas?."*

Informan :*" mekanismenya yaitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di lbk (pemberdayaan) dengan mengumpulkan persyaratan yang diperlukan diantaranya seperti fotokopi KTP, KK calon peserta untuk dimasukkan dalam form peserta ."*

Peneliti: *" apakah sejauh ini calon peserta dapat mengetahui tentang langkah-langkah pemberdayaan ? ."*

Informan: *" sejauh ini untuk difabel yang kurang aktif dilingkungan masyarakat tidak dapat mengetahui langkah-langkah tersebut ."*

Bapak Margi Hanur C,S.E Selaku Pendamping Disabilitas UPTD

Loka Bina Karya pada tanggal 14 Januari 2020 mengatakan:

***Peneliti** :terkait mekanisme Pak bagaimana sih mekanisme UPTD Loka Bina Karya Dalam memberikan program pemberdayaan kepada penyandang disabilitas. Apakah apa namanya si peserta calon pemberdayaan itu tahu langkah-langkah untuk mendapatkan program pemberdayaan pak?*

***Informan**: “ diantara calon peserta itu tidak tahu persis sehingga sudah menjadi tugas pendamping untuk memberikan penerangan memberikan sosialisasi tentang langkah-langkah tersebut gambaran pertama adalah pendataan setelah itu ada assesment terhadap minat bakat disabilitas nanti kan ketahuan bahwa disabilitas itu punya keunggulan apa ,minat bakatnya dimana yang harus di Salurkan yang harus kita advokasi yang harus kita usulkan itu gambaran-gambaran dari dari prosedur yang ada setelah kita data setelah kita assesment, kita ajukan kepada kepala UPTD kaitannya dengan program-program pelatihan di mana program pelatihan tersebut disesuaikan dengan program pelatihan yang ada di LBK dari anggaran Pemda Kabupaten Tegal setiap tahun”*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa ada pengetahuan mengenai mekanisme mendapatkan program pemberdayaan disabilitas banyak diantara peserta yang tidak tahu persis dan dapat dikatakan pemahaman mekanisme dalam mendapatkan pemberdayaan dapat dikatakan cukup baik dan yang mengetahui langkah-langkah dalam mendapatkan pemberdayaan hanya disabilitas yang aktif dilingkungan saja yang sering mengetahui langkah-langkah untuk mendapatkan pemberdayaan tersebut.Karena pengetahuan mekanisme untuk mendapatkan pogram sangat penting agar disabilitas dapat mendapatkan program pemberdayaan.

Pertanyaan keempat yang diajukan koresponden; Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang adanya sosialisasi yang diberikan oleh petugas pendamping UPTD Loka Bina Karya sebelum pemberdayaan pelatihan ketrampilan/keahlian diselenggarakan?

Tabel V.07
Sosialisasi Program Pemberdayaan Disabilitas
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu Ada	6	30	8%
2.	Sering	15	60	20%
3.	Kadang –kadang	24	72	32%
4	Jarang Ada	12	24	16%
5	Tidak Pernah	18	18	24%
Jumlah		75	204	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Program Pemberdayaan ” nomor 4 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu ada sosialisasi yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 15 orang atau sebesar 20% yang memilih ada kalanya dilakukan sosialisasi 24 orang atau sebesar 32%, jarang ada sosialisasi yaitu 12 orang atau sebesar 16 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 18 orang atau sebesar 24%. Dengan demikian 75 responden menyatakan bahwa sosialisasi program pemberdayaan disabilitas telah disampaikan ,dan dapat tersampaikan dengan cukup baik.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi program telah didapatkan oleh penyandang disabilitas sebelum mengikuti program pemberdayaan berupa pelatihan/keahliam dan sosialisasi sudah dilakukan oleh petugas pendamping disabilitas jika dikaitkan dengan peran petugas sebagai

fasilitator maka dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjang dengan hasil wawancara dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah ada sosialisasi yang dilakukan petugas pendamping sebelum program pemberdayaan dilakukan? Kemudian Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan“

Informan :*“memang ada sosialisasi saat sebelum dilaksanakannya pemberdayaan tetapi melalui grup sosmed khusus pendamping untuk memberikan informasi kepada seluruh pendamping difabel tegal, untuk memberitahukan kepada setiap desa bahwa akan diadakanya kegiatan .”*

Peneliti: *“ Bagaimana cara memberikan sosialisasi pada penyandang disabilitas? .”*

Informan : *“ Dengan cara kita selalu berkoordinasi dengan pihak RT maupun pihak desa, untuk meminta ijin dari pihak desa kemudian ke pihak RT agar dapat memebrikan data calon peserta yang akan di ikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan tersebut .”*

Kemudian Bapak Margi Hanur C,S.E Selaku Pendamping Disabilitas

UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 14 Januari 2020 mengatakan:

Informan: *“Sosialisasi itu selalu dilaksanakan secara berproses setiap tahun tetapi bukan hanya setiap tahun tugas kami pendamping adalah pendataan 1. Pemetaan 2. Pendataan 3. Asesmen pengajuan data disabilitas sesuai dengan minat bakat Nya kepada kepala UPTD LBK ini gambaran-gambaran terkait di sini kan tadi disampaikan pendataan itu secara berproses bukan setiap tahun ada setiap hari setiap Minggu setiap bulan secara berproses yang tidak bisa disebutkan kapan waktunya tetapi disela-sela tugas pendampingan kita akan melakukan pendataan di dalamnya pendataan terkandung sosialisasi tentang pelayanan yang ada di LBK,tentang informasi-informasi yang kaitanya dengan pelayanan-pelayanan disabilitas kabupaten tegal.”*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai sosialisasi program pemberdayaan disabilitas telah dilakukan oleh petugas pendamping dan didalam sela-sela melakukan sosialisasi petugas pendamping

juga melakukan pendataan ,pemetaan ,asesmen pengajuan data disabilitas sesuai dengan minat bakatnya.

Pertanyaan kelima yang peneliti ajukan kepada responden;Apakah rentang waktu yang diberikan mencukupi dalam pelaksanaan program pemberdayaan pelatihan ketrampilan / Keahlian ?

Tabel V.08
Rentang Waktu Program Pemberdayaan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu Mencukupi	6	30	4%
2.	Sering Mencukupi	15	60	20%
3.	Kadang-Kadang	24	72	32%
4	Jarang Mencukupi	12	24	16%
5	Tidak Mencukupi	18	18	24%
		75	204	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Program Pemberdayaan” nomor 5 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya terkait dengan rentang waktu yang dibeikan dalam pemberdayaan terdapat 5 alternatif jawaban dan 75 responden memberikan jawaban sebagai berikut selalu mencukupi yaitu 6 orang atau sebesar 4%, responden yang memilih jawaban sering mencukupi 15 orang atau sebesar 20% yang memilih kadang-kadang 24 orang atau sebesar 32%, jarang mencukupi yaitu 12 orang atau sebesar 16%, dan responden yang memilih jawaban tidak mencukupi sama sekali yaitu 18 orang atau sebesar 24% . Dapat disimpulkan bahwa ada rentang waktu yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya dalamj memberikan pemberdayaan disabilitas.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa tentang rentang waktu yang disediakan dalam program pemberdayaan kadang kala dapat mencukupi , sehingga peserta cukup memahami proses pemberdayaan yang diperolehnya dan jika dikaitkan dengan peran petugas pendamping sebagai fasilitator maka dalam hal ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan berapa lama rentang waktu yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya dalam memberikan program pemberdayaan disabilitas?apakah mencukupi?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan “rentang waktunya adalah selama satu bulan untuk pelatihan-pelatihan, kadang juga untuk penyaluran ke pihak penyedia setelah diberdayakan dan ada juga dari pihak lbk mengajukan peserta yang telah mengikuti pelatihan tersebut ke perusahaan yang ada di kabupaten tegal “ saya dulu sebagai alumni yang mengikuti pelatihan program di LBK sejak tahun 1996 .”

Peneliti: “ kemudian dahulu untuk rentang waktunya berapa lama? .”

Informan: “dahulu rentang waktunya sampai 3 bulan 90 hari itupun mendapatkan alat pelatihan program seperti mesin jahit dll, lalu untuk waktu rentang yang sekarang hanya 1 bulan .“

Peneliti: “ Kira-kira menurut anda sebagai pendamping disabilitas, untuk disabilitas sendiri apakah waktunya mencukupi atau tidak dalam mengikuti program pelatihan tersebut? .”

Informan; menurut saya kalau difabelnya sudah mempunyai dasar ,saya kira waktunya sangat mencukupi untuk mengikuti pelatihan tersebut, tetapi kalau yang tidak mempunyai dasar sama sekali waktunya tidak mencukupi

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai rentang waktu dalam proses pemberdayaan disabilitas adakalanya mencukupi jika

penyandang disabilitas sudah mempunyai dasar sebelumnya dan tidak mencukupi jika penyandang disabilitas tidak mempunyai dasar sama sekali .

Pertanyaan keenam yang peneliti ajukan kepada responden yaitu: “Apakah setelah mendapatkan Program Pemberdayaan ada perubahan dalam kemandiriaan anda?

Tabel V.09
Output Program Pemberdayaan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu Ada	6	30	8%
2.	Sering	15	60	20%
3.	Ragu-ragu	24	72	32%
4	Jarang	12	24	16%
5	Tidak Pernah	18	18	24%
Jumlah		75	204	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Program Pemberdayaan” nomor 6 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu ada yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 15 orang atau sebesar 20% yang memilih ada kalanya 24 orang atau sebesar 32%, jarang yaitu 12 orang atau sebesar 16 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada perubahan sama sekalai yaitu 18 orang atau sebesar 24%.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa setelah mendapatkan pemberdayaan kadang kala penyandang disabilitas mengalami perubahan dalam kehidupan berupa kemandirian setelah mendapatkan program pemberdayaan ,maka ouput program pemberdayaan yang dicapai dapat dikatakan belum sepenuhnya merubah tingkat kemandirian penyandang disabilitas dan jika

dikaitkan dengan peran petugas pendamping sebagai fasilitator maka dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah Selaku pendamping disabilitas menurut anda apakah setelah mendapatkan pemberdayaan disabilitas ada perubahan dalam kemandirian penyandang disabilitas?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan “menurut saya difabel untuk menuju kemandirian sangat susah, makanya fungsi untuk memberdayakanya di loka itu terbiasa mendapatkan modal untuk alat dan modal usaha lalu disini peran pendamping untuk memonitoring kegiatan-kegiatan setelah mengikuti pelatihan itu agar dapat berkembang dengan modal yang telah didapatkan

Peneliti: “ setelah diberdayakan rata-rata berapa orang peserta yang mengikutinya?.”

Informan: “ banyaknya peserta yang mengikutinya rata-rata mencapai 20 orang, setiap pendamping ada 6 orang yang masing-masing memegang 4 orang peserta difabel.”

Peneliti: “ Dari 20 peserta tersebut, berapakah prosentase tingkat kemandirian setelah diberdayakan? .”

Informan: “ dari tingkat kemandirian disini tidak dapat diukur dengan prosentase , tetapi kira-kira bisa mencapai 40 % sebab difabel itu beragam ada yang berpendidikan dan ada tidak berpendidikan, jadi dalam mengukur kemandirian dapat dilihat dari pendidikan dimana dapat mengembangkan diri atau tidak.”

Bapak Margi Hanur C, SE Selaku Pendamping Disabilitas UPTD

Loka Bina Karya pada tanggal 14 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan dan Jawaban Peneliti dan informan

Informan ;Akhirnya telah mengikuti pelatihan memilih kegiatan usaha yang mandiri yang tadinya mereka Itu modalnya kecil setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah 5 juta misal mereka yang tadinya tidak memiliki peralatan airnya memiliki peralatan yang tadinya pendapatannya kecil memiliki pendapatan besar yang tadinya mereka

ekonomi mereka itu bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi disabilitas itu ukuran-ukuran dari tingkat keberhasilan tidak pintar.

Adapun mereka yang dagang disabilitas yang mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan akan tetapi hasil dari pelatihan tersebut tidak dipakai udah dipakai malah memakai usaha kegiatan lain. yang tidak jelas titik dipindah memiliki keterampilan keterampilan menjahit Karena ini ada mungkin satu hambatan di keluarga kita enggak tahu.

hasil dari pelatihan menjahit tersebut tidak dipakai karena mereka tuh dalam kegiatannya lain yang serabutan.

Peneliti; *berarti tidak konsisten dalam hasil itu ya Pak setelah pelatihan tidak mengembangkan gitu ya pak?*

Informan; *karena pengaruh masyarakat pengaruh kehidupan karena mereka tidak konsisten pemerintah sudah memberikan peluang agar mereka itu punya kegiatan mandiri untuk menjahit tetapi nyatanya keahlian menjahit tersebut tidak digunakan akhirnya menjadi adanya adalah pekerjaan serabutan.*

Peneliti: *berarti kalau misalnya dalam pemberdayaan yang diadakan di LBK itu biasanya sekali pemberdayaan itu berapa orang?*

Informan: *20 orangitu kalau 20 orang tersebut mengikuti pelatihan yang berhasil Mandiri dan membuka usaha dan pengembangan usahanya itu kira-kira 15 sampai 18%*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai perubahan dalam kemandirian disabilitas setelah mendapatkan pemberdayaan tingkat keberhasilan dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil dikarenakan output dari hasil pemberdayaan yang tidak lebih dari 40% tingkat keberhasilan hal ini disebabkan oleh faktor penyandang disabilitas itu sendiri tingkat kekonsistenan mengikuti pemberdayaan dan juga pelatihan yang telah diikuti belum sepenuhnya digunakan untuk mewujudkan kemandirianya .

Pertanyaan ketujuh yang diajukan ke reponden;Menurut Bapak / Ibu /Saudara ,Apakah setelah mendapatkan program pemberdayaan di UPTD Loka Bina Karya ada keberlanjutan dari program yang diberikan?

Tabel V.10
Keberlanjutan Program Setelah Pemberdayaan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu Ada	6	30	8%
2.	Sering	12	48	16%
3.	Kadang-Kadang	27	81	36%
4.	Jarang	15	30	20%
5.	Tidak Pernah	15	15	20%
Jumlah		75	204	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Program Pemberdayaan ” nomor 7 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu ada yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 12 orang atau sebesar 16% yang memilih kadang-kadang 27 orang atau sebesar 36%, jarang yaitu 15 orang atau sebesar 20 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 15 orang atau sebesar 20%. Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa ada keberlanjutan setelah program pem berdayaan ,keberlanjutan program kadang kala diberikan oleh petugas pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya jika dikaitkan dengan peranan petugas pendamping sebagai fasilitator maka bisa dikatakan cukup baik dalam menindak lanjuti program yang sudah diberikan dalam artian keberlanjutan program kadang kala diberikan oleh petugas pendamping.

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah “apakah ada tindak lanjut setelah program pemberdayaan pendidikan pelatihan ketrampilan diberikan?jika ada seperti apa tindak lanjutnya”?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

***Jawaban Informan** “. “ seperti tadi ada yang membuka usaha sendiri, ada yang membentuk kube, ada yang bekerja di konveksi, dan ada juga yang diperusahaan. Maka tetap ada tindak lanjut dari pendamping setelah itu dengan memonitoring selama 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali kerumah difabel masing-masing untuk melihat perkembangan difabel tersebut. Tindak lanjut dari pelatihan tadi setelah mereka mengikuti pelatihan-pelatihan di lbk, otomatis mereka akan membutuhkan penambahan alat ataupun modal usaha disini peran aktif dari program UEP yaitu disaat teman-teman membutuhkan penambahan modal ataupun alat itu biasanya dari pendamping mengusahakan untuk mengakses bantuan UEP untuk penyandang disabilitas yang mengalami kendala di peralatan maupun permodalan”*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa setelah diberikan pemberdayaan penyandang disabilitas kadang kala mendapatkan tindak lanjut dari petugas pendamping setelah pemberdayaan dilakukan seperti penambahan alat yang mengalami kendala diperalatan usaha dan bantuan modal yang mengalami kendala dalam permodalan dalam usaha hasil dari pemberdayaan. jika dikaitkan dengan peranan petugas pendamping sebagai fasilitator maka bisa dikatakan cukup baik dalam keberlanjutan program.

Pertanyaan kedelapan yang diajukan untuk responden Menurut bapak/ibu/saudara ;Apakah ada hambatan yang dialami dalam mendapatkan pemberdayaan pelatihan ketrampilan /Keahlian,?

Tabel V.11
Hambatan Dalam Program Pemberdayaan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	9	45	12%
2.	Sering	15	60	20%
3.	Kadang-kadang	21	63	28%
4	Jarang	18	36	24 %
5	Tidak Pernah	12	12	16%
Jumlah		75	216	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Program Pemberdayaan” nomor 8 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Selalu ada hambatan yaitu 9 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih sering ada hambatan 15 orang atau sebesar 20% yang memilih kadang-kadang mengalami hambatan 21 orang atau sebesar 28%, Jarang ada hambatan yaitu 18 orang atau sebesar 24 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah mengalami hambatan yaitu 12 orang atau sebesar 16%.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa hambatan dalam mendapatkan dan mengikuti program pemberdayaan dapat dialami oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan pemberdayaan sehingga dapat dikatakan mereka sudah terbiasa mengalami hambatan tersebut. Dan jika dikaitkan dengan peran petugas pendamping sebagai fasilitator dalam meminimalisir hambatan maka bisa dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah hambatan apa saja yang dihadapi petugas dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas di UPTD Loka Bina Karya?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan: “hambatannya peserta difabel yaitu diantaranya dari lingkungan, orang tua, difabel sendiri dan dari keluarga. Tetapi hambatan paling utama adalah keluarga karena ada yang keluarganya merasa malu karena kondisi fisik dari salah satu keluarga merupakan difabel kemudian pada difabelnya juga ada karena merasa kurang percaya diri, merasa malu dan tidak ingin ditemui oleh seseorang, tidak bisa diajak berkomunikasi. Maka pendamping berusaha memotivasi pada ketiga hambatan tersebut agar dapat keluar dari zona ketidakberdayaan.”

Peneliti: “ bagaimana cara mengatasi kendala dalam hambatan tersebut?

Informan: “ kita koordinasikan dengan pihak desa terlebih dahulu dengan meminta pendampingan dari RT, RW setempat setelah itu RT, RW tersebut ikut memotivasi keluarga difabel dan juga difabelnya itu sendiri. Jadi kendala hambatan setelah itu peserta kebingungan cara mengembangkan pelatihan yang diterapkan di lbk ini ,sehingga peran pendamping itu sangat penting setelah peserta mengikuti pelatihan, makanya diadakanya monitoring secara berkala dan juga motivasi pada difabel tersebut .”

Bapak Margi Hanur C, SE Selaku Pendamping Disabilitas UPTD

Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan

Informan “nuansa negatif yang dimiliki oleh disabilitas luar menyatakan bahwa disabilitas itu bodoh karena karena tidak mengenyam pendidikan kurangnya peran keluarga dalam memberikan motivasi dan semangat terhadap disabilitas kenapa keluarga kurang berperan memberikan motivasi untuk kemajuan di sekitar tersebut ini mohon maaf ada stigma negatif dari orang tua kita. stigma negatif orang tua malu orang tua malu memiliki anak disabilitas sehingga disabilitas tersebut selalu dikurung di rumah tidak boleh keluar rumah ini gambaran nyata” . jadi kendala difabel nya itu yang lagi bilang itu seperti tidak kekonsistenan dalam mengembangkan hasil pemberdayaan ini pak apa namanya kira-kira ada faktor lain yang menyebabkan apa pemberdayaan itu hasil pemberdayaan itu dikembangkan oleh difabel gitu ini keberhasilan tadi udah sekarang ketidakberhasilan kenapa di LBK tapi tidak berhasil mewujudkan

kemandirian ya satu pertama tapi tidak konsisten setengah pemerintah memberikan memberdayakan Mereka ternyata hasil keterampilannya tidak dipakai Kenapa tidak dipakai karena mereka itu tidak layak Kenapa tidak layak karena mereka tidak mampu Kenapa tidak mampu contoh? mengikuti pelatihan menjahit pelatihan menjahit misalnya 1 bulan peserta menjahit itu selama 30 hari harus berangkat semua harus berangkat Terus ternyata hari pertama mereka datang hari kedua datang ketika datang hari keempat nggak datang nyampe seminggu yang datang mereka bisa mendapatkan ilmu ini ini ini tingkat ya kedisiplinan dari disabilitas sendiri tingkat kemauan disabilitas itu sendiri rubah itu kan jelas-jelas mereka seperti tidak niat. Ada alasan sakit lah ada Alasan istrinya nggak rela ada alasan.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai hambatan program pemberdayaan disabilitas dapat dialami oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan pemberdayaan yaitu ada pada stigma diri, keluarga, dan lingkungan. Sementara itu hambatan setelah pemberdayaan dilaksanakan ialah itu peserta kebingungan cara mengembangkan pelatihan yang sudah diberikan oleh UPTD Loka Bina Karya.

Pertanyaan nomor sembilan yang diajukan ke responden Menurut Bapak/Ibu/Saudara ; Apakah ada evaluasi program yang dilakukan oleh petugas pendamping dalam memberikan pemberdayaan disabilitas?

Tabel V.12

Evaluasi Program Pemberdayaan

Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	9	45	12%
2.	Sering	15	60	20%
3.	Kadang-Kadang	27	81	36%
4	Jarang	18	36	24%
5	Tidak Pernah	6	6	8%
Jumlah		75	228	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Program Pemberdayaan ” nomor 9 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Selalu ada evaluasi yaitu 9 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih jawaban Sering ada evaluasi 15 orang atau sebesar 20% yang memilih ada kalanya melakukan evaluasi 27 orang atau sebesar 36%, Jarang ada evaluasi yaitu 18 orang atau sebesar 24 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mengetahui sama sekali yaitu 6 orang atau sebesar 8%. Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa evaluasi biasa dilakukan oleh petugas pendamping. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah ada evaluasi yang dilakukan petugas pendamping setelah memfasilitasi program pemberdayaan penyandang disabilitas ?bagaimana evaluasi tersebut dilakukan ?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina

Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

***Jawaban Informan 1:** “ untuk evaluasinya setiap kegiatan lbk atau kegiatan pendamping setelah pelatihan itu, biasanya dari pihak lbk ada monitoring ke peserta ingin mengetahui sejauh mana perkembangan usahanya dan menanyakan tentang kendala atau permasalahan apa yang menghambat produk usahanya , pendamping biasanya memberikan motivasi agar bangkit, jangan cepat menyerah dan jangan cepat terpuruk jadi istilahnya usaha tetap dilanjutkan.”*

Bapak Margi Hanur C, SE Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina

Karya pada tanggal 14 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

***Peneliti :** ... itu berarti monev (monitoring dan evaluasi)itu seberapa sering dilakukan pak dalam tempo 1 bulan itu berapa kali?*

***Informan 2** : “jumlah disabilitas kabupaten tegal yang sudah kita berdayakan oleh LBK itu jumlahnya banyak secara berproses kita itu melakukan monet kadang kita pendamping setiap bulan kita Mantau bahkan telah telatnya per 3 bulan kita memantau yang jelas setiap bulan kita akan mengunjungi disabilitas-disabilitas yang pernah mengikuti pelatihan*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai evaluasi program yang dilakukan oleh petugas pendamping biasa dilakukan setelah kegiatan program pemberdayaan dilakukan dan kadang kala petugas pendamping melakukan monev(monitoring dan evaluasi) secara bertahap. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari pemberdayaan diberikan,output,hambatan-hambatan yang dialami .

Pertanyaan kesepuluh yang diajukan kepada responden :Ketika ada ide atau pendapat terkait proses pemberdayaan apakah anda dapat menyampaikan masukan, kritik dan saran kepada petugas pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.13
Penyampaian Masukan ,Kritik Saran pemberdayaan disabilitas
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	9	45	12%
2.	Sering	12	48	16%
3.	Kadang-kadang	24	72	32%
4	Jarang	18	36	24%
5	Tidak Pernah	12	12	16%
Jumlah		75	213	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Program Pemberdayaan ” nomor 10 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Selalu yaitu 9 orang atau sebesar 12%, sering yaitu 12 orang atau sebesar 16% yang memilih kadang-kadang yaitu 24 orang atau sebesar 32%, jarang yaitu 18 orang atau sebesar 20%, dan responden yang tidak pernah sama sekali memberi kritik dan saran yaitu 12 orang atau sebesar 16%. Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa responden cukup mampu dalam memberikan masukan, kritik atau ide dalam pemberdayaan disabilitas sementara itu sebagian jarang dan tidak pernah menyampaikan ide, kritik dikarenakan mereka belum sepenuhnya pernah mengikuti program pemberdayaan yang disediakan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan peran sebagai fasilitator dikatakan cukup baik dalam menampung kritik saran dan masukan penyandang disabilitas. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah untuk proses setelah pemberdayaan apakah peserta pelatihan dapat menyampaikan ide kritik saran dan masukan terkait program pemberdayaan?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

*Jawaban **Informan** “jadi disini masuk ke fungsi peran pendamping dimana bertugas tidak hanya memonitoring dan memotivasi tetapi juga dapat menerima saran dan keluhan-keluhan dari semua penyandang disabilitas yang mengikuti di lbk dan para pendamping dapat memberikan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah penyandang disabilitas. Lalu keluhan dan saran-saran tersebut dapat disampaikan di grup whatshap pendamping.”*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa penyandang disabilitas dapat memberikan ide masukan kritik terkait program pemberdayaan, setelah menerima aspirasi tersebut kemudian dapat disampaikan kedalam media komunikasi seperti whatsapp group pendamping. Dalam hal ini petugas pendamping terbuka menerima masukan, saran, kritik yang disampaikan penyandang disabilitas.

b. Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling

Pertanyaan pertama yang diajukan koresponden terkait Fasilitasi UPSK; Apakah Anda mengetahui tentang adanya Unit Pelayanan Sosial Keliling yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.14
Pengetahuan Tentang Program UPSK
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat Mengetahui	6	30	8%
2.	Mengetahui	12	48	16%
3.	Ragu-ragu	21	63	28%
4	Kurang Mengetahui	15	30	20%
5	Tidak Mengetahui	21	21	28%
Jumlah		75	192	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling ” nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Sangat Mengetahui yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban mengetahui 12 orang atau sebesar 16% yang memilih ragu-ragu 21 orang atau sebesar 28%,

kurang mengetahui yaitu 15 orang atau sebesar 20 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mengetahui yaitu 21 orang atau sebesar 28%.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang adanya program fasilitasi Unit pelayanan sosial keliling belum sepenuhnya diketahui oleh penyandang disabilitas dengan demikian peran Sebagai fasilitator terkait pelayanan UPSK bisa dikatakan belum sepenuhnya maksimal. Hal di ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan ; Apa yang dimaksud dengan fasilitasi unit pelayanan sosial keliling? seberapa jauh penyandang disabilitas mengetahui adanya program tersebut?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan:

Peneliti: “ Apakah yang dimaksud dengan fasilitas unit sosial keliling? .”

Informan: “fasilitas unit sosial keliling yaitu mencari informasi tentang adanya landasan disabilitas dimana petugas UPSK mengaksesmen difabel tersebut untuk dipertanyakan kebutuhan difabel apa saja agar dapat diajukan kepada dinas sosial.”

Peneliti : “ apa sajakah bentuk unit sosial keliling pada disabilitas? .”

Informan:“ bentuk unit sosial keliling yaitu memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di dinas sosial maupun di LBK.” penyandang disabilitas sekarang dapat mengetahui adanya petugas UPSK , lalu untuk para difabel ada yang dapat mengetahui adanya UPSK ada yang tidak karena kurangnya pergaulan terhadap lingkungan masyarakat.”

Bapak Arief Triono selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Informan; pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di Kabupaten Tegal itu ada upsk ini kita kerjasama melalui dinas sosial dan melalui Dinas Sosial provinsi itu juga kami sudah melakukan unit pelayanan keliling Kecamatan itu biasanya

programnya adalah memberikan bantuan bantuan dalam ini adalah bantuan Alkes alat kesehatan contohnya atau katrok Walker kaki palsu Terus Yang bantuan yang selanjutnya adalah panduan rujukan misalkan rujukan rehabilitasi medik ataupun rehabilitasi kaitanya dengan pelatihan keterampilan

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai pengetahuan tentang adanya fasilitasi unit pelayanan sosial keliling belum banyak diketahui oleh penyandang disabilitas dan bisa disimpulkan bahwa tidak semua penyandang disabilitas mengetahui tentang adanya layanan tersebut.

Pertanyaan kedua yang diajukan kepada responden;Apakah anda pernah berpartisipasi dalam Unit Pelayanan Sosial Keliling yang disediakan Oleh UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.15
Partisipasi Dalam program UPSK
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu berpartisipasi	6	30	8%
2.	Sering berpartisipasi	12	48	16%
3.	Ragu-ragu	21	63	28%
4	Jarang	9	18	12%
5	Tidak Pernah	27	27	36%
Jumlah		75	186	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling ” nomor 2 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 12 orang atau sebesar 16% yang memilih ada kalanya mengetahui 21 orang atau sebesar 28%, jarang yaitu 9 orang atau sebesar 18 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah mengetahui sama sekala yaitu 27 orang atau sebesar 36%.

Dari hasil kuesioner diatas dapat disimpulkan bahwa program UPSK belum sepenuhnya didapatkan dan diketahui oleh penyandang disabilitas sehingga fasilitasi yang diberikan hanya beberapa saja yang mengetahui tentang adanya fasilitasi pelayanan tersebut. Jika dikaitkan dengan peran petugas sebagai fasilitator dalam memfasilitasi pelayanan sosial keliling maka bisa dikatakan belum sepenuhnya maksimal dikarenakan banyak penyandang disabilitas yang kurang mengetahui adanya layanan tersebut. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah sejauh mana penyandang disabilitas berpartisipasi dalam program UPSK?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina

Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan; “disini UPSK juga memilih difabel yang produktif dan non produktif dimana arti dari non produktif itu usia dari 40 th ke bawah dan yang produktif itu usia yang 30 th ke atas, dan biasanya UPSK dan penyandang disabilitas itu sama-sama memilih usia yang produktif untuk diberdayakan di dinas sosial dan lbk . bentuk unit sosial keliling yaitu memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di dinas sosial maupun di lbk.” penyandang disabilitas sekarang dapat mengetahui adanya petugas UPSK , lalu untuk para difabel ada yang dapat mengetahui adanya UPSK, ada yang tidak karena kurangnya pergaulan terhadap lingkungan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai keterlibatan penyandang disabilitas dalam mendapatkan fasilitasi UPSK dan dapat disimpulkan yang pernah mendapatkan fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling hanya sebagian kecil saja dan bagi yang belum mendapatkannya dikarenakan kurang pengetahuan penyandang disabilitas terkait adanya program tersebut.

Pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan kepada responden; Apakah Anda mengetahui tentang mekanisme mendapatkan fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling yang diberikan oleh UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.16
Pengetahuan Mekanisme Mendapatkan UPSK
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mengetahui	6	30	8%
2.	Mengetahui	12	48	16%
3.	Ragu-ragu	21	63	28%
4	Kurang mengetahui	9	18	12%
5	Tidak mengetahui	27	27	36%
Jumlah		75	186	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling” nomor 3 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Sangat Mengetahui yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban mengetahui 12 orang atau sebesar 16% yang memilih ragu-ragu 21 orang atau sebesar 28%, kurang mengetahui yaitu 9 orang atau sebesar 12 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mengetahui yaitu 27 orang atau sebesar 36%. Dapat disimpulkan bahwa adanya mekanisme untuk mendapatkan program UPSK

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang adanya mekanisme mendapatkan program fasilitasi UPSK belum sepenuhnya diketahui oleh penyandang disabilitas sehingga dapat dikatakan pengetahuan tentang mekanisme atau langkah langkah untuk mengakses program UPSK masih minim Jika dikaitkan dengan peran sebagai fasilitator maka bisa dikatakan belum

sepenuhnya baik dikarenakan partisipasi penyandang disabilitas dalam mendapatkan fasilitasi UPSK masih rendah disebabkan karena kurangnya pengetahuan program .Hal ini ditunang dengan wawancara informan sebagai berikut.

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah bagaimana mekanisme atau langkah dalam memberikan program fasilitasi UPSK ? apakah calon peserta mengetahui mekanisme untuk mendapatkan program tersebut?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

*Jawaban **Informan** “bentuk unit sosial keliling yaitu memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di dinas sosial maupun di lbk.” penyandang disabilitas sekarang dapat mengetahui adanya petugas UPSK , lalu untuk para difabel ada yang dapat mengetahui adanya UPSK, ada yang tidak karena kurangnya pergaulan terhadap lingkungan masyarakat.”*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai pengetahuan mekanisme penyandang disabilitas dalam mendapatkan fasilitasi UPSK dan dapat disimpulkan yang pernah mendapatkan fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling hanya sebagian kecil saja dan bagi yang belum mendapatkannya dikarenakan kurang pengetahuan penyandang disabilitas terkait adanya program tersebut. Maka dalam hal ini peran pendamping belum sepenuhnya baik dalam memberikan pengetahuan tentang mekanisme pelayanan UPSK.

Pertanyaan keempat yang diajukan kepada responden terkait fasilitasi UPSK; Menurut Bpk/Ibu /Sdr Adakah tindak lanjut setelah program Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial diberikan?

Tabel V.17
Tindak Lanjut Program UPSK
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	12	60	16%
2.	Sering	6	24	8%
3.	Kadang-kadang	21	63	28%
4	Jarang	6	12	8%
5	Tidak Tahu	30	30	40%
Jumlah		75	189	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling ” nomor 4 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Selalu ada tindak lanjut yaitu 12 orang atau sebesar 16%, responden yang memilih jawaban sering ada tindak lanjutnya 6 orang atau sebesar 8% yang memilih ada kalanya 21 orang atau sebesar 28%, jarang ada tindak lanjutnya yaitu 6 orang atau sebesar 12 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mengetahui tindak lanjutnya yaitu 30 orang atau sebesar 40%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden penyandang disabilitas memberikan anggapan bahwa ada tindak lanjut setelah progrm UPSK diberikan .

Dari hasil kuesioner diatas dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut program UPSK disabilitas belum sepenuhnya ada tindak lanjut fasilitasi program UPSK hal ini ada korelasinya dengan tingkat pengetahuan tentang adanya program tersebut yang masih minim sehingga peran petugas pendamping sangat diperlukan

dalam fasilitasi UPSK. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah ada tindak lanjut setelah program UPSK diberikan? lalu seperti apa tindak lanjutnya?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

*Jawaban **Informan** setelah adanya fasilitasi UPSK yang kemudian dipilah-pilah buat calon peserta difabel ,langkah dari setiap tindakan UPSK untuk mengikuti pelatihan ,disini UPSK juga memilih difabel yang produktif dan non produktif dimana arti dari non produktif itu usia dari 40 th ke atas dan yang produktif itu usia yang 40 th kebawah, dan biasanya UPSK dan penyandang disabilitas itu sama-sama memilih usia yang produktif untuk diberdayakan di dinas sosial dan lbk”.*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai tindak lanjut dari fasilitasi pelayanan UPSK kadang kala penyandang disabilitas mendapatkan tindak lanjut untuk diikut sertakan pelatihan .yaitu memilih penyandang disabilitas yang usia produktif untuk diikut sertakan kedalam pelatihan ketrampilan /keahlian atau program pemberdayaan.

Pertanyaan kelima yang peneliti ajukan kepada responden ; Menurut Bapak/Ibu/Saudara ,Apakah ada hambatan ketika anda mengakses Unit Pelayanan Sosial Keliling?

Tabel V.18
Hambatan Program UPSK
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	12	60	16%
2.	Sering	6	24	8%
3.	Kadang-Kadang	21	63	28%
4.	Jarang	6	12	8%
5.	Tidak Tahu	30	30	40%
Jumlah		75	189	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling” nomor 5 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu ada hambatan yaitu 30 orang atau sebesar 40%, responden yang memilih jawaban sering ada hambatan 6 orang atau sebesar 8% yang memilih ada kalanya terhambat 24 orang atau sebesar 32%, jarang ada hambatan yaitu 9 orang atau sebesar 12 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada hambatan yaitu 3 orang atau sebesar 4%. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 75 responden penyandang disabilitas mengalami hambatan dan sudah terbiasa dengan hambatan dalam fasilitasi UPSK hal tersebut dikarenakan mereka belum sepenuhnya mendapatkan program tersebut dan jika dikaitkan dengan peran fasilitator dapat dikatakan belum sepenuhnya memfasilitasi pelayanan UPSK. Hal ini ditunjang dengan wawancara dibawah ini

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah hambatan apa saja yang dihadapi oleh petugas pendamping dalam memfasilitasi pelayanan UPSK. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini :

Bapak Ali Machmudin selaku pendamping disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

“Peneliti: “ hambatan apa saja yang dihadapi dalam memberikan fasilitasi UPSK ? .”

Informan : “ hambatannya antara lain 1.ketidaktahuan difabel itu tentang pelayanan UPSK,2. Kurang sosialisasinya terhadap penyandang disabilitas yang ada didesa tentang adanya UPSK itu.”

peneliti: “ berarti memang ada hambatannya diantaranya kurangnya sosialisasi dalam memberikan informasi.”

Informan : “ ya, memang benar difabel itu diibaratkan banyak yang tidak mengerti adanya pelayanan tentang UPSK. Maka disini peran pendamping atau peran UPSK itu sering kelapangan memberitahukan adanya program-program seperti ini ke difabel atau masyarakat .“ menurut saya sebagai pendamping dan saya sendiri sebagai difabel itu tidak ada kendala untuk memberikan motivasi , mengajak untuk melihat program-program di lbk yang menjadi kendala itu keluarganya tetapi setelah difabelnya baik-baik saja dari pihak orang tuanya itu melarang dengan alasan merasa kasihan.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa penyandang disabilitas sering mengalami hambatan dan sudah terbiasa dengan hambatan dalam program UPSK banyak belum sepenuhnya mendapatkan program tersebut dan jika dikaitkan dengan peran fasilitator dapat dikatakan belum sepenuhnya memfasilitasi pelayanan UP mengenai peran pendamping dalam UPSK itu sering kelapangan memberitahukan adanya program-program seperti ini ke difabel atau masyarakat yang menjadi kendala itu keluarganya tetapi setelah difabelnya baik-baik saja dari pihak orang tuanya itu melarang dengan alasan merasa kasihan.

Pertanyaan Keenam yang diajukan kepada responden; Apakah ada evaluasi program yang dilakukan oleh petugas pendamping dalam memfasilitasi program Unit Pelayanan Sosial Keliling?

Tabel V.19
Evaluasi Program UPSK
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	12	60	16%
2.	Sering	6	24	8%
3.	Ada Kalanya	21	63	28%
4	Jarang	6	12	8%
5	Tidak Tahu	30	30	40%
Jumlah		75	189	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling” nomor 6 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu ada evaluasi yaitu 12 orang atau sebesar 16%, responden yang memilih jawaban sering ada evaluasi 9 orang atau sebesar 12% yang memilih ada kalanya evaluasi dilakukan 21 orang atau sebesar 28%, jarang melakukan evaluasi yaitu 6 orang atau sebesar 8 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mengetahui adanya evaluasi yaitu 30 orang atau sebesar 40%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 75 responden evaluasi dapat memberikan dampak pelayanan yang diberikan Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa evaluasi program yang dilakukan petugas pendamping belum sepenuhnya dilakukan dan peran petugas dalam mengevaluasi dapat dikatakan kurang efektif .

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah adakah evaluasi yang dilakukan oleh petugas pendamping? Bagaimanakah evaluasi tersebut dilakukan?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina

Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti; “ terkait dengan fasilitasi UPSK, evaluasi program yang dilakukan tugas pendamping UPSK itu bagaimana, apakah evaluasi program yang dilakukan sering atau kadang-kadang ? .”

Informan; “ untuk evaluasinya setiap kegiatan lbk atau kegiatan pendamping setelah pelatihan itu, biasanya dari pihak lbk ada monitoring ke peserta ingin mengetahui sejauh mana perkembangan usahanya dan menanyakan tentang kendala atau permasalahan apa yang menghambat produk usahanya , pendamping biasanya memberikan motivasi agar bangkit, jangan cepat menyerah dan jangan cepat terpuruk jadi istilahnya usaha tetap dilanjutkan.”

”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai evaluasi program UPSK untuk disabilitas evaluasi biasa dilakukan dalam fasilitasi pelayanan UPSK untuk evaluasinya setiap kegiatan LBK atau kegiatan pendamping setelah pelatihan itu, biasanya dari pihak LBK ada monitoring ke peserta ingin mengetahui sejauh mana perkembangan usahanya dan menanyakan tentang kendala atau permasalahan apa yang menghambat produk usahanya

c. Fasilitasi Unit Ekonomi Produktif

Pertanyaan pertama yang diajukan untuk responden yaitu ; Apakah anda Mengetahui tentang adanya Fasilitasi Bantuan Usaha Ekonomi Produktif untuk penyandang disabilitas yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.20
Pengetahuan Adanya Program UEP
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mengetahui	9	45	12%
2.	Mengetahui	12	48	16%
3.	Ragu-Ragu	33	99	44%
4.	Kurang mengetahui	6	12	8%
5.	Tidak mengetahui	15	15	20%
Jumlah		75	219	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Ekonomi Produktif ” nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Sangat Mengetahui yaitu 9 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih jawaban mengetahui 12 orang atau sebesar 16% yang memilih ada kalanya mengetahui 33 orang atau sebesar 44%, kurang mengetahui yaitu 6 orang atau sebesar 8 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mengetahui sama sekali yaitu 15 orang atau sebesar 20%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 75 responden penyandang disabilitas cukup mengetahui tentang adanya bantuan usaha ekonomi produktif jika dikaitkan dengan peran fasilitator maka peran fasilitasi dalam membantu penyandang disabilitas untuk mengakses bantuan UEP dapat dikatakan cukup baik .

Dari hasil kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang adanya program fasilitasi bantuan UEP dapat dikatakan sosialisasi program bantuan UEP belum sepenuhnya berhasil dikarenakan belum sepenuhnya

responden mengerti tentang adanya program bantuan UEP hanya yang pernah mengikuti saja yang dapat mengetahui. Hal ini ditunjang dengan wawancara dibawah ini

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah ;“Apakah yang dimaksud dengan fasilitasi bantuan Usaha ekonomi produktif ? apakah penyandang disabilitas mengetahui tentang adanya program tersebut ?”

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan“.

Peneliti: *selanjutnya terkait dengan fasilitasi unit ekonomi produktif, apa yang dimaksud fasilitasi unit ekonomi produktif? .”*

Informan: *“ Tindak lanjut dari pelatihan tadi setelah mereka mengikuti pelatihan-pelatihan di lbk, otomatis mereka akan membutuhkan penambahan alat ataupun modal usaha disini peran aktif dari program UEP yaitu disaat teman-teman membutuhkan penambahan modal ataupun alat itu biasanya dari pendamping mengusahakan untuk mengakses bantuan UEP untuk penyandang disabilitas yang mengalami kendala di peralatan maupun permodalan kalau masalah program UEP di LBK itu semua difabel yang mengikuti pelatihan di lbk biasanya mengetahui semuanya karena program tersebut sudah diagendakan setiap selesai pelatihan pasti ada tindak lanjut untuk program UEP itu tujuannya untuk memperkuat usaha mereka .”*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai pengetahuan program fasilitasi bantuan UEP untuk disabilitas hanya difabel yang mengikuti pelatihan di LBK yang dapat mengetahui semuanya karena program tersebut sudah diagendakan setiap selesai pelatihan program tersebut

Pertanyaan kedua yang diajukan untuk responden ; “Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah berpartisipasi mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif yang telah disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya ?”

Tabel V.21
Partisipasi mendapatkan Program UEP
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu Berpartisipasi	9	45	12%
2.	Berpartisipasi	12	48	16%
3.	Ragu-ragu	33	99	44%
4	Jarang	6	12	8%
5	Tidak Pernah	15	15	20%
Jumlah		75	219	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Ekonomi Produktif” nomor 2 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 9 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih jawaban sering 12 orang atau sebesar 16% yang memilih ada kalanya mengetahui 33 orang atau sebesar 44%, jarang mengikuti yaitu 6 orang atau sebesar 8 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah mengikuti sama sekalai yaitu 15 orang atau sebesar 20%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 75 responden sebagian besar penyandang disabilitas pernah mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif dan adakalanya mendapatkan bantuan UEP tersebut dalam hal ini jika dikaitkan dengan peran pendamping sebagai fasilitator makadapat dikatakan peranan yang diberikan sudah cukup baik.

Dari kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan UEP dapat membantu penyandang disabilitas mewujudkan kemandirian. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah sejauh mana fasilitasi program bantuan usaha ekonomi produktif disalurkan? kriteria disabilitas yang mendapatkannya?

Bapak Margi Hanur C .SE Selaku Pendamping Disabilitas UPTD

Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan peneliti dan Jawaban Informan“

***peneliti**“sejauh mana fasilitasi program bantuan usaha ekonomi produktif disalurkan?kriteria disabilitas yang mendapatkannya?*

***Informan**;mengusulkan disabilitas agar mendapatkan bantuan bantuan UEP baik dari Kementerian maupun provinsi setelah kita melakukan monev, untuk peningkatan kegiatan usaha agar lebih meningkat agar lebih tercapainya tingkat kesejahteraan maka membutuhkan misalnya misalnya membutuhkan bantuan modal perhatian dari pemerintah Kita usulkan sebelumnya kita usulkan dulu lewat pengajuan pengajuan proposal agar mereka mendapatkan bantuan setelah mendapatkan bantuan untuk menambah modal kegiatan tetap Kita kawal*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai Bantuan UEP sudah disediakan dan bantuan UEP yang diberikan harapan ya dapat meningkatkan kemampuan penerima manfaat yang sudah mempunyai usaha, agar dapat berkembang kegiatan usahanya.

Pertanyaan Ketiga yang diajukan kepada responden; Apakah ada pengawasan (monitoring) yang dilakukan oleh petugas pendamping UPTD Loka Bina Karya setelah mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif tersebut?

Tabel V.22
Monitoring Program UEP
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	6	30	8%
2.	Sering	15	60	20%
3.	Ada kalanya	33	99	44%
4.	Jarang	6	12	8%
5.	Tidak Pernah	15	15	20%
Jumlah		75	216	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Ekonomi Produktif ” nomor 3 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 12 orang atau sebesar 16% yang memilih ada kalanya mengetahui 33 orang atau sebesar 44%, jarang yaitu 9 orang atau sebesar 12 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 15 orang atau sebesar 20%. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden mengatakan bahwa ada evaluasi yang dilakukan petugas pendamping.

Dari hasil kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan,capaian output yang didapat dalam hal ini petugas penamping dalam melakukan evaluasi dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah ; Apakah setelah memfasilitasi program bantuan usaha ekonomi produktif selalu ada monitoring yang dilakukan petugas pendamping? lalu seperti apa pengawasan tersebut dilakukan?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan “kami selalu tetap memantau walaupun mereka sudah punya usaha dan sudah mandiri tetapi yang namanya pendamping tetap monitoring, memberikan motivasi, memberikan masukan biar mereka lebih mantap lagi dalam berusaha dan yang baru ini ingin mengajukan program UEP sebanyak 20 orang itu langsung ke kementerian termasuk hasil pelatihan tata boga dan akhirnya sampai keluar permodalanya perorang mendapatkan hasilnya sebanyak 5 juta.”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai evaluasi petugas pendamping setelah memberikan fasilitasi program bantuan UEP diberikan adakalanya selalu melakukan evaluasi terhadap bantuan UEP yang diberikan, walaupun sudah mandiri peran pendamping tetap melakukan monitoring, memberikan motivasi dan masukan.

Pertanyaan keempat yang diajukan kepada responden: Setelah mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang diberikan UPTD Loka Bina Karya apakah ada keberlanjutan program yang telah diberikan?

Tabel V.23
Keberlanjutan Program UEP
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	6	45	12%
2.	Sering	15	48	16%
3.	Kadang-kadang	33	99	44%
4.	Jarang	6	12	8%
5.	Tidak Pernah	15	15	20%
Jumlah		75	219	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Ekonomi Produktif” nomor 4 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 15 orang atau sebesar 20% yang memilih ada kalanya mengetahui 33 orang atau sebesar 44%, jarang yaitu 12orang atau sebesar 16 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 9 orang atau sebesar 12%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden berpendapat bahwa ada keberlanjutan program bantuan yang diberikan penyandang disabilitas mendapatkan program lanjutan. Jika dikaitkan dengan peran pendamping sebagai fasilitator dalam hal fasilitasi program bantuan UEP dapat dikatakan peranan yang dilakukan sudah cukup baik dalam memfasilitasi program bantuan UEP dan menindak lanjuti keberlanjutan program. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah :“apakah setelah memberikan fasilitasi Bantuan Usaha Ekonomi Produktif ada keberlanjutan program ?tindak lanjutnya seperti apa?”

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban

Informan; “kami selalu tetap memantau walaupun mereka sudah punya usaha dan sudah mandiri tetapi yang namanya pendamping tetap monitoring, memberikan motivasi , memberikan masukan biar mereka lebih mantap lagi dalam berusaha dan yang baru ini ingin mengajukan program UEP sebanyak 20 orang itu langsung ke kementerian termasuk hasil pelatihan tata boga dan akhirnya sampai keluar permodalanya perorang mendapatkan hasilnya sebanyak 5 juta

Peneliti: “ berarti setelah memberikan bantuan tersebut selalu ada keberlanjutan program yang diberikan?.”

Informan: “ ada.”

Peneliti: “ contohnya apa saja.”

Informan: “ misalkan kalau sudah terbentuk usaha itu kan ada tindak lanjut lagi , setelah UEP tadi nanti ada program-program yang lain itu pasti akan diajukan lagi seperti bantuan penambahan peralatan kadang-kadang juga dari program lain dan akan dimasukkan di usaha tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa ada keberlanjutan program yang diberikan dalam hal ini bantuan UEP adakalanya penyandang disabilitas mendapatkan program kelanjutan seperti bantuan penambahan peralatan dan adakalanya program lain yang akan dimasukkan dalam usaha yang sudah berkembang.

Pertanyaan kelima yang peneliti ajukan kepada responden ;Apakah setelah mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang didapatkan membantu anda dalam mewujudkan kemandirian?

Tabel V.24
Output Program UEP
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	9	45	12%
2.	Sering	12	48	16%
3.	Ada Kalanya	33	99	44%
4	Jarang	6	12	8%
5	Tidak Pernah	15	15	20%
Jumlah		75	219	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Ekonomi Produktif” nomor 5 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 9 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih jawaban sering 12 orang atau sebesar 8% yang memilih ada kalanya mengetahui 33 orang atau sebesar 44%, jarang yaitu 6 orang atau sebesar 8 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 15 orang atau sebesar 20%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 75 responden menganggap bahwa setelah bantuan UEP diberikan harapanya dapat mewujudkan kemandiriannya,

Dari hasil kuisisioner diatas program bantuan UEP yang diberikan penyandang disabilitas belum sepenuhnya cukup membantu mewujudkan kemandirian setelah mendapatkan program bantuan UEP.

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah Apakah setelah mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang pendamping fasilitasi dapat membantu penyandang disabilitas dalam mewujudkan kemandirian? lalu seperti apa kemandirian mereka?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan“;

Informan: “ dari tingkat kemandirian disini tidak dapat diukur dengan prosentase , tetapi kira-kira bisa mencapai 40 % sebab difabel itu beragam ada yang berpendidikan dan ada tidak berpendidikan,jadi dalam mengukur kemandirian dapat dilihat dari pendidikan dimana dapat mengembangkan diri atau tidak.”

Peneliti : “ dalam indikator keberdayaan tingkat kemandirian hanya terdapat 40% saja biasanya terdapat hambatan, lalu apa sajakah hambatan tersebut?.”

Informan;“ hambatannya yaitu yang pertama produksi,pemasaran yang susah dalam menghasilkan produknya sehingga dapat menghambat difabel untuk berkembang”.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai output bantuan UEP yang telah diberikan disabilitas belum sepenuhnya dapat mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas. Tingkat kemandirian penyandang disabilitas dipengaruhi oleh individu sendiri ,dukungan keluarga dan masyarakat, hal ini sesuai dengan jawaban informan bahwa tingkat kemandirian penyandang disabilitas setelah mendapatkan pemberdayaan hanya di angka 40%..

Pertanyaan keenam yang peneliti ajukan kepada responden; Apakah Anda sebagai penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam mengembangkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang diberikan?

Tabel V.25
Hambatan Dalam Program UEP
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	15	75	20%
2.	Sering	6	24	8%
3.	Ada Kalanya	33	99	44%
4	Jarang	9	18	12%
5	Tidak Pernah	12	12	16%
Jumlah		75	228	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Ekonomi Produktif” nomor 6 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Sangat Mengetahui yaitu 15 orang atau sebesar 20%, responden yang memilih jawaban mengetahui 6 orang atau sebesar 8% yang memilih ada kalanya 33 orang atau sebesar 44%, jarang yaitu 9 orang atau sebesar 12 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah sama sekalai yaitu 12 orang atau sebesar 16%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 75 responden penyandang disabilitas sering mengalami hambatan dalam mengembangkan bantuan usaha ekonomi produktif .

Dari kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa mereka bisa mengalami hambatan dalam mengembangkan bantuan usaha. Setelah menirikan usaha mereka mengalami hambatan . Hal ini ditunjang engan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah ketika petugas pendamping memfasilitasi bantuan UEP untuk penyandang disabilitas hambatan

apa saja yang dihadapi oleh disabilitas dalam mengembangkan usahanya ? lalu factor apa saja yang menyebabkan kendala tersebut ?

Ibu Kris Fajar Ariani M.Pd selaku kepala UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan:

ya kalau itu biasanya kan dah ada kendala-kendala dalam hal pemasaran ku satu mungkin biaya operasionalnya yang untuk ke itu sendiri yang kedua mungkin hasil dari produknya belum belum memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen mungkin kalau yang sudah kan yang sudah jalan seperti itu. Ditampung di agen. Kemudian dari agen baru disalurkan ke Dalam jangka lama setelah setelah habis baru kita bisa atau produsen bisa menerima uang kecuali kalau yang mungkin dia buka usaha sendiri seperti warung kendalanya itu mungkin kualitasnya juga belum

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai hambatan dalam memfasilitasi program UEP yaitu kurang mengetahui tentang adanya fasilitas untuk mengakses program UEP , dan setelah mendapatkan bantuan UEP PM(penerima manfaat) mengalami hambatan pertama produksi, pemasaran yang susah dalam menghasilkan produknya sehingga dapat menghambat difabel untuk berkembang”.

Pertanyaan ketujuh yang peneliti ajukan kepada responden ; Apakah Selalu ada evaluasi program yang dilakukan oleh petugas pendamping dalam memberikan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif.

Tabel V.26
Evaluasi Program UEP
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	6	30	8%
2.	Sering	9	36	12%
3.	Ada Kalanya	33	108	48%
4.	Jarang	15	30	16%
5.	Tidak Pernah	12	12	16%
Jumlah		75	207	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Unit Ekonomi Produktif” nomor 7 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Selalu yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering ada 9 orang atau sebesar 12% yang memilih ada kalanya 33 orang atau sebesar 44%, jarang yaitu 15 orang atau sebesar 20 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 12 orang atau sebesar 24%. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 75 responden mengatakan bahwa ada evaluasi program dilakukan oleh petugas pendamping.

Dari kuisiner diatas dapat disimpulkan bahwa ada evaluasi program yang dilakukan . Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan progrm yang telah diberikan dalam hal ini evaluasi yang dilakukan petugas pendamping dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah ada evaluasi yang dilakukan petugas pendamping dalam memfasilitasi bantuan UEP? lalu seperti apa evaluasinya?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan; “ jadi disini masuk ke fungsi peran pendamping dimana bertugas tidak hanya memonitoring dan memotivasi tetapi juga dapat menerima saran dan keluhan-keluhan dari semua penyandang disabilitas yang mengikuti di lbk dan para pendamping dapat memberikan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah penyandang disabilitas. Lalu keluhan dan saran-saran tersebut dapat disampaikan di grup whatshap pendamping .

Peneliti: “seperti apakah evaluasi program petugas pendamping dalam memberikan bantuan usaha produktif?.”

Informan: “ evaluasinya yaitu kita mengajarkan management atau pembukuan keuangan .”

Bapak Margi Hanur C .SE Selaku Pendamping Disabilitas UPTD

Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Peneliti ; itu berarti monev(monitoring dan evaluasi) itu seberapa sering dilakukan pak dalam tempo 1 bulan itu berapa kali?

informan: jumlah disabilitas kabupaten tegal yang sudah kita berdayakan oleh LBK itu jumlahnya banyak secara berproses kita itu melakukan monev kadang kita pendamping setiap bulan kita Mantau bahkan telah telatnya per 3 bulan kita memantau yang jelas setiap bulan kita akan mengunjungi disabilitas-disabilitas yang pernah mengikuti pelatihan /mendapatkan bantuan usaha

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai evaluasi program UEP untuk evaluasi program secara berproses melakukan monev adakalanya pendamping setiap bulan kita monitoring atau per tiga bulan mengunjungi disabilitas-disabilitas yang pernah mengikuti pelatihan atau mendapatkan bantuan usaha .

d. Fasilitasi untuk mendapatkan Pelayanan E-KTP/KK dan SIM

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah anda mengetahui tentang adanya fasilitasi pelayanan untuk mendapatkan KK,E-KTP dan SIM yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.27
Pengetahuan Program
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat Mengetahui	39	195	52%
2.	Mengetahui	15	60	20%
3.	Ragu-ragu	12	36	16%
4	Kurang Mengetahui	6	12	8%
5	Tidak Mengetahui	3	3	4%
Jumlah		75	306	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi E-ktpp/kk/SIM ” nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Sangat Mengetahui yaitu 39 orang atau sebesar 52%, responden yang memilih jawaban mengetahui 15 orang atau sebesar 20% yang memilih ada kalanya mengetahui 12 orang atau sebesar 16%, kurang mengetahui yaitu 6 orang atau sebesar 8 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mengetahui sama sekali yaitu 3 orang atau sebesar 4%. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan responden mengetahui tentang adanya fasilitasi pelayanan E-KTP/KK/SIM.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui 75 responden mnyatakan bahwa mereka mengetahui program fasilitasi pelayanan KTP/KK SIM dan sering diketahui oleh penyandang disabilitas jika dikaitkan dengan peranan petugas dalam memfasilitasi pelayanan KTP/KK dan SIM maka dapat dikatakan peranan fasilitator yang petugas jalankan dalam kategori sudah baik.Hal ini ditunjang dengan wawancara nforman sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah yang dimaksud dengan fasilitasi pelayanan e-KTP KK/SIM yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya ?sejauh mana penyandang disabilitas mengerti tentang pelayanan tersebut ?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan peneliti dan Jawaban Informan

“Peneliti :“apakah yang dimaksud dengan fasilitasi untuk mendapatkan pelayanan E-KTP/KK dan SIM terhadap penyandang disabilitas ?.”Ali: “ disini termasuk pelayanan, difabel disini kebanyakan sudah mempunyai data diri atau identitas, selama ini yang saya alami di lapangan itu seperti itu dimana difabel itu banyak sekali yang belum punya E-KTP, makanya untuk mengakses segala macam bentuk bantuan maupun pelatihan itupun harus menggunakan E-KTP, dan tugas pendamping itu sendiri untuk pengadaan E-KTP untuk penyandang disabilitas itu kita mengadakan kerja sama dengan pihak dukcapil,yang pertama kita menyerahkan data difabel yang tidak memiliki E-KTP ke dukcapil

Peneliti:“berarti sebelumnya penyandang disabilitas itu belum mengetahui adanya pelayanan tersebut .”

Informan: “ sebenarnya memang mereka mengetahui fasalitas pelayanan tersebut tetapi karena mobilitas, dan itu merupakan salah satu kendala penyandang disabilitas dalam pengambilan E-KTP di dukcapil.”

Bapak Dede AP Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 14 Januari 2020 mengatakan

Peneliti :Apakah yang dimaksud dengan fasilitasi pelayanan untuk mendapatkan sim untuk penyandang disabilitas?

Informan :jadi untuk temen-temen disabilitas ini perlu adanya dampingan untuk pembuatan SIM D maupun SIM C sebagai warga negara Indonesia yang baik dan Taat Hukum tidak mengandalkan disabilitasnya untuk belas kasihan jadi ketika ada operasi ataupun Apa tipe sudah mempunyai Sim C/D

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai pengetahuan tentang fasilitasi E-KTP KK SIM dapat dikatakan baik dalam hal ini peranan yang dijalankan yaitu peranan fasilitator meliputi pengadaan E-KTP/KK SIM bagi penyandang disabilitas yang belum mempunyai identitas dan untuk temen-temen disabilitas ini yang belum memiliki SIM C ataupun SIM D maka peran petugas dalam memfasilitasi akses pelayanan dengan dampingan untuk pembuatan SIM D maupun SIM C sebagai warga negara *Indonesia yang baik dan Taat Hukum* tersebut setelah penyandang disabilitas mempunyai identitas maka penerima manfaat dapat diikutsertakan dalam mengakses segala macam bantuan, seperti bantuan program pemberdayaan, bantuan usaha.

Pertanyaan kedua yang peneliti ajukan kepada responden Apakah anda pernah mendapatkan Fasilitasi Pelayanan untuk mendapatkan KK, E-KTP dan SIM yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.28
Partisipasi Mendapatkan Program E-KTP/KK/SIM
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	39	195	52%
2.	Sering	12	48	16%
3.	Kadang-kadang	12	36	16%
4	Jarang	3	6	4%
5	Tidak Pernah	9	9	12%
Jumlah		75	294	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Program E-KTP/KK/SIM” nomor 2 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 39 orang atau sebesar 52%, responden yang memilih jawaban sering 12 orang atau sebesar 16% yang memilih ada kalanya 12 orang atau sebesar 16%, kurang mengetahui yaitu 12 orang atau sebesar 16 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 9 orang atau sebesar 12%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan sebagian besar penyandang disabilitas pernah mendapatkan fasilitas pelayanan e-KTP/KK/SIM yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya dengan demikian dapat disimpulkan peranan petugas sebagai fasilitator dalam memfasilitasi pelayanan tersebut dapat dikatakan sudah baik.

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah sejauhmana penyandang disabilitas mendapatkan fasilitasi pelayanan E-KTP KK dan SIM

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Disini termasuk pelayanan, difabel disini kebanyakan sudah mempunyai data diri atau identitas, selama ini yang saya alami di lapangan itu seperti itu dimana difabel itu banyak sekali yang belum punya E-KTP, makanya untuk mengakses segala macam bentuk bantuan maupun pelatihan itupun harus menggunakan E-KTP, dan tugas pendamping itu sendiri untuk pengadaan E-KTP untuk penyandang disabilitas itu kita mengadakan kerja sama dengan pihak dukcapil,yang pertama kita menyerahkan data difabel yang tidak memiliki E-KTP ke dukcapil, terus teknisnya setelah data sudah diserahkan ke dukcapil kita mengadakan pembicaraan kepada dukcapil, bagaimana teknisnya dilapangan agar temen-teman difabel ini dapat mengakses E-KTP, setelah itu pendamping membicarakan cara pengakutan difabel ke dukcapil lalu ada kesepakatan antara pendamping dan dukcapil

untuk mengakses E-KTP untuk penyandang disabilitas, kemudian pada saat kita mengangkut difabel ke dukcapil itu untuk merekam pengambilan E-KTP sementara atau suket, selanjutnya kita lebih efisien dimana kita mengangkut difabel atau sitem jemput bola , setelah ada data kita kumpulkan di balaidesa dimana dukcapil memanggil pendamping difabel untuk mengambil E-KTP di balaidesa tersebut

Bapak Dede AP Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 14 Januari 2020 mengatakan

biasanya dari teman-teman disabilities itu datang ke desa ataupun LBK terus sering ingin membuat SIM agar dibantu untuk di dampingi ke pihak Polres Nah di sini ketika mau ke Polres kita kumpulin dulu ada beberapa orang misalkan 10 orang nanti kita baru kita dampingi jadi biar tidak bolak-balik Terus kalaau Satu persatu itu kan capek gitu kan jadi kita sekaligus 10 orang nanti rombongan ke sana di baru di proses .

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas pernah mendapatkan fasilitas pelayanan e-KTP/KK/SIM yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya dengan demikian dapat disimpulkan peranan petugas sebagai fasilitator dalam memfasilitasi pelayanan tersebut dapat dikatakan sudah baik mengenai pengetahuan program fasilitasi pelayanan e-KTP/KK/SIM disabilitas dukcapil itu diantaranya merekam pengambilan E-KTP sementara atau suket, selanjutnya kita lebih efisien dimana kita mengangkut difabel atau sitem jemput bola , setelah ada data kita kumpulkan di balaidesa dimana dukcapil memanggil pendamping difabel untuk mengambil E-KTP di balaidesa tersebut.

Dan bagi yang membutuhkan fasilitas pelayanan SIM C/D teman-teman disabilities itu datang ke desa ataupun LBK dan ingin membuat SIM maka petugas pendamping memfasilitasi ke pihak Polres setelah itu sebelum ke Polres lebih dulu didata setelah 10 orang kemudian penyandang disabilitas didampingi

dalam memfasilitasi mendapatkan SIM C dan D. Kemudian berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di Loka Bina Karya sudah memberikan fasilitasi pelayanan SIM/KK/KTP dengan baik untuk penyandang disabilitas.

Pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan kepada responden : “apakah Anda mengetahui tentang langkah-langkah mendapatkan fasilitasi pelayanan E-KTP /KK dan SIM yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.29
Mekanisme Mendapatkan Program Pelayanan KTP/KK/SIM
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat Mengetahui	36	180	48%
2.	Mengetahui	15	60	20%
3.	Ragu-ragu	12	36	16%
4	Kurang Mengetahui	9	18	12%
5	Tidak Mengetahu	3	3	4%
Jumlah		75	297	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “ Fasilitasi Program E-KTP/KK/SIM” nomor 3 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Sangat Mengetahui yaitu 36 orang atau sebesar 48%, responden yang memilih jawaban mengetahui 15 orang atau sebesar 20% yang memilih ada kalanya mengetahui 12 orang atau sebesar 16%, kurang mengetahui yaitu 9 orang atau sebesar 12 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mengetahui yaitu 3 orang atau sebesar 4%.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa ada mekanisme untuk mendapatkan pelayanan E-KTP/KK SIM disabilitas sudah banyak diketahui oleh penyandang disabilita.

Dan dari hasil kuisisioner dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang mekanisme atau langkah langkah untuk mengakses sudah baik dan jika dikaitkan dengan peranan petugas sebagai fasilitator dalam memfasilitasi pelayanan tersebut dapat dikatakan sudah baik .Hal ini ditunjang dengan hasil wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah bagaimana mekanisme dalam memberikan fasilitasi pelayanan E-KTP/KK/SIM utuk disabilitas ? apakah klien mengetahui langkah-langkah dalam mendapatkan program tesebut?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan : “ setelah hasil pendataan tersebut tugas pendamping melakukan validasi data ke lapangan, lalu validasi data tersebut disosialisasikan bahwa di LBK ada pelayanan E-KTP/KK/SIM, selanjutnya kira-kira setelah sosialisasi tersebut diberikan tentang adanya pelayanan KTP/KK SIM , kemudian disabilitas tersebut dapat mengetahui tidak adanya pelayanan tersebut. “ setelah pendamping memberi tahu contoh tentang gambaran langkah-langkah pembuatan KTP/KK/SIM ,lalu difabel itu tahu caranya mendapatkan pelayanan E-KTP/KK/SIM.”misalnya pelayanan E-Ktp dalam teknis dilapangan itu setelah data sudah diserahkan ke dukcapil kita mengadakan pembicaraan kepada dukcapil,

Peneliti;bagaimana teknisnya dilapangan agar temen-teman difabel ini dapat mengakses E-KTP?

Informan;setelah itu pendamping membicarakan cara pengakutan difabel ke dukcapil lalu ada kesepakatan antara pendamping dan dukcapil untuk mengakses E-KTP untuk penyandang disabilitas,kemudian pada saat kita mengangkut difabel ke dukcapil itu untuk merekam pengambilan E-KTP

sementara atau suket, selanjutnya kita lebih efisien dimana kita mengangkut difabel atau sitem jemput bola , setelah ada data kita kumpulkan di balaidesa dimana dukcapil memanggil pendamping difabel untuk mengambil E-KTP di balaidesa tersebut .

mekanismenya adalah dimana pendamping berperan membantu difabel dalam mengakses E-KTP yaitu pertama kita dari hasil pendataan tingkat kabupaten kita memetakan setelah itu difabel yang tidak punya E-KTP, KIS dan difabel yang tidak sekolah itu juga semua masuk disitu dan itu merupakan kebutuhan dasar penyandang disabilitas yaitu KTP , makanya pendamping disini itu bekerja keras untuk memfasilitasi difabel itu untuk mendapatkan E-KTP

Bapak Dede AP Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya

pada tanggal 14 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti; *Bagaimana sih mekanisme pendamping disabilitas dalam memberikan atau memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan sim c atau SIM D*

Informan : *untuk difabel langkah-langkahnya langkah-langkahnya yang pertama kita pertama itu koordinasi yaitu audiensi dengan pihak Polres kemudian kita mengutarakan maksud dan tujuannya untuk permohonan SIM D ataupun SIM C terus kemudian berjalan istilahnya untuk mendapatkan sim D dan SIM C nya*

Peneliti : *untuk mendapatkan data disabilitas yang belum mempunyai SIM C atau SIM D itu biasanya dari mana Mas itu dari teman-teman disabilities itu datang ke desa ataupun LBK terus sering ingin membuat SIM agar dibantu untuk di dampingi ke pihak Polres Nah di sini ketika mau ke Polres kita kumpulin dulu ada beberapa orang misalkan 10 orang nanti kita baru kita dampingi jadi biar tidak bolak-balik Terus kalaau Satu persatu itu kan capek gitu kan jadi kita sekaligus 10 orang nanti rombongan ke sana di baru di proses*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai langkah-langkah dalam mendapatkan program fasilitasi pelayanan E-KTP KK SIM yaitu sosialisasi tentang adanya pelayanan,pendataan ,validasi data,koordinasi dengan Disdukcapil untuk KK/E-KTP,dan Polres untuk memfasilitasi mendapatkan SIM C dan D kemudian menjemput penyandang disabilitas menuju tempat pelayanan kependudukan ataupun pelayanan pembuatan

SIM. Dan dapat disimpulkan bahwa peran pendamping dalam memfasilitasi program untuk mendapatkan pelayanan E-KTP KK SIM dapat dikatakan sudah baik.

Pertanyaan Keempat yang diajukan kepada responden :Apakah Anda mengalami kendala dalam mendapatkan Pelayanan fasilitasi KK,E-KTP dan SIM yang disediakan oleh UPTD ,?

Tabel V.30
Hambatan Program Fasilitasi E-KTP/KK/SIM
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	15	75	20%
2.	Sering	21	84	28%
3.	Kadang-kadang	27	81	36%
4	Jarang	3	6	4%
5	Tidak Pernah	9	9	12%
Jumlah		75	255	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Program E-KTP/KK/SIM” nomor 4 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 15 orang atau sebesar 20%, responden yang memilih jawaban sering 21 orang atau sebesar 28% yang memilih ada kalanya 27 orang atau sebesar 36%, jarang yaitu 3 orang atau sebesar 4 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 9 orang atau sebesar 12%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan mereka sudah mendapatkan pelayanan E-KTP KK/SIM yang disediakan oleh UPTD Loka Bina

Karya dan juga mereka sudah terbiasa dengan kendala dan hambatan yang dialami.

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas dalam memberikan fasilitasi pelayanan E-KTP KK dan SIM kepada penyandang disabilitas? apakah hambatan tersebut bisa tertangani?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina

Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan peneliti dan Jawaban Informan

“Peneliti “ apakah ada kendala dalam memberikan pelayanan E-KTP?.”

Informan: “ kendalanya yaitu pertama mobilitas, kedua akses di dukcapil karena di dukcapil pengaksesannya untuk difabel kurang , maka dari itu pendamping menginisiatif untuk jemput bola atau pengangkutan difabel di lbk lalu memanggil dukcapil untuk datang ke lbk dalam pengambilan rekam E-KTP .”

peneliti: “ berarti memang kendalanya ada,

Informan; iyya

Peneliti : Baik terima kasih atas penjelasannya kemudian terkait dengan hambatan Mas hambatan apa saja yang dihadapi petugas pendamping dalam memberikan fasilitas pelayanan SIM C atau SIM D pada penyandang disabilitas?

Informan Selama ini tidak ada hambatan karena sudah difasilitasi sudah diarahkan jadi tidak ada kendala. ataupun hambatan untuk mengatasi hambatan dari difabel nya Mas Apakah ada hambatan atau tidak Itu masih bisa mengendarai sepeda motor dia otomatis sudah tidak ada hambatan karena sudah bisa mengendarai sepeda motor kemudian mengikuti halang rintang ya akhirnya Jalan Tetapi kalau difabel itu belum bisa naik sepeda motor terus langsung mengikuti ujian akan menjadi hambatan makanya saran dari pendamping temen-temen disabilitas untuk belajar sepeda motor dulu sebelum mengakses SIMD/ SIM C

Berdasarkan hasil wawancara informan, Penulis simpulkan bahwa mengenai kendala pada penyandang disabilitas untuk mengakses pelayanan E-KTP/KK diantaranya ;mobilitas dan aksesibilitas pelayanan yang ada di dukcapil dan dalam memfasilitasi pelayanan SIM C/D Yan menjadi hambatan

ialah misalkan difabel belum bisa naik sepeda motor terus langsung mengikuti ujian akan menjadi hambatan makanya saran dari pendamping temen-temen disabilitas.

Pertanyaan kelima yang diajukan peneliti :Apakah ada evaluasi program yang dilakukan oleh petugas pendamping dalam memberikan fasilitasi pelayanan untuk mendapatkan E-KTP/KK dan SIM

Tabel V.31
Evaluasi Program E-KTP/KK/SIM”
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	12	60	16%
2.	Sering	24	72	32%
3.	Kadang-kadang	27	81	36%
4	Jarang	3	6	4%
5	Tidak Pernah	9	9	12%
Jumlah		75	228	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitasi Program E-KTP/KK/SIM” nomor 5 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 12 orang atau sebesar 16%, responden yang memilih jawaban sering 24 orang atau sebesar 32% yang memilih ada kalanya yaitu 27 orang atau sebesar 36%, dan responden yang memilih jawaban jarang 3 orang atau sebesar 4% tidak pernah yaitu 9 orang atau sebesar 24%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas evaluasi fasilitasi pelayanan E-KTP KK dan SIM dapat sering dilakukan oleh petugas

pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya dan dapat dikatakan sudah baik dalam melakukan evaluasi

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh petugas pendamping disabilitas setelah memfasilitasi pelayanan E-KTP KK dan SIM ? lalu seperti apa evaluasinya?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

peneliti: “berarti memang kendalanya dari difabelnya, evaluasi program setelah memberikan pelayanan E-KTP/KK dan SIM itu apakah ada dan seperti apa evaluasinya ?.”

Informan: “evaluasinya yaitu yang pertama semuanya harus akses layanan publiknya karena difabel itu perlu kebutuhan khusus .”

peneliti: “ Berarti sarana dan prasarana disini termasuk layanan publik itu belum aksesibel.” ?

Informan: “ya, masih banyak yang belum aksesibel untuk pelayanan itu”
peneliti: “ kalau contoh yang sudah aksesibel itu seperti apa ? .”

informan: “ contohnya banyak sekali yang sudah akses itu seperti di puskesmas dukuhwaru, puskesmas adiwerna, dan yang lainnya asudah akses banyak sekali Cuma sekian persen yang belum akses untuk pelayanan publik dan harapan saya untuk kedepanya semua pelayanan publik dapat akses .”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa ada evaluasi fasilitasi pelayanan E-KTP KK dan SIM dapat sering dilakukan oleh petugas mengenai evaluasinya seperti yaitu yang pertama semuanya harus akses layanan publiknya karena difabel itu perlu kebutuhan khusus masih banyak yang belum aksesibel untuk pelayanan .

e. Fasilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (penderita kusta)

Pertanyaan pertama yang diajukan untuk responden apakah anda mengetahui tentang adanya fasilitas Pelayanan kesehatan(kusta) yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya

Tabel V.32
Pengetahuan Program Fasilitas Pelayanan Kesehatan (kusta)”
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat Mengetahui	9	45	12%
2.	Mengetahui	6	24	8%
3.	Ragu-Ragu	18	54	24%
4	Kurang Mengetahui	12	36	16%
5	Tidak Pernah Mengetahui	30	30	40%
Jumlah		75	189	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Pengetahuan Program Fasilitas Pelayanan Kesehatan (kusta)” nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Sangat Mengetahui yaitu 9 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih jawaban mengetahui 6 orang atau sebesar 8% yang memilih ada kalanya mengetahui 18 orang atau sebesar 24%, kurang mengetahui yaitu 12 orang atau sebesar 16 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mengetahui sama yaitu 30 orang atau sebesar 40%.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang adanya fasilitas pelayanan kesehatan(kusta) belum sepenuhnya diketahui oleh penyandang disabilitas sehingga dapat dikatakan pengetahuan tentang adanya

pelayanan tersebut masih minim jika dikaitkan dengan peran petugas sebagai fasilitator maka peranan tersebut bisa dikatakan belum sepenuhnya maksimal dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan(kusta) hal ini dikarenakan banyak penyandang disabilitas(kusta) yang belum mengetahui tentang adanya layanan tersebut sudah ada namun hanya sebegaaian kecil .

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah yang dimaksud dengan fasilitasi pelayanan kesehatan(Kusta) untuk penyandang disabilitas di UPTD Loka Bina Karya? Sejauh mana pengetahuan penyandang disabilitas (kusta) tentang pelayanan tersebut.

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

peneliti: “ apakah yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan penderita kusta?.”

Informan: “ disini untuk kusta itu sendiri, pendamping sudah ada MOU Dinkes untuk pendampingan terhadap kusta dan disini kami bekerjasama dengan puskesmas adiwerna sebab masih ikut wilayah adiwerna untuk ikutserta penanganan kusta maupun pengurangan stigma terhadap penderita kusta itu sendiri.”

peneliti: “ itu penderita kusta juga termasuk disabilitas? .”

Informan “ iya betul sekali.” untuk kusta itu sendiri sebenarnya didesa-desa sudah ada namanya kader kusta bahkan pendamping juga dilibatkan dalam pendampingan tentang itu. disini kami bekerja sama dengan puskesmas adiwerna ada penanganan nama kelompoknya yaitu kelompok perawatan dini kusta ata(kpd) itu diadakan setiap bulan sekali dipuskesmas adiwerna. Kita punya anggota dari kelompok tersebut itu yang setiap bulan rutin diadakan kelompok perawatan diri dan biasanya kita disitu share ring perawatan,keluhan, ada dokter ada apa dan juga kadang juga ada pelayanan obat untuk kusta .”“ untuk memberikan fasilitas itu kadang-kadang juga banyak sekali kendalanya pada penderita kusta ini dan sistemnya tertutup atau dinamakan dengan sigma. Kusta itu banyak sekali kendalanya yaitu diantaranya stigma masyarakat,stigma diri dimana stigma diri ini kadang-kadang menjadi tertutup.”

peneliti: “ jadi menyebabkan juga tentang pengetahuan yang ada di lbk terdapat pelayanan fasilitasi kusta dan kebanyakan mereka malah tidak tahu tentang adanya fasilitasi pelayanan kusta

informan: Iyyah betul seperti itu mas..

Bapak Firmansyah Selaku Kader Kusta dan Wakil Ketua DSM pada tanggal 18 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti :Seberapa jauh sih pengetahuan tentang penyandang disabilitas kusta tentang adanya fasilitasi pelayanan kusta yang ada di LbK

Informan :Terima kasih ya Sebagai orang yang pernah mengalami kusta dan aktif di DSM / Difabel SlawiMandiri yang tempatnya juga bersama dengan LBK (Loka Bina Karya)dan kegiatan bareng dengan teman temanpendamping disabilitas untuk orang yang Mengalami kusta di sini kaitan dengan disabilitas ya karena kusta itu juga bisa menyebabkan difabel atau kalau terlambat pengobatan untuk pemberdayaan di Loka Bina Karya itu juga temen-temen yang paling besar di Kabupaten Tegal diikutsertakan di pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan kaitan dengan kesehatan atau pelayanannya kita disini MOU dengan Puskesmas ya karena di sini koordinatornya itu Dinas Kesehatan di sini ada KPD kelompok perawatan diri dimanat temen-temen kita juga ikut di kegiatan maupun di LBK jadi yang ditanyakan bagaimana pelayanannya itu kita disini untuk konseling Ya artinya memberikan pendampingan kepada mereka yang meempunyai kusta Yang tentang pengetahuannya itu dalam pencegahan dan pengobatannya terutama teman-teman yang masih dekat itu kita beri dorongan agar tidak terlambat pengobatan agar tidak terjadi perdebatan untuk dilapangan Biasanya kita mendata ya dari hasil kata itu ketika ada orang yang memutuskan motivasi kita ajak untuk pemberdayaanya atau mengikuti pelatihan LBKdan di sini ada beberapa temen informasi di DSM itu anggotanya sebagian dari orang yang mempunyai kusta dan mengikuti pelatihan kemarin dari sekian banyak temen-temendisabilitas yang mengertil pemberdayaan itu ada dari orang yang telah mengalami kusta. untuk pengetahuan kita memberikan sosialisasi ketika dilapangan kepada masyarakat khususnya di kabupaten tegal bahwa di LBK selain ada contoh pemberdayaan kita di sini juga dengan DSM itu memberikan pengetahuan kalau disini ada pemberdayaan difabel dan orang yang pernah mengalami kusta juga diikutsertakan agar masyarakat itu mendorong mereka orang yang punya kusta itu ya Malu itu agar bisa terbuka atau di masyarakat itu mau mengikuti kegiatan pertama untuk diri sendiri dulu pelatihan keterampilan berkaitan dengan kesejahteraan nya kita itu sebagai orang yang Penderita kusta dari pengetahuan masyarakat kita diberi sosialisasi untuk pelayanan di LBK maupun DSM itu sendiri ada konseling ada motivasi dan untuk pengetahuan tentang kustakita juga memberikan pemahaman kepada

masyarakat itu kusta apa dan stigma maupun keluarganya berkurang maupun dihapuskan Karena kita punya hak yang sama.

Peneliti : *dalam hal itu apakah mereka penyandang disabilitas (kusta) Apakah pada umumnya mereka tentu tahu tentang adanya pelayanan yang disediakan atau tahu setelah adanya sosialisasi ya mas,..?*

Informan: *ya karena memang kita butuh pemahaman masyarakat kita itu satu apa namanya sekedar pemberitahuan tapi juga di situ lebih dari itu untuk sosialisasi tentang difabel atau orang yang pernah mengalami kustapelayanan fasilitas kesehatan di LBK di Kabupaten Tegal tinggi dan keselamatan dikirim nasional.Jadi masih kuat daalam pemberdayaan itu kita berkumpul dengan teman-teman harapannya mereka bisa lebih percaya diri karena pengetahuan tentang kusta maupun di masyarakat itu juga tahu kalau di lbk itu pernah untuk melayani kusta itu sendiri*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai program fasilitas kesehatan(kusta) belum sepenuhnya diketahui oleh responden ,terkait program fasilitas kesehatan (kusta) adanya kerjasama dengan lintas sektor yaitu DSM,Puskesmas Adiwerna dan Dinkes Kabupaten Tegal untuk mengurangi stigma bagi penderita kusta namun karena dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan (kusta) banyak kendala seperti stigma diri,yang menjadikan penyandang disabilitas kusta maupun OYPMK masih tertutup sehingga kebanyakan penderita penyandang disabilitas(kusta) belum sepenuhnya mengetahui tentang adanya layanan yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya dalam hal ini fasilitas mengakses pelayanan kesehatan kusta ,Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan serta Dinkes sebagai penanggung jawab program terkait layanan penanganan kusta.

Pertanyaan kedua yang diajukan kepada responden :Apakah anda pernah mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan (kusta) yang diberikan Oleh UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.33
Tingkat Partisipasi Program Fasilitas Kesehatan (kusta)”
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	6	30	8%
2.	Sering	9	36	12%
3.	Ragu-Ragu	15	45	20%
4	Jarang	18	36	24%
5	Tidak Pernah	21	21	28%
Jumlah		75	168	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitas Pelayanan Kesehatan (kusta)” nomor 2 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 9 orang atau sebesar 12% yang memilih ragu-ragu 15 orang atau sebesar 20%, jarang yaitu 18 orang atau sebesar 24 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 18 orang atau sebesar 21%.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang adanya fasilitas pelayanan kesehatan(kusta) belum sepenuhnya diketahui oleh penyandang disabilitas sehingga dapat dikatakan pengetahuan tentang adanya pelayanan tersebut masih minim yang hal ini berdampak pada partisipasi dalam mendapatkan pelayanan tersebut masih rendah dan jika dikaitkan dengan peran petugas sebagai fasilitator maka peranan tersebut bisa dikatakan belum sepenuhnya maksimal dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan(kusta) hal ini dikarenakan banyak penyandang disabilitas(kusta) yang belum mengetahui tentang adanya layanan tersebut sudah ada namun hanya sebagian kecil .

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah sejauh mana penyandang disabilitas (kusta) mendapatkan fasilitasi pelayanan kesehatan(kusta)?

Bapak Arif Triyono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan; “ya untuk untuk masyarakat atau untuk penyandang disabilitas kusta yang sudah ikut bergabung dalam kelompok DSM mereka sudah mengetahui dan terlayani dengan terbentuknya kelompok perawatan diri (KPD) kusta itu tempatnya ada di Puskesmas Adiwerna tapi bagi mereka yang belum bergabung belum mengetahui adanya layanan”.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai pengetahuan program fasilitasi pelayanan kesehatan (kusta) hanya sebagian kecil yang mengetahui yaitu yang pernah mengikuti fasilitasi pelayanan kesehatan yaitu penyandang disabilitas yang mengerti tentang adanya layanan tersebut dalam arti yang bergabung dalam organisasi DSM(Difabel Slawi Mandiri)

Pertanyaan ketiga yang diajukan kepada responden: apakah anda mengetahui tentang langkah-langkah mendapatkan fasilitasi pelayanan kesehatan (kusta) yang diberikan oleh UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.34
Mekanisme Mengakses Program Fasilitasi Kesehatan (kusta)”
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	3	15	4%
2.	Sering	12	48	16%
3.	Ragu-ragu	15	45	20%
4	Jarang	21	42	28%
5	Tidak Pernah	24	24	32%
		75	174	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Mekanisme Mengakses Program Fasilitasi Pelayanan Kesehatan (kusta)” nomor 3 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 3 orang atau sebesar 4%, responden yang memilih jawaban sering 12 orang atau sebesar 16% yang memilih ragu-ragu 15 orang atau sebesar 20%, jarang yaitu 21 orang atau sebesar 28 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 24 orang atau sebesar 32%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan hanya sebagian saja penyandang disabilitas yang mengetahui langkah-langkah untuk mendapatkan fasilitasi pelayanan kesehatan (kusta) .

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang mekanisme mendapatkan fasilitasi pelayanan kesehatan(kusta) belum sepenuhnya diketahui oleh penyandang disabilitas sehingga dapat dikatakan pengetahuan tentang mekanisme mendapatkan pelayanan fasilitasi kesehatan (kusta) masih rendah hal ini berdampak pada partisipasi dalam mendapatkan pelayanan tersebut masih rendah dan jika dikaitkan dengan peran petugas sebagai fasilitator maka peranan tersebut bisa dikatakan belum sepenuhnya maksimal dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan(kusta) hal ini dikarenakan banyak penyandang disabilitas(kusta) yang belum mengetahui tentang adanya layanan tersebut bahwa layanan sudah ada namun hanya sebageian kecil yang mengetahui . Hal ini ditunjang dengan wawancara informn sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah bagaimana mekanisme atau langkah dalam memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan (kusta) ?apakah calon peserta mengetahui langkah-langkah dalam mendapatkan program tersebut?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

peneliti; “Kalau mekanisme sendiri langkah-langkah dalam memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan dalam hal ini kusta itu seperti apa ?.”

Informan: “langkah-langkah untuk pelayanan itu biasanya dari pihak puskesmas didampingi dengan pendamping difabel ini biasanya memberikan pengarahan ke desa dan sosialisai tentang kusta terus mengarahkan agar penderita kusta itu secepatnya untuk berobat ke puskesmas.”

peneliti: “ biasanya difabel kusta itu sudah mengetahui langkah-langkah tersebut apa belum? .”

informan: “ sebenarnya mereka tahu, tetapi karena menutup diri maka mereka jarang ada yang mengetahuinya , karena status stigma itu membikin benar-benar tertutup bahawa dirinya tidak ingin diketahui orang lain telah menderita penyakit kusta .”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai pengetahuan dalam langkah-langkah untuk mendapatkan fasilitasi pelayanan kesehatan (kusta) dapat dikategorikan kurang banyak dikateahui dikarenakan penyandang disabilitas (kusta) itu menagalami stigma diri yang membuat dirinya benar-benar menjadi tertutup sehingga tidak ingin diketahui orang lain telah menderita penyakit kusta.

Pertanyaan nomor empat yang diajukan kepada responden: Apakah Anda mengalami hambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan (penderita kusta,)?

Tabel V.35
“Hambatan Program Fasilitas Pelayanan Kesehatan (kusta)”
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	6	30	8%
2.	Sering	9	36	12%
3.	Kadang-kadang	15	45	20%
4	Jarang	24	48	32%
5	Tidak tahu	21	21	28%
Jumlah		75	180	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Fasilitas Pelayanan Kesehatan (kusta)” nomor 4 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 9 orang atau sebesar 8% yang memilih ada kalanya 15 orang atau sebesar 20%, jarang yaitu 24 orang atau sebesar 32 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mengetahui sama sekalai yaitu 21 orang atau sebesar 24%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan hambatan yang dialami sedikit hal itu dikarenakan sebagian besar penyandang disabilitas belum pernah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan(kusta)meskipun peran petugas pendamping sudah melakukannya dengan baik .

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah hambatan apa saja yang dialami petugas dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas (kusta)?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

*Jawaban **Informan**;*“ untuk memberikan fasilitas itu kadang-kadang juga banyak sekali kendalanya pada penderita kusta ini dan sistemnya tertutup atau dinamakan dengan sigma. Kusta itu banyak sekali kendalanya yaitu diantaranya stigma masyarakat, stigma diri dimana stigma diri ini kadang-kadang menjadi tertutup.”

Bapak firmansyah selaku kader kusta /wakil ketua DSM pada tanggal 18 Januari 2020 mengatakan:

*Jawaban **Informan**;*Yang dialami oleh penyandang disabilitas hambatan dari orang yang sedang mengalami kusta itu sebenarnya tidak ada yang kalau kita dari pelayanan secara untuk mengaksesnya dari Puskesmas itu sendiri malah mengambil karena pendorong masyarakat kebanyakan dari yang menjadi hambatan itu dari orangnya sendiri yang mengalami . lebih menutup diri ketika menutup tidak mau berubah apalagi hambatan secara hambatan diri sendiri yang mati sendiri itu lebih baik makanya kita perlu untuk mengetahui apapun orang yang menderita kita itu berubah dan masyarakat maupun keluarganya apa sih namanya sih Mandiri mendemotivasi itu ya memang dari kitanya sendiri kemauan kita untuk berobat secara pelayanan di sini kemarin.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai hambatan petugas dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan (kusta) diantaranya stigma keluarga, stigma masyarakat, stigma diri dimana stigma diri ini mengakibatkan penyandang disabilitas (kusta) menjadi tertutup.

Pertanyaan nomor 5 yang diajukan kepada responden: Apakah ada evaluasi program yang dilakukan oleh petugas pendamping dalam memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan (kusta)?

Tabel V.36
Evaluasi Program Fasilitasi Pelayanan Kesehatan (kusta)
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	3	15	4%
2.	Sering	12	48	16%
3.	Kadang-kadang	15	45	20%
4.	Jarang	21	42	28%
5.	Tidak Tahu	24	24	32%
Jumlah		75	174	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “ Program Fasilitasi Pelayanan Kesehatan (kusta)” nomor 5 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Selalu yaitu 3 orang atau sebesar 4%, responden yang memilih jawaban sering 12 orang atau sebesar 16% yang memilih ada kalanya 15 orang atau sebesar 20%, jarang yaitu 21 orang atau sebesar 28 %, dan responden yang memilih jawaban tidak tahu yaitu 24 orang atau sebesar 32%.

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa evaluasi program belum banyak diketahui hanya sebgaiian kecil saja yang dapat mengetahui petugas pendamping melakukan evaluasi yaitu penyandang disabilitas yang pernah mendapatkan pelayanan tersebut.

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah ada evaluasi program setelah memfasilitasi pelayanan kesehatan penyandang disabilitas (kusta) ?

Bapak Margi Hanur C. SE Selaku Pendamping Disabilitas UPTD

Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

***Jawaban Informan** “secara berproses kita itu melakukan monev kadang kita pendamping setiap bulan kita Mantau bahkan telah telatnya per 3 bulan kita memantau yang jelas setiap bulan kita akan mengunjungi disabilitas-disabilitas yang pernah mendapatkan pelayanan tersebut”.*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai evaluasi program dilakukan pertiga bulan atau setiap setelah pemberian program

F.Pendampingan

Pertanyaan pertama yang diajukan peneliti kepada reseponden: Apakah Anda Mengetahui tentang adanya pendampingan disabilitas yang dilakukan oleh petugas pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.37
Pengetahuan Tentang Adanya Pendampingan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	33	165	44%
2.	Sering	15	60	20%
3.	Ragu-ragu	9	27	12%
4	Jarang	12	24	16%
5	Tidak Pernah	6	6	8%
Jumlah		75	282	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Pendampingan” nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu yaitu 33 orang atau sebesar 44%, responden yang memilih jawaban sering 15 orang atau sebesar 20% yang memilih ada kalanya dilakukan sosialisasi 9 orang atau sebesar 12%, jarang ada yaitu 12 orang atau sebesar 16 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 6 orang atau sebesar 8%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 75 responden menyatakan bahwa mereka sering mendapatkan pendampingan yang dilakukan oleh petugas pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya dan peran petugas dalam melakukan pendampingan dapat dikatakan baik .

Dan dapat disimpulkan dari kuisisioner diatas bahwa pendampngan dilakukan bertujuan agar penyandang disabilitas mampu temotivai tas dampingan yng diberikan.

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah yang dimaksud dengan pendampingan disabilitas?sejauh mana penyandang disabilitas mengeti dan mendapatkan dampingan oleh petugas pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti:apakah yang dimaksud dengan pendampingan disabilitas? .”

Informan: “ pendampingan disablitas yaitu sebuah peran pendamping dimana mendampingi difabel untuk mengakses semua kebutuhan penyandang disabilitas .”

Peneliti: “ berarti dalam hal ini tentang adanya pendampingan rata-rata penyandang disabilitas mengetahui tentang adanya pendampingan yang ada di lbk. Terus sejauh mana penyandang disabilitas mengerti adanya tentang pendampingan?.”

Informan: “ sebenarnya difabel itu sudah tahu adanya pendamping karena mereka sangat membutuhkan adanya pendamping untuk mengakses semua kebutuhannya .”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai pengetahuan tentang adanya pendampingan disabilitas banyak yang sudah mengetahui tentang pendampingan yang dilakukan petugas pendamping disabilitas yang pada hakekatnya mereka membutuhkan adanya pendamping untuk mengakses berbagai kebutuhan pelayanan.

Pertanyaan kedua yang diajukan kepada responden : Anda sering mendapatkan pendampingan dari petugas pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.38
Partisipasi Program Pendampingan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	27	135	36%
2.	Sering	21	84	28%
3.	Ada Kalanya	9	27	12%
4	Jarang	6	12	8%
5	Tidak Pernah	12	12	16%
		75	270	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Partisipasi Program Pendampingan ,nomor 2 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 27 orang atau sebesar 36%, responden yang memilih jawaban sering 21atau sebesar 28%

yang memilih ada kalanya mengetahui 9 orang atau sebesar 12%, jarang yaitu 6 orang atau sebesar 8 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 12 orang atau sebesar 16%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 75 responden penyandang disabilitas sering mendapatkan dampingan dari petugas pendamping dan peran petugas sebagai fasilitator dalam melakukan pendampingan dapat dikatakan sudah baik.

Dan dari kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas mendapatkan pendampingan dari petugas pendamping ,proses pendampingan bertujuan untuk memotivasi penyandang disabilitas, agar dapat termotivasi serta membantu dalam mengatasi permasalahan disabilitas. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah seberapa sering petugas pendamping disabilitas UPTD LBK melakukan pendampingan kepada penyandang disabilitas ?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti: “berarti dalam hal ini penyandang disabilitas rentan dengan masalah-masalah. Dalam masalah yang terdapat pada difabel peran pendamping bagaimana?.”

Informan:“kita disini sebagai pendamping selalu membantu masalah yang diderita difabel sesuai dengan kemampuannya dan tugas pendamping itu untuk mengawal, mendampingi, mengaksesmen sampai difabel tersebut mendapatkan apa yang mereka inginkan .”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai peran petugas dalam melakukan pendampingan diantaranya membantu masalah

yang diderita penyandang disabilitas ,mengawal,mendampingi ,mengaksesmen sampai penyandang disabilitas mendapatkan apa yang diinginkanya dan jika dikaitkan dengan peran petugas sebagai fasilitator dalam melakukan pendampingan dapat dikatakan sudah baik.

Pertanyaan ketiga yang diajukan peneliti kepada responden : apakah petugas pendamping selalu mendampingi anda dalam membantu permasalahan-permasalahan yang anda hadapi?

Tabel V.39
Pendampingan Dalam Permasalahan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	21	105	28%
2.	Sering	24	96	32%
3.	Kadang-kadang	12	36	16%
4	Jarang	3	6	4%
5	Tidak Pernah	15	15	20%
Jumlah		75	258	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Pendampingan ,nomor 3 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 21 orang atau sebesar 28%, responden yang memilih jawaban sering 24 orang atau sebesar 32% yang memilih ada kalanya mengetahui 12 orang atau sebesar 16%, jarang yaitu 3 orang atau sebesar 4 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 15 orang atau sebesar 20%. Dengan demikian berdasarkan tabel dari 75 responden diatas dapat mereka sering mendapatkan permasalahan didalam kehidupan sosial dan terbiasa dengan permasalahan yang ada .

Dan dari kuisisioner diatas dapat dikatakan pendamping disabilitas sering membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas dan dapat disimpulkan peran fasilitasi pendampingan petugas pendamping dalam membantu permasalahan-permasalah sudah baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah seberapa sering petugas pendamping membantu permasalahan-permasalahan penyandang disabilitas?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

*Jawaban **Informan**;*“ kita disini sebagai pendamping selalu membantu masalah yang diderita difabel sesuai dengan kemampuannya dan tugas pendamping itu untuk mengawal, mendampingi, mengaksesmen sampai difabel tersebut mendapatkan apa yang mereka inginkan .”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai peran petugas dalam membantu penyandang disabilitas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi sering dilakukan diantaranya mengawal,mendampingi,mengaksesmen kebutuhan penyandang disabilitas dari apa yang diinginkannya. Dapat disimpulkan peran fasilitasi pendampingan petugas pendamping dalam membantu permasalahan-permasalah sudah baik.

Pertanyaan keempat yang diajukan oleh peneliti kepada responden: menurut anda,apakah proses pendampingan yang dilakukan petugas pendamping dapat membantu untuk menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan anda?

Tabel V.40
Output Program Pendampingan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	12	60	16%
2.	Sering	18	72	24%
3.	Kadang-kadang	27	81	36%
4	Jarang	6	12	8%
5	Tidak Pernah	12	12	16%
Jumlah		75	237	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Pendampingan ,nomor 4 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 12 orang 24 % atau sebesar 16%, responden yang memilih jawaban sering ada 18 orang ada kalanya 27 atau sebesar 36% yang memilih jarang 6 atau 8% dan yang memilih tidak pernah yaitu 12 orang atau sebesar 16 %. Dari tabel diatas dapat diketahui sebagai penyandang disabilitas mendapatkan pendampingan yang bertujuan untuk dapat membantu untuk menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan

Dari hasil kuesioner diatas dapat diketahui bahwa pendampingan yang dilakukan oleh petugas pendamping mampu membuka akses pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas . Dalam hal ini maka proses pendampingan yang dilakukan oleh petugas pendamping dapat dikatakan sudah baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah menurut anda,apakah proses pendampingan yang dilakukan petugas pendamping dapat membantu untuk menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan peneliti dan Jawaban Informan

“Peneliti: *“setelah mendapatkan proses pendampingan tersebut, apakah mampu membantu mereka mewujudkan kehidupan sosial ekonomi ? Menurut anda bagaimana? .”*

Informan: *“menurut saya karena adanya program dari lbk ini penguatan ekonomi maka disini diadakan pelatihan, pemberdayaan dan yang paling utama yaitu untuk mengangkat perekonomian penyandang disabilitas karena difabel disini kan identik karena tidak mampu dan sebagainya. Peran pendamping itu untuk mengawal agar difabel itu mandiri dan bisa menghidupi diri sendiri,jadi penguatan ekonomi disini melalui pelatihan-pelatihan itu.”*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai peran pendamping dalam melakukan pendampingan bertujuan untuk mengawal agar disabilitas itu mandiri dan bisa menghidupi dirinya sendiri, jadi melalui pendampingan dapat membangkitkan penguatan ekonomi disini melalui pelatihan-pelatihan ,pemberdayaan,dan yng paling utama untuk mengangkat perekonomian penyandang disabilitas karena difabel disini kan identik karena tidak mampu dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan peran petugas sebagai fasilitator dalam melakukan pendampingan maka dapat dikatakan sudah melaksanakan dengan baik .

Pertanyaan kelima yang diajukan kepada responden: Menurut anda apakah proses pendampingan yang dilakukan dapat membantu anda untuk mewujudkan perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi?

Tabel V.41
Output Pendampingan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	6	30	8%
2.	Sering	15	60	20%
3.	Ada Kalanya	36	108	48%
4	Jarang	12	24	16%
5	Tidak Pernah	21	21	28%
		75	243	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Pendampingan ,nomor 5 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 15 orang atau sebesar 20% yang memilih ada kalanya mengetahui 36 orang atau sebesar 48%, Jarang yaitu 12 orang atau sebesar 16 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 21 orang atau sebesar 28%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 75 responden menyatakan bahwa ada output dari proses pendampingan berupa perbaikan kehidupan sosial ekonomi.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan penyandang disabilitas sering mendapatkan pendampingan dan adakalanya mampu memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi disabilitas dalam hal peran pendamping UPTD Loka Bina Karya dapat dikatakan sudah bai. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah proses pendampingan yang dilakukan dapat membantu anda untuk mewujudkan perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan peneliti dan Jawaban Informan

“Peneliti: “ setelah mendapatkan proses pendampingan tersebut, apakah mamapu membantu mereka mewujudkan kehidupan sosial ekonomi ? Menurut anda bagaimana? .”

Informan: “ menurut saya karena adanya program dari lbk ini penguatan ekonomi maka disini diadakan pelatihan, pemberdayaan dan yang paling utama yaitu untuk mengangkat perekonomian penyandang disabilitas karena difabel disini kan identik karena tidak mampu dan sebagainya. Peran pendamping itu untuk mengawal agar difabel itu mandiri dan bisa menghidupi diri sendiri,jadi penguatan ekonomi disini melalui pelatihan-pelatihan itu.”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai Peran pendamping itu untuk mengawal agar disabilitas itu mandiri dan bisa menghidupi diri sendiri,jadi penguatan ekonomi disini melalui pelatihan-pelatihan itu.”program dari lbk ini penguatan ekonomi maka disini diadakan pelatihan, pemberdayaan dan yang paling utama yaitu untuk mengangkat perekonomian penyandang disabilitas karena difabel disini kan identik karena tidak mampu dan sebagainya.

Pertanyaan keenam yang diajukan kepada responden Selalu ada kendala yang dihadapi dalam mendapatkan proses pendampingan yang dilakukan petugas UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.42
Hambatan Program Pendampingan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	33	165	44%
2.	Sering	15	60	20%
3.	Kadang-kadang	12	36	16%
4	Jarang	9	18	12%
5	Tidak Pernah	6	6	8%
Jumlah		75	285	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Pendampingan” ,nomor 6 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu yaitu 33 orang atau sebesar 44%, responden yang memilih jawaban sering 15 orang atau sebesar 20%, responden yang memilih jawaban kadang-kadang 12 orang atau sebesar 16%, jarang yaitu 9 orang atau sebesar 12 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 6 orang atau sebesar 8%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden menyatakan bahwa selalu ada kendala yang dihadapi dalam mendapatkan pendampingan dan mereka sudah terbiasa dengan kendala tersebut.

Dari kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa pendampingan sering dilakukan petugas pendamping dan merekapun selalu mendapatkan pendampingan untuk mengatasi kendala –kendala tersebut jika dikaitkan dengan peran petugas dalam melakukan pendampingan maka dapat dikatakan sudah baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah ada kendala yang dihadapi oleh petugas pendamping dalam mendapatkan proses pendampingan yang dilakukan petugas UPTD Loka Bina Karya? Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti: “jadi dalam hal ini peran petugas pendamping sangatlah dominan, lalu apasajakah kendala dalam pendampingan disabilitas?.”

Informan: “kendala memang ada, tetapi dengan adanya kerja sama dengan tim maka kendala tersebut dapat diatasi dan paling tidak bisa diminimalisasi. Kendalanya dari difabel itu sendiri dimana untuk membangkitkan difabel itu agak sulit maka dari itu diadakanya kerja sama agar penyandang disabilitas mudah untuk bangkit .”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa petugas pendamping sering mengalami kendala dalam melakukan pendampingan dan hambatan selalu ada dalam melakukan pendampingan, tetapi dengan adanya koordnisai dengan anggota tim pendamping disabilitas maka kendala tersebut dapat diatasi dan paling tidak bisa diminimalisasi. Kendalanya yang dialami yaitu dari difabel itu sendiri biasanya untuk membangkitkan penyandang disabilitas itu agak sulit maka dari itu diadakanya kerja sama agar penyandang disabilitas mudah untuk bangkit . Dan dapat disimpulkan melalui wawancara diatas bahwa penyandang disabilitas terbiasa dengan kendala-kendala yang dialami dan petugas pendamping sudah terbiasa menghadapi kendala tersebut dalam hal ini maka petugas pendamping dalam melakukan peranya dapat dikatakan baik.

Pertanyaan ketujuh yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah ada evaluasi program yang dilakukan oleh petugas pendamping dalam memberikan pendampingan terhadap anda

Tabel V.43
Evaluasi Program Pendampingan
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu dievaluasi	12	60	16%
2.	Sering dievaluasi	18	72	24%
3.	Kadang-kadang	27	81	36%
4.	Jarang dievaluasi	6	12	8%
5.	Tidak pernah dievaluasi	12	12	16%
Jumlah		75	237	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Pendampingan , nomor 7 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban selalu dievaluasi yaitu 12 orang atau sebesar 16%, responden yang memilih jawaban sering dievaluasi ada 18 orang atau sebesar 24% yang memilih kadang-kadang dievaluasi 27 orang atau sebesar 36%, jarang dievaluasi yaitu 6 orang atau sebesar 8 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 12 orang atau sebesar 16%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden menyatakan bahwa petugas pendamping kadang kala melakukan evaluasi program yang disediakan dan dapat disimpulkan peran fasilitator dalam pendampingan cukup baik .

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti: “dalam memberikan program yang dilakukan oleh petugas pendamping apakah ada evaluasinya dalam melakukan proses pendampingan ? .”

Informan: “ setelah melakukan pendampingan tetap ada evaluasinya yaitu dengan evaluasi sama teman-teman yang lain, tingkat keberhasilannya kelulusanya dibicarakan oleh para tim.”

Peneliti: “ itu semua apakah sering dilakukan? .”

Informan: “ ya, sering selama 1 bulan sekali

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai evaluasi fasilitasi pendampingan kepada penyandang disabilitas setelah melakukan pendampingan tetap ada evaluasinya yaitu dengan evaluasi sama teman-teman yang lain, tingkat keberhasilannya ,kelulusanya dibicarakan oleh para tim.

g. Motivasi dan bimbingan

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada responden : Apakah anda mengetahui tentang adanya motivasi dan bimbingan yang dilakukan petugas pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.44
Pengetahuan Adanya Motivasi Dan Bimbingan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mengetahui	12	60	16%
2.	Mengetahui	27	108	36%
3.	Ragu-ragu	9	27	12%
4	Kurang mengetahui	6	12	8%
5	Tidak mengetahui	21	21	28%
Jumlah		75	228	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Motivasi Dan Bimbingan ,nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Sangat Mengetahui yaitu 12 orang atau sebesar 16%, responden yang memilih jawaban sering mengetahui 27 orang atau sebesar 36% yang memilih ada kalanya mengetahui 9 orang atau sebesar 12%, kurang mengetahui yaitu 6 orang atau sebesar 8 %, dan

responden yang memilih jawaban tidak mengetahui sama sekali yaitu 21 orang atau sebesar 28%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden menyatakan bahwa penyandang disabilitas sudah mengetahui tentang adanya motivasi dan bimbingan di UPTD Loka Bina Karya dan peranan petugas dalam memotivasi dan membimbing penyandang disabilitas dapat dikatakan sudah baik .

Dan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang motivasi dan bimbingan dapat diketahui penyandang disabilitas . Motivasi dan bimbingan membantu penyandang disabilitas untuk bangkit dari stigma yang melekat pada dirinya dan agar dapat termotivasi dalam hal ini peran petugas dalam melakukan motivasi dan bimbingan dapat dikatakan sudah baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis apakah yang dimaksud dengan motivasi dan bimbingan untuk penyandang disabilitas yang disediakan oleh UPTD Loka Bina Karya ? seberapa jauh penyandang disabilitas mengerti tentang adanya program tersebut?

Bapak Ali Machmudin selaku pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti : “ menurut anda selaku sebagai petugas pendamping apa yang dimaksud motivasi dan bimbingan ?.”

Informan: “ motivasi yaitu kita memberikan semangat , membangkitkan semangat hidupnya agar bisa berkembang dari keterpurukan agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan.”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa peran pendamping disabilitas mengenai motivasi dan bimbingan motivasi yaitu dengan

memberikan semangat , membangkitkan semangat hidupnya agar bisa berkembang dari keterpurukan agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan.”

Pertanyaan kedua yang diajukan kepada responden; Apakah Anda sering mendapatkan motivasi dan bimbingan dari petugas pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya

Tabel V.45
Partisipasi Motivasi Dan Bimbingan
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	24	120	32%
2.	Sering	9	36	12%
3.	Kadang-kadang	15	45	20%
4	Jarang	6	12	8%
5	Tidak Pernah	21	21	28%
Jumlah		75	234	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “ Motivasi Dan Bimbingan ,nomor 2 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan yang memilih jawaban Selalu yaitu 24 orang atau sebesar 32%, responden yang memilih jawaban sering yaitu ada 9 orang atau sebesar 12% yang memilih ada kalanya mengetahui 15 orang atau sebesar 20%, jarang yaitu 6 orang atau sebesar 8 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 21 orang atau sebesar 28%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden menyatakan mereka selalu mendapatkan motivasi dan bimbingan dari petugas pendamping UPTD Loka Bina Karya yang bertujuan untuk memabngkitkan semangat dan

disabilitas dapat termotivasi dalam menjalani kehidupan sosial. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan seberapa sering motivasi dan bimbingan untuk penyandang disabilitas dilakukan ? Apakah ada treatment khusus untuk melakukan motivasi dan bimbingan?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan: *untuk motivasi dan bimbingan kita itu biasanya setiap ada kegiatan monitoring selalu memberikan masukan agar mereka itu lebih percaya diri .”*

Peneliti: *“Kalau dalam hal itu ada treatment khusus tidak dalam melakukan motivasi dan bimbingan ? .”*

Informan: *“ jadi kita melihat kondisi terlebih dahulu , kondisi difabelnya seperti apa, terus kita menggunakan trik yang berbeda dengan memotivasi difabel yang lain dan kita gunakan trik-trik tersendiri,misalkan kita ajak bicara,bercanda,setelah mereka respon baru kita masuk untuk motivasi .”*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai motivasi dan bimbingan sering dilakukan oleh petugas pendamping disabilitas hal ini bertujuan untuk memotivasi dan membimbing mereka dengan memberikan masukan ,semangat agar penyandang disabilitas itu lebih percaya diri . Motivasi dan bimbingan diberikan dengan menggunakan treatment khusus diantaranya dengan melihat kondisi terlebih dahulu , kondisi difabelnya seperti apa, terus dengan menggunakan trik yang berbeda dengan memotivasi difabel yang lain dan petugas pendamping juga gunakan trik-trik tersendiri,misalkan dengan mengajak bicara,bercanda,setelah mereka respon baru kita masuk untuk motivasi dalam hal ini peran petugas pendamping dapat dikatakan sudah baik karena penyandang disabilitas merasa terbantu dengan adanya motivasi dan bimbingan.

Pertanyaan ketiga yang diajukan kepada responden : Apakah Anda mengetahui langkah-langkah untuk mendapatkan bimbingan dan motivasi yang dilakukan petugas pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya

Tabel V.46
Mekanisme Untuk Mendapatkan Bimbingan
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mengetahui	12	60	16%
2.	Mengetahui	21	84	28%
3.	Ragu-ragu	15	45	20%
4	Kurang mengetahui	18	36	24%
5	Tidak engetahui	9	9	12%
Jumlah		75	234	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Motivasi Dan Bimbingan nomor 3 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban Sangat Mengetahui yaitu 12 orang atau sebesar 16%, responden yang memilih jawaban Mengetahui 21 orang atau sebesar 28% yang memilih ada kalanya 15 orang atau sebesar 20%, Kurang Mengetahui yaitu 18 orang atau sebesar 24 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 18 orang atau sebesar 24%. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden menyatakan mereka mengetahui mekanisme melakukan motivasi dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas pendamping disabilitas .

Dari kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa peran petugas dalam melakukan pemahaman tentang adanya motivasi dan bimbingan dapat dikatakan sudah melaksanakannya dengan baik karena banyak penyandang disabilitas yang

telah mengetahui adanya motivasi dan bimbingan. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah : Apakah penyandang disabilitas mengetahui langkah-langkah untuk mendapatkan motivasi dan bimbingan dari petugas pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya ?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti: “bagaimana langkah-langkah memberikan pendampingan?.”

Informan: “langkah-langkah yang pertama yaitu kita mengadakan pendekatan terhadap penyandang disabilitas ,memberikan motivasi , berbagi tentang pengalaman , memberikan gambaran-gambaran kedepan pada difabel itu agar bangkit kembali .”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai langkah-langkah dalam melakukan pendampingan disabilitas dengan mengadakan pendekatan terhadap penyandang disabilitas ,memberikan motivasi , berbagi tentang pengalaman , memberikan gambaran-gambaran kedepan . Peran petugas dalam melakukan pemahaman tentang adanya motivasi dan bimbingan dapat dikatakan sudah melaksanakanya dengan baik.

Pertanyaan keempat yang diajukan kepada responden :Menurut anda,apakah proses bimbingan dan motivasi yang dilakukan petugas pendamping dapat memotivasi anda dalam mewujudkan kemandiriam?

Tabel V.47
Output Motivasi Dan Bimbingan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu memotivasi	6	30	8%
2.	Sering memotivasi	27	108	36%
3.	Kadang-kadang	15	45	20%
4.	Jarang	18	36	24%
5.	Tidak Pernah	9	9	12%
Jumlah		75	228	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Motivasi dan Bimbingan ,nomor 4 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 27 orang atau sebesar 36% yang memilih ada kalanya 15 orang atau sebesar 20%, jarang yaitu 18 orang atau sebesar 24 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 9 orang atau sebesar 12%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan dari 75 responden penyandang disabilitas sering mendapatkan motivasi dan bimbingan.

Dan dari kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan motivasi yang diberikan petugas pendamping kadang kala mampu memotivasi untuk mewujudkan kemandirian. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah : Apakah proses bimbingan dan motivasi yang dilakukan petugas pendamping dapat memotivasi

anda dalam mewujudkan kemandirian? Jika tidak apa yang menghambat kemandiriannya?

Bapak Arif Triyono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan

Informan “kadang-kadang mampu, sedangkan kalau tidak ya adanya faktor yang tidak mendukung diantaranya kepercayaan dirinya yang pertama Untuk memotivasi dirinya itu memang masih lemah”. terkadang masih adanya rasa minder Kurang PD kurang percaya diri terus faktor yang selanjutnya itu juga kurang dukungan dari misalkan dengan disabilitas punya keinginan membuka usaha toko di pinggir jalan keluarga juga kadang kurang mendukung ekonomi itu bisa mungkin dari segi pengalaman itu juga kadang menjadi bahan pertimbangan dari keluarga itu juga juga faktor yang selanjutnya ini dari dari lingkungan atau masyarakat juga bisa sangat berpengaruh

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa yang menghambat kemandirian penyandang disabilitas setelah mendapatkan motivasi dan bimbingan kepercayaan dirinya yang pertama penyandang disabilitas dalam memotivasi dirinya yang masih lemah, pertimbangan dari keluarga , lingkungan atau masyarakat juga bisa sangat berpengaruh dalam mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas. Dalam hal ini peran petugas dalam memfasilitasi penyandang disabilitas melakukan motivasi dan bimbingan dapat dikatakan sudah baik

Pertanyaan kelima yang diajukan kepada responden : Apakah ada kendala yang dihadapi anda dalam mendapatkan motivasi dan bimbingan yang dilakukan petugas UPTD Loka Bina Karya?

Tabel V.48
Hambatan Dalam Motivasi Dan Bimbingan
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	12	60	16%
2.	Sering	15	60	20%
3.	Kadang-kadang	21	63	28%
4.	Jarang	18	36	24%
5.	Tidak Pernah	9	9	12%
Jumlah		75	228	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Motivasi dan Bimbingan ,nomor 5 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu ada yaitu 12 orang atau sebesar 16%, responden yang memilih jawaban sering 15 orang atau sebesar 20% yang memilih ada kalanya 21 atau sebesar 28% %, jarang ada 18 orang atau sebesar 24 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 18 orang atau sebesar 24%. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 75 responden berpendapat mereka sudah terbiasa dengan kendala yang dialami.

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah adakah kendala yang dihadapi dalam memberikan motivasi dan bimbingan yang dilakukan petugas UPTD Loka Bina Karya ?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan peneliti dan jawaban Informan

Peneliti :“apa sajakah hambatan dalam memotivasi dan bimbingan?.”

Informan:“ hambatan dalam memberikan motivasi itu kebanyakan pada difabelnya yang susah saat diajak berbicara, termasuk pada

difabel yang tingkat traumanya masih tinggi biasanya itu kita mengalami kesulitan dalam mengajak difabel berkomunikasi ,petugas pendamping disitu harus intensif , jadi berusaha terus untuk mengajak bicara sampai difabel mau berbicara dengan kita tetapi disini justru terasa menantang untuk memberikan motivasi difabel ini biar bisa diajak bicara dan bisa termotivasi .””

Bapak Arif Triyono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

yang pertama permasalahan yang ada di penyandang disabilitas itu yang pertama adalah motivasi diri terkait dengan orangnya atau disabilitasnya itu motivasinya rendah dalam arti begini rata-rata yang tinggal di pedesaan khususnya di wilayah kabupaten Tegal itu masih mempunyai rasa minder percaya diri tidak mau keluar rumah kami sebagai pendamping disabilitas itu berupaya untuk memberikan motivasi terutama motivasi-motivasi memotivasi dirinya supaya supaya Bangkit dari keterpurukan , ada faktor dari orang tua orang tua orang tua itu kadang juga sangat berpengaruh dan bisa menghambat bagi disabilitas itu sendiri contohnya misalkan disabilitas itu sudah tidak minder tidak mau lagi mau keluar rumah tapi masih dihambat atau tidak boleh sama orang tua keluar.. Faktor lain ada dari lingkungan masyarakat lingkungan masyarakat lingkungan masyarakat itu seperti misalkan kalau ada anak penyandang disabilitas yang sudah keluar rumah tapi kadang kurang diterima oleh masyarakat lingkungan masyarakat Contohnya misalkan diejek diolok-olok dihina dan akhirnya apa seorang penyandang disabilitas bisa kembali ke rumah dan tidak mau keluar lagi..

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa adanya hambatan petugas dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada disabilitas diantaranya penyandang disabilitas susah diajak komunikasi yaitu penyandang disabilitas yang masih dalam tingkat trauma yang tinggi, yang mengalami hambatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Dan dapat disimpulkan melalui wawancara diatas bahwa petugas terbiasa menghadapi hambatan hambatan yang dialami penyandang disabilitas.

Pertanyaan keenam yang diajukan kepada responden: Apakah ada evaluasi program yang dilakukan oleh petugas pendamping dalam memberikan Bimbingan dan motivasi terhadap anda?

Tabel V.49
Evaluasi Program Fasilitas Motivasi Dan Bimbingan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	6	30	8%
2.	Sering	27	108	36%
3.	Kadang-kadang	15	45	20%
4	Jarang	18	36	24%
5	Tidak Pernah	9	9	12%
Jumlah		75	228	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “Memotivasi Dan Bimbingan ,nomor 6 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 27 orang atau sebesar 36% yang memilih ada kalanya 15 orang atau sebesar 20%, jarang ada yaitu 18 orang atau sebesar 24 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 9 orang atau sebesar 12%. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada evaluasi yang dilakukan petugas pendamping .

Dengan demikian berdasarkan kuisisioner diatas dapat dikatakan ada evaluasi yang dilakukan petugas pendamping dalam melakukan bimbingan dan motivasi ,adakalanya petugas pendamping melakukan evaluasi dalam memberikan bimbingan dan motivasi. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah : Apakah ada evaluasi yang dilakukan setelah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyandang disabilitas?

Bapak Ali Machmudin selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan.

Informan: “ setelah melakukan motivasi dan bimbingan tetap ada evaluasinya yaitu dengan evaluasi sama teman-teman yang lain, tingkat keberhasilannya ,kelulusanya dibicarakan oleh para tim.”

Peneliti: “ itu semua apakah sering dilakukan?.”

Informan:“ya, sering selama 1 bulan sekali

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai evaluasi pendamping setelah melakukan bimbingan evaluasi tetap dilakukan yaitu dalam tempo 1 bulan dengan koordinasi dengan tim pendamping lainnya . Dan dapat dikatakan bahwa evaluasi yang dilakukan petugas dalam melakukan motivasi dan bimbingan cukup baik

2. Broker

Dalam konteks PM, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal, seperti halnya di pasar modal, dalam PM terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh “keuntungan” maksimal.

a. Identifikasi dan Pemecah Masalah Disabilitas Yang dihadapi:

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada responden : Apakah petugas pendamping mampu mengidentifikasi permasalahan yang anda hadapi?

Tabel V.50
Kemampuan Petugas Dalam Mengidentifikasi Masalah
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	12	60	16%
2.	Sering	9	36	12%
3.	Ragu-ragu	21	63	28%
4	Jarang	27	54	36%
5	Tidak Pernah	6	6	8%
Jumlah		75	219	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Broker nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu yaitu 12 orang atau sebesar 16%, responden yang memilih jawaban sering 9 orang atau sebesar 12% yang memilih jarang 21 orang atau sebesar 28%, jarang ada yaitu 27 orang atau sebesar 36 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 6 orang atau sebesar 8%. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden menyatakan bahwa petugas pndamping cukup mampu mengidentifikasi permasalahan penyandang disabilitas yang dialami.

Dari hasil kuesioner diatas dapat disimpulkan bahwa peran pendamping sebagai broker cukup mampu memecahkan permasalahan penyandang disabilitas

yang mengalami masalah seperti stigma diskriminasi sosial maupun sikap keluarga. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah : Sebagai pendamping disabilitas menurut anda masalah apa sajakah yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan yang ada di UPTD Loka Bina Karya?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan: “ difabel itu sangat kompleks ,masalahnya tergantung dengan tingkat difabel. Ada difabel yang ringan masalahnya pasti ringan dan ada juga difabel yang permasalahannya juga berat , disini saya ambil tengah-tengahnya difabel itu memang komplek banyak sekali permasalahannya diantara lain kurang diterimanya di masyarakat, dikucilkan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat itu merupakan permasalahan dari disabilitas. Mereka dianggap aib keluarga bahkan ada difabel yang disembunyikan oleh keluarganya, karena keluarganya merasa malu mempunyai keluarga difabel,itu permasalahan-permasalahan di disabilitas.’

Peneliti; “ kalau didalam dunia kerja bagaimana?.”

Informan: “ kalau didunia kerja itu jelas sekali diskriminasinya,karena disini difabel rata-rata bodoh tidak sekolah dan mereka selalu menanyakan dengan ijazah terakhir, biasanya kalau difabel itu tidak sekolah maka dari itu didunia kerja permasalahannya disebabkan karena ijazah terakhir .” didalam pendidikan juga seperti itu,contohnya misal difabel juga pengen sekolah di sekolahan umum dia tidak diperbolehkan, alasanya tidak ada guru khusus maka dari itu difabel kalau ingin sekolah di sekolah SLB dan juga harus ada sekolah ilusi dimana sekolah yang mau menerima difabel tersebut tetapi pihak sekolah tetap menolak karena tidak ada guru khusus .”

Peneliti ;“kalau permasalahannya disabilitas dalam keluarga ,lingkungan itu apa sajakah ? .”

Informan: “ jadi untuk permasalahan disabilitas dalam keluarga itu merupakan aib bagi keluarga difabel tersebut ,keluarga menutup diri mereka tidak mau diketahui bahwa keluarga mereka itu difabel, sedangkan dilingkungan itu memandang sebelah mata .”

Bapak Arief Triono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti: yang saya tanyakan Mas sebagai pendamping menurut anda Masalah apa saja yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan?

Informan: yang pertama permasalahan yang ada di penyandang disabilitas itu yang pertama adalah motivasi diri terkait dengan orangnya atau disabilitasnya itu motivasinya rendah dalam arti begini rata-rata yang tinggal di pedesaan khususnya di wilayah kabupaten Tegal itu masih mempunyai rasa minder percaya diri tidak mau keluar rumah kami sebagai pendamping disabilitas itu berupaya untuk memberikan motivasi terutama motivasi-motivasi memotivasi dirinya supaya supaya Bangkit dari keterpurukan.

Peneliti :ya Mas itu terkait itu berarti dalam penyandang disabilitas juga ada masalah seperti masalah yang tadi masalah dalam dirinya sendiri terus apakah ada masalah yang lainnya masih yang menghambat dalam mendapatkan pelayanan?

Informan : ada faktor dari orang tua orang tua orang tua itu kadang juga sangat berpengaruh dan bisa menghambat bagi disabilitas itu sendiri contohnya misalkan disabilitas itu sudah tidak minder tidak mau lagi mau keluar rumah tapi masih dihambat atau tidak boleh sama orang tua keluar rumah alasannya macam-macam alasannya pada zaman itu bisa yang pertama orang tua itu Malu sendiri dengan mempunyai anak penyandang seorang penyandang disabilitas yang kedua ini mempunyai rasa kekhawatiran yang berlebihan Akhirnya akhirnya tentang misalkan nanti keluar rumah jalannya bagaimana terus tidak tahu jalan pulang. Disamping itu juga ya takut kenapa-napa di jalan Sudah penyandang disabilitas nanti ada apa-apa di jalan Mungkin kecelakaan atau bagaimana.

Peneliti:berarti dalam hal ini faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut itu bisa diambil dari justru dari pihak keluarga keluargakeluarga faktor yang tidak dari keluarga ini sangat berpengaruh sangat besar ini peranan keluarga juga sangat mempengaruhi apa namanya motivasi diri

Informan: Iya benar penyandang disabilitas yang betul sangat berpengaruh sangat berperan sangat penting sangat penting sangat penting terhadap pernyataan seseorang penyandang disabilitas tersebut

Peneliti :Apakah ada faktor lain selain dirinya dan keluarga?

Informan: Faktor lain ada dari lingkungan masyarakat lingkungan masyarakat lingkungan masyarakat itu seperti misalkan kalau ada anak penyandang disabilitas yang sudah keluar rumah tapi kadang kurang diterima oleh masyarakat lingkungan masyarakat Contohnya misalkan diejek diolok-olok dihina dan akhirnya apa seorang penyandang disabilitas bisa kembali ke rumah dan tidak mau keluar lagi. Ketiga faktor sebut juga

tetap menjadi permasalahan yang ada hal ini berarti ada indikasinya penyandang disabilitas mengalami kasus diskriminasi

Berdasarkan hasil wawancara informan, dapat diketahui bahwa mengenai masalah masalah yang biasa dialami penyandang disabilitas antara lain kurang diterimanya di masyarakat, dikucilkan, dianggap aib keluarga bahkan disembunyikan oleh keluarganya, dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan hal tersebut merupakan permasalahan-permasalahan yang biasa dialami oleh penyandang disabilitas.

Sedangkan permasalahan didalam didunia kerja antara lain penyandang disabilitas rata-rata berpendidikan rendah / tidak sekolah dalam mengakses pekerjaan pihak penyedia pekerjaan selalu terkendala dengan syarat formal ijazah terakhir.

Dan didalam dunia pendidikan disabilitas yang ingin bersekolah di sekolahan umum kebanyakan dialihkan kesekolahan khusus (SLB), dikarenakan didalam dunia pendidikan belum semuanya tersedia pendidikan inklusi dengan menyediakan guru khusus ,sarana/prasarana khusus maka dari itu difabel biasanya disekolahkan di sekolahan luar biasa. Maka dapat disimpulkan bahwa selalu ada permasalahan-permasalahan yang dialami penyandang disabilitas dan mereka terbiasa dengan permasalahan tersebut , jika dikaitkan peran pendamping sebagai broker dalam mengidentifikasi permasalahan penyandang disabilitas maka dapat dikatakan cukup baik.

Pertanyaan kedua yang diajukan kepada responden; apakah petugas pendamping mampu mengidentifikasi sumber referal (penyedia pekerjaan) dalam kaitannya dengan kemandirian anda .

Tabel V.51
Identifikasi Sumber Referal
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	12	60	16%
2.	Sering	9	36	12%
3.	Kadang-kadang	21	63	28%
4	Jarang	27	54	36%
5	Tidak Pernah	6	6	8%
Jumlah		75	219	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “ Broker nomor 2 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu yaitu 12 orang atau sebesar 16%, responden yang memilih jawaban Sering 9 orang atau sebesar 12% yang memilih mampu , yang menjawab ada kalanya 21 orang atau sebesar 28%, Jarang yaitu 27 orang atau sebesar 36%, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 6 orang atau sebesar 8%. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden menyatakan bahwa petugas pendamping disabilitas cukup mampu mengidentenfikasi sumber-sumber referal(penyedia lapangan pekerjaan).

Dari kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa adanya sumber-sumber referal yang berkaitan dalam mewujudkan kemandirian,sumber referal tersebut diantaranya penyedia lapangan pekerja, pembuatan kebjakan, kerjasama antar

sektor dalam hal ini peran petugas dalam menjangkau sumber referal dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah : Apakah UPTD LBK berkerjasama dengan penyedia lapangan pekerjaan?apakah pendamping dapat membangun konsorsium mitra dan dapat membantu mewujudkan kemandirian dengan menyalurkan ke penyedia lapangan pekerjaan?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti: “ kemudian sebagai linking ,kalau sebagai petugas pendamping UPTD loka bina karya dalam membangun kerja sama dengan sektor pemerintah dan swasta itu seperti apa ?.”

Informan:“ kembali ke networking lagi ya, pendamping juga memfasilitasi untuk bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan ataupun BUMN maupun BUMD untuk bisa menutup kuota amanat dari UU No 8 th 2016 itu amanatnya untuk dunia kerja penyandang disabilitas di perusahaan –perusahaan tersebut paling tidak 3% yang 2% untuk BUMN dan yang 1% untuk BUMD dan pendamping juga ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang siap menerima penyandang disabilitas.”

Peneliti:“ kira-kira dalam undang-undang tersebut kuota 3% tersebut yang disediakan apakah semua terpenuhi?.”

Informan: “ untuk wilayah kabupaten tegal ini belum semuanya menutup kuota itu karena terkendala dengan ijazah terakhir tadi karena mereka tidak ada rasa khusus untuk kriteria kuota kerja itu secara formal harus seperti itu, untuk di kabupaten tegal ini antara 3% yang sudah bisa menerima penyandang disabilitas.”.

Peneliti: “ dimana sajakah perusahaan yang menerima difabel ?.”

informan:“diantaranya di pabrik roti purimas, pabrik zam, pabrik mujisas, dan teh 2 tang .

Berdasarkan hasil wawancara informan, dapat diketahui bahwa adanya kerjasama networking UPTD Loka Bina Karya dengan pihak terkait seperti perusahaan,intansi lain maupun sumber sumber referal lainnya.

Dan dapat disimpulkan bahwa petugas pendamping UPTD Loka Bina karya mampu melokalisir penyedia sumber kebutuhan dan keinginan penyandang disabilitas .Namun dalam kerjasama yang dibangun untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan belum sepenuhnya dapat membantu mengakses pekerjaan dikarenakan masih banyak penyandang disabilitas yang terhambat dalam syarat formal yaitu ijazah terakhir.

Pertanyaan ketiga yang diajukan kepada responden: Apakah petugas pendamping UPTD Loka Bina karya mampu melokalisir penyedia sumber kebutuhan penyedia lapangan kerja dan keinginan penyandang disabilitas? Jika mampu,maka seperti apa tindakanya?

Tabel V.52
Menjangkau Kerjasama Publik
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	12	60	16%
2.	Sering	9	36	12%
3.	Kadang-kadang	21	63	28%
4	Jarang	27	54	36%
5	Tidak Pernah	6	6	8%
Jumlah		75	219	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Broker nomor 3 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban sangat mampu yaitu 12 orang atau sebesar 16%, responden yang memilih jawaban mampu ada 9 orang atau sebesar 12% yang memilih ada kalanya 21 orang atau sebesar 38%, kurang mampu yaitu 27 orang atau sebesar 36%, dan responden yang memilih jawaban tidak mampu ada yaitu 6 orang atau sebesar 8%. Dapat diketahui bahwa 75 respoden menyatakan bahwa petugas

pendamping cukup mampu melokalisir sumber-sumber kebutuhan penyandang disabilitas.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keinginan dan kebutuhan penyandang disabilitas cukup terpenuhi sehingga dapat dikatakan petugas pendamping cukup baik dalam melokalisir keinginan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah : Apakah petugas pendamping UPTD Loka Bina karya mampu melokalisir penyedia sumber kebutuhan penyedia lapangan kerja dan keinginan penyandang disabilitas? Jika dapata,maka seperti apa tindakanya?

Ibu Kris Fajar Selaku Kepala UPTD Loka Bina Karya pada tanggal

17 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti :yang terkait *linking bu* , atau *jaringan kerja sama* , bagaimana UPTD loka bina karya dalam membangun kerja sama dengan sektor pemerintah lainnya dalam tindak lanjut pemberdayaan disabilitas setelah diberdayakan?

Informan ; kita menjaring itu bisa melalui website nya *dinsos* atau kita bisa langsung ke masing-masing *OPD* kalau memang ada link disana misalnya tenaga kerja perindustrian tenaga kerja itu jadi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan pemberdayaan di *dinsos* berusaha disalurkan ke penyedia kalau di *OPD* tenaga kerja itu menampung tetapi kalau disana ya menyalurkan .

Peneliti; berarti dalam hal ini perusahaan menyediakan kuota khusus untuk penyandang disabilitas ya bu?

Informan ; ya ada 40%

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan peniliti dan Jawaban Informan

Peneliti: “ kira-kira dalam undang-undang tersebut kuota 3% tersebut yang disediakan apakah semua terpenuhi?.”

Informan: “ untuk wilayah kabupaten tegal ini belum semuanya menutup kuota itu karena terkendala dengan ijazah terakhir tadi karena mereka tidak ada rasa khusus untuk kriteria kuota kerja itu secara formal harus seperti itu, untuk di kabupaten tegal ini antara 3% yang sudah bisa menerima penyandang disabilitas.”

Peneliti: “ dimana sajakah perusahaan yang menerima difabel ?.”

Informan: “ diantaranya di pabrik roti purimas, pabrik zam, pabrik mujisas, dan teh 2 tang .”

Peneliti: “ berarti dalam hal ini terkait dengan peran pendamping memberikan pemberdayaan, setelah mendapatkan pemberdayaan petugas pendamping mampu menyalurkan penyandang disabilitas dengan penyedia lapangan pekerjaan sejauh mana tindak lanjutnya?.”

informan: “ tindak lanjutnya sekarang pendamping masih berkoordinasi dengan piha-pihak perusahaan .”

Berdasarkan hasil wawancara informan, dapat diketahui bahwa adanya peran petugas dalam melokalisir penyedia sumber kebutuhan dan keinginan penyandang disabilitas, diantaranya untuk penyandang disabilitas yang sudah pernah mendapatkan pemberdayaan ,petugas pendamping membantu menyalurkan kepenyedia sumber-sumber kebutuhan . Adanya koordinasi antara OPD(Organisasi Perangkat Daerah) lainnya dengan kerjasama yang dibangun untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan .

Dan dapat disimpulkan bahwa pendamping disabilitas cukup mampu membantu penyandang disabilitas dalam mengakses pekerja, hal ini dikarenakan masih banyak penyandang disabilitas yang terhambat dalam mengakses pekerjaan yang terkendala dengan syarat formal yaitu ijazah terakhir dan terkait kebijakan Undang-Undang Nomor 8 tahun2016 yang menyatakan bahwa menyediakan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas 3% dari 100 karyawan belum semuanya terpenuhi dikarenakan kendala tersebut .

b. Linking

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada responden: Setelah mendapatkan pemberdayaan petugas pendamping UPTD Loka Bina Karya membantu anda menyalurkan pekerjaan kepada penyedia lapangan pekerjaan.

Tabel V.53
Menghubungkan Sumber Referral
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu Membantu	12	60	16%
2.	Sering Membantu	9	36	12%
3.	Ragu-ragu	21	63	28%
4	Jarang Membantu	27	54	36%
5	Tidak Membantu	6	6	8%
Jumlah		75	219	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Broker nomor 4 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban Sangat Membantu yaitu 12 orang atau sebesar 16%, responden yang memilih jawaban Sering Membantu 9 orang atau sebesar 12% yang memilih ragu-ragu 21 orang atau sebesar 28%, Kurang membantu 27 orang atau sebesar 28 %, dan responden yang memilih jawaban tidak membantu yaitu 6 orang atau sebesar 8%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden menyatakan bahwa ada peran pendamping dalam membantu menyalurkan pekerjaan kepada penyedia lapangan pekerjaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dapat peran pendamping dalam membantu menyalurkan pekerjaan kepada penyedia lapangan pekerjaan dikatakan cukup baik dalam menyalurkan peserta . Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut :

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah : Apakah setelah mendapatkan pemberdayaan petugas pendamping UPTD Loka Bina Karya membantu penyandang disabilitas menyalurkan pekerjaan kepada penyedia lapangan pekerjaan?

Drs. Kris Fajar M.Pd Selaku Kepala UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan: jadi setelah mendapatkan pemberdayaan UPTD Loka Bina Karya tetap menyalurkan yang memfasilitasi ya kalau mau di ada itu kriteria khusus harus yang sudah misalnya yang sudah memahami keterampilan seperti itu jadi nanti ada di sana nanti di tes lagi kalau ada permintaan di coba kirim sana yang mereka mau di sana di tes nanti kalau apa itu sesuai dengan kriteria dari perusahaan ya diterima sampai kan waktu itu selain tadi kan yang itu ya

Peneliti; berarti setelah mendapatkan pemberdayaan UPTD loka bina karya tetap menyalurkan ya bu,

Informan ;ya memberikan informasi dulu disini ada kalau mau nanti disalurkan

Peneliti: apakah disini ada kriteria khusus bu yang sudah memahami?

Informan: biasanya perusahaan mempunyai kriteria yang berbeda beda ,kalau ada permintaan dicoba dikirim kesana kalau mereka mau disana di tes nanti kalau lulus diterima .

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan “: “ kembali ke networking lagi ya, pendamping juga memfasilitasi untuk bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan ataupun BUMN maupun BUMD untuk bisa menutup kuota amanat dari UU No 8 th 2016 itu amanatnya untuk dunia kerja penyandang disabilitas di perusahaan –perusahaan tersebut paling tidak 3% yang 2% untuk

BUMN dan yang 1% untuk BUMD dan pendamping juga ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang siap menerima penyandang disabilitas.”

Informan: “ untuk wilayah kabupaten tegal ini belum semuanya menutup kuota itu karena terkendala dengan ijazah terakhir tadi karena mereka tidak ada rasa khusus untuk kriteria kuota kerja itu secara formal harus seperti itu, untuk di kabupaten tegal ini antara 3% yang sudah bisa menerima penyandang disabilitas.”

Peneliti : “ dimana sajakah perusahaan yang menerima difabel ?.”

Informan: diantaranya di pabrik roti purimas, pabrik zam, pabrik mujisas, dan teh 2 tang”.

Berdasarkan hasil wawancara informan, dapat diketahui bahwa adanya peran pendamping dalam membantu penyandang disabilitas dalam menyalurkan pekerjaan kepada penyedia lapangan pekerjaan. Setelah mendapatkan pemberdayaan UPTD Loka Bina Karya tetap menyalurkan dan memfasilitasi. Yang pertama memberikan informasi terkait adanya lowongan, dan dalam hal ini ada procedure perusahaan dalam melakukan seleksi dengan kriteria khusus harus yang sudah memenuhi kriteria yaitu yang sudah memahami keterampilan setelah itu tetap ada tahapan tes sesuai dengan kriteria dari perusahaan .

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa UPTD Loka Bina Karya bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan yang siap menerima penyandang disabilitas seperti BUMN maupun BUMD untuk memenuhi kuota pekerjaan dari amanat UU No 8 th 2016 yaitu setidaknya 3% yang 2% untuk BUMN dan 1% untuk BUMD .

Pertanyaan yang kedua yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah petugas pendamping mampu menghubungkan sumber referal dengan tindak lanjut, pendistribusian sumber, dan menjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima dengan pelayanan yang inklusif.

Tabel V.54
Menghubungkan Sumber Referal Dengan Tindak Lanjut,
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat Mampu	3	15	4%
2.	Mampu	9	36	12%
3.	Kadang-kadang	33	99	44%
4.	Kurang Mampu	24	48	32%
5.	Tidak Mampu	6	6	8%
Jumlah		75	204	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Broker nomor 5 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban sangat mampu yaitu 3 orang atau sebesar 4%, responden yang memilih jawaban mampu 9 orang atau sebesar 12% yang memilih ada kalanya ada yaitu 33 orang atau sebesar 44%, kurang mampu yaitu 24 orang atau sebesar 32 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mampu yaitu 6 orang atau sebesar 8%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 75 responden penyandang disabilitas menyatakan bahwa kemampuan petugas dalam menghubungkan dengan sumber referal dengan tindak lanjut, pendistribusian sumber, dan dapat jaminan bahwa barang-barang dan jasa.

Dan dapat disimpulkan bahwa ni peranan petugas sebagai broker dapat dikatakan cukup baik . Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah : Bagaimana petugas pendamping mampu menghubungkan sumber referal dengan tindak

lanjut, pendistribusian sumber, dan menjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima dengan pelayanan yang inklusif ? lalu seperti apa perwujudanya?.

Ibu Kris Fajar Selaku Kepala Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan “pada penyandang disabilitas itu ada kriteria tertentu dalam mendapatkan bantuan terus juga kalau bantuan bantuan yang diberikan juga nggak sama Tergantung bantuannya usaha ekonomi produktif berarti pemberian bantuan itu mereka Minimal punya usaha yang dimiliki sehingga pemerintah memberikan bantuan tidak cuma-cuma
Oh iya itu juga termasuk dari tindak lanjut hasil pemberian program pasalnya pemberdayaan berhasil kemudian mendirikan usaha kemudian juga ada program bantuan yang sesuai permintaan kalau alat kesehatan bantuan alat pendengaran dalam pemberian bantuan tersebut juga ada standar operasional nya sendiri Maksudnya standar operasional prosedur dalam melaksanakan pelayanan tersebut Ada standarnya misalnya kayak pemberian bantuan alat dengar dia diperiksa dulu nggak bisa kan tidak diberi nggak bisa mendapatkan bantuan.”.

Bapak Arief Triono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti :Berarti setelah mendapatkan pemberdayaan tersebut ada kerja sama juga dengan sektor swasta

Informan: itu ada-ada untuk jejaring dengan supaya disabilitas yang sudah mendapatkan pelatihan itu kita upayakan mereka itu mendapatkan pekerjaan di sektor swasta seperti seperti di apa di konveksi konveksi daerah ini Adiwerna itu kan banyak industri kebanyakan kan itu menjahit ada juga yang bekerja di pihak perusahaan. memang belum banyak Setiap perusahaan karena disabilitas itu terkendala dengan ijazah tapi kalau kemampuan itu mereka mampu tapi masih terkendala dengan terkendala juga dengan syarat formal dalam mendapatkan pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara informan, dapat diketahui bahwa adanya sumber referal dengan tindak lanjut, pendistribusian sumber, dan menjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima dengan pelayanan yang inklusif

dalam memberikan bantuan pada penyandang disabilitas itu ada kriteria tertentu dalam mendapatkan bantuan, bantuan yang diberikan juga tidak sama tergantung kebutuhan si penerima manfaat, misalnya bantuannya usaha ekonomi produktif berarti pemberian bantuan itu mereka minimal punya usaha yang dimiliki sehingga pemerintah memberikan bantuan tidak cuma-cuma. Berdasarkan hasil wawancara informan dapat disimpulkan bahwa ini peranan petugas dalam tindak lanjut, pendistribusian sumber, dan menjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima dengan pelayanan yang inklusif jika dikaitkan dengan peran sebagai broker maka dapat dikatakan cukup baik

c. Goods and Services

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah Anda pernah mendapatkan bantuan baik materiil ataupun non materiil yang diberikan oleh UPTD Loka Bina Karya

Tabel V.55
Distribusi Sumber Kebutuhan
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	6	30	8%
2.	Sering	9	36	12%
3.	Ada Kalanya	33	99	44%
4.	Jarang	15	30	20%
5.	Tidak Pernah	12	12	16%
Jumlah		75	207	100%

d. Sumber : angket penelitian desember 2019 “Goods and Services

nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu ada yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 9 orang atau sebesar 12% yang memilih ada kalanya yaitu 33 orang atau sebesar 44%, jarang ada yaitu 15 orang atau sebesar 20 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah yaitu 12 orang atau sebesar 16%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden menyatakan bahwa penyandang disabilitas pernah mendapatkan bantuan baik materiil ataupun non materiil yang diberikan oleh UPTD Loka Bina Karya .

Dan melalui kuisisioner diatas disimpulkan bahwa peran petugas pendamping dalam memberikan bantuan baik materiil ataupun non materiil dapat dikatakan cukup baik . Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah ada bantuan baik materiil maupun non materiil yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas? lalu dalam bentuk apa saja bantuan tersebut diberikan?

Ibu Kris Fajar H M.Pd Selaku Kepala UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan“pada penyandang disabilitas itu ada kriteria tertentu dalam mendapatkan bantuan terus juga kalau bantuan bantuan yang diberikan juga nggak sama Tergantung bantuannya usaha ekonomi produktif berarti pemberian bantuan itu mereka Minimal punya usaha yang dimiliki sehingga pemerintah memberikan bantuan tidak cuma-cuma Oh iya itu juga termasuk dari tindak lanjut hasil pemberian program pasalnya pemberdayaan berhasil kemudian mendirikan usaha kemudian juga ada program bantuan yang sesuai permintaan kalau alat kesehatan bantuan alat pendengaran dalam pemberian bantuan tersebut juga ada standar operasional nya sendiri Maksudnya standar operasional

prosedur dalam melaksanakan pelayanan tersebut Ada standarnya misalnya kayak pemberian bantuan alat dengan dia diperiksa dulu nggak bisa kan tidak diberi nggak bisa mendapatkan bantuan.”

Bapak Arif Triyono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan “untuk bantuan ada juga yang istilahnya bantuan ekonomi misalkan peralatan untuk menunjang perekonomian penyandang disabilitas contoh ada seorang penyandang disabilitas yang usahanya berdagang tapi belum mempunyai alat untuk berdagang contohnya etalase kecil itu kita upaya untuk apa ya menggali informasi barangkali ada program bantuan yang dari pusat atau pun kita berupaya dengan cara mengajukan membuat proposal pengajuan bantuan untuk peralatan Perekonomian mereka ada yang etalase, ada yang peralatan masak ada juga yang untuk menjahit peralatan jahit mesin jahit itu juga .Terus kaitanya dengan bantuan Alkes alat kesehatan kesehatan tongkat. dan juga yang kaki palsu ataupun tangan palsu juga diupayakan

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti : “ apakah anda pernah mendapatkan bantuan materil maupun non materil yang diberikan oleh UPTD? Yang menjawab selalu ada 6,yang menjawab sering ada 9,yang menjawab ada kalanya 33,jarang 15,tidak pernah 12, dalam hal ini rata-rata penyandang disabilitas mendapatkan bantuan,bantuan seperti apa yang telah diberikan?.”

Informan: “ pertama yaitu bantuan pelatihan-pelatihan, kedua peralatan ,yang ketiga permodalan .”

Peneliti : “ Kriteria yang berhak mendapatkan bantuan tersebut seperti apa?.”

Informan: “ kriterianya yaitu harus difabel dengan usia produktif terus ada kemauan untuk maju .”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa ada pemberian bantuan sosial seperti bantuan usaha (ekonomi) ,bantuan alat kesehatan,bantuan alat yang disediakan pemerintah dan ada kriteria khusus untuk mendapatkan bantuan tersebut .

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis menyimpulkan bahwa peran pendamping sebagai broker yaitu memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mengakses bantuan yang disediakan diantaranya bantuan pelatihan-pelatihan usaha, bantuan peralatan, bantuan alat kesehatan dan lainya dapat dikatakan cukup baik .

Pertanyaan kedua yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah pelayanan yang diberikan petugas pendamping mampu memenuhi keinginan anda dalam mendapatkan kebutuhan dasar ?

Tabel V.56
Pemenuhan Kebutuhan
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat Mampu	9	45	12%
2.	Mampu	12	48	16%
3.	Ragu-ragu	30	90	40%
4	Kurang Mampu	18	36	24%
5	Tidak Mampu	6	6	8%
Jumlah		75	225	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Good and Services nomor 2 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban sangat mampu yaitu 9 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih jawaban Mampu 12 orang atau sebesar 16% yang memilih ragu-ragu 30 orang atau sebesar 40%, Kurang Mampu yaitu 18 orang atau sebesar 24 %, dan responden yang memilih jawaban tidak mampu yaitu 6 orang atau sebesar 8%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 75 responden menyatakan bahwa adanya peran petugas pendamping dalam membantu

memenuhi keinginan penyandang disabilitas dalam mendapatkan kebutuhan dasar dan pelayanan sudah diberikan dengan cukup baik .

Dengan demikian berdasarkan kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa petugas pendamping cukup membantu memenuhi keinginan penyandang disabilitas dalam mendapatkan kebutuhan dasar dan pelayanan sudah diberikan dengan cukup baik . Hal ini ditunjang dengan hasil wawancara dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah : Apakah Pelayanan selalu diberikan petugas pendamping mampu memenuhi keinginan penyandang disabilitas dalam mendapatkan kebutuhan dasar?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti: “apakah pelayanan yang diberikan itu sudah memenuhi keinginan mereka , menurut anda selaku pendamping bagaimana?.”

Informan: “menurut pendamping pelayanan di lbk itu sudah sesuai karena program di lbk itu ada suara dari difabel itu sendiri dan program itu diadakan karena kemauan dari penyandang disabilitas itu sendiri .”

Peneliti: “pelayanan yang diberikan selalu dibutuhkan dan yang dibutuhkan itu seperti apa?.”

Informan: “untuk pelatihan di lbk itu sangat dibutuhkan karena mereka itu sangat berharap adanya pelatihan-pelatihan di lbk itu untuk menopang difabel agar bisa mengangkat perekonomian difabel itu sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara informan, dapat diketahui bahwa mengenai pelayanan yang diberikan petugas pendamping mampu memenuhi keinginan penyandang disabilitas dalam mendapatkan kebutuhan dasar

Dapat disimpulkan melalui wawancara diatas bahwa pelayanan di LBK itu sudah sesuai harapan karena program di LBK itu ada suara dari difabel itu sendiri dan program itu diadakan karena kemauan dari penyandang disabilitas itu sendiri

“ untuk pelatihan di lbk itu sangat dibutuhkan karena mereka itu sangat berharap adanya pelatihan-pelatihan di lbk itu untuk menopang difabel agar bisa mengangkat perekonomian difabel.” Jika dikaitkan peran petugas sebagai broker dapat dikatakan cukup baik.

Pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah Pelayanan yang diberikan dan disediakan selalu dibutuhkan penyandang disabilitas demi mewujudkan kemandirian anda?

Tabel V.57
Kebutuhan Pelayanan
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	9	45	12%
2.	Sering	12	48	16%
3.	Kadang-kadang	33	99	44%
4	Jarang	15	30	20%
5	Tidak Pernah	6	6	8%
Jumlah		75	228	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Good and Services” nomor 3 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu ada yaitu 9 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih jawaban sering 12 orang atau sebesar 16% yang memilih kadang-kadang dilakukan 33 orang atau sebesar 40%, jarang ada yaitu 15 orang atau sebesar 20 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 6 orang atau sebesar 8%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 responden menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan dan disediakan sering dibutuhkan oleh

penyanggah disabilitas demi mewujudkan kemandirian dalam hal ini peranan petugas sebagai broker dapat dikatakan sudah baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah pelayanan yang diberikan dan disediakan selalu dibutuhkan penyandang disabilitas? apakah mampu mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban

Informan “ : “ menurut saya difabel untuk menuju kemandirian sangat susah, makanya fungsi untuk memberdayakanya di lbk itu terbiasa mendapatkan modal untuk alat dan modal usaha lalu disini peran pendamping untuk memonitoring kegiatan-kegiatan setelah mengikuti pelatihan itu agar dapat berkembang dengan modal yang telah didapatkan

Peneliti: “biasanya rata-rata berapa orang peserta yang mengikutinya?.”

Informan: “ banyaknya peserta yang mengikutinya rata-rata mencapai 20 orang, setiap pendamping ada 6 orang yang masing-masing memegang 4 orang peserta difabel.”

Peneliti: “ Dari 20 peserta tersebut, berapakah prosentase tingkat kemandirian setelah diberdayakan? .”

Informan: dari tingkat kemandirian disini tidak dapat diukur dengan prosentase , tetapi kira-kira bisa mencapai 40 % sebab difabel itu beragam ada yang berpendidikan dan ada tidak berpendidikan, jadi dalam mengukur kemandirian dapat dilihat dari pendidikan dimana dapat mengembangkan diri atau tidak.”.

Berdasarkan hasil wawancara informan, dapat diketahui bahwa penulis pelayanan yang diberikan dan disediakan selalu dibutuhkan penyandang disabilitas diantaranya pemberdayaan, bantuan sosial alat kesehatan , motivasi dan bimbingan.

Dan melalui wawancara diatas dapat simpulkan bahwa mengenai pelayanan yang ada di UPTD LBK sudah diberikan sesuai apa yang dibutuhkan oleh

penyandang disabilitas namun outcome dari hasil pelayanan seperti pemberdayaan berupa kemandiriian belum diwujudkan dan hanya kisaran 40 % yang mampu berdaya dari 20-25 peserta pemberdayaan.

e. Quality Control

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah ada monitoring, evaluasi kepada penyandang disabilitas setelah pelayanan UPTD Loka Bina Karya diberikan?

Tabel V.58
Monitoring dan Evaluasi
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	9	45	12%
2.	Sering	12	48	16%
3.	Kadang-kadang	27	81	36%
4	Jarang	21	42	28%
5	Tidak Pernah	6	6	8%
Jumlah		75	222	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Quality control nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu ada yaitu 9 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih jawaban sering 12 orang atau sebesar 16% yang memilih ada kalanya 27 orang atau sebesar 36%, jarang ada yaitu 21 orang atau sebesar 28%, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 6 orang atau sebesar 8%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas 75 respoden menyatakan bahwa ada pengawasan kepada penyandang disabilitas setelah mendapatkan pelayanan

pengawasan dilakukan guna sejauh mana hasil yang dicapai dan bermanfaat bagi penyandang disabilitas.

Dan dapat disimpulkan bahwa peran petugas dalam melakukan monitoring, evaluasi kepada penyandang disabilitas setelah pelayanan UPTD Loka Bina Karya diberikan dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah : Apakah ada pengawasan yang dilakukan petugas pendamping kepada penyandang disabilitas setelah mendapatkan, Pemberdayaan dan bantuan UEP? Jika ada bagaimana pengawasan tersebut dilakukan?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan “kami selalu tetap memantau walaupun mereka sudah punya usaha dan sudah mandiri tetapi yang namanya pendamping tetap monitoring, memberikan motivasi, memberikan masukan biar mereka lebih mantap lagi dalam berusaha dan yang baru ini ingin mengajukan program UEP sebanyak 20 orang itu langsung ke kementerian termasuk hasil penelitian tata boga dan akhirnya sampai keluar permodalanya perorang mendapatkan hasilnya sebanyak 5 juta.”

Peneliti: pengawasan yang dilakukan pada penyandang disabilitas setelah mendapatkan pemberdayaan, bantuan UEP, bantuan usaha atau pelatihan keterampilan, untuk pendampingan bagaimana cara pengawasannya?.

Informan: “pengawasannya kita dilakukan secara rutin selama 1 minggu atau 1 bulan sekali kita monitoring kerumah difabel kita disitu lihat hasil dari produksi atau kualitasnya, managemenya bagaimana, disitu kita selalu mengawasi.”

Bapak Arif triono : Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina

Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti ;setelah mengikuti pelatihan dan proses pemberdayaan pembuat web diberikan Apakah ada pengawasan yang dilakukan? penyandang disabilitas

Informan: Nah setelah mendapatkan bantuan tersebut masih ada ada pengawasan atau monitoring yang berkelanjutan tetap kami selaku pendamping Kami selalu monitoring kepada mereka yang sudah kita berdayakan baik itu yang ada di rumah ataupun di perusahaan itu bisa kami monitoring jadi kita pengen tahu sejauh mana pelayanan yang sudah kita berikan Apakah itu memang bermanfaat atau tidak jadi kalau memang tidak bermanfaat Seperti apa kita harus bisa mencari solusi solusi yang terbaik supaya harapan kita adalah penyandang disabilitas itu mampu mampu bersaing di masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara informan, dapat diketahui bahwa Monitoring dan evaluasi petugas pendamping sudah dilaksanakan disertai memberikan motivasi , memberikan masukan biar mereka lebih mantap lagi dalam berusaha tetap memantau walaupun penyandang disabilitas sudah punya usaha dan sudah mandiri .

Dan dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan petugas pendamping cukup baik dalam melakukan evaluasi, monitoring dilakukannya secara berkala untuk mengetahui hasil dari pelayanan yang telah diberikan apakah mempunyai dampak manfaat dll.

Pertanyaan kedua yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah setelah mendapatkan pemberdayaan , bantuan UEP ,fasilitasi pelayanan lainnya ada evaluasi petugas pendamping kepada anda yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan?

Tabel V.59
Konsisten Dalam Melakukan Evaluasi
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	9	45	12%
2.	Sering	15	60	20%
3.	Kadang-kadang	24	72	32%
4	Jarang	21	42	28%
5	Tidak Pernah	6	6	8%
Jumlah		75	225	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Quality control nomor 2 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu ada yaitu 9 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih jawaban sering 15 orang atau sebesar 20% yang memilih ada kalanya 24 orang atau sebesar 32%, jarang ada yaitu 21 orang atau sebesar 28 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 6 orang atau sebesar 8%. Dari tabel diatas dapat diketahui 75 responden menyatakan bahwa ada evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Dengan demikian berdasarkan kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa setelah mendapatkan pemberdayaan , bantuan UEP ,fasilitasi pelayanan lainnya evaluasi biasanya dilakukan secara bertahap serta kadang kala dilakukan terus menerus dengan begitu peran petugas pendamping cukup baik. Hal ini ditunjang dengan hasil wawancara dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah setelah memeberikan pemberdayaan , bantuan UEP ,fasilitasi pelayanan lainnya ada evaluasi yang dilakukan oleh petugas ?lalu bagaimna evaluasi tersebut dilakukan?

Bapak Margi Hanur C,SE Selaku Pendamping Disabilitas UPTD

Loka Bina Karya pada tanggal 15 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan; “memantau dari UPTD LBK, itu akan tetap mengawal tindak lanjut setelah pelatihan ada manfaatnya nggak mereka setelah pelatihan menciptakan kegiatan usaha apa ndak, pendapatannya berapa dari kegiatan usahanya setelah itu baru nanti UPTD pendamping melakukan monev. monitoring dan evaluasi gambarannya apa setelah dilakukan monev, monitoring dan evaluasi pemerintah di dinas sosial memberikan 1 langkah ke rumah setelah monev mengusulkan disabilitas agar mendapatkan bantuan bantuan UEP baik dari Kementerian maupun provinsi setelah kita melakukan monev, untuk peningkatan kegiatan usaha agar lebih meningkat agar lebih tercapainya tingkat kesejahteraan maka membutuhkan misalnya misalnya membutuhkan bantuan modal perhatian dari pemerintah Kita usulkan sebelumnya kita usulkan dulu lewat pengajuan pengajuan proposal agar mereka mendapatkan bantuan modal setelah mendapatkan bantuan untuk menambah modal kegiatan tetap Kita kawal. Seberapa jauh kemajuan yang diperoleh setelah mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah? kita juga akan melakukan monev gambaran-gambaran untuk peningkatan kesejahteraan disabilitas kabupaten tegal itu gambaran yang ada .

Berdasarkan hasil wawancara informan, dapat diketahui bahwa adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan seperti mengawal hasil dari peserta pelatihan, hasil dari pemberian bantuan usaha berupa modal, mengukur ketrcapaain program dari tingkat kemandirian, manfaat yang dicapai, kemajuan yang diperoleh ,hingga evaluasi tentang tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas.

Dan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran petugas dalam melakukan evaluasi dan monitoring secara konsisten dapat dikatakan cukup baik .

f. Assesment Kebutuhan Disabilitas

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah Anda mengetahui langkah-langkah assesment petugas pendamping dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar anda

Tabel V.60
Pengetahuan Tentang Assesment Petugas Pendamping
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Sangat mengetahui	15	75	20%
2.	Mengetahui	9	36	12%
3.	Ragu-ragu	21	63	28%
4	Kurang mengetahui	18	36	24%
5	Tidak mengetahui	12	12	16%
Jumlah		75	222	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Assesment kebutuhan disabilitas nomor 1 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban Sangat Mengetahui yaitu 9 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih jawaban Mengetahui 15 orang atau sebesar 20% yang memilih ada kalanya 21 orang atau sebesar 28%, Kurang Mengetahui yaitu 18 orang atau sebesar 24 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah mengetahui ada yaitu 12 orang atau sebesar 16%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 75 responden penyandang disabilitas cukup mengetahui langkah-langkah assesment petugas pendamping dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

Dan dari hasil kuisinoer diatas dapat disimpulkan bahwa asesmen dilakukan untuk menjangkau penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan dan dalam hal ini peranan petugas dalam memberikan pengetahuan

dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah bagaimana langkah-langkah assesment petugas pendamping dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar anda?apakah penyandang disabilitas mengetahui langkah-langkah tersebut?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti: “terkait dengan assesment kebutuhan mereka seperti apa?”

Informan: “ untuk assesment kebutuhan mereka kita biasanya selalu kita tanyakan kebutuhan yang diperlukan apa saja ,yang menjadi permasalahannya apa, yang menjadi kendala apa seperti itu.”

Peneliti: “ bagaimana mekanisme tugas pendamping ketrampilan dalam membangun jaringan usaha?.”

Informan: “berhubungan dengan jaringan disini kita berkomunikasi dahulu dengan pihak yang akan kita ajak untuk bekerja sama,lalu adanya pendekatan antara difabel dengan pihak yang mempunyai usaha .”

Bapak Arif Triono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina

Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti : berarti pengawasan tersebut dilakukan secara terus-menerus yang betul kalau terkait dengan asesmen kebutuhan disabilitas Mas bagaimana sih mekanisme PT Loka Bina Karya Dalam Melakukan asesmen kebutuhan penyandang disabilitas ?

Informan.kita tanyakan kepada mereka sebenarnya Keinginan mereka itu apa kan tidak serta merta pemerintah itu memberikan bantuan pada hal yang penerima manfaat atau penyandang disabilitas itu mempunyai keinginan yang berbeda artinya kan tidak klop tidak ya tidak sesuai dengan keinginan mereka untuk pendamping disabilitas itu menanyakan misalkan apa sih kebutuhan saat ini yang sangat dibutuhkan misalkan kita datang ke keluarga yang mempunyai anak penyandang disabilitas kita tanyakan terutama kepada penyandang disabilitas tersebut kita amati kita cermati bahwa penyandang disabilitas kita tanyakan bahwa yang di yang di misalkan yang dibutuhkan adalah alat bantu gerak tongkat karena

memang belum punya tongkat kita utamakan itu kita utamakan itu setelah mendapatkan tongkat baru Setelah mendapatkan tongkat berlanjut mungkin nanti butuh keterampilan ya kita tanyakan keterampilan seperti apa? Apakah menjahit Apakah sablon? Apakah kita kita tanyakan itu lah suka-suka dari seorang pendamping disabilitas di lapangan untuk mengakses pelatihan pemberdayaan juga ada kriteria tersendiri yang khas dalam cari aplikasi untuk mendapatkan pemberdayaan lembar dan disini kita kembalikan kepada sistem sistem yaitu rbm rehabilitasi berbasis masyarakat Kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri apalagi masyarakat untuk penyandang disabilitas kan jauh beda antara masyarakat dengan wilayah sana sini Kita sesuaikan berusaha kita menyesuaikan kita memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan tapi Toh kalau memang tidak tidak sesuai dengan keinginan mereka ya kita kembalikan kepada program ataupun program dari pemerintah kalau terkait benar tentang pelayanan yang ada di LBK Mas layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang sedang kita yang sudah diberikan kepada pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang pertama adalah motivasi yang kedua keterampilan ilmu keterampilan ilmu keterampilan keterampilan menjahit keterampilan komputer dan lain-lain dan yang ketiga yang sudah diberikan adalah kembali kepada perekonomian mereka kita melakukan pengawasan pemberdayaan adalah pengawasan kita dan mereka supaya mereka itu bisa hidup mandiri dengan kasar ya kita memberikan ilmu kepada orang bilang pelatihan keterampilan

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai langkah-langkah dalam melakukan asasesment kebutuhan yaitu identifikasi kebutuhan apa yang diperlukan , identifikasi permasalahannya apa yang dihadapi, kendala apa yang yang dialami. Dan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa asesmen dilakukan untuk menjangkau penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan dan dalam hal ini peranan petugas dalam memberikan pengetahuan dapat dikatakan cukup baik

Pertanyaan kedua yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah petugas pendamping UPTD loka Bina Karya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam melakukan asesmen kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas

Tabel V.61
Ketrampilan Petugas Melakukan Assesment
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	15	75	20%
2.	Sering	9	36	12%
3.	Ada Kalanya	24	72	32%
4	Jarang	18	36	24%
5	Tidak Pernah	9	9	20%
Jumlah		75	228	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Assesment Kebutuhan Disabilitas nomor 2 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu ada yaitu 15 orang atau sebesar 20%, responden yang memilih jawaban sering 9 orang atau sebesar 12% yang memilih ada kalanya 24 orang atau sebesar 32%, jarang ada yaitu 18 orang atau sebesar 24 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 9 orang atau sebesar 12%.

Dari tabel diatas diketahui bahwa ada kemampuan petugas dalam melakukan assesment kebutuhan penyandang disabilitas.

Dengan demikian berdasarkan kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa petugas pendamping UPTD loka Bina Karya sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam melakukan asesmen kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah Bagaimana Petugas pendamping UPTD loka Bina Karya melakukan asesmen kebutuhan

masyarakat penyandang disabilitas?kemampuan apa yang harus dimiliki dalam memberikan assesment tersebut?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan;“ jadi kita melihat kondisi terlebih dahulu , kondisi difabelnya seperti apa, terus kita menggunakan trik yang berbeda dengan memotivasi difabel yang lain dan kita gunakan trik-trik tersendiri,misalkan kita ajak bicara,bercanda,setelah merka respon baru kita masuk untuk motivasi .”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melakukan assesment penyandang disabilitas diantaranya dengan melihat kondisi terlebih dahulu , kondisi difabelnya seperti apa, dan dengan menggunakan trik yang berbeda dengan memotivasi difabel satu dengan yang lain dan dengan menggunakan trik-trik khusus , misalkan mengajak bicara, bercanda, setelah merka respon baru kita masuk untuk melakukan apa kebutuhannya .

g. Ketrampilan Membangun Konsorsium dan Jaringan Antar Organisasi Secara Konsisten

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah Setelah mendapatkan pemberdayaan,bantuan UEP,UPSK, apakah petugas pendamping membantu penyandang disabilitas dalam membangun usaha bersama dan membangun jaringan antar pengusaha secara konsisten ?

Tabel V.62
Jejaring Usaha
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	15	75	20%
2.	Sering	9	36	12%
3.	Kadang-kadang	21	63	28%
4.	Jarang	18	36	24%
5.	Tidak Pernah	12	12	16%
Jumlah		75	222	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,ketrampilan membangun konsorsium dan jaringan usaha nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu yaitu 15 orang atau sebesar 20%, responden yang memilih jawaban sering 9 orang atau sebesar 12% yang memilih ada kalanya dilakukan 21 orang atau sebesar 28%, jarang ada yaitu 18 orang atau sebesar 24 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 12 orang atau sebesar 16%. Dapat diketahui bahwa ada peran petugas dalam membangun ketrampilan usaha bersama.

Dengan demikian berdasarkan kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa setelah mendapatkan pemberdayaan,bantuan UEP,UPSK petugas pendamping cukup membantu penyandang Disabilitas dalam membangun usaha bersama dan membangun jaringan antar pengusaha secara konsisten dalam hal ini peran petugas pendamping dalam membangun konsorsium dan jaringan antar oragnisasi secara konsisten dapat dikatakan cukup baik. hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini :

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah Apakah Setelah mendapatkan pemberdayaan, bantuan UEP, UPSK petugas pendamping membantu penyandang Disabilitas dalam membangun usaha bersama dan membangun jaringan antar pengusaha secara konsisten? lalu seperti apa tindak lanjutnya.

Drs. Kris Fajar A M.Pd selaku Kepala UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

peneliti: Apakah setelah pemberdayaan dilakukan di Loka Bina Karya apakah dapat menempatkan penyandang disabilitas dalam membangun kelompok usaha bersama ?

Informan: yang telah mandiri setelah mendapatkan bantuan ketrampilan maka didirikan kelompok usaha bersama setelah Mandiri tidak ada modal nanti kalau sudah berjalan baru kita mintakan bantuan ya kalau itu biasanya kan dah ada kendala-kendala dalam hal pemasaran ku satu mungkin biaya operasionalnya yang untuk ke itu sendiri yang kedua mungkin hasil dari produknya belum belum memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen mungkin kalau yang sudah kan yang sudah jalan seperti itu. Ditampung di agen. Kemudian dari agen baru disalurkan ke Dalam jangka lama setelah setelah habis baru kita bisa atau produsen bisa menerima uang kecuali kalau yang mungkin dia buka usaha sendiri seperti warung kendalanya itu mungkin kualitasnya juga belum ”.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai sosialisasi Setelah mendapatkan pemberdayaan, bantuan UEP, UPSK petugas pendamping membantu penyandang Disabilitas dalam membangun usaha bersama dan membangun jaringan antar pengusaha secara konsisten. dalam hal ini peran petugas pendamping dalam membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi secara konsisten dapat dikatakan cukup baik

3. Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran

mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (win-winsolution). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela dimana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri.

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada responden: Sebagai penyandang disabilitas, apakah anda pernah mengalami diskriminasi sosial didalam kehidupan anda?

Tabel V.63
Diskriminasi Yang Dialami
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu Mengalami	15	75	20%
2.	Sering Mengalami	27	108	36%
3.	Ada Kalanya	18	54	24%
4.	Jarang Mengalami	6	12	8%
5.	Tidak Pernah	9	9	12%
Jumlah		75	258	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Mediator nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu mengalami yaitu 15 orang atau sebesar 20%, responden yang memilih jawaban sering mengalami 27 orang atau sebesar 36% yang memilih ada

kalanya 18 orang atau sebesar 24%, jarang mengalami yaitu 6 orang atau sebesar 8 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 9 orang atau sebesar 12 %. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 75 responden menyatakan bahwa mereka sudah terbiasa mengalami kasus diskriminasi dalam kehidupan sosial dan masyarakat.

Dari kuisioner diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas terbiasa mengalami diskriminasi, seperti diskriminasi dalam kehidupan sosial, diskriminasi pendidikan, diskriminasi pekerjaan. Dalam hal peran mediator sangat diperlukan untuk memediasi permasalahan yang dialami penyandang disabilitas, seperti diskriminasi dalam kehidupan sosial dunia pendidikan dan masyarakat. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah: Menurut anda sebagai pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya, apakah penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi sosial didalam kehidupan bermasyarakat?

Bapak Arif Triyono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan “: di dalam masyarakat permasalahan yang ada di masyarakat bagi penyandang disabilitas yaitu yang pertama adalah kurang diperhatikan terutama hak mereka hak mereka mereka juga mempunyai hak yang sama kadang masyarakat itu belum belum tahu atau belum memperhatikan mereka contoh saja hak mendapatkan pendidikan pendidikan juga masih belum apa yang belum memperhatikan penyandang disabilitas sesuai dengan keinginannya sesuai dengan fisiknya mereka juga mengalami kendala yaitu permasalahan itu sidang ke-2 di masyarakat lingkungan masyarakat itu kadang masih masih ada yang masyarakat yang mengejek itu juga ada terus juga merasa masyarakat itu menilai bahwa kurang mampu hasilnya tidak Punya apa? Sejauh sejauh orang umum pada

umumnya masih nilai masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang masih rendah masih rendah yang masih diremehkan.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas terbiasa mengalami diskriminasi, seperti diskriminasi dalam kehidupan sosial, diskriminasi pendidikan, diskriminasi pekerjaan .

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai masalah yang dihadapi penyandang disabilitas diantaranya isu-isu persamaan hak, diskriminasi didalam keluarga, masyarakat dunia kerja , stigma yang dialami penyandang disabilitas, dianggap sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya . Dalam hal peran mediator sangat diperlukan untuk memediasi permasalahan yang dialami penyandang disabilitas, seperti diskriminasi dalam kehidupan sosial dunia pendidikan dan masyarakat. Dapat dikatakan peran pendamping sebagai mediator dapat dikatakan baik.

Pertanyaan Kedua yang peneliti ajukan kepada responden: Menurut anda, apakah petugas pendamping membantu anda dalam memediasi ke pemerintah terkait isu-isu persamaan hak, diskriminasi, stigma yang dialami penyandang disabilitas?

Tabel V.64
Mediator Permasalahan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	15	75	20%
2.	Sering	27	108	36%
3.	Ada Kalanya	18	54	24%
4	Jarang	9	18	12%
5	Tidak Pernah	6	6	8%
Jumlah		75	261	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Mediator nomor 2 setelah diinterpretasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu yaitu 15 orang atau sebesar 20%, responden yang memilih jawaban sering 27 orang atau sebesar 36% yang memilih ada kalanya dilakukan 18 orang atau sebesar 40%, jarang ada sosialisasi yaitu 9 orang atau sebesar 12 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 6 orang atau sebesar 8%. Dari kuisisioner diatas dapat diketahui bahwa petugas pendamping membantu penyandang disabilitas dalam memediasi pemerintah terkait isu-isu persamaan hak,diskriminasi,dan stigma.

Dengan demikian berdasarkan kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas sering mengalami permasalahan diskriminasi stigma dan kurangnya kesetaraan hak dalam hal ini petugas pendamping sering membantu penyandang disabilitas dalam memediasi ke pemerintah terkait isu-isu persamaan hak,diskriminasi,stigma. Hal ini ditunjang dengan hasil wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah penyandang disabilitas sering mengalami permasalahan seperti kurangnya kesetaraan hak, diskriminasi, stigma? apakah petugas pendamping membantu dalam menangani permasalahan tersebut?

Bapak Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan “Bapak Arif Triyono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

***Jawaban Informan** “ ya kami memediasi untuk memfasilitasi mereka misalkan apa sih permasalahan mereka saya ambil contoh saja untuk untuk KTP KTP itu bagi penyandang disabilitas yang belum punya KTP itu ini ini sangat-sangat terkendalaanya. kita berupaya untuk sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah dengan cara itu tadi sesuai dengan kebutuhan kita juga Sama kok penyandang disabilitas sama mempunyai hak yang sama misalkan di fasilitas fasilitas publik itu kadang ada juga yang belum layak belum layarnya. Iya ada pengguna kursi roda itu mau Kan mereka juga mempunyai hak yang sama perlu ke pasar ke kantor kantor itu kadang mereka mengalami Kendala di fasilitas karena di kantor tersebut sudah mempunyai fasilitas akses jalan untuk ke kursi roda supaya bisa mereka bisa masuk ke dalam mendapatkan pelayanan ini contohnya untuk yang di publik misalkan di keramaian itu di tempat hiburan ataupun di trotoar kita berupaya kepada pemerintah. kita berupaya untuk sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah dengan cara itu tadi sesuai dengan kebutuhan kita juga Sama kok penyandang disabilitas sama mempunyai hak yang sama misalkan di fasilitas fasilitas publik itu kadang ada juga yang belum layak belum layarnya. Iya ada pengguna kursi roda itu mau Kan mereka juga mempunyai hak yang sama perlu ke pasar ke kantor kantor itu kadang mereka mengalami Kendala di fasilitas karena di kantor tersebut sudah mempunyai fasilitas akses jalan untuk ke kursi roda supaya bisa mereka bisa masuk ke dalam mendapatkan pelayanan ini contohnya untuk yang di publik misalkan di keramaian itu di tempat hiburan ataupun di trotoar kita berupaya kepada pemerintah. apa ya istilahnya kita koordinasi dengan pemerintah dalam Pemerintah Kabupaten Tegal supaya hak-hak penyandang*

disabilitas juga diperhatikan dasar-dasar termasuk dalam mobilitas yaitu dengan mobilitas pelayanan dalam hal ini apakah pelayanan semua pelayanan publik di Kabupaten Tegal sudah aksesibel untuk difabel rata-rata ada yang sudah dan ada yang belum kalau kebanyakan untuk untuk saat ini untuk saya saat ini memang sudah mereka sudah mengetahui jadi kebutuhan dasar yang termasuk fasilitas publik itu mereka sudah tahu tapi ada juga yang sebagian yang ini yang jauh dari kota ini belum Belum belumb belum memperhatikan kebutuhan-kebutuhan itu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa permasalahan penyandang disabilitas yang biasa dialami isu-isu persamaan hak, diskriminasi, stigma yang dialami penyandang disabilitas seperti pelayanan publik yang belum akses dan permasalahan perekaman e-ktp.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa petugas pendamping berupaya dalam membantu penyandang disabilitas memediasi ke pemerintah terkait isu-isu persamaan hak, diskriminasi, stigma yang dialami penyandang disabilitas seperti pelayanan publik yang belum akses permasalahan perekaman e-ktp .

4. Pembela

Dalam praktek PM, seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekeja sosial haru memainkan peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi kausal (cause advocacy)

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah dalam peranya petugas pendamping memberikan pembelaan (advokasi) kepada penyandang disabilitas terhadap kasus permasalahan yang dihadapi didalam masyarakat?

Tabel V.65
Pembelaan (advokasi)
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	15	75	20%
2.	Sering	27	108	36%
3.	Ada Kalanya	18	54	24%
4	Jarang	6	12	8%
5	Tidak Pernah	9	9	12%
Jumlah		75	258	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Pembelaan nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu yaitu 15 orang atau sebesar 20%, responden yang memilih jawaban sering 27 orang atau sebesar 36% yang memilih ada kalanya 18 orang atau sebesar 24%, jarang yaitu 6 orang atau sebesar 8%, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 9 orang atau sebesar 12%. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan penyandang disabilitas sering mendapatkan advokasi dalam kasus permasalahan yang dihadapi dimasyarakat dan dapat disimpulkan peranya petugas pendamping memberikan pembelaan (advokasi) kepada penyandang disabilitas terhadap kasus permasalahan yang

dihadapi didalam masyarakat dalam melakukan pembelaan dapat dikatakan sudah baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah petugas pendamping memberikan pembelaan (advokasi) kepada penyandang disabilitas terhadap kasus permasalahan yang dihadapi didalam masyarakat? lalu seperti apa pembelaanya?

Bapak Arief Triono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Jawaban Informan “*jelas untuk seorang pendamping disabilitas melakukan pembelaan pembelaan juga termasuk yang bagi mereka yang mengalami kasus permasalahan kalau misalkan dengan hukum kalau memang masih di bisa diatasi oleh individu oleh seorang pendamping disabilitas tersebut alhamdulillah, tapi kalau memang permasalahannya untuk sangat pelik sangat kompleks sangat kompleks itu nanti kita bersama-sama dalam hal ini bersama-sama dengan pendamping. termasuk juga melalui kedinasan melalui dinas sosial kita memohon atau meminta bantuan kepada dinas dinas terkait ada satu kasus yang sangat kompleks kita minta bantuan kepada staf atau pendamping yang lain dalam hal secara umum di Kabupaten Tegal ya Ada sudah terbentuk kaitanya dengan forum forum peduli disabilitas forum peduli itu itu yang anggotanya itu lintas sektor Jadi bukan hanya Dinas Sosial saja termasuk juga lembaga-lembaga yang lain misalkan untuk universitas kita juga sudah ada forum sudah ada wadah kita minta bantuannya kepada anggota forum supaya ikut membantu untuk menangani suatu kasus”.*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai sosialisasi program pemberdayaan disabilitas pendamping disabilitas melakukan pembelaan pembelaan juga termasuk yang bagi mereka yang mengalami kasus permasalahan minta bantuan kepada staf atau pendamping yang lain dalam hal secara umum di Kabupaten Tegal dan juga berkoordinasi dengan forum peduli disabilitas(FPD), forum peduli itu anggotanya itu lintas sektor Jadi bukan hanya Dinas Sosial saja termasuk juga lembaga-lembaga yang lain misalkan universitas

dan dapat disimpulkan peranya petugas pendamping memberikan pembelaan (advokasi) kepada penyandang disabilitas terhadap kasus permasalahan yang dihadapi didalam masyarakat dalam dalam melakukan pembelaan dapat dikatakan sudah baik

Pertanyaan kedua yang peneliti ajukan kepada responden: Apakah dalam peranya petugas pendamping memberikan pembelaan (advokasi) kepada anda dalam kasus permasalahan yang dihadapi Didunia Pendidikan Dan Usaha?

Tabel V.66
Pembelaan (advokasi)Dunia Pendidikan Dan Usaha
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	15	75	20%
2.	Sering	24	96	32%
3.	Ada Kalanya	21	63	28%
4	Jarang	6	12	8%
5	Tidak Pernah	9	9	12%
Jumlah		75	255	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Pembelaan nomor 2 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu yaitu 15 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih jawaban sering 24 orang atau sebesar 32% yang memilih ada kalanya 28 orang atau sebesar 40%, jarang ada yaitu 6 orang atau sebesar 8 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 9 orang atau sebesar 24%. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas sering mendapatkan kasus di diskriminasi didunia pekerjaan dan usaha dan sering mendapatkan pembelaan dari petugas pendamping terkait kasus yang dialami

dalam hal ini peran pendamping sebagai pembela dapat dikatakan sudah baik dalam melakukan pembelaan. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut;

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah Apakah dalam peranya petugas pendamping memberikan pembelaan (advokasi) kepada penyandang disabilitas terhadap kasus permasalahan yang dihadapi didalam dunia pendidikan dan dunia kerja?

Bapak Arief Triono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti: *Misalnya dalam hal ini Mas Kasus apa yang kita pilih di dalam dunia usaha dan dunia kerja terkait dengan adanya diskriminasi dalam dunia usaha dan dunia kerja*

Informan *“sesuai dengan permasalahan yang ada paling tidak kita harus mencermati mengasesmen permasalahan apa sih sebenarnya apakah kesalahan itu bisa cari di fabel tersebut atau dari pihak perusahaan kita harus mencermati itu itu yang pertama dan memang kalau memang dari pihak kerjaan ya kita sesuai ,dengan kembali dengan hak-hak dasar yang seorang penyandang disabilitas atau pun secara umum lah pekerja itu kalau memang ada diskriminasi ya kita koordinasi secara baik-baik misalkan secara kekeluargaan kalau memang tidak bisa diputuskan atau belum belum sampai ada kesepakatan kita bisa melobi atau kita bisa mohon Minta bantuannya kepada dinas disperinaker Dinas Perindustrian dan tenaga kerja itu juga menjadi salah satu anggota forum yang forum peduli disabilitas itu cara penanganannya”.*

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai dalam peranya petugas pendamping memberikan pembelaan (advokasi) kepada penyandang disabilitas dalam kasus permasalahan yang dihadapi langkah-langkahnya identifikasi masalah kasus,identifikasi kebutuhan dasar penyandang disabilitas,dan koordinasi pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

5. Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung (protector) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (guardianrole), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial.

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada responden : Anda mendapatkan perlindungan dari petugas pendamping terhadap kasus diskriminasi yang dialami dalam kehidupan sosial masyarakat?

Tabel V.67
Pelindung Kasus Diskriminasi Sosial
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	6	30	8%
2.	Sering	27	108	36%
3.	Ada Kalanya	18	54	24%
4	Jarang	15	30	20%
5	Tidak Pernah	9	9	12%
Jumlah		75	231	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Perlindungan nomor 1 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih

jawaban selalu ada yaitu 6 orang atau sebesar 8%, responden yang memilih jawaban sering 27 orang atau sebesar 36% yang memilih ada kalanya dilakukan 18 orang atau sebesar 24%, jarang ada yaitu 15 orang atau sebesar 20 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 9 orang atau sebesar 12%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan penyandang disabilitas sering mendapatkan perlindungan dari pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya dan penyandang disabilitas sering sekali mengalami kasus diskriminasi didalam kehidupannya. Dan peran petugas dalam memberikan perlindungan dapat dikatak sudah baik. Hal ini ditunjang dengan wawancara informan sebagai berikut:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah Apakah dalam peranya petugas pendamping memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas didalam kehidupan bermasyarakat ?jika iya perlindungan seperti apa yang diberikan?

Bapak Arief Triono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya pada tanggal 13 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan :di dalam masyarakat permasalahan yang ada di masyarakat bagi penyandang disabilitas yaitu yang pertama adalah kurang diperhatikan terutama hak mereka hak mereka mereka juga mempunyai hak yang sama kadang masyarakat itu belum belum tahu atau belum memperhatikan mereka contoh saja hak mendapatkan pendidikan pendidikan juga masih belum apa yang belum memperhatikan penyandang disabilitas sesuai dengan keinginannya sesuai dengan fisiknya mereka juga mengalami kendala yaitu permasalahan itu di masyarakat lingkungan masyarakat itu kadang masih ada yang masyarakat yang mengejek sejauh orang umum pada umumnya masih nilai masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang masih rendah masih rendah yang

masih diremehkan. merasa masyarakat itu menilai bahwa kurang mampu hasilnya tidak Punya apa? Sejauh sejauh orang umum pada umumnya masih nilai masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang masih rendah masih rendah yang masih diremehkan.

Peneliti: *kalau dalam hal ini peranan pendamping memberikan perlindungan ?*

Informan: *kepada penyandang disabilitas di dalam kehidupan bermasyarakat perlindungan penyadaran kepada lingkungan masyarakat tersebut bahwa mereka adalah manusia supaya mereka juga diperhatikan Karena mereka juga perlu makan perlu bekerja dan perlu yang lain-lain.*

Dengan demikian berdasarkan wawancara informan diatas dapat dikatakan penyandang disabilitas sering mendapatkan perlindungan dari pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya dan penyandang disabilitas sering sekali mengalami permasalahan didalam kehidupannya. Peran petugas kepada penyandang disabilitas di dalam kehidupan bermasyarakat memberikan penyadaran kepada lingkungan masyarakat tentang hak dasar penyandang disabilitas , dan peran petugas dalam memberikan perlindungan dapat dikatak sudah baik .

Pertanyaan kedua yang diajukan untuk responden: Apakah Anda mendapatkan perlindungan dari petugas pendamping terhadap kasus diskriminasi yang dialami di dunia usaha dan pekerjaan?

Tabel V.68
Pelindung Kasus Diskriminasi Dunia Pendidikan Dan Pekerjaan
Frekuensi Jawaban Responden

No.	Jawaban	Frekuensi	Jumlah Skor	Prosentase
1.	Selalu	9	45	12%
2.	Sering	24	96	32%
3.	Ada Kalanya	15	45	20%
4	Jarang	18	36	24%
5	Tidak Pernah	9	9	12%
Jumlah		75	231	100%

Sumber : angket penelitian desember 2019 “,Perlindungan nomor2 setelah diinterpretasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 75 responden telah memberikan pendapatnya dengan 5 alternatif yang disediakan yang memilih jawaban selalu ada yaitu 9 orang atau sebesar 12%, responden yang memilih jawaban sering 24 orang atau sebesar 32% yang memilih ada kalanya 15 orang atau sebesar 24%, jarang ada yaitu 18 orang atau sebesar 24 %, dan responden yang memilih jawaban tidak pernah ada yaitu 9 orang atau sebesar 12%.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan penyandang disabilitas sering sekali mengalami kasus diskriminasi didalam kehidupannya termasuk didalam dunia usaha dan dunia kerja dalam hal ini peran petugas dalam perlindungan usaha dari kasus diskriminasi dapat dikatakan sudah baik.

Dari hasil kuesioner diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan dilakukan untuk melindungi penyandang disabilitas yang mengalami

permasalahan di dalam dunia usaha dan pekerjaan dan dapat disimpulkan berdasarkan kuisioner diatas bahwa peran petugas dalam melindungi penyandang disabilitas dapat dikatakan sudah baik .Hal ini ditunjang dengan wawancara informan dibawah ini:

Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap informan adalah apakah dalam peranya petugas pendamping memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas didalam dunia usaha dan dunia kerja?jika iya perlindungan seperti apa yang diberikan?

Bapak Arief Triono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka

Bina Karya pada tanggal 17 Januari 2020 mengatakan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Informan “kepada penyandang disabilitas di dalam kehidupan bermasyarakat perlindungan kesadaran kepada lingkungan masyarakat tersebut bahwa mereka adalah manusia supaya mereka juga diperhatikan Karena mereka juga perlu makan perlu bekerja dan perlu yang lain-lain. **Peneliti:**kalau misalnya tadi kan Mas Arif bilang cepet tentang Apa bidang pendidikan apa namanya penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan dalam hal ini? penyandang disabilitas Adakalanya dirujuk menuju pendidikan yang secara khusus yang ada di SLB pada udah lama analisa lain mengatakan bahwa penyandang disabilitas itu sebenarnya menginginkan di sekolahan umum sekolah umum menurut Mas Arif selaku pendamping. Apakah dalam hal ini di Kabupaten Tegal khususnya sudah tersedia pendidikan?

Informan: yang inklusif untuk di Kabupaten Tegal untuk pendidikan inklusi sekolah yang itu memang ada tetapi ada itu hanya beberapa 1/2 Kalau tidak salah dan mereka masih terkendala terkendala di bidang tenaga pengajar dan Abang aja. Misalkan ada yang bisa dicas yang jenisnya tunanetra Tuh kan memakai huruf braille Ya itu kan Kadang juga susah terus juga yang tunarungu wicara itu tenaga pengajarnya di Di sekolah-sekolah itu memang belum ada mereka yang siap untuk tenaga pengajar yang khusus untuk bahasa isyarat itu juga ada tapi untuk melalui melalui kelompok DSM itu sudah ada sebenarnya untuk pendidikan jadi yang sifatnya bukan apa ya istilahnya bukan di sekolah-sekolah pada umumnya melalui kelompok Yayasan itu bekerja sama dengan PKBM lembaga pendidikan. Itu nanti bisa sekolah kejar paket a b dan c. Itu pelayanannya ada di LBK sendiri-sendiri dan itu Gratis itu berkat

kerjasama dengan antara DSM kelompok Desa Mandiri dengan pkpn dalamnya adalah TKP yang ada di Adiwerna Kecamatan Adiwerna Halo yang mengisi peserta yang mengikuti to mas kejar paket berapa orang Mas 20 orang 20 orang 20 orang terdiri dari penyandang disabilitas ada yang alami kusta ada yang fisik atau yang tunarungu wicara? Sementara itu kalau tenaga khususnya apakah sudah ada Mas ada sudah ada tenaga khususnya sudah ada dan kembali lagi dengan antara kerja dan PKBM tersebut kita belajar bareng akhirnya berkolaborasi baik itu pendamping ataupun tenaga pengajar dari pkpn tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan dilakukan untuk melindungi penyandang disabilitas yang mengalami permasalahan didala dunia usaha dan pekerjaan dan dapat disimpulkan berdasarkan kuisisioner diatas bahwa peran petugas dalam melindungi penyandang disabilitas dapat dikatakan sudah baik.

C. Rekapitulasi Jawaban Responden “Peran Dalam Pemberdayaan”

Rekapitulasi hasil dari jawaban responden mengenai peran unit pelaksana teknis dinas loka bina karya dalam “Pemberdayaan masyarakat disabilitas menuju kemandirian”, hasil dari perolehan data dari jawaban item pertanyaan terhadap 75 responden, makaselanjutnya direkapitulasi untuk menguji variabel “Peran”, Sebelumnya dicari nilai rata-rata rentang skala per item jawaban dalam aspek. Dengan cara :

a. Skor terendah = Bobot Terendah x Jumlah Sampel =

$$5 \quad \times \quad 75 \quad = 375$$

b. Skor Tertinggi = Bobot Tertinggi x Jumlah Sampel =

$$1 \quad \times \quad 75 \quad = 75$$

Untuk menentukan rentang skala yang menggunakan rumus :

$$\text{Rentang Skala (RS)} = \frac{n(m-1)}{m}$$

(Sumber : Sugiyono, 2011:99)

Dimana : N = Jumlah Sampel

M = Jumlah alternative tiap jawaban item

Maka akan menjadi ;

$$\text{RS} = \frac{75(5-1)}{5} = 60$$

Sehingga akan terbentuklah tabel rentang skala :

Tabel V.69

Rentang Skala

No	Rentang Skala (RS)	Kriteria
1.	316 – 375	Sangat Baik/Sangat Memuaskan
2.	226 – 315	Baik/Memuaskan
3.	196 – 225	Cukup Baik/Cukup Memuaskan
4.	136 – 195	Tidak Baik/Tidak Memuaskan
5.	75 – 135	Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Memuaskan

Tabel V.69

**Rentang Skala Per-Aspek Dan Item Jawaban
Hasil Rentang Skala Jawaban Responden Per Item pada aspek Fasilitator**

No	Aspek	Indikator	Item Soal	Hasil Perhitungan	Rentang Skala	Kriteria
1	Fasilitator	1. Program Pemberdayaan	a. Pengetahuan tentang Program	219	196-225	Cukup Baik
			b. Tingkat Partisipasi mengikuti Program	216	196-225	Cukup Baik
			c. Pengetahuan tentang cara mendapatkan program.	204	136-195	Cukup Baik
			d. Sosialisasi Program	204	196-225	Cukup Baik
			e. Rentang waktu Pelaksanaan Program	204	196-225	Cukup Baik
			f. Output Program	204	196-225	Cukup Baik
			g. Keberlanjutan Program	204	196-225	Cukup Baik

			h. Hambatan dalam Proses Pemberdayaan	216	196-225	Cukup Baik
			i. Evaluasi Program Pemberdayaan	228	226-315	Baik
			j. Masukan,Kritik dan Saran dalam Program	213	196-225	Cukup Baik
		HASIL	10 Item pertanyaan	2112	1951-2250	Biasa saja
		2. Fasilitasi UPSK	a. Pengetahuan Program	192	136-195	Kurang Baik
			b. Tingkat Partisipasi Program	186	136-195	Kurang Baik
			c. Mekanisme Mendapatkan UPSK	186	136-195	Kurang Baik
			d. Tindak Lanjut Program	189	136-195	Kurang Baik
			e. Hambatan Dalam Mendapatkan Program	189	136-195	Kurang Baik

			f. Evaluasi Program	189	136-195	Kurang Baik
			6 Item pertanyaan Total Skors	1131	811- 1170	Kurang memuaskan
		3. Fasilitasi Bantuan UEP	a. Pengetahuan Program	219	196-225	Cukup Baik
			b. Tingkat Partisipasi mendapatkan program UEP	219	196-225	Cukup Baik
			c. Pengawasan (Monitoring Petugas) mendapatkan UEP	216	196-225	Cukup Baik
			d. Tindak lanjut program UEP	216	196-225	Cukup Baik
			e. Output Program	219	196-225	Cukup Baik

		f. Hambatan dalam mengakses Program	228	226-315	Baik
		g. Evaluasi program	207	196-225	Cukup Baik
		7 item pertanyaan	1524	1366-1785	Biasa saja
	4. Fasilitasi Pelayanan E-ktp /KK SIM	a. Pengetahuan program	306	226-315	Baik
		b. Kemudahan dalam mengakses program	294	226-315	Baik
		c. Pengetahuan tentang cara mendapatkan program	297	226-315	Baik
		d. Hambatan	255	226-315	Baik
		e. Evaluasi Program	252	226-315	Baik
		5 item pertanyaan	1404	1276-1575	Baik

		5. Fasilitasi	a. Pengetahuan	177	136-195	Kurang Baik
		Pelayanan	Program			
		Kesehatan	b. Tingkat Partisipasi	174	136-195	Kurang Baik
		Kusta	c. Pengetahuan	174	136-195	Kurang Baik
			tentang mengakses			
			program.			
			d. Kemudahan dalam	180	136-195	Kurang Baik
			fasilitasi pelayanan			
			kesehatan (kusta)			
			e. Evaluasi Program	174	136-195	Kurang Baik
			5 item pertanyaan	879	676-975	Kurang memuaskan

		6. Pendampingan	a. Pengetahuan tentang program	282	226-315	Baik
			b. Tingkat partisipasi program	270	226-315	Baik
			c. Peran dalam mengidentifikasi masalah	258	226-315	Baik
			d. Output program (Membuka akses kebutuhan)	237	226-315	Baik
			e. Output Program perbaikan kehidupan	234	226-315	Baik
			f. Hambatan program	285	226-315	Baik
			g. Evaluasi Program	225	196-225	Cukup Baik
			7 item pertanyaan	1791	1786-2205	Baik
		7. Motivasi dan Bimbingan	a. Pengetahuan program	228	226-315	Baik
			b. Partisipasi program	234	226-315	Baik
			c. Pengetahuan tentang tata cara mendapatkan	234	226-315	Baik

			program			
			d. Outuput(Perubahan sosial)	228	226-315	Baik
			e. Hambatan program	228	226-315	Baik
			f. Evaluasi Program	216	196-225	Cukup Baik
			6 item pertanyaan	1368	1171-1530	Biasa saja
2.	Broker	a. Identifikasi	a. Identifikasi Pemecah masalah	219	196-225	Cukup Baik
			b. Sumber referal Penyedia pekerjaan	207	196-225	Cukup Baik
			c. Menjangkau Kerjasama public sektor dan swasta	198	196-225	Cukup Baik
			3 Item pertanyaan	624	586-765	
		b. Linking	a. Menghubungkan sumber referal (Penyedia Lapangan pekerjaan)	192	136-195	Kurang Baik
			b. Output Linking	204	196-225	Cukup Baik

			2 item pertanyaan	396	391-510	Biasa saja
		c. Goods and Services	a. Distribusi sumber kebutuhan disabilitas	207	196-225	Cukup Baik
			b. Keinginan dalam pemenuhan kebutuhan	225	196-225	Cukup Baik
			c. Outcome	228	226-315	Baik
			3 item pertanyaan	660	586-765	Biasa saja
		d. Quality control	a. Monitoring setelah pelayanan	222	196-225	Cukup Baik
			b. Evaluasi dan keberlanjutan program	225	196-225	Cukup Baik
			2 item pertanyaan	447	391-510	Biasa saja
		d. Assesment kebutuhan	a. Pengetahuan assesment petugas	222	196-225	Cukup Baik
			b. Ketrampilan melakukan assesment	228	226-315	Baik
			2 item pertanyaan	450	391-510	Cukup baik

		f. Ketrampilan membangun Jaringan Usaha	a. Kemampuan membangun jaringan usaha secara konsisten	222	196-225	Cukup Baik
				2799		
3	Mediator	a. Permasalahan dalam masyarakat	a. Diskriminasi sosial b. Mediasi ke pemerintah dan Memperjuangkan kesetaraan hak	258 261	226-315 226-315	Baik Baik
				519	511-630	Baik
4	Pembela	a. Pembelaan atas kasus	a. Pembelaan kasus dalam masyarakat b. Dunia pendidikan dan usaha	258 255	226-315 226-315	Baik Baik
				513	511-630	Baik
5.	Pelindung		a. Perlindungan atas kasus di masyarakat b. Perlindungan dalam dunia pendidikan dan Usaha	231 231	226-315 226-315	Baik Baik

				462	391-510	baik
	Jumlah		$\sum X=65$ item	14.502 Skors	12676– 16575	Biasa Saja

Setelah skor dalam rentang skala di golongan per aspek yang diambil dalam masing-masing tabel distribusi frekuensi, maka selanjutnya di rekapitulasi masing-masing skor dalam rentang skala dengan cara mencari total score $\sum X_1 + \sum X_2 + \dots + \sum X_{65}$, jadi $(\sum X) =$ Nilai maksimum (max) untuk variabel Peran UPTD Loka Bina Kaya ($\sum X$) diperoleh melalui = jumlah item pernyataan dikalikan nilai tertinggi dikalikan jumlah responden penyandang disabilitas sebanyak 75 responden, jadi diperoleh $65 \times 5 \times 75 = 24375$, sedangkan nilai minimum (min) variabel Peran UPTD Loka Bina Kaya ($\sum X$) diperoleh melalui = jumlah item pernyataan dikalikan nilai terendah dikalikan jumlah reponden, jadi diperoleh $65 \times 1 \times 75 = 4875$

Range merupakan jumlah nilai maksimum (max) dikurangi nilai minimum = $24375 - 4875 = 19500$, selanjutnya dengan mengetahui range nilai dari jawaban responden maka dapat ditentukan Rentang Skala (RS) pengukuran yaitu range dibagi skala pengukuran = $19500 / 5 = 3900$

Rentang Skala (RS) digunakan untuk menentukan rentang penilaian dalam kategori “Peran UPTD Loka Bina Karya Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian yang ditentukan dalam standar derajat penilaian berikut:

Tabel III.02
Rentang Skala Variabel “Peran UPTD Loka Bina Karya”

Rentang Skala (RS)	Kriteria
20476– 24375	Sangat Baik/Sangat Memuaskan
16576 – 20475	Baik/Memuaskan
12676– 16575	Cukup Baik/Cukup Memuaskan
8776 – 12675	Tidak Baik/Tidak Memuaskan
4875- 8775	Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Memuaskan

Sumber: data primer yang telah diolah tahun 2020

V.2 Pembahasan

1. Peran

Total skor perolehan data terhadap variabel “Peran UPTD Loka Bina Karya Dalam Pemberdayaan Disabilitas” ($\sum X$) yaitu 14502. Dengan menggunakan rentang penilaian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai variabel “Peran Dalam Memberdayakan ” berada pada kategori “Cukup Baik”.

Peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan disabilitas menuju kemandirian meliputi peran sebagai fasilitator, peran sebagai broker ,peran sebagai mediator, peran sebagai pembela, dan peran sebagai pelindung. Terkait hasil rekapitulasi diatas peran UPTD Loka Bina Karya pada akhirnya yang paling dominan adalah peran sebagai fasilitator dalam hal ini peran sebagai fasilitator meliputi : Fasilitasi program pemberdayaan, fasilitasi UPSK, fasilitasi bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif),

fasilitasi pelayanan E-KTP/KK/SIM, fasilitasi pelayanan kesehatan (kusta) pendampingan ,motivasi dan bimbingan.

1. Berdasarkan tabel rentang skala yang terdiri dari 46 buah pertanyaan maka dapat diambil kesimpulan dari variabel “ Peran fasilitator” terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas dilhaat yang terdiri indikator:

a. Fasilitasi Progam Pemberdayaan terdiri dari 10 Pertanyaan

Pertanyaan 1 dengan skor 219 kriteria Cukup Baik, pertanyaan 2 dengan skor 216 kriteria Cukup Baik, pertanyaan 3 dengan skor 204 kriteria Cukup Baik, pertanyaan 4 dengan skor 204 kriteria Cukup Baik, pertanyaan 5 dengan skor 204 kriteria Cukup Baik, pertanyaan 6 dengan skor 204 kriteria Cukup Baik , pertanyaan 7 dengan skor 204 kriteria Cukup Baik, pertanyaan 8 dengan skor 216 kriteria Cukup Baik, pertanyaan 9 dengan skor 228 kriteria Baik, pertanyaan 10 dengan skor 213 kriteria Cukup Baik. Sehingga dapat dikatakan kriteria biasa saja dalam memberikan fasilitasi pemberdayaan penyandang disabilitas.

b. Fasilitasi UPSK terdiri dari 6 Pertanyaan

Pertanyaan 1 dengan skor 192 kriteria Kurang Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 186 kriteria Kurang Baik, Pertanyaan 3 dengan skor 186 kriteria Kurang Baik, Pertanyaan 4 dengan skor 189 kriteria Kurang Baik, Pertanyaan 5 dengan skor 189 kriteria Kurang Baik, Pertanyaan 6 dengan skor 189 kriteria Kurang Baik , Sehingga dapat dikatakan kriteria kurang baik dalam memfasilitasi pelayanan UPSK.

c. Fasilitasi UEP terdiri dari 7 Pertanyaan

Pertanyaan 1 dengan skor 219 kriteria Cukup Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 219 kriteria Cukup Baik, Pertanyaan 3 dengan skor 216 kriteria Cukup Baik, Pertanyaan 4 dengan skor 216 kriteria Cukup Baik, Pertanyaan 5 dengan skor 219 kriteria Cukup Baik, Pertanyaan 6 dengan skor 228 kriteria Baik, Pertanyaan 7 dengan skor 207 kriteria Cukup Baik, Sehingga dapat dikatakan kriteria biasa saja dalam memfasilitasi penyandang disabilitas mengakses UEP.

d. Fasilitasi untuk mendapatkan pelayanan E-KTP/KK dan SIM 5 Pertanyaan

Pertanyaan 1 dengan skor 306 kriteria Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 294 kriteria Baik, Pertanyaan 3 dengan skor 297 kriteria Baik, Pertanyaan 4 dengan skor 255 kriteria Baik, Pertanyaan 5 dengan skor 252 kriteria Baik, Sehingga dapat dikatakan kriteria baik

e. Fasilitasi pelayanan kesehatan(kusta) 5 pertanyaan

Pertanyaan 1 dengan skor 177 kriteria Kurang Baik, pertanyaan 2 dengan skor 174 kriteria Kurang Baik, Pertanyaan 3 dengan skor 174 kriteria Kurang Baik, Pertanyaan 4 dengan skor 180 kriteria Kurang Baik, Pertanyaan 5 dengan skor 174 kriteria Kurang Baik, Sehingga dapat dikatakan kriteria kurang baik

f. Pendampingan 7 Pertanyaan

Pertanyaan 1 dengan skor 282 kriteria Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 270 kriteria Baik, Pertanyaan 3 dengan skor 258 kriteria Baik,

Pertanyaan 4 dengan skor 237 kriteria Baik, Pertanyaan 5 dengan skor 234 kriteria Baik, Pertanyaan 6 dengan skor 285 kriteria Baik, Pertanyaan 7 dengan skor 225 kriteria Baik, Sehingga dapat dikatakan kriteria baik.

g. Motivasi dan bimbingan 6 Pertanyaan

Pertanyaan 1 dengan skor 228 kriteria Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 234 kriteria Baik, Pertanyaan 3 dengan skor 234 kriteria Baik, Pertanyaan 4 dengan skor 228 kriteria Baik, Pertanyaan 5 dengan skor 228 kriteria Baik, Pertanyaan 6 dengan skor 216 kriteria Cukup Baik, Sehingga dapat dikatakan kriteria biasa saja

Berdasarkan hasil dari 46 item pertanyaan variabel peran fasilitator dapat disimpulkan bahwa peran UPTD Loka Bina Karya pada akhirnya yang paling dominan adalah peran sebagai fasilitator dalam hal ini peran sebagai fasilitator meliputi peran petugas dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak dasar. Seperti pemberdayaan, pendampingan, bantuan alat kesehatan, bantuan usaha dll.

2. Berdasarkan tabel rentang skala yang terdiri dari 13 buah pertanyaan maka dapat diambil kesimpulan dari variabel “ Peran Broker” terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas dilihat yang terdiri indikator Peran sebagai Broker yang terdiri dari 13 buah pertanyaan

a. Identifikasi dan pemecah masalah 3 buah pertanyaan.

Pertanyaan 1 dengan skor 219 kriteria Cukup Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 207 kriteria Cukup Baik, Pertanyaan 3 dengan skor 198 kriteria Cukup Baik, Sehingga dapat dikatakan kriteria biasa saja

b. Linking 2 buah pertanyaan

Pertanyaan 1 dengan skor 192 kriteria Kurang Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 204 kriteria Cukup Baik, Sehingga dapat dikatakan kriteria biasa saja

c. Goods and Seviles 3 Pertanyaan

Pertanyaan 1 dengan skor 207 kriteria Cukup Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 225 kriteria Cukup Baik, Pertanyaan 3 dengan skor 228 kriteria Baik, Sehingga dapat dikatakan kriteria biasa saja

d. Quality Control 2 Pertanyaan

Pertanyaan 1 dengan skor 222 kriteria Cukup Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 225 kriteria Cukup Baik sehingga dapat dikatakan biasa saja

e. Assesment kebutuhan Disabilitas 2 pertanyaan

Pertanyaan 1 dengan skor 222 kriteria Cukup Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 228 kriteria Baik, Sehingga dapat dikatakan kriteria biasa saja

f. Ketrampilan Membangun Konsorsium 1 pertanyaan

Pertanyaan 1 dengan skor 222 kriteria Cukup Baik

Berdasarkan hasil dari 13 item pertanyaan variabel peran broker dapat disimpulkan bahawa peran UPTD Loka Bina Karya dalam hal ini

peran sebagai broker meliputi peran petugas dalam identifikasi permasalahan penyandang disabilitas, Link networking, goods and service, quality control, assesment, ketrampilan membangun konsorsium jaringan usaha. Sehingga dapat dikatakan biasa saja

3. Berdasarkan tabel rentang skala yang terdiri dari 2 buah pertanyaan maka dapat diambil kesimpulan dari variabel “ Peran Mediator” terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas dilhaat yang terdiri indikator peran sebagai mediator yang terdiri dari 2 buah pertanyaan: Pertanyaan 1 dengan skor 258 kriteria Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 261 kriteria Baik, Sehingga dapat dikatakan kriteria baik.
4. Berdasarkan tabel rentang skala yang terdiri dari 2 buah pertanyaan maka dapat diambil kesimpulan dari variabel “ Peran Pembela terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas dilhaat yang terdiri indikator Peran sebagai pembela yang terdiri dari 2 pertanyaan Pertanyaan 1 dengan skor 258 kriteria Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 255 kriteria Baik, Sehingga dapat dikatakan kriteria baik
5. Berdasarkan tabel rentang skala yang terdiri dari 2 buah pertanyaan maka dapat diambil kesimpulan dari variabel Peran sebagai pelindung yang terdiri dari 2 pertanyaan Pertanyaan 1 dengan skor 231 kriteria Baik, Pertanyaan 2 dengan skor 231 kriteria Baik, Sehingga dapat dikatakan kriteria baik.

Membercheck terkait Peran yang Dominan yang diberikan oleh

UPTD Loka Bina Karya :

Peneliti :Terima kasih atas penjelasannya Mas poin selanjutnya yang saya tanyakan tentang dari semua informasi yang saya waancarai itu pada kesimpulannya peran yang paling dominan itu peran fasilitator ya Mas ..(terjeda)*Informan* :iyaa mass,

Peneliti :ya kita lanjutkan mohon maaf Mas tadi ada sedikit kendala kendala dalam ruangan kita lanjutkan terkait membahas tentang fasilitasi yang telah diberikan Loka Bina Karya kan berarti kajian teori saya menyatakan bahwa peran fasilitator yang mendominasi dalam teori peran itu ada 5 yaitu peran mediator ,peran sebagai pembela ,pelindung ,peran sebagai fasilitator, peran sebagai broker ,menanggapi hal ini mas..?

Informan: Iyya yang pada akhirnya kesimpulannya peran yang paling dominan pada UPTD Loka Bina Karya adalah peran fasilitator yaitu peran memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan suatu akses kebutuhan dasar .

Peneliti:.Kenapa peran tersebut peran fasilitator paling dominasi mas dede,kalo dalam kajian teori kan ada 5 ,yaitu fasilitator, broker, mediator pembela ,pelindung..?bagaimana anda menanggapi hal tersebut sebagai pendamping??

Informan:Ya pada intinya kami sebagai pendamping disabilitas,dalam hal ini sebagai petugas pendamping UPTD Loka Bina Karya kami tetap melakukan peran-peranan tersebut...memang ,peran yang paling dominan kan peran fasilitator yaitu memberikan pelayanan hak –hak dasar penyandang disabilitas seperti:memfasilitasi disabilitas untuk mendapatkan data diri disini adanya fasilitasi pelayanan e-ktp,kk,sim-C dan D, untuk membangkitkan semangat teman-teman disabilitas agar bagkit dari keterpurukan disini ada peran pendamping memfasilitasi untuk memotivasi,membimbing dan melakukan pendampingan kepada penyandang disabilitas,dan jika disabilitas yang ingin mendapatkan bantuan seperti bantuan usaha,bantuan pemberdayaan disini ada; fasilitasi disabilitas untuk mendapatkan pemberdayaan,fasilitasi untuk mendapatkan bantuan usaha dan bantuan peralatan seperti bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif)...

Peneliti:ya ..terima kasih atas penjelasaya..dalam hal lain,seperti peran sebagai pelindung,mediator,broker,dan pembela..?tanggapanya mass sebagai pendamping?apakah petugas pendamping ikut berperan?

Informan:Kami tetap melnjalankan peranan tersebut...,disini ada contoh kasus ..,kemarin teman kita yang bernama bambang...,sudah bekerja di konveksi namun upah yang didapat hanya 5 ribu...,kami pendamping tetap melakukan mediasi kepada pemilik usaha...,kenapa hal itu terjadi,,kami tetap melakukan mediasi terkait dalam masalah tersebut,,kemudian melakukan pembelaan jika ada yang misalnya mendiskriminasi pekerjaan dalam hal ini tentunya upah yang diberikan karena dibawah standar upah yang diberikan oleh sipenyedia pekerjaan setelah kami melakukan mediasi kemudian melakukan advokasi akhirnya , bambang dapat mendapatkan upah yang layak kembali

Peneliti; jadi dalam hal ini, peran UPTD loka bina karya meliputi peran yang lainnya juga ya mas, dalam hal ini peran sebagai pembela ,peran pendamping tetap melakukan pembelaan, pelindung, mediasi jika ada yang kiranya mendapatkan perlakuan diskriminasi misal dalam hal pekerjaan maupun didalam bermasyarakat ,

Peneliti :ya disini ada sikap pemerintah dalam melindungi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesetaraan hak,yaitu dengan adanya regulasi UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ,apakah semua masyarakat sudah tahu akan adanya peraturan tersebut bahwa penyandang disabilitas juga dilindungi oleh pemerintah yaitu adanya UU tersebut??bagaimana tanggapannya mas..

Informan:baik mas, terima kasih menurut saya sebagai pendamping disabilitas mas karena mungkin banyak masyarakat yang belum tahu penyandang disabilitas dan juga belum tahu tentang adanya peraturan tersebut termasuk dalam pelaksanaannya UU Nomor 8 th 2016 tentang disabilitas dalam hal itu dijelaskan bahwa adanya kesetaraan hak terkait dengan upah yang layak dalam mendapatkan pekerjaan ya, jadi banyak yang belum tahu tentang peraturan tersebut ...peran yang lainnya tetap kami berikan ,meliputi peran mediator,peran broker,peran ssebagai pelindung, peran sebagai pembela , ya memang kalau misalnya penyandang disabilitas yang mengalami penyisakaan kasus hukum, atau permasalahan dan kasus lainnya memang belum ada yang melaporkan kepada pendamping tetapi jika ada yang melapor kepada kami ,kami tetap mendampingi penyandang disabilitas tersebut..,kalau misalnya sebagai broker kami tetap ada kerja sama dengan pihak lainnya misalnya samsat terkait pelayanan fasilitasi untuk mendapatkan SIM, didukcapil E-KTP , puskesmas adiwerna dalam hal ini fasilitasi pelayanan kesehatan penyandang disabilitas (kusta) dan karena UPTD loka bina karya terletak di adiwerna kami juga adanya kerja sama dengan konveksi yang ada disekitaran LBK .

Peneliti; berarti dalam hal ini peran fasilitator adalah peran yang paling dominan meskipun peran yang lainnya juga ada ?

Informan; ya, soalnya kan peran fasilitator adalah peran petugas pendamping dalam memfasilitasi penyandnag disabilitas untuk mendapatkan hak hak dasar seperti KTP, pemberdayaan(pelatihan keterampilan), pendampingan ,motivasi dan bimbingan meskipun juga kami tetap melakasaan peranan sebagai pembela, sebagai pelindung ,sebagai mediator dalam membantu jikalau ada permasalahan yang dihadapi oleh difabelm.,berkaitan peran sebagai broker kami tetap menjalin kerjasama dengan pihak pihak lainnya..,seperti Samsat,Puskesmas Adiwerna,Disdukcapil,maupun penyedia usaha yang ada disekitaran LBK..

Peneliti;baik, terimakasih atas konfirmasi dan tanggapannya dan terimakasih atas waktunya yang anda berikan selamat pagi

Berdasarkan hasil dari wawancara informan dapat disimpulkan bahawa peran UPTD Loka Bina Karya pada akhirnya yang paling dominan adalah peran sebagai fasilitaor dalam hal ini peran sebagai

fasilitator meliputi peran petugas dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkn hak dasar seperti peran untuk memfasilitasi program pemberdayaan disabilitas,memfasilitasi pelayanan UPSK ,memfasilitasi Bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) untuk penyandang disabilitas yang sudah mempunyai usaha, mefasilitasi pelayanan E-KTP/KK/SIM untuk penyandang disabilitas yang belum mempunyai data diri , memfasilitasi pelayanan kesehatan (kusta) bagi yang ingin mendapatkan akses kesehatan seperti akses kesehatan untuk disabilitas (kusta) pendampingan ,motivasi dan bimbingan untuk membangkitkan kesemangatan teman-teman difabel,.

2. Faktor Yang Menjadi Kendala Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian

a.Membercheck Faktor Yang Menghambat Sebelum Pemberdayaan

Pertanyaan yang diajukan kepada informan : Menurut Bpk/ibu/Sdr selaku pendamping disabilitas ,Faktor apa sajakah yang menjadi Kendala Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian??

Ibu Kris Fajar M.Pd Selaku Kepala UPTD Loka Bina Karya menegaskan pada tanggal 17 Januari 2020 menegaskan

***Peneliti** : Pekerja Sosial melakukan transaksi dalam pasar lain yakni jaringan pelayanan sosial pemahaman pekerja sosial menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial disekitar lingkungan menjadi sangat penting dalam memenuhi memperoleh keuntungan yang maksimal terkait dalam hal ini ada item yang namanya identifikasi Identifikasi dan pemecahan masalah disabilitas yang dihadapi menurut*

ke ibu selaku kepala UPTD Loka Bina Karya Masalah apa saja yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pemberdayaan apakah ada faktor penyebab yang menjadikan penyandang disabilitas kurang mandiri dalam hidupnya..?

Informan: masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pemberdayaan yang pertama kurangnya ini. Apa kurangnya Minat dan kemauan dari para penyandang disabilitas itu sendiri kurangnya minat kemampuan kita beri motivasi ya Terus mungkin yang kedua untuk mendapatkan pembelajaran masalah yang dihadapi dari faktor mungkin dari faktor interen keluarga-keluarga yang tidak memperbolehkan untuk mendapatkan pemberdayaan yang dilakukan di luar dirinya. Dia sendiri juga yang kurang peminat kadang kan disuruh ke sini untuk mengikuti kegiatan yang ada berarti faktornya tapi ada faktor dari diri sendiri terus keluarga mereka itu mau ya itu berarti Faktor yang kedua juga sudah terjawab ya kalau itu biasanya kan dah ada kendala-kendala dalam hal pemasaran ku satu mungkin biaya operasionalnya yang untuk ke itu sendiri yang kedua mungkin hasil dari produknya belum belum memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen mungkin kalau yang sudah kan yang sudah jalan seperti itu. Ditampung di agen. Kemudian dari agen baru disalurkan ke Dalam jangka lama setelah setelah habis baru kita bisa atau produsen bisa menerima uang kecuali kalau yang mungkin dia buka usaha sendiri seperti warung kendalanya itu mungkin kualitasnya juga belum memenuhi standart,

Peneliti: Kalau dari tingkat kepercayaan masyarakat umum terhadap produk penyandang disabilitas itu gimana?

Informan: Iya, selama ini mungkin. Belum semuanya ya mempercayai ya makanya kadang ada ini kerjasama dengan pihak lain seperti dinas koperasi dan dinas-dinas terkait.

Bpk Arief Triono Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina

Karya menegaskan pada tanggal 17 Januari 2020:

Peneliti : untuk faktor yang menjadi kendala Mas dalam pemberdayaan disabilitas menuju kemandirian biasanya kan setelah diberdayakan ada yang berhasil ada yang tidak berhasil, kira-kira menurut mas arief selaku Pendamping apa yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut dalam perwujudan kemandirian setelah diberdayakan ?

Informan: faktor yang apa tidak tidak apa tidak mendukung tidak mendukung kepercayaan dirinya yang pertama Untuk memotivasi

dirinya itu memang masih lemah. terkadang masih adanya rasa minder Kurang PD ,kurang percaya diri terus faktor yang selanjutnya itu juga kurang dukungan dari misalkan dengan disabilitas punya keinginan membuka usaha toko di pinggir jalan keluarga juga kadang kurang mendukung ekonomi itu bisa mungkin dari segi pengalaman itu juga kadang menjadi bahan pertimbangan dari keluarga itu juga juga faktor yang selanjutnya ini dari dari lingkungan atau masyarakat juga bisa sangat berpengaruh. misalkan ada suatu usaha yang yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tersebut sudah keluar rumah Buka kios misalkan atau buka toko kadang masih beranggapan itu menyepelkan itu.. menyepelkan disabilitas ,dan tidak mau mengakui mengakui bahwa mereka itu mampu ke mereka itu bisa asalkan ada yang usaha jasa misalkan ada yang potong rambut atau menjahit itu masih apa ya ada yang belum mengakui itu ada juga seperti itu masyarakat pandangannya masih masihmemandang negatif hasil karya dari penyandang disabilitas itu

Bpk Margi H, SE Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina

Karya menegaskan pada tanggal 14 Januari 2020 menegaskan

Peneliti: *Terkait feedback dari pemberdayaan kepada penyandang disabilitas Bpk menurut Bpk margi selaku pendamping, Apakah setelah diberdayakan penyandang disabilitas mampu meningkatkan kemandirian dalam hidupnya jika belum Apa faktor yang menghambat kemandirian tersebut Pak jika sudah indikatornya apa Pak ??*

Informan: *pelatihan-pelatihan yang ada di LBK untuk kepercayaan itu berakhir berakhir gambaran-gambaran yang berhasil karena mereka yang tadinya ini gambaran gambarangambaran kecil untuk pelatihan misalnya menjahit ataupun mereka tidak mempunyai pekerjaan setelah mendapatkan pelatihan pemberdayaan pelatihan tata boga akhirnya mereka bisa menciptakan lapangan Kegiatan usaha yaitu membuat kue dan kuenya dijual di sini kita berusaha memberikan advokasi kita membina kita membimbing kita mengarahkan agar usaha mereka bisa berjalan dengan lancar bagaimana adanya peningkatan modal ,kita ajukan agar mendapatkan bantuan itu gambaran-gambaran dan ada hasilnya jadi mereka yang tidak punya usaha .Akhirnya telah mengikuti pelatihan memilih kegiatan usaha yang mandiri ,yang yang tadinya mereka Itu modalnya kecil setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah 5 juta misal mereka yang tadinya tidak memiliki peralatan akhirnya memiliki peralatan ,yang tadinya pendapatannya kecil memiliki pendapatan besar ,yang tadinya mereka ekonomi mereka itu bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi disabilitas itu ukuran-ukuran dari tingkat keberhasilan .Adapun mereka yang dagang*

disabilitas yang mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan akan tetapi hasil dari pelatihan tersebut tidak dipakai udah dipakai malah memakai usaha kegiatan lain. yang tidak jelas titik dipindah memiliki keterampilan keterampilan menjahit Karena ini ada mungkin satu hambatan di keluarga kita enggak tahu. hasil dari pelatihan menjahit tersebut tidak dipakai karena mereka tuh dalam kegiatannya lain yang serabutan

Peneliti: *berarti tidak konsisten dalam hasil itu ya Pak??kemudian berapa persen nih disabilitas yang setelah mendapatkan pemberdayaan dapat mandiri..?*

Informan: *setelah mengikuti pelatihan tidak mengembangkan gitu ya karena pengaruh masyarakat pengaruh kehidupan karena mereka tidak konsisten pemerintah sudah memberikan peluang agar mereka itu punya kegiatan mandiri untuk menjahit tetapi nyatanya keahlian menjahit tersebut tidak digunakan*

akhirnya menjadi adanya adalah pekerjaan serabutan tidak berarti kalau misalnya dalam pemberdayaan yang diadakan di LBK itu biasanya sekali pemberdayaan itu berapa ada 20 itu kalau 20 orang tersebut mengikuti pelatihan yang berhasil Mandiri dan membuka usaha dan pengembangan usahanya itu kira-kira 15 sampai 18%.

Dede AP Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya

menegaskan pada tanggal 9 Januari 2020 menegaskan

Peneliti:*faktor kendala yang dialami misalnya peran serta pemerintah dalam mendukung disabilitas menghadapi kendalanya dalam Peran serta pemerintah itu gimana Mas ..*

Informan: *di sini peran pemerintah pemerintah yang mana? Apakah warga desa apa pemerintahan..?*

Peneliti : *pemerintah dalam arti luas perhatikan bisa pemerintah Desa bisa pemerintah daerah pusat pemerintah nasional? ya kendalanya apa bukan?dukungan dukungan dari pemerintah itu seperti apa dalam menghadapi kendala kendala mewujudkan disabilitas menuju kemandirian?*

Informan: *Dukungan pemerintah harus memberikan akses pemerintah tidak memberikan akses terhadap pemberdayaan disabilitas itu juga akan menjadikan sebuah kendala difabel terutama fasilitas yang ada di pemerintahan itu entah itu perkantoran pasar dan sebagainya sarana publik itu pun harus akses untuk teman-teman disabilitas itu yang tunanetra tunarungu wicara tuna daksa yang menggunakan kursi roda \harus difasilitasi Kalau tidak ada seperti itu otomatis itu akan membaca untuk perkembangan disabilitas dalam hal ini pelayanan publik itu harus akses adanya akses khusus ya. Iya seperti misalnya dalam difabel netra Jika ada garis kuning di dalam akses misalnya*

pelayanan publik ,kalau misalnya dia apa namanya Tuna Rungu wicara atau difabel yang lainnya juga ada harus di setiap pelayanan publik ada yang memberikan suatu gambaran tentang pelayanan yang diberikan.

Ali Machmudin Selaku Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya

menegaskan pada tanggal 13 Januari 2020 menegaskan:

Pertanyaan Peneliti dan Jawaban Informan

Peneliti: “ kira-kira menurut anda, apakah ada hambatan difabel ketika setelah mengikuti pemberdayaan? .”

Informan: “ hambatanya peserta difabel yaitu diantaranya dari lingkungan,orang tua, difabel sendiri dan dari keluarga. Tetapi hambatan paling utama adalah keluarga karena ada yang keluarga nya merasa malu karena kondisi fisik dari salah satu keluarga merupakan difabel kemudian pada difabelnya juga ada karena merasa kurang percaya diri, merasa malu dan tidak ingin ditemui oleh seseorang,tidak bisa diajak berkomunikasi. Maka pendamping berusaha memotivasi pada ketiga hambatan tersebut agar dapat keluar dari zona ketidakberdayaan.”

Peneliti: “ bagaimana cara mengatasi kendala dalam hambatan tersebut?

Informan: “ kita koordinasikan dengan pihak desa terlebih dahulu dengan meminta pendampingan dari RT,RW setempat setelah itu RT,RW tersebut ikut memotivasi keluarga difabel dan juga difabelnya itu sendiri. Jadi kendala hambatan setelah itu peserta kebingungan cara mengembangkan pelatihan yang diterapkan di lbk ini ,sehingga peran pendamping itu sangat penting setelah peserta mengikuti pelatihan,makanya diadakanya monitoring secara berkala dan juga motivasi pada difabel tersebut .”

Informan:“hambatanya peserta difabel yaitu diantaranya dari lingkungan,orang tua, difabel sendiri dan dari keluarga. Tetapi hambatan paling utama adalah keluarga karena ada yang keluarga nya merasa malu karena kondisi fisik dari salah satu keluarga merupakan difabel kemudian pada difabelnya juga ada karena merasa kurang percaya diri, merasa malu dan tidak ingin ditemui oleh seseorang,tidak bisa diajak berkomunikasi. Maka pendamping berusaha memotivasi pada ketiga hambatan tersebut agar dapat keluar dari zona ketidakberdayaan.”

Peneliti: dalam indikator pemberdayaan kemandirian hanya terdapat tidak lebih dari 40% saja biasanya terdapat hambatan, lalu apa sajakah hambatan tersebut?.”

Informan: “ hambatannya yaitu yang pertama produksi,pemasaran yang susah setelah menghasilkan produknya sehingga dapat menghambat difabel untuk berkembang.” permasalahan-permasalahan di disabilitas.’

Peneliti; “ kalau didalam dunia kerja bagaimana?.”

Informan: “ kalau didunia kerja itu jelas sekali diskriminasinya,karena disini difabel rata-rata bodoh tidak sekolah dan mereka selalu menanyakan dengan ijazah terakhir, biasanya kalau difabel itu tidak sekolah maka dari itu didunia kerja permasalahanya disebabkan karena ijazah terakhir .”

Peneliti: “ dalam hal ini difabel juga mengalami suatu diskriminasi ?

Informan: “ didalam pendidikan juga seperti itu,contohnya misal difabel juga pengen sekolah di sekolahan umum dia tidak diperbolehkan, alasanya tidak ada guru khusus maka dari itu difabel kalau ingin sekolah di sekolah SLB dan juga harus ada sekolah ilusi dimana sekolah yang mau menerima difabel tersebut tetapi pihak sekolah tetap menolak karena tidak ada guru khusus .”

Peneliti: “ guru khusus itu guru yang seperti apa?.”

Informan: guru khususnya yaitu guru yang bisa menangani penyandang disabilitas dalam bahasa,perilaku atau tingkah laku dan selain itu juga harus bisa menangani itu semua.”

Peneliti: “ apakah bisa menjadi penyebab bagi banyaknya difabel yang tidak sekolah.”

Informan:ya, betul mungkin itu bisa jadi 80 % seperti itu menjadi penyebab teman-teman disabilitas tersebut pindah sekolah karena sekolahan tidak menerima adanya difabel .”

Peneliti; “ kalau permasalahanya disabilitas dalam keluarga ,lingkungan itu apa sajakah ? .”

Informan:jadi untuk permasalahan disabilitas dalam keluarga itu merupakan aib bagi keluarga difabel tersebut ,keluarga menutup diri mereka tidak mau diketahui bahwa keluarga mereka itu difabel, sedangkan dilingkungan itu memandang sebelah mata .”

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa feedback /output keberhasilan dari fasilitasi program pemberdayaan disabilitas ada 15-40 % yang dapat mandiri dari sekitar 20-25 peserta pelatihan hal ini dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi kemandirian disabilitas ada dua yaitu sebelum dan setelah mendapatkan pemberdayaan.

a. Faktor Yang Menghambat Kemandirian Disabilitas Sebelum

Pemberdayaan: Kesulitan dalam mencari peserta dikarenakan masih banyak penyandang disabilitas yang Medemotivasi diri bahwa dirinya tidak mampu, konsistensi dalam mengikuti proses pemberdayaan ,

kurangnya pengetahuan tentang adanya program pemberdayaan di UPTD Loka Bina Karya, stigma negatif diri yang masih melekat, Stigma negatif pihak keluarga, kurangnya peran keluarga dalam memotivasi anggota keluarganya yang mengalami disabilitas, kurangnya dukungan masyarakat, infrastruktur yang belum memadai dan aksesible/belum aksesnya pelayanan publik untuk memfasilitasi terkait mobilitas penyandang disabilitas, Pendidikan yang rendah, singkatnya rentang waktu mengikuti pelatihan keahlian.

- b. Faktor Yang Menghambat Kemandirian Disabilitas Setelah Pemberdayaan antara lain: peserta pemberdayaan disabilitas dalam hal ini penyandang disabilitas merasa kebingungan dengan apa yang dilakukannya setelah mengikuti pelatihan tidak mengembangkan hasil pelatihan ketrampilan keahlian yang didapat dari program pemberdayaan (kurang konsisten) ada yang sudah mandiri sudah mempunyai usaha namun produk disabilitas yang dihasilkan masih diragukan/disepelekan, kendala dalam memasarkan produk setelah mendirikan usaha, kendala biaya operasional produksi, kesulitan dalam membangun jejaring usaha dengan antar sektor, kesulitan mendapatkan pekerjaan baik diswasta maupun mendirikan usaha dikarenakan masih terkendala dengan syarat formal.
- c. Faktor yang menghambat peran petugas dalam memfasilitasi program pemberdayaan yang ada di Loka Bina Karya : stigma

negatif diri yang masih melekat, Stigma negatif pihak keluarga, kurangnya peran keluarga dalam memotivasi anggota keluarganya yang mengalami disabilitas, kurangnya dukungan masyarakat, infrastruktur yang belum memadai dan aksesible/belum aksesnya pelayanan publik untuk memfasilitasi terkait mobilitas penyandang disabilitas, Pendidikan yang rendah, singkatnya rentang waktu mengikuti pelatihan keahlian.

3. Solusi Yang Dapat Ditempuh

Solusi yang Dapat Ditempuh untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dapat penulis simpulkan yang pertama bahwa dengan meningkatkan sosialisasi program pemberdayaan, memprioritaskan peserta yang belum mengikuti, mengintensifkan dan mengoptimalkan program pemberdayaan, monitoring dan evaluasi terhadap hasil maupun output dari program pemberdayaan kemudian yang kedua dengan membantu memotivasi penyandang disabilitas agar dapat berusaha keluar dari zona yang menghambat dirinya (stigma diri), Mendampingi dan membimbingnya dan yang ketiga ialah dengan rencana aksi bersama yang melibatkan berbagai peran seperti peran keluarga, peran masyarakat dan peran stake holder dan peran pemerintah dalam upaya membantu mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas

Hasil dari analisis data memperlihatkan bahwa Peran UPTD Loka Bina Karya Dalam memberdayakan penyandang disabilitas dapat dikatakan

cukup baik namun outcome dari hasil pemberdayaan belum sepenuhnya mewujudkan kemandiriian penyandang disabilitas dikarenakan tingkat kemandirian penyandang disabilitas yang hanya ada disekitaran 15-40% atau 3- 8 orang.

Peran UPTD Loka Bina karya dalam pelaksanaan program pemberdayaan ada 5 aspek peran yang terdiri dari fasilitatori, broker, mediator, pembela dan pelindung bisa dilihat dari sejauh mana berjalannya 5 aspek peran ini. Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-rata pada rentang skala yang diperoleh sebesar 14502 yang memperlihatkan bahwa menurut 75 responden yang pernah mengikuti pemberdayaan dan outcome berup kemandiriaan memberikan nilai mengenai 5 aspek peran UPTD Loka Bina Karya dalam mewujudkan kemandirian tersebut yang mana termasuk dalam interval cukup memuaskan.

Dari 5 aspek mengenai peran yang termasuk didalamnya 65 item pertanyaan dari hasil wawancara kepada informan mengenai sejauh mana peran UPTD Loka Bina Karya Dalam Pemberdayaan disabilitas menuju kemandirian ini berjalan dan implementasi dari 5 aspek peran , penulis simpulkan bahwa peran UPTD Loka Bina Karya Dalam Pemberdayaan disabilitas menuju kemandirian masuk dalam kategori cukup baik .Upaya UPTD LBK (Lok Bina Karya) dalam meningkatkan kemandirian di kalangan penyandang disabilitas adalah dengan menjalankan 5 aspek peran dalam memberdayakanya. Dimulai dengan diadakannya pemberian program Fasilitasi program pemberdayaan yang dalam pelaksanaanya 1 tahun 3

sampai kali ,fasilitasi UPSK dengan memfasilitasi mendapatkan pelayanan sosial keliling kecamatan ,Fasilitasi untuk mengakses program Bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), fasilitasi pelayanan E-KTP/KK/SIM untuk mendapatkan data diri ,Fasilitasi pelayanan kesehatan (kusta) untuk memfasilitasi penyandang disabilitas (kusta) dalam mengakses layanan kesehatan ,pendampingan ,motivasi dan bimbingan, broker sebagai pemecah masalah,mengidentifikasi sumber-sumber referaal,distribusi sumber kebutuhan penyandang disabilitas ,hingga membangun kerjasama dan mitra ,membangun jejaring usaha ,mediator untuk memediasi terkait permasalahan-permasalahan yang dialami penyandang disabilitas seperti : stigma,diskriminasi,kesetaraan hak, peran sebagai pembela dalam membela kasus yang dialami disabilitas seperti kasus didalam masyarakat,dunia pendidikan dan dunia usaha/kerja ,dan juga sebagai pelindung dalam melindungi kasus tersebut. Pemberdayaan disabilitas diadakan karena adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas yang mengharuskan penyandang disabilitas mendapatkan kesetaraan hak,pemenuhan kebutuhan, perlindungan ,bebas dari diskriminasi pemberdayaan , kemandirian , kesejahteraan dan atas dasar tersebut maka dengan adanya UPTD Loka Bina Karya dapat diartikan sudah memenuhi amanat UU No 8 Tahun 2016 Pasal ayat 14

Dalam 5 aspek Peran salah satunya adalah peran fasilitator yaitu peran petugas pendamping dalam memfasilitasi penyandang disabilitas dalam menagkses pelayanan . LBK selaku penyelenggara pemberdayaan juga bertugas memberdayakan penyandang disabilitas yang harapan nantinya akan

dapat mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas . Dalam aspek ini, LBK mengatakan bahwa masih banyak masyarakat penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pemberdayaan , hal ini dikarenakan dari petugas masih kesulitan memahami kondisi penyandang disabilitas, mencari peserta pemberdayaan , terbatasnya peserta pemberdayaan (kuota peserta) dan juga kurangnya pengetahuan tentang adanya program yang disediakan dan diberikan . LBK juga mengatakan bahwa masih adanya stigma yang dialami dalam hal ini yang dapat menghambat adalah stigma dirinya sendiri, dan juga kurangnya peran keluarga dalam memotivasi dan membangkitkan penyandang disabilitas dan juga anggota keluarga yang menghalang-halangi dalam mendapatkan pemberdayaan .

Untuk aspek yang berikutnya yaitu peran sebagai broker, broker sebagai pemecah masalah, mengidentifikasi sumber-sumber referaal, distribusi sumber kebutuhan penyandang disabilitas , hingga membangun kerjasama dan mitra , membangun jejaring usaha dan dapat. Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai masalah masalah yang biasa dihadapi antara lain kurang diterimanya di masyarakat, dikucilkan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat itu merupakan permasalahan dari disabilitas. Mereka dianggap aib keluarga bahkan ada difabel yang disembunyikan oleh keluarganya, karena keluarganya merasa malu mempunyai keluarga difabel, itu permasalahan-permasalahan di disabilitas. Sedangkan kalau di dunia kerja itu diskriminasinya diantara lain penyandang disabilitas rata-rata bodoh tidak sekolah dan dalam mengakses

pekerjaan pihak penyedia pekerjaan selalu menanyakan dengan ijazah terakhir. Dan didalam dunia pendidikan penyandang disabilitas yang menginginkannya sekolah di sekolahan umum namun kebanyakan tidak diperbolehkan karena belum banyaknya sekolah inklusi, karena belum adanya guru khusus maka dari itu disabilitas banyak yang mengurungkan niatnya dalam bersekolah . Dan disabilitas yang ingin sekolah biasanya disekolahkan di SLB meskipun penyandang disabilitas sebenarnya menginginkan bersekolah disekolahan umum. Permasalahan disabilitas dalam keluarga itu biasanya keluarga memandang penyandang disabilitas sebagai aib bagi keluarga difabel ,keluarga menutup diri mereka tidak mau diketahui bahwa keluarga mereka itu difabel, sedangkan dilingkungan itu memandang sebelah mata. Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai kerjasama networking perusahaan bahwa UPTD Loka Bina Karya sudah ada kerjasama terkait dengan perusahaan . Petugas pendampingan UPTD Loka Bina karya mampu melokalisir penyedia sumber kebutuhan dan keinginan penyandang disabilitas .Namun dalam kerjasama yang dibangun untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan belum sepenuhnya dapat membantu mengakses pekerjaan dikarenakan masih banyak penyandang disabilitas yang terhambat dalam syarat formal yaitu ijazah terakhir.

Peran pendamping dalam membantu menyalurkan pekerjaan kepada penyedia lapangan pekerjaan. Setelah mendapatkan pemberdayaan UPTD Loka Bina Karya tetap menyalurkan dan memfasilitasi. Yang pertama memberikan

informasi terkait adanya lowongan. Procedure perusahaan tetap melakukan seleksi dengan kriteria khusus harus yang sudah memenuhi kriteria yaitu yang sudah memahami keterampilan setelah itu tetap ada tahapan tes sesuai dengan kriteria dari perusahaan .

Dalama hal ini UPTD Loka Bina Karya bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan yang siap menerima penyandang disabilitas seperti BUMN maupun BUMD untuk bisa menutup kuota dari amanat dari UU No 8 th 2016 itu amanatnya adalah kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan –perusahaan setidaknya 3% yang 2% untuk BUMN dan 1% untuk BUMD . Penulis menyimpulkan bahwa peran pendamping sebagai broker yaitu memfasilitasi penyandang disabilitas dalam membantu memecahkan permasalahan penyandang disabilitas membantu pemenuhan sumber-sumber kebutuhan dasar seperti mengakses bantuan yang disediakan diantaranya bantuan pelatihan-pelatihan usaha,bantuan peralatan,bantuan alat kesehatan dan lainnya. Setelah mendapatkan pemberdayaan,bantuan UEP,UPSK petugas pendamping adakalanya membantu penyandang Disabilitas dalam membangun usaha bersama dan membangun jaringan antar pengusaha secara konsisten Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa mengenai monitoring dan evaluasi tetap dilakukan seperti mengawal hasil dari peserta pelatihan,hasil dari pemberian bantuan usaha berupa modal,mengukur ketrcapaain program dari tingkat kemandirian,manfaat yang dicapai , kemajuan yang diperoleh ,hingga evaluasi

tentang tingkat kesejahteraan penerima manfaat dalam hal ini adalah penyandang disabilitas.

Aspek yang ketiga adalah peran sebagai mediator mediator untuk memediasi terkait permasalahan-permasalahan disabilitas seperti : stigma,diskriminasi,kesetaraan hak berdasarkan jawaban responden yang menyatakan penyandang disabilitas sering mengalami permasalahan diskriminasi stigma dan kurangnya kesetaraan hak dalam hal ini petugas pendamping sering membantu penyandang disabilitas dalam memediasi ke pemerintah terkait isu-isu persamaan hak,diskriminasi,stigma. petugas pendamping berupaya dalam membantu penyandang disabilitas memediasi ke pemerintah terkait isu-isu persamaan hak,diskriminasi,stigma yang dialami penyandang disabilitas seperti pelayanan publik yang belum akses permasalahan perekaman e-ktp .

Aspek yang keempat adalah peran sebagai pembela peran sebagai pembela dalam membela kasus yang dialami disabilitas seperti kasus didalam masyarakat,dunia pendidikan dan dunia usaha/kerja penyandang disabilitas sering mendapatkan advokasi dalam kasus permasalahan yang dihadapi dimasyarakat dan dapat disimpulkan peranya petugas pendamping memberikan pembelaan (advokasi) kepada penyandang disabilitas terhadap kasus permasalahan yang dihadapi didalam masyarakat dalam hal peranan petugas dalam melakukan pembelaan dapat dikatakan sudah baik penulis simpulkan bahwa mengenai peran pendamping disabilitas melakukan pembelaan pembelaan juga termasuk yang bagi mereka yang mengalami kasus

permasalahan yaitu dengan minta bantuan kepada staf atau pendamping yang lain dalam hal secara umum di Kabupaten Tegal dan juga berkoordinasi dengan forum peduli disabilitas(FPD), forum peduli itu anggotanya itu lintas sektor Jadi bukan hanya Dinas Sosial saja termasuk juga lembaga-lembaga yang lain misalkan universitas. mengenai dalam peranya petugas pendamping memberikan pembelaan (advokasi) kepada anda dalam kasus permasalahan yang dihadapi langkah-langkahnya identifikasi masalah kasus,identifikasi kebutuhan dasar penyandang disabilitas,dan koordinasi pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penyandang disabilitas sering mendapatkan perlindungan dari pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya dan penyandang disabilitas sering sekali mengalami kasus diskriminasi didalam kehidupannya, penyandang disabilitas sering sekali mengalami kasus diskriminasi didalam kehidupannya termasuk didalam dunia usaha dan dunia kerja dalam hal ini peran petugas dalam pembelaan usaha dari kasus diskriminasi dapat dikatakan sudah baik

Aspek yang kelima adalah peran sebagai pelindung dalam melindungi permasalahan yang diahadapi peran sebagai pelindung dalam melindungi dari kasus yang dialami disabilitas seperti kasus didalam masyarakat,dunia pendidikan dan dunia usaha/kerja Penyandang disabilitas sering mendapatkan perlindungan dari pendamping disabilitas UPTD Loka Bina Karya dan penyandang disabilitas sering sekali mengalami kasus diskriminasi didalam kehidupannya, penyandang disabilitas sering sekali mengalami kasus diskriminasi didalam kehidupannya termasuk didalam dunia usaha dan dunia

kerja dalam hal ini peran petugas dalam pembelaan usaha dari kasus diskriminasi dapat dikatakan sudah baik

Dari pertanyaan yang diperoleh hasil wawancara mengenai faktor-faktor Dan dari pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai solusi untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dapat penulis simpulkan yang pertama bahwa dengan meningkatkan sosialisasi program pemberdayaan , memprioritaskan peserta yang belum mengikuti , mengintensifkan dan mengoptimalkan program pemberdayaan ,monitoring dan evaluasi terhadap hasil maupun output dari program pemberdayaan kemudian yang kedua dengan membantu memotivasi penyandang disabilitas agar dapat berusaha keluar dari zona yang menghambat dirinya (stigma diri),Mendampingi dan membimbingnya dan yang ketiga ialah dengan rencana aksi bersama yang melibatkan berbagai peran seperti peran keluarga, peran masyarakat dan peran stake holder dan peran pemerintah dalam upaya membantu mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas. Dan untuk menangani berbagai faktor kendala demi mewujudkan kemandirian yang pada hakikatnya adalah sebuah output hasil pemberdayaan alangkah baiknya di agar dapat mengkaji secara mendalam serta memperbaiki hal apa saja yang kiranya kurang optimal , dan untuk masyarakat penyandang disabilitas ketika ada program pemberdayaan mengenai pelatihan / ketrampilan apapun yang diberikan oleh UPTD LBK harusnya lebih konsisten lagi dalam mengikuti program sehingga apa yang diberikan oleh instruktur pendidikan pelatihan yang disediakan oleh UPTD LBK harapnya penyandang disabilitas dapat

memahami materi dari pemberdayaan dalam hal pelatihan ketrampilan/keahlian dan tanggap sehingga nantinya lebih paham apa yang sudah diberikan dan dapat mempraktekannya secara langsung untuk mengembangkan apa yang sudah diberikan oleh UPTD Loka Bina Karya.

Dari data yang diperoleh dari hasil kuesioner kepada masyarakat penyandang disabilitas kemudian dicocokkan dari hasil data yang diperoleh dari wawancara kepada informan yang dianggap tahu apa yang kita teliti. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa Peran UPTD Loka Bina Karya biasa-biasa saja, karena hasil kuesioner dari responden memiliki nilai yang cukup baik. Karena masyarakat merasa terpenuhi dengan peran UPTD LBK dalam hal ini peran petugas pendamping dalam melakukan pelayanan dalam memfasilitasi untuk mendapatkan akses berbagai program yang disediakan. Hal ini juga dilihat dari hasil wawancara dimana informan memberikan pengertian bahwa dari pemerintah dan UPTD LBK dalam mengusahakan memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan hak dasar penyandang disabilitas diantaranya kesamaan kesempatan ,pemberdayaan,pemenuhan hak, perwujudan kesetaraan, perlindungan dari diskriminasi sosial. Karena tujuan pemerintah dan UPTD LBK untuk memenuhi semua hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas. Hal ini memperlihatkan adanya kecocokan antara jawaban responden masyarakat penyandang disabilitas dengan informan yakni masyarakat penyandang disabilitas, dimana keseluruhan memperlihatkan bahwa peran petugas

pendamping dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas dapat dikatakan cukup baik dengan hasil 14205

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran uptd LBK dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas menuju kemandirian biasa saja dan berjalan dengan cukup baik. Karena peran yang baik adalah peran yang dapat dilakukan dengan merujuk pada amanat UU No 8 Th 2016 Tentang penyandang disabilitas dan tentunya yang sesuai dengan prosedur yang ada, dimana peran UPTD LBK diukur dalam 5 aspek yakni fasilitator, broker, mediator, pembela dan pelindung dan dalam peran tersebut peran yang paling dominan ialah peran UPTD Loka Bina Karya sebagai fasilitator diantaranya memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pelayanan dalam hal ini pemberdayaan. Karena itu peran UPTD LBK dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 yakni biasa saja .

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya Kabupaten Tegal Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran UPTD Loka Bina Karya dalam pemberdayaan disabilitas menuju kemandirian meliputi peran sebagai fasilitator, peran sebagai broker , peran sebagai mediator, peran sebagai pembela, dan peran sebagai pelindung. Terkait hasil rekapitulasi diatas peran UPTD Loka Bina Karya pada akhirnya yang paling dominan adalah peran sebagai fasilitator dalam hal ini peran sebagai fasilitator meliputi : Fasilitasi program pemberdayaan, fasilitasi UPSK, Fasilitasi Bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), fasilitasi pelayanan E-KTP/KK/SIM, Fasilitasi pelayanan kesehatan (kusta) , pendampingan , motivasi dan bimbingan sementara itu peran UPTD Loka Bina Karya dalam Pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas belum sepenuhnya berhasil dikarenakan output hasil dari peran petugas pendamping disabilitas dalam memfasilitasi pemberdayaan disabilitas hanya berkisar 15-40 % dari 20 peserta yang .dapat mandiri artinya dari 20 peserta yang mengikuti pemberdayaan hanya 3-8 orang yang dapat mandiri . Dan dapat disimpulkan bahwa

peran UPTD Loka Bina Karya pada akhirnya yang paling dominan adalah peran sebagai fasilitator, Peranan fasilitator sangat berpengaruh untuk penyandang disabilitas dikarenakan peran tersebut memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan sebuah akses program fasilitasi untuk memenuhi hak dasar penyandang disabilitas, seperti peran untuk memfasilitasi program pemberdayaan disabilitas, memfasilitasi pelayanan UPSK, memfasilitasi Bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) untuk penyandang disabilitas yang sudah mempunyai usaha, memfasilitasi pelayanan E-KTP/KK/SIM untuk penyandang disabilitas yang belum mempunyai data diri, memfasilitasi pelayanan kesehatan (kusta) bagi yang ingin mendapatkan akses kesehatan seperti akses kesehatan untuk disabilitas (kusta) pendampingan, motivasi dan bimbingan untuk membangkitkan semangat teman-teman difabel.

2. Adapun Faktor kendala dalam program pemberdayaan disabilitas:

- a. Faktor Yang Menghambat Kemandirian Disabilitas Sebelum Pemberdayaan: Kesulitan dalam mencari peserta dikarenakan masih banyak penyandang disabilitas yang demotivasi diri bahwa dirinya tidak mampu serta belum adanya data yang konkret terkait jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal berdasarkan kelompok usia, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan dan dari konsistensi dalam mengikuti proses pemberdayaan, kurangnya pengetahuan tentang adanya program pemberdayaan di UPTD Loka Bina Karya, stigma negatif diri yang

masih melekat, stigma negatif pihak keluarga, kurangnya peran keluarga dalam memotivasi anggota keluarganya yang mengalami disabilitas, kurangnya dukungan masyarakat, infrastruktur yang belum memadai dan aksesible/belum aksesnya pelayanan publik untuk memfasilitasi terkait mobilitas penyandang disabilitas, Pendidikan yang masih rendah, singkatnya rentang waktu mengikuti pelatihan keahlian.

- b. Faktor Yang Menghambat Kemandirian Disabilitas Setelah Pemberdayaan antara lain: peserta pemberdayaan disabilitas dalam hal ini penyandang disabilitas merasa kebingungan dengan apa yang dilakukannya setelah mengikuti pelatihan tidak mengembangkan hasil pelatihan ketrampilan keahlian yang didapat dari program pemberdayaan (kurang konsisten) ada yang sudah mandiri sudah mempunyai usaha namun produk disabilitas yang dihasilkan masih diragukan/disepelekan, kendala dalam memasarkan produk setelah mendirikan usaha, kendala biaya operasional produksi, kesulitan dalam membangun jejaring usaha dengan antar sektor, kesulitan mendapatkan pekerjaan baik diswasta maupun mendirikan usaha dikarenakan masih terkendala dengan syarat formal.

c. Faktor yang menghambat peran petugas dalam memfasilitasi program yang ada di Loka Bina Karya : stigma negatif diri yang masih melekat, Stigma negatif pihak keluarga, kurangnya peran keluarga dalam memotivasi anggota keluarganya yang mengalami disabilitas, kurangnya dukungan masyarakat, infrastruktur yang belum memadai dan aksesible/belum aksesnya pelayanan publik untuk memfasilitasi terkait mobilitas penyandang disabilitas, Pendidikan yang rendah, singkatnya rentang waktu mengikuti pelatihan keahlian.

3. Solusi yang akan ditempuh untuk mengatasi kendala dalam pemberdayaan disabilitas menuju kemandirian

Solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dapat penulis simpulkan yang pertama bahwa dengan meningkatkan sosialisasi program pemberdayaan yang intensif, memprioritaskan peserta yang belum mengikuti, mengintensifkan dan mengoptimalkan program pemberdayaan, monitoring dan evaluasi terhadap hasil maupun output dari program pemberdayaan kemudian yang kedua dengan membantu memotivasi penyandang disabilitas agar dapat berusaha keluar dari zona yang menghambat dirinya (stigma diri), Mendampingi dan membimbingnya dan yang ketiga ialah dengan rencana aksi bersama yang melibatkan berbagai peran seperti peran keluarga, peran masyarakat dan peran stakeholder dan peran pemerintah dalam upaya membantu mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas.

VI.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran (rekomendasi) sebagai berikut :

1. Petugas Pendamping Disabilitas UPTD Loka Bina Karya Kabupaten Tegal agar lebih maksimal lagi dalam proses pendampingan penyandang disabilitas , mengintensifkan sosialisasi dan pelaksanaan program Pemberdayaan Disabilitas, memberikan kesadaran kepada penyandang disabilitas akan pentingnya pemberdayaan demi kemandiriannya ,melalui pendekatan yang lebih mendalam serta menambah lebih banyak lagi inovasi dalam melaksanakan peran pendamping seperti misalnya basis data terpadu by name by address, Inovasi keberlanjutan program dengan mendirikan KUBE, menambah staf ahli pegawai pada bidang pemberdayaan disabilitas, dalam rangka pemberdayaan disabilitas yang jumlahnya banyak agar berjalan lebih memprioritaskan peserta pemberdayaan yang belum mendapatkannya dan sebaiknya diadakan pendataan penyandang disabilitas agar data yang konkret terkait jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal berdasarkan kelompok usia, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan dapat terkelompokan.
2. Bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya Kabupaten Tegal agar lebih efektif lagi dalam memberdayakan penyandang disabilitas perlu adanya kerjasama lintas sektoral dengan Stakeholder sebagai pemangku

kepentingan, sektor public sebagai penyedia pelayanan publik, Sektor Swasta sebagai pihak penyedia lapangan pekerjaan .

3. Bagi Penyandang disabilitas tetap semangat jangan menyerah dengan keadaan, harapkan penyandang disabilitas supaya diberikan sosialisasi program pemberdayaan secara berkala agar lebih mengetahui akan arti pentingnya pemberdayaan yang bertujuan untuk memandirikannya.
4. Bagi masyarakat pada umumnya hendaknya kita saling menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan memotivasi dan memberikan semangat kepada mereka agar dapat termotivasi merubah hidupnya .

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Ahmad Syafe'i. 2001, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*
Bandung: Gerbang Masyarakat Baru
- Anwar, 2007 *Manajemen Pemberdayaan perempuan*
Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*.
Jakarta: Kencana
- Edi Suhardono, 2018 . *Teori Peran Konsep ,Derivasi dan Implikasinya*
Gramedia Pustaka Indonesia
- Edi Suharto, 2017 *Mengembangkan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*
Bandung : Refika Aditama
- Isbandi Rukminto Adi ,2001 . *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan, Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*,
Jakarta: FE-UI
- Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei 2001, *Pengembangan Masyarakat Islam; Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Onny S.Prijono, 1996 .*Pemberdayaan ,Konsep ,Kebijakan dan Implementasi*
Jakarta : CSIS
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*.
Jakarta : Edisi Baru Rajawali Pers
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Bandung: Alfabeta

Journal:

- Journal INKLUSI: Journal of Disability Studies* Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2016, h. 139-162 DOI: 10.14421/ijds.030201
- Ekawati Rahayu Ningsih dalam jurnal *Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat*, 2014).

Sastya Eka Pravitasari dkk, dalam jurnal *Pemberdayaan Bagi Penyandang Tuna Netra Guna Meningkatkan Sumber Daya Manusia*, 2014

Peraturan-Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 2 ayat 2 tentang Pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- UU RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.
- UU RI 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 9
- UU Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 205 Tahun 1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.

Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor 96/HK/SE/2005 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Penyandang Cacat.

UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Internet:

sumber : www.google/difabel.com)

sumber:kamus besar bahasa Indonesia /KBBI/Difabel